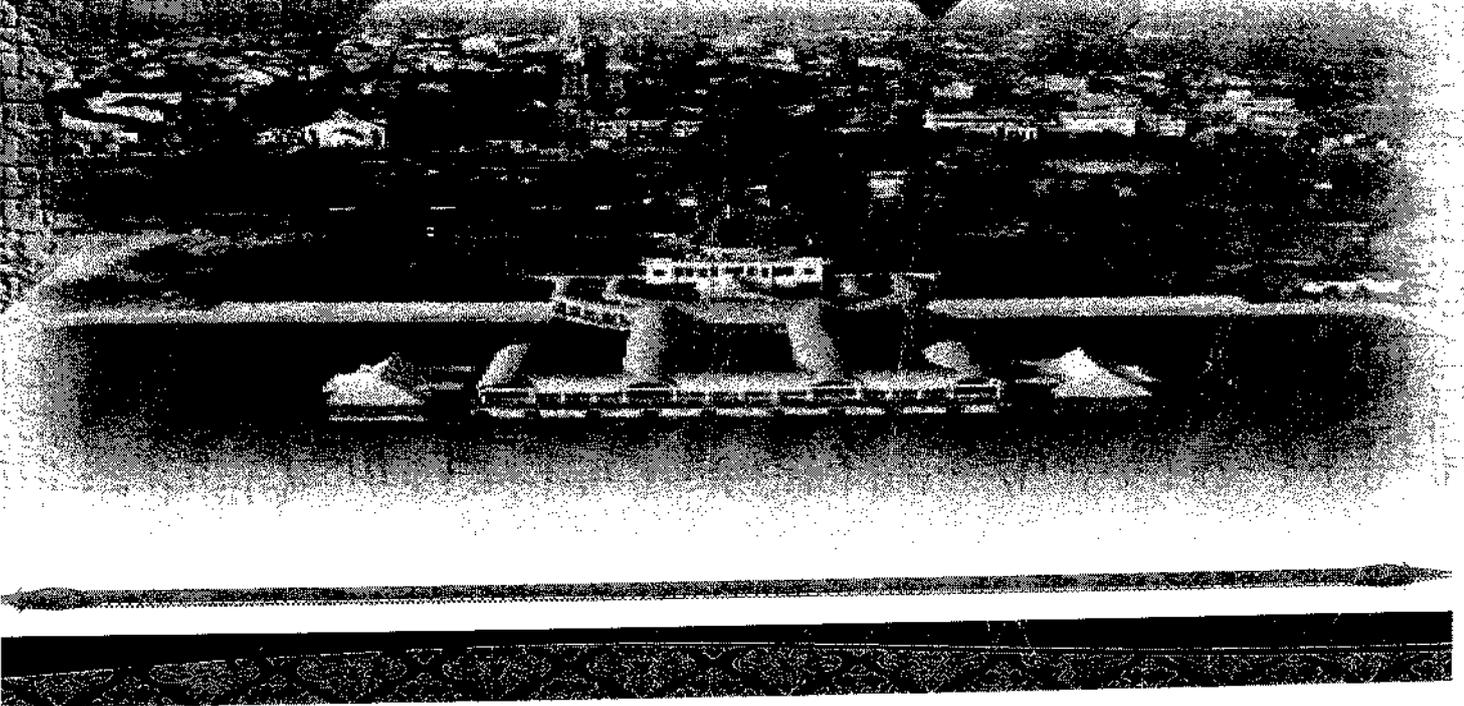
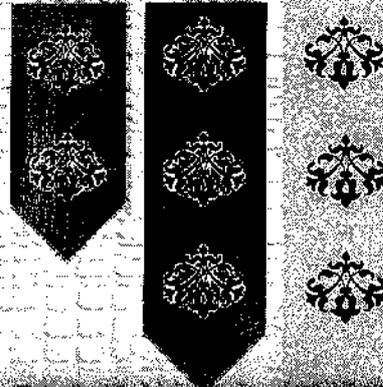




LKPD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021
(AUDITED)





BUPATI BENGKALIS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

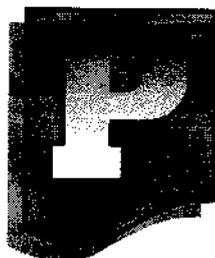
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bengkalis, Mei 2022

BUPATI BENGKALIS


KASMARNI, S.Sos, MMP



uji syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua. Di awal tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021. Laporan Keuangan dimaksud mencakup: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyampaian Laporan Keuangan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni dengan memberikan informasi keuangan yang transparan kepada *stakeholders* berdasarkan pertimbangan bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sekaligus dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang disusun dan masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami tetap mengharapkan

Kata Pengantar Laporan Keuangan Tahun 2021



Pemerintah Kabupaten Bengkalis

tanggapan, dukungan, saran, maupun kritik yang membangun dari *stakeholders*. Selanjutnya, kami akan tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja sekaligus melakukan penyempurnaan dalam menyajikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan akurat sebagai salah satu upaya kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya, teriring ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan ini. Semoga Allah SWT tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk dapat berkarya lebih baik lagi sehingga Visi Kabupaten Bengkalis dapat tercapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bengkalis, Mei 2022

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos, MMP

Daftar Isi

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN.....	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	vii
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	viii
NERACA.....	ix
LAPORAN OPERASIONAL.....	ix
LAPORAN ARUS KAS.....	x
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	x
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	7
1.5. Sumber Dana.....	13
1.6. Kebijakan Konversi.....	13
1.7. Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	13
1.8. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan.....	14
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD	16
2.1. Ekonomi Makro.....	16
2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	21
2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.....	24
2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Bengkalis.....	25
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	29
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	



	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.....	29
3.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Pendapatan Tahun Anggaran 2015.....	35
BAB IV	Kebijakan Akuntansi	37
4.1	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.....	37
4.2	Basis Akuntansi.....	37
4.3	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.....	37
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	102
5.1	Laporan Realisasi Anggaran	
5.1.1	Pendapatan – LRA.....	102
5.1.2	Belanja.....	139
5.1.3	Transfer.....	163
5.1.4	Surplus/Defisit.....	165
5.1.5	Pembiayaan.....	165
5.1.6	SiLPA.....	166
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	168
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal.....	168
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....	168
5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Penggunaan Anggaran SiLPA/SiKPA.....	168
5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	168
5.2.5	Saldo Anggaran Lebih	168
5.3	Neraca	170
5.3.1	Aset.....	170
5.3.2	Kewajiban.....	238
5.3.3	Ekuitas.....	244
5.4	Laporan Operasional	245
5.4.1	Pendapatan – LO.....	245
5.4.2	Beban.....	268
5.4.3	Surplus Non Operasional.....	292
5.4.4	Defisit Non Operasional.....	292
5.4.5	Surplus/Defisit – LO.....	292



5.5	Laporan Arus Kas	294
5.5.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi.....	294
5.5.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi.....	301
5.5.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan.....	302
5.5.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.....	302
5.5.5	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	304
5.5.6	Saldo Akhir Kas	304
5.5.7	Perbandingan antara Saldo Akhir Kas dengan SiLPA..	307
5.6	Laporan Perubahan Ekuitas	308
5.6.1	Ekuitas Awal.....	308
5.6.2	Surplus/Defisit – LO.....	308
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan.....	308
5.6.4	Ekuitas Akhir.....	319
BAB VI	Pengungkapan Informasi Lainnya	320
BAB VII	Penutup	326





RINGKASAN



sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 khususnya Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, PPKD Kabupaten Bengkalis selaku salah satu entitas akuntansi berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis yang salah satunya dialokasikan dan dikelola oleh PPKD Kabupaten Bengkalis.

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh PPKD Kabupaten Bengkalis selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bengkalis selama periode pelaporan 1 Januari sd 31 Desember 2021 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2021 adalah **Rp 4.321.908.588.453,72** atau **125,51%** dari anggarannya. Realisasi Belanja Daerah pada TA 2021 adalah sebesar **Rp2.878.996.128.075,36** atau mencapai **181,69%** dari anggarannya. Realisasi Transfer Daerah pada TA 2021 adalah **Rp413.964.685.122,00** atau **99,79%** dari anggarannya. Realisasi Surplus TA 2021 adalah sebesar **Rp413.964.685.122,00** yang berarti mencapai **99,79%** dari yang dianggarkan dalam APBD TA 2021 sebesar surplus **Rp1.028.947.775.256,36**. Selanjutnya Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada TA 2021 adalah **Rp151.011.573.806,55** yang terdiri dari Penggunaan SiLPA. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2021 adalah **Rp0,00**. SiLPA pada TA 2021 adalah sebesar **Rp1.179.959.349.062,91**.

	TA 2021		TA 2020
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
➤ Pendapatan Daerah	1.442.085.042,40	1.421.988.148,73	2.217.203.230,14
➤ Belanja Daerah	2.135.667.552,41	2.428.094.125,05	2.294.251.536,24
➤ Transfer Daerah	41.455.400,00	41.064.845,12	41.010.334,62
➤ Surplus (Defisit)	1151.011.573.806,55	1.028.947.778.062,91	(71.079.051.819,84)
➤ Penerimaan Pembiayaan	151.011.573.806,55	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37
➤ Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
➤ SILPA	0,00	1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2021 adalah sebesar **Rp151.011.573.806,55**. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar **Rp151.011.573.806,55**. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA) adalah sebesar **Rp1.179.959.349.062,91**. Dan Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp1.179.959.349.062,91**.

	TA 2021	TA 2020
➤ Saldo Anggaran Lebih Awal	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37
➤ Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	151.011.573.806,55	215.501.085.439,00
➤ Subtotal	0,00	0,00
➤ Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55
➤ Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
➤ Saldo Anggaran Lebih Akhir	1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp9.358.668.744.217,05** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp1.327.884.329.697,55**, Investasi Jangka Panjang sebesar **Rp518.272.400.040,00**, Aset Tetap sebesar **Rp7.309.978.441.934,46** Dana Cadangan sebesar **Rp0,00** dan Aset Lainnya sebesar **Rp202.533.572.495,04**.

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp159.418.991.183,13** dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp0,00**. Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp9.199.249.753.033,92**.

	TA 2021	TA 2020
Aset	9.358.668.744.217,05	9.299.185.896.626,77
Aset Lancar	1.327.884.329.697,55	1.327.884.329.697,55
Investasi Jangka Panjang	518.272.400.040,00	518.272.400.040,00
Aset Tetap	7.309.978.441.934,46	7.309.978.441.934,46
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	202.533.572.495,04	202.533.572.495,04
Kewajiban	159.418.991.183,13	82.632.722.928,60
Kewajiban Jangka Pendek	159.418.991.183,13	82.632.722.928,60
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Ekuitas	9.199.249.753.033,92	9.216.552.973.698,17
Ekuitas	9.199.249.753.033,92	9.216.552.973.698,17

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menggambarkan seluruh dana atau uang yang digunakan oleh dalam menjalankan Kegiatan Operasionalnya selama periode 1 Januari sd 31 Desember 2021. Laporan Operasional menyajikan pos-pos Pendapatan LO, Beban LO, Pos Luar Biasa LO dan surplus/(defisit) dari kegiatan Operasional. Laporan Operasional Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan LO sebesar **Rp2.948.007.230.812,48**, Beban LO sebesar **Rp3.382.599.344.416,23** Surplus Penjualan Aset Non Lancar sebesar **Rp0,00**, Pos Luar Biasa LO sebesar **Rp0,00** dan Defisit untuk tahun 2021 adalah sebesar **Rp434.592.113.603,75**.



	TA 2021	TA 2020
	Realisasi	Realisasi
☑ Pendapatan - LO	2.948.007.230.812,48	2.450.428.050.457,24
☑ Beban - LO	3.382.599.344.416,23	3.309.350.282.481,56
☑ Surplus Penjualan Aset NonLancar	0,00	723.380.000,00
☑ Pos Luar Biasa - LO	0,00	0,00
☑ Surplus/(Defisit) - LO	(434.592.113.603,75)	(858.198.852.024,32)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Laporan Arus Kas terdiri dari Saldo Awal Kas per 1 Januari 2021 sebesar **Rp151.011.573.806,55** Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar **Rp1.708.440.331.169,78** Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus **Rp679.492.555.913,42**, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar **Rp0,00**, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris minus sebesar **Rp0,00**, Kenaikan dan Penurunan Kas sebesar minus **Rp1.028.947.775.256,36** dan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.179.959.349.062,91**.

	TA 2021	TA 2020
☑ Saldo Awal Kas per 1 Januari 2021	151.011.573.806,55	222.840.495.416,99
☑ Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.708.440.331.169,78	448.527.263.471,00
☑ Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(679.492.555.913,42)	(488.705.201.982,00)
☑ Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
☑ Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
☑ Kenaikan dan Penurunan Kas	(1.028.947.775.256,36)	(717.073.021.489,00)
☑ Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021	1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal per 1 Januari 2021 sebesar **Rp9.215.647.863.998,17**, Defisit LO minus sebesar **Rp434.592.113.603,75**, dan Dampak Kumulatif Perubahan



Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar **Rp418.194.002.639,50**. Ekuitas Akhir sebesar **Rp9.199.249.753.033,92**.

	TA 2021	TA 2020
Ekuitas Awal	9.215.647.863.998,17	9.886.020.878.913,95
Surplus/(Defisit) - LO	(434.592.113.603,75)	(858.198.852.024,32)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	418.194.002.639,50	187.825.837.108,54
Ekuitas Akhir	9.199.249.753.033,92	9.215.647.863.998,17





PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN
REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Untuk Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	RASIO (%)	REALISASI 2020
PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.A				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.A1	79.095.000.000,00	82.355.513.611,00	104,12	63.664.818.589,25
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.A2	18.794.375.000,00	10.329.501.238,00	54,96	8.956.066.385,34
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.1.1.A3	33.292.209.969,00	33.292.209.969,00	100,00	20.920.504.935,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.A4	213.262.740.396,00	158.257.869.755,72	74,21	158.384.480.005,94
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		344.444.325.365,00	284.235.094.573,72	82,52	251.925.869.915,53
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.B				
TRANSFER PEMPUS - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.B1				
Dana Bagi Hasil	5.1.1.B1a	2.079.905.950.291,00	3.066.476.067.593,00	147,43	1.728.780.988.415,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.B1b	336.787.052.000,00	336.787.052.000,00	100,00	338.731.609.000,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.B1c	100.775.011.000,00	93.311.533.266,00	92,59	73.318.351.993,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.B1d	149.612.641.600,00	146.640.483.916,00	98,01	134.822.508.902,00
Jumlah Transfer Pempus - Dana Perimbangan		2.667.080.654.891,00	3.643.215.136.775,00	136,60	2.275.653.458.310,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.B2				
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.Ba		0,00	0,00	35.625.236.000,00
Dana Penyesuaian	5.1.1.Bb	196.962.531.000,00	165.099.615.167,00	83,82	131.032.700.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		196.962.531.000,00	165.099.615.167,00	83,82	166.657.936.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat		2.864.043.185.891,00	3.808.314.751.942,00	220,42	2.442.311.394.310,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.B3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.B3a	131.899.031.211,70	129.050.630.338,00	97,84	104.662.859.108,49
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	5.1.1.B3b	18.176.000.000,00	17.763.201.600,00	97,73	26.623.226.400,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		150.075.031.211,70	146.813.831.938,00	97,83	131.286.085.508,49
Jumlah Pendapatan Transfer		3.014.118.217.102,70	3.955.128.583.880,00	131,22	2.573.597.479.818,49
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.C				
Pendapatan Hibah	5.1.1.C	84.924.400.000,00	82.544.910.000,00	97,20	91.438.330.000,00
Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.C	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.C	0,00	0,00	0,00	431.550.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		84.924.400.000,00	82.544.910.000,00	97,20	91.869.880.000,00
TOTAL PENDAPATAN		3.443.486.942.467,70	4.321.908.588.453,72	125,51	2.917.393.229.734,02
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.A				
Belanja Pegawai	5.1.2.A1	1.098.111.270.828,00	1.018.335.441.328,20	92,74	967.266.480.083,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.A2	1.238.509.280.437,70	1.097.486.691.596,15	88,61	933.384.530.032,00
Belanja Subsidi	5.1.2.A3	10.642.684.920,00	10.642.584.920,00	100,00	9.618.696.893,00
Belanja Hibah	5.1.2.A4	40.945.646.000,00	35.834.828.114,59	87,52	71.023.667.791,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.A5	41.987.368.819,00	37.194.371.163,00	88,58	0,00
Jumlah Belanja Operasi		2.430.196.251.004,70	2.199.493.917.121,94	90,51	1.981.293.374.799,00
BELANJA MODAL	5.1.2.B				
Belanja Tanah	5.1.2.B1	449.000.000,00	412.940.853,70	91,97	815.248.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.B2	144.778.803.836,00	121.410.901.246,66	83,86	97.002.850.638,45
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.B3	152.951.705.243,00	131.209.405.612,36	85,78	131.718.395.987,69
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.B4	435.735.010.686,00	415.733.389.785,70	95,41	260.976.621.697,70
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.B5	11.308.047.400,00	10.725.918.415,00	94,85	9.816.546.659,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.B6	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		745.222.567.165,00	679.492.555.913,42	91,18	500.329.662.982,84
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.C				
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.C	4.248.534.272,00	9.655.040,00	0,00	152.938.659.147,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		4.248.534.272,00	9.655.040,00	0,00	152.938.659.147,00
JUMLAH BELANJA		3.179.667.352.441,70	2.878.996.128.075,36	181,69	2.634.561.696.928,84

TRANSFER	5.1.3				
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.A				
Transfer Bagi Hasil Pajak	5.1.3.A	9.308.845.804,00	9.306.096.195,00	99,97	4.915.347.049,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi	5.1.3.A	1.959.882.799,00	1.959.882.773,00	100,00	763.602.328,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		11.268.728.603,00	11.265.978.968,00	99,98	5.678.949.377,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.B				
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.B	403.562.435.229,00	402.698.706.154,00	99,79	348.231.605.248,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.B	0,00	0,00		0,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		403.562.435.229,00	402.698.706.154,00	99,79	348.231.605.248,00
JUMLAH TRANSFER		414.831.163.832,00	413.964.685.122,00	99,79	353.910.554.625,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.594.498.516.273,70	3.292.960.813.197,36	91,61	2.988.472.251.553,84
SURPLUS (DEFISIT)	5.1.4	(151.011.573.806,00)	1.028.947.775.256,36	-681,37	(71.079.021.819,82)
PEMBIAYAAN	5.1.5				
PENERIMAAN	5.1.5.A				
Penggunaan SILPA Tahun Lalu	5.1.5.A	151.011.573.806,00	151.011.573.806,55	100,00	222.090.595.626,37
Pencairan Dana Cadangan	5.1.5.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan		151.011.573.806,00	151.011.573.806,55	100,00	222.090.595.626,37
PENGELUARAN	5.1.5.B				
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.5.B	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.5.B	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Biaya Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
ADB		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pengeluaran		0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		151.011.573.806,00	151.011.573.806,55	100,00	222.090.595.626,37
SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)	5.1.6	0,00	1.179.959.349.062,91	0,00	151.011.573.806,55

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos, MMP



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN
PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 Desember 2021 dan 2020

Lampiran II

NO	URAIAN	Cat.	2021	2020
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37
3	Subtotal (1 - 2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55
5	Subtotal (3 + 4)		1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.2.5	1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos, MMP



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

NERACA
PER 31 DESEMBER 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

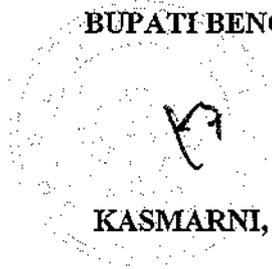
NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Reff	2021 (Rp)	2020 (Rp)
2	3	4	5
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.A		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.A.1	1.168.554.249.066,37	144.655.673.806,01
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.A.2	1.581.400,00	1.876.550.420,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.A.3	6.308,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.A.4	1.758.070,00	0,00
Kas di Bendahara JKN	5.3.1.A.5	0,00	1.624.173.188,00
Kas di BLUD	5.3.1.A.6	11.349.091.889,54	2.715.869.028,54
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.A.7	52.662.329,00	139.307.364,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak	5.3.1.A.8	90.008.134.003,73	82.404.274.028,73
Piutang Retribusi	5.3.1.A.8	5.701.751.469,50	5.631.891.569,50
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.A.8	19.692.453.118,00	2.682.331.914,00
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	5.3.1.A.8	0,00	428.603.107.748,00
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	5.3.1.A.8	11.352.317.619,51	5.965.064.148,51
Piutang Lainnya	5.3.1.A.8	11.803.187.344,24	11.493.903.651,24
Penyisihan Piutang	5.3.1.A.9	(74.229.823.209,38)	(65.197.972.723,62)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.A.10	48.875.000,00	77.190.900,00
Persediaan	5.3.1.A.11	83.548.085.289,04	61.779.121.203,23
Jumlah Aset Lancar		1.327.884.329.697,55	684.450.486.246,14
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.B		
Investasi Non Permanen	5.3.1.B.1		
Investasi Non Permanen	5.3.1.B.1	31.547.255.555,00	31.670.421.119,00
Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih	5.3.1.B.1	(31.189.055.555,00)	(31.252.521.119,00)
Jumlah Investasi Non Permanen		358.200.000,00	417.900.000,00
Investasi Permanen	5.3.1.B.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.B.2	517.914.200.090,00	518.544.148.762,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		517.914.200.090,00	518.544.148.762,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		518.272.400.090,00	518.962.048.762,00
ASET TETAP	5.3.1.C		
Tanah	5.3.1.C.1	1.113.920.111.347,51	1.118.098.988.741,31
Peralatan dan Mesin	5.3.1.C.2	1.840.891.216.160,18	1.720.936.637.948,03
Gedung dan Bangunan	5.3.1.C.3	3.278.033.677.342,66	3.135.001.432.141,73
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.C.4	9.327.286.533.125,75	8.975.413.810.264,85
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.C.5	135.015.878.085,72	126.159.968.170,72
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.C.6	355.705.505.591,46	335.652.200.689,21
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.C.7	(8.740.874.479.718,82)	(7.532.028.493.938,79)
Jumlah Aset Tetap		7.309.978.441.934,46	7.879.234.544.017,06
DANA CADANGAN	5.3.1.D		
Dana Cadangan	5.3.1.D	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan (41)		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.E		
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.E.1	6.306.966.250,66	6.306.966.250,66
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.E.2	488.750.000,00	488.750.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.E.3	2.382.272.002,28	3.604.936.620,03
Aset Lain-lain	5.3.1.E.5	193.355.584.242,10	205.137.864.730,88
Jumlah Aset Lainnya		202.533.572.495,04	215.538.517.601,57
JUMLAH ASET		9.358.668.744.217,05	9.298.185.596.626,77

KEWAJIBAN	5.3.2.		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.A		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.A.1	0,00	0,00
Utang Biaya Pinjaman Luar Negeri	5.3.2.A.2	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.A.3	95.720.570.681,77	57.533.376.593,10
Utang Pihak Ketiga	5.3.2.A.4	60.699.149.905,36	22.100.255.714,50
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.A.5	2.999.270.596,00	2.904.100.321,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		159.418.991.183,13	82.537.732.628,60
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.B		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		159.418.991.183,13	82.537.732.628,60
EKUITAS	5.3.3.	9.199.249.753.033,92	9.215.647.863.998,17
JUMLAH EKUITAS		9.199.249.753.033,92	9.215.647.863.998,17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		9.358.668.744.217,05	9.298.185.596.626,77

BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos, MMP



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN
OPERASIONAL
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

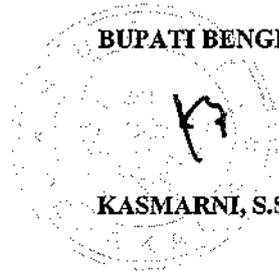
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff.	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN	5.4.1.				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.A.				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.A.1	90.021.270.953,33	72.112.407.050,33	17.908.863.903,00	24,83
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.A.2	10.399.361.138,00	9.147.885.825,34	1.251.475.312,66	13,68
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.A.3	33.292.209.969,00	20.920.504.935,00	12.371.705.034,00	59,14
7	Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.A.4	175.288.078.681,72	149.140.735.845,51	26.147.342.836,21	17,53
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		309.000.920.742,05	251.321.533.656,18	57.679.387.085,87	22,95
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.B.				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.B.1				
11	Dana Bagi Hasil	5.4.1.B.1.a	1.797.672.209.000,00	1.393.364.672.614,00	404.307.536.386,00	29,02
12	Dana Alokasi Umum	5.4.1.B.1.b	336.787.052.000,00	338.731.609.000,00	(1.944.557.000,00)	(0,57)
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.1.B.1.c	93.311.533.266,00	73.318.351.993,00	19.993.181.273,00	27,27
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.1.B.1.d	146.640.483.916,00	134.822.508.902,00	11.817.975.014,00	8,77
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pempus - Dana Perimbangan		2.374.411.278.182,00	1.940.237.142.509,00	434.174.135.673,00	22,38
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.B.2				
17	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Penyesuaian	5.4.1.B.2.a	31.134.698.000,00	35.625.236.000,00	(4.490.538.000,00)	(12,60)
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		31.134.698.000,00	35.625.236.000,00	(4.490.538.000,00)	(12,60)
20	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA/ PROVINSI	5.4.1.B.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.B.3.a	123.422.564.788,00	95.257.229.490,00	28.165.335.298,00	29,57
22	Bantuan Keuangan Pemprov/Kab./ Kota Lainnya	5.4.1.B.3.b	17.763.147.160,00	26.623.226.400,00	(8.860.079.240,00)	(33,28)
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi		141.185.711.948,00	121.880.455.890,00	19.305.256.058,00	15,84
25	Jumlah Pendapatan Transfer		2.546.731.688.130,00	2.097.742.834.399,00	448.988.853.731,00	21,40
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.C.				
27	Pendapatan Hibah	5.4.1.C.1	92.028.271.351,96	99.896.028.750,00	(7.867.757.398,04)	(7,88)
28	Pendapatan Lainnya	5.4.1.C.2	246.350.388,47	1.467.653.652,06	(1.221.303.063,59)	(83,21)
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		92.274.621.940,43	101.363.682.402,06	(9.089.060.461,63)	(8,97)
30	JUMLAH PENDAPATAN		2.948.007.230.812,48	2.450.428.050.457,24	497.579.180.355,24	20,31
31	BEBAN	5.4.2.				
32	BEBAN OPERASI	5.4.2.A.				
33	Beban Pegawai	5.4.2.A.a	1.017.081.423.128,20	967.266.480.083,00	49.814.943.045,20	5,15
34	Beban Persediaan	5.4.2.A.b	208.811.591.511,32	146.227.778.397,64	62.583.813.113,68	42,80
35	Beban Jasa	5.4.2.A.c	631.426.922.790,00	621.807.784.795,33	9.619.137.994,67	1,55
36	Beban Pemeliharaan	5.4.2.A.d	100.416.766.337,90	47.889.394.732,47	52.527.371.605,43	109,68
37	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.A.e	153.646.382.311,50	129.718.994.022,00	23.927.388.289,50	18,45
38	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
39	Beban Subsidi	5.4.2.A.f	10.642.584.920,00	9.618.696.893,00	1.023.888.027,00	10,64
40	Beban Hibah	5.4.2.A.g	65.868.005.997,87	174.181.813.556,46	(108.313.807.558,59)	(62,18)
41	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.A.h	37.194.371.163,00	0,00	37.194.371.163,00	0,00
42	Beban Penyusutan	5.4.2.A.i	838.152.774.546,60	842.136.619.622,64	(3.983.845.076,04)	(0,47)
43	Beban Amortisasi	5.4.2.A.j	1.924.210.417,75	3.817.484.659,92	(1.893.274.242,17)	(49,59)
44	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.A.k	9.204.270.253,09	6.328.008.927,10	2.876.261.325,99	45,45
45	Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen		0,00	0,00	0,00	0,00
46	Beban Penghapusan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
47	Beban Hibah Aset	5.4.2.A.l	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Beban Lain-lain	5.4.2.A.m	28.439.550.977,00	137.479.372.167,00	(109.039.821.190,00)	(79,31)
49	Beban Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00
50	Jumlah Beban Operasi		3.102.808.854.354,23	3.086.472.427.856,56	16.336.426.497,67	0,53
51	BEBAN TRANSFER	5.4.2.B.				
52	Beban Transfer Bagi hasil Pajak	5.4.2.B.a	9.306.096.195,00	4.915.347.049,00	4.390.749.146,00	89,33
53	Beban Transfer Retribusi	5.4.2.B.b	1.959.882.773,00	763.602.328,00	1.196.280.445,00	156,66
54	Beban Transfer Bantuan Keuangan	5.4.2.B.c	268.524.511.094,00	217.198.905.248,00	51.325.605.846,00	23,63
55	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Jumlah Beban Transfer		279.790.490.062,00	222.877.854.625,00	56.912.635.437,00	25,54
58	JUMLAH BEBAN		3.382.599.344.416,23	3.309.350.282.481,56	73.249.061.934,67	2,21
59	JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI		(434.592.113.603,75)	(858.922.232.024,32)	424.330.118.420,57	(49,40)

60	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
61	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.3.				
62	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3.a	0,00	723.380.000,00	(723.380.000,00)	(100,00)
63	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Jumlah Surplus Non Operasional		0,00	723.380.000,00	(723.380.000,00)	(100,00)
66	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.				
67	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Jumlah Defisit Non Operasional		0,00	0,00	0,00	0,00
71	JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	723.380.000,00	(723.380.000,00)	(100,00)
72	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(434.592.113.603,75)	(858.198.852.024,32)	423.606.738.420,57	(49,30)
73	POS LUAR BIASA					
74	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
76	POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
77	SURPLUS / DEFISIT - LO	5.4.5.	(434.592.113.603,75)	(858.198.852.024,32)	423.606.738.420,57	(49,30)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos, MMP





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN ARUS KAS

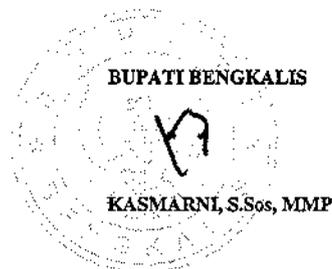
Lampiran VI

Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
Metode Langsung

Uraian	Reff	TA 2021	TA 2020
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2 Arus Masuk Kas	5.5.1.A		
3 Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.Aa	82.355.513.611,00	63.664.818.589,25
4 Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.Ab	10.329.501.238,00	8.956.066.385,34
5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.Ac	33.292.209.969,00	20.920.504.935,00
6 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.Ad	158.257.869.755,72	157.661.100.005,94
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.Ae	3.066.476.067.593,00	1.728.780.988.415,00
8 Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	5.5.1.Af	336.787.052.000,00	338.731.609.000,00
9 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1.Ag	93.311.533.266,00	73.318.351.993,00
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1.Ah	146.640.483.916,00	134.822.508.902,00
11 Penerimaan Otonom Khusus	5.5.1.Ai	0,00	0,00
12 Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.Aj	165.099.615.167,00	166.657.936.000,00
13 Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.Ak	17.763.201.600,00	26.623.226.400,00
14 Penerimaan Hibah	5.5.1.Al	82.544.910.000,00	91.438.330.000,00
15 Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.Am	129.050.630.338,00	105.094.409.108,49
16 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)		4.321.908.588.453,72	2.916.669.849.734,02
17 Arus Keluar Kas	5.5.1.B		
18 Pembayaran Pegawai	5.5.1.B	1.018.335.441.328,20	967.266.480.083,00
19 Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.B	1.097.486.691.596,15	933.384.530.032,00
20 Pembayaran Bunga	5.5.1.B	0,00	0,00
21 Pembayaran Subsidi	5.5.1.B	10.642.584.920,00	9.618.696.893,00
22 Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.B	35.834.828.114,59	71.023.667.791,00
23 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.B	37.194.371.163,00	0,00
24 Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.B	9.655.040,00	152.938.659.147,00
25 Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	5.5.1.B	11.265.978.968,00	5.678.949.377,00
26 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	5.5.1.B	402.698.706.154,00	348.231.605.248,00
27 Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 26)		2.613.468.257.283,94	2.488.142.588.571,00
28 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 27)		1.708.440.331.169,78	428.527.261.163,02
29 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
30 Arus Masuk Kas	5.5.2.A		
31 Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.A	0,00	0,00
32 Penjualan Atas Tanah	5.5.2.A	0,00	0,00
33 Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.A	0,00	723.380.000,00
34 Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.A	0,00	0,00
35 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.A	0,00	0,00
36 Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.A	0,00	0,00
37 Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.A	0,00	0,00
38 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.2.A	0,00	0,00
39 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2.A	0,00	0,00
40 Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 39)		0,00	723.380.000,00
41 Arus Keluar Kas	5.5.2.B		
42 Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.B	0,00	0,00
43 Perolehan Tanah	5.5.2.B	412.940.853,70	815.248.000,00
44 Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.B	121.410.901.246,66	97.002.850.638,45
45 Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.B	131.209.405.612,36	131.718.395.987,69
46 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.B	415.733.389.785,70	260.976.621.697,70
47 Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.B	10.725.918.415,00	9.816.546.659,00
48 Perolehan Aset lainnya	5.5.2.B	0,00	0,00
49 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.B	0,00	0,00
50 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
51 Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 50)		679.492.555.913,42	500.329.662.982,84
52 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (40 - 51)		(679.492.555.913,42)	(499.606.282.982,84)

53	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
54	Arus Masuk Kas	5.5.3.A		
55	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	5.5.3.A	0,00	0,00
56	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	5.5.3.A	0,00	0,00
57	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.A	0,00	0,00
58	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.A	0,00	0,00
59	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	5.5.3.A	0,00	0,00
60	Penerimaan Kembali Pinjaman Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.A	0,00	0,00
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.A	0,00	0,00
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.A	0,00	0,00
63	Jumlah Arus Masuk Kas (55 s/d 62)		0,00	0,00
64	Arus Keluar Kas	5.5.3.B		
65	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	5.5.3.B	0,00	0,00
66	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	5.5.3.B	0,00	0,00
67	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.B	0,00	0,00
68	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.B	0,00	0,00
69	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	5.5.3.B	0,00	0,00
70	Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.B	0,00	0,00
71	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 70)		0,00	0,00
72	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (63 - 72)		0,00	0,00
73	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
74	Arus Masuk Kas	5.5.4.A		
75	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.A	136.003.660.775,45	130.055.634.127,00
76	Jumlah Arus Masuk Kas (75)		136.003.660.775,45	130.055.634.127,00
77	Arus Keluar Kas	5.5.4.B		
78	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.B	136.003.660.775,45	130.055.634.127,00
79	Jumlah Arus Keluar Kas (78)		136.003.660.775,45	130.055.634.127,00
80	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (75 - 78)		0,00	0,00
95	Kenaikan/Penurunan Kas (34 + 58 + 80 + 88)	5.5.5	1.028.947.775.256,36	(71.079.021.819,82)
96	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD dan Kas di Bendahara BOS		151.011.573.806,55	222.090.595.626,37
97	Saldo Akhir Kas di BUD	5.5.6a	1.168.554.249.066,37	144.655.673.806,01
98	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6b	1.581.480,00	1.876.550.420,00
99	Saldo Akhir Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.5.6c	6.308,00	0,00
100	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.6d	1.758.070,00	0,00
101	Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN	5.5.6e	0,00	1.624.173.188,00
102	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	5.5.6f	11.349.091.889,54	2.715.869.028,54
103	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	5.5.6g	52.661.329,00	139.307.364,00
104	Saldo Akhir Kas (97 + 98 + 99+100+101+102+103+104)	5.5.6	1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini





**PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS**

**LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Cat.	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	5.6.1.	9.215.647.863.998,17	9.896.020.878.913,95
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.6.2.	(434.592.113.603,75)	(858.198.852.024,32)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	5.6.3.	418.194.002.639,50	187.825.837.108,54
4	Koreksi Nilai Piutang		999.562.616.171,00	278.822.675.350,00
5	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		(10.465.257,14)	287.099.911,90
6	Koreksi Nilai Persediaan		(1.017.740.231,89)	0,00
7	Koreksi Investasi Non Permanen		0,00	0,00
8	Koreksi Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih		0,00	0,00
9	Koreksi Nilai Aset Tetap		(1.037.563.269,51)	132.201.518.281,20
10	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(373.140.038.393,96)	(158.612.144.168,79)
11	Koreksi Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
12	Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud		0,00	15.000.000,00
13	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(6.512.500,00)	(721.447,00)
14	Koreksi Nilai Aset Lain-lain		(11.469.914.467,00)	(6.997.500,00)
15	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		0,00	6.324.470.748,23
16	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka		(186.638.836.607,00)	(71.205.078.231,00)
17	Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga		(8.049.030.305,00)	14.166,00
18	Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya		1.487.500,00	0,00
19	Koreksi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	(2,00)
	Total	5.6.4	9.199.249.753.033,92	9.215.647.863.998,17

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos, MMP



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dimana laporan tersebut merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 khususnya Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan disusun guna memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* yang relevan antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan berisikan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis selama Tahun Anggaran 2021 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan antara lain mengenai pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memahami tentang:

- a. Kemampuan penerimaan dari pendapatan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu untuk mendanai kegiatan yang telah dianggarkan;
- e. Posisi keuangan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan berupa pajak, retribusi dan penerimaan lainnya serta kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu akibat dari pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021; dan
- f. Informasi tentang perubahan Posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - q. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - r. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;



1.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 yang berbasis akrual terdiri dari:

1) Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset yang disajikan terdiri dari aset lancar dan aset nonlancar, kewajiban disajikan terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Untuk data mengenai kas daerah, investasi, dana cadangan, tuntutan perbendaharaan, piutang dana transfer, utang bunga, utang luar negeri (jangka pendek dan jangka panjang) didasarkan pada neraca PPKD (Bendahara Umum Daerah), sedangkan data mengenai kas dibendahara penerimaan, kas dibendahara pengeluaran, piutang pajak, piutang retribusi, tuntutan ganti rugi, persediaan, aset tetap, aset lainnya, utang pemotongan pajak (PFK) didasarkan pada neraca konsolidasi dari SKPD.

2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Daerah menyajikan data tentang pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan daerah. Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyajikan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Data/informasi keuangan dari PPKD (BUD) terdiri dari Pendapatan Transfer, Lain-Lain PAD yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, dan Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3) Laporan Arus Kas (LAK)

Data keuangan mengenai aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) disusun dalam salah satu Laporan Keuangan yaitu Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas hanya disusun oleh Entitas Pelaporan yakni Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada dibawah pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Silpa/Sikpa, Koreksi, dan Saldo Anggaran Lebih akhir.

5) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan LO, Beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terhadap koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, lain-lain dan ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menjelaskan tentang akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL). Penjelasan mengenai kondisi umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, Ekonomi makro, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang dilengkapi dengan tabel dan grafik. Informasi tambahan dengan diterapkan akuntansi berbasis akrual yakni pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Semua informasi dan penjelasan tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan guna pengungkapan yang andal dan memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan penggabungan antara Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

b. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 berjumlah 47 OPD terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat dan Kecamatan, dengan rincian pada Tabel 1.1.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 1.1**Daftar OPD pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021**

No	SKPD	Alamat Kantor
1	Sekretariat Daerah	Jl. Ahmad Yani Bengkulu
2	Sekretariat DPRD	Jl. Antara Bengkulu
3	Dinas Pendidikan	Jl. Pertanian Bengkulu
4	Dinas Kesehatan	Jl. Pertanian Bengkulu
5	RSUD Kabupaten Bengkulu	Jl. Kelapapati Tengah Bengkulu
6	RSUD Kecamatan Mandau	Duri Kec. Mandau
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Pertanian Bengkulu
8	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Jl. Pramuka Bengkulu
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Ahmad Yani Bengkulu
10	Dinas Pemadam Kebakaran	Jl. Sudirman Bengkulu
11	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. H.R Subrantas Bengkulu
12	Dinas Sosial	Jl. Antara Bengkulu
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Duri Kec. Mandau
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Pertanian Bengkulu
15	Dinas Ketahanan Pangan	Jl. Antara Bengkulu
16	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Pertanian Bengkulu
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Pertanian Bengkulu
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl. Pertanian Bengkulu
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jl. Hang Tuah Bengkulu
20	Dinas Perhubungan	Jl. Pramuka Bengkulu
21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Jl. Kartini Bengkulu
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jl. Pertanian Bengkulu
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Antara Bengkulu
24	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Jl. Arif Rahman Bengkulu
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Pertanian Bengkulu
26	Dinas Perikanan	Jl. Pertanian Bengkulu
27	Dinas Perkebunan	Jl. Pertanian Bengkulu
28	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Jl. Pertanian Bengkulu
29	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Jl. Pertanian Bengkulu
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Antara Bengkulu
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Pertanian Bengkulu
32	Badan Pendapatan Daerah	Jl. Sudirman Bengkulu
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Jl. Antara Bengkulu



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	SKPD	Alamat Kantor
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jl. Pertanian Bengkulu
35	Inspektorat	Jl. Antara Bengkulu
36	Kantor Camat Bengkulu	Jl. Panglima Minal Bengkulu
37	Kantor Camat Bantan	Kec. Bantan
38	Kantor Camat Bukit Batu	Kec. Bukit Batu
39	Kantor Camat Siak Kecil	Kec. Siak Kecil
40	Kantor Camat Bandar Laksamana	Kec. Bandar Laksamana
41	Kantor Camat Rupal	Kec. Rupal
42	Kantor Camat Rupal Utara	Kec. Rupal Utara
43	Kantor Camat Mandau	Kec. Mandau
44	Kantor Camat Pinggir	Kec. Pinggir
45	Kantor Camat Bathin Solapan	Kec. Bathin Solapan
46	Kantor Camat Talang Muandau	Kec. Talang Muandau
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Antara Bengkulu

c. Entitas Pelaporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang juga selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021 yang berbasis akrual merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan PPKD.

1.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

a. Sejarah Kabupaten Bengkulu

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkulu tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, dimana sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu yang berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera (Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil) terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai-sungai besar di Pulau Sumatera, yang selanjutnya semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan-endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya, diantaranya Pulau Bengkulu dan Pulau Rupal yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu.

Sejarah terbentuknya wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu sebelum Indonesia merdeka, merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamákannya Negara Kesatuan Republik Indonesia,



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

dan diikuti dengan penyerahan kekuasaan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

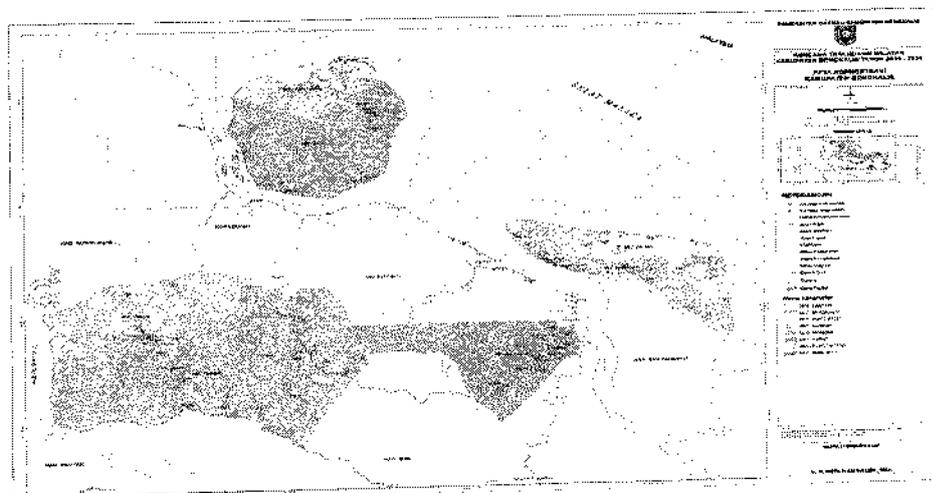
Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II, yang pada waktu itu masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Padang. Dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pada saat itu Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau. Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, sejumlah wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis satu demi satu dimekarkan. Dimulai pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun yang sama melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 dibentuklah Kota Dumai merupakan pemekaran pertama dari Kabupaten Bengkalis. Dan terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkalis memiliki luas 8.403,28 km² yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan sebanyak 15 pulau utama.

Gambar. I-1 Peta Administratif Kabupaten Bengkalis





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, 18 kelurahan dan 136 desa. Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel I-1 berikut.

Tabel I-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis

1	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	464,04	5,32
2	Bantan	Selatbaru	-	23	443,29	5,12
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	603,93	6,97
4	Bandar Laksamana	Tenggayun	-	7	1,321,88	15,26
5	Siak Kecil	Lubuk Muda	-	17	942,86	10,88
6	Mandau	Air Jamban	9	2	521,86	6,02
7	Batin Solapan	Sebangar	-	13	686,32	7,92
8	Pinggir	Pinggir	2	8	775,03	8,95
9	Talang Muandau	Beringin	-	9	1,379,26	15,92
10	Rupat	Batu Panjang	4	12	1,145,30	13,22
11	Rupat Utara	Tanjung Medang	-	8	378,41	4,37
Total Keseluruhan			18	136	8.662,18	100,00

Sumber : RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi $100^{\circ}57'57,6''$ – $102^{\circ}30'25,2''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}7'37,2''$ - $0^{\circ}55'33,6''$ Lintang Utara. Sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur.

Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 938 km² atau 93.840 hektar dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 62.850 Ha atau 1.524,85 km², dimana Pulau Rupat memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya.

Untuk geografis kawasan pesisirnya terdiri dari Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas daratan dan perairannya 187.021 Ha atau 1.870,21 km². Kawasan tersebut berada di perairan Selat Pakning yang menghubungkan antara kawasan tersebut dengan Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti). Selanjutnya,



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

geografis kawasan daratan terdiri dari Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total daratannya sebesar 3.440,47 km².

Letak Kabupaten Bengkulu sangat strategis, selain karena sebagian wilayahnya ada yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta pesisir barat Malaysia dan ada juga sebagian wilayahnya yang berada pada jalur ekonomi penting Pulau Sumatera dan beberapa kabupaten/kota disekitarnya. Posisi tersebut tentunya dapat saja 9 berimplikasi positif dan negatif pada posisi geostrategis Kabupaten Bengkulu di masa mendatang. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kabupaten Bengkulu masih memiliki potensi daya tarik bagi investor lokal maupun luar kabupaten, hal ini dikarenakan lahannya yang masih potensi untuk dikembangkan, ketersediaan sumber daya serta anggaran daerah yang masih cukup besar untuk dijadikan market modal bagi kedatangan investor ke wilayah Kabupaten Bengkulu.

c. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkulu umumnya relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2-6 mdpl. Bentuk wilayah daratannya sebagian besar berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0-3 mdpl yang mencakupi 71 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 551.949 ha, kecuali pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdpl yang mencakupi 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 ha. Selanjutnya kemiringan antara 8-16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 ha dan terakhir kemiringan >16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakupi 8 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 ha. Adapun fisiografi wilayah Kabupaten Bengkulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a) Cekungan Rawa Daerah ini dijumpai di bagian tengah, berupa cekungan tertutup yang terdiri dari rawa gambut yang berasal dari bahan endapan aluvial. Bentuk wilayah datar sampai cekung (0-3 mdpl) dengan bentukan drainase alam yang jelek. Daerah ini mencakup 71% dari luas kabupaten yang tersebar di Kecamatan Rupert, Rupert Utara, Bengkulu, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. b) Dataran Fisiografi ini berasal dari endapan aluvial mencapai 21% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah pada unit fisiografi ini adalah bergelombang sampai berombak (3-18 mdpl) dengan bentukan drainase sedang sampai baik. Disamping yang terbentuk dari endapan aluvial, bentuk dataran ini juga berasal dari sabuk meander dan teras laut tua. Bentuk wilayah ini terdapat pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau, Pinggir dan sedikit di Kecamatan Bukit Batu. Uraian di atas menunjukkan wilayah Kabupaten Bengkulu didominasi oleh kelompok kubah gambut dan kelompok marin. Kelompok kubah gambut berkembang dari endapan organik dan semakin tebal jika semakin jauh dari pantai. Gambut yang dipengaruhi oleh air laut mempunyai potensi asam sulfat tinggi. Sedangkan kelompok marin berkembang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

dari endapan mineral yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mempunyai lebar bervariasi antara 0,5-5 km.

d. Geologi

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkulu tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, dimana sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera yang terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai-sungai besar di Pulau Sumatera dimana semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya yang diantaranya membentuk Pulau Bengkulu dan Pulau Rupa. Secara umum kondisi geologi wilayah Kabupaten Bengkulu terdiri dari tiga formasi yaitu: formasi petani (Tup), formasi telisa (TMT) dan formasi pematang (TLpe). Formasi petani disebut sebagai lapisan palembang tengah dan bawah, sedangkan kuartar terdiri dari formasi minas (Qpmi), endapan permukaan muda (Qh) dan endapan permukaan tua (Qp). Aluvium tua umumnya merupakan bagian kering yang terdapat di Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bukit Batu. Sedangkan aluvium muda menempati cekungan atau daerah belakang pantai yang berawa dan alur-alur pasang surut yang terdapat di Kecamatan Rupa, Rupa Utara, Bengkulu, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Khusus Kecamatan Mandau dan Pinggir terletak dalam struktur tersier dan cekungan deposit yang sering disebut sebagai cekungan Sumatera Tengah dimana endapan dan cekungan ini terdiri atas lapisan yang tebal di antara deposit minyak bumi dan batu-batuan.

e. Hidrologi

Kabupaten Bengkulu memiliki dua belas aliran sungai yang berada di Kecamatan Rupa, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bukit Batu. Kedua belas aliran sungai tersebut adalah: Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Senebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Sair, Sungai Penonton, Sungai Jangkang, Sungai Bantan Tengah dan Sungai Kambung Luar. Diantara sungai yang ada di Kabupaten Bengkulu yang sangat penting peranannya sebagai prasarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah aliran Sungai Siak dan Siak Kecil dengan panjang \pm 90 Km. Beberapa sungai yang mencirikan kondisi hidrologi daerah rawa diantaranya adalah Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Penebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Suir, Sungai Penonton, Sungai Jangkang dan Sungai Bantan Tengah. Sungai-sungai tersebut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sehingga intrusi air laut tersebut berpotensi menyebabkan kualitas air tanah di wilayah ini bersifat payau/asin dengan salinitas sedang sampai tinggi. Keadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut yang tersebar



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

di Kecamatan Bukit Batu, Mandau dan Rupert. Pada beberapa bagian wilayah banyak yang masih mengalami genangan, terjadi di Kecamatan Rupert dan Mandau. Keberadaan lahan gambut yang mendominasi wilayah Kabupaten Bengkulu merupakan kantong-kantong penyimpanan air yang sangat besar.

f. Klimatologi

Kondisi iklim Kabupaten Bengkulu, menurut klasifikasi Oldeman menunjukkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupert dan Rupert Utara termasuk zona agroklimat E dengan sub zona agroklimat E3, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya 4-6 bulan dalam setahun dengan curah hujan < 100 mm/bulan. Sedangkan Kecamatan Bengkulu, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil termasuk dalam kelompok sub zona agroklimat E1, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya kecil atau sama dengan dua bulan. Berdasarkan data curah hujan bulanan rata-rata Kecamatan Bantan, Bengkulu, Bukit Batu dan Siak Kecil memiliki empat bulan kering, yaitu Januari, Februari, Maret dan Juni dan tidak memiliki bulan basah. Sedangkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupert dan Rupert Utara memiliki satu bulan kering yaitu bulan Februari dan satu bulan basah yaitu bulan Oktober. Setiap kecamatan memiliki tipe hujan yang hampir sama yaitu memiliki puncak hujan bimodal (Maret -April dan Oktober-November) dan musim kering yang lemah.

g. Demografi

Kepadatan Penduduk Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkulu tahun 2019 mencapai 65 jiwa per km². Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu termasuk kategori penduduk sangat jarang. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkulu tiap tahunnya semakin bertambah dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan kepadatan penduduk tersebut seiring dengan makin berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional yang terjadi di daerah ini. Jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Mandau yaitu sebanyak 190 jiwa/km², dengan jumlah penduduk sebanyak 150,806 jiwa atau sebesar 27% dari total penduduk pada Kabupaten Bengkulu pada tahun 2019. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Rupert Utara yaitu sebanyak 13.783 Jiwa atau 2,49 persen dari total penduduk Kabupaten Bengkulu. Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan lainnya sehingga akan memicu terjadinya peningkatan harga lahan dan perlunya penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan mengakibatkan terjadinya persolaan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah.

Sementara dari komposisi penduduk, jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan penduduk perempuan, di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pinggir, Bathin Solapan, Talang Muandau dan Bandar



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Laksamana. Rasio Jenis Kelamin pada Kabupaten Bengkulu tahun 2019 berada pada angka 105 yang artinya dalam 100 jumlah perempuan pada kabupaten Bengkulu terdapat 105 laki laki.

1.5 SUMBER DANA

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021 menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.3.594.498.516.273,70 yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sebesar	:	Rp	344.444.325.365,00
b. Pendapatan Transfer sebesar	:	Rp	3.014.118.217.102,70
c. Lain-lain Pendapatan Sah sebesar	:	Rp	84.924.400.000,00
d. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	151.011.573.806,55

1.6 KEBIJAKAN KONVERSI

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1.7. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian untuk mensinergikan antara Peraturan sebagaimana tersebut diatas, khusus untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021 melakukan penyesuaian dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana kode rekening dikonversi ke kode akun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan pelaksanaannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang secara teknis akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bengkulu dan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 93 Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu.

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu
- 1.5. Sumber Dana
- 1.6. Kebijakan Konversi
- 1.7. Perubahan kebijakan Akuntansi
- 1.8. Sistematisasi Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
- 2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
- 3.3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Target Pendapatan Tahun Anggaran 2021

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
 - 5.1.1. Pendapatan-LRA
 - 5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
- 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
- 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 5.1.1.2 Pendapatan Transfer
 - 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
 - 5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
 - 5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya
 - 5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan
- 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
- 5.1.2. Belanja
 - 5.1.2.1 Belanja Operasi
 - 5.1.2.2 Belanja Modal
 - 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga
- 5.1.3. Transfer
- 5.1.4. Pembiayaan Netto
 - 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan
- 5.1.5. Pendapatan-LO
- 5.1.6. Beban
- 5.1.7. Aset
- 5.1.8. Kewajiban
- 5.1.9. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI LAINNYA

- 6.1. Informasi Rekening Giro yang Dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- 6.2. Informasi Deposito Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- 6.3. Informasi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)
- 6.4. Informasi Lainnya

BAB VII PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Kabupaten Bengkalis, tidak saja menyerang dari sisi kesehatan, namun juga dari sisi perekonomian.

Terus menurunnya harga minyak dipasaran dunia dan semakin menurunnya produksi minyak yang terdapat di Kabupaten Bengkalis tetap akan berpengaruh secara signifikan pada perekonomian Kabupaten Bengkalis. Aktivitas-aktivitas ekonomi yang berkaitan pada sektor pertambangan dan pengggalian terus menurun dan ini tentunya akan tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi tetapi juga terhadap pendapatan Kabupaten Bengkalis terutama yang berasal dari bagi hasil sumberdaya alam. Keadaan ini akan berdampak pada pembiayaan pembangunan, sementara dilain pihak kebutuhan akan pembiayaan pembangunan semakin besar. Disamping itu kampanye negara negara eropa terhadap minyak sawit yang merupakan salah satu produk yang dihasilkan di Kabupaten Bengkalis masih menjadi kendala untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis.

Faktor geografis yang berada pada pesisir timur Pulau Sumatera yang terdiri dari pulau dan pantai serta lahan rawa bergambut menjadi penyebab tingginya biaya pembangunan. Sebagian besar bahan material yang digunakan untuk pembangunan didatangkan dari luar Kabupaten Bengkalis, dengan jangkauan akses infrastruktur dasar masyarakat yang masih terbatas.

Kabupaten Bengkalis memiliki sumber daya alam beragam yang secara ekonomis bernilai tinggi, baik sumber daya mineral maupun non-mineral, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal bagi peningkatan kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Hal ini dikarenakan sulitnya menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh, keterbatasan sarana dan prasarana wilayah, maupun karena ketidakmampuan masyarakat tersebut secara ekonomi.

Faktor lainnya yang turut mendorong melambatnya perekonomian Kabupaten Bengkalis menurunnya sumber pembiayaan pembangunan yang selama ini sebagian besar berasal dari bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas yang semakin lama produksi dan harganya semakin menurun. Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan yang berasal dari DAU juga tidak bisa diharapkan karena adanya gejolak ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid_19.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

a. Ekonomi Makro Kabupaten Bengkalis

Pembangunan daerah merupakan bagian daripada pembangunan nasional. Oleh sebab itu arah kebijakan ekonomi daerah harus sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Berkenaan dengan itu sinkronisasi pembangunan antar tingkatan pemerintahan merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah haruslah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pemerintah Provinsi. Dalam rangka itu, untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan secara menyeluruh, pembangunan Kabupaten Bengkalis juga harus selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional.

Penyebaran Covid 19 secara massif mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional yang berdampak pada melambatnya perekonomian nasional, dimana keadaan ini dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pembangunan nasional diarahkan pada pemulihan sosial ekonomi disamping menjaga upaya pengendalian terhadap angka penyebaran Covid-19, maka Pemerintah Republik Indonesia pada RKP 2021 mengambil tema **“Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial”**. Berdasarkan tema tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Arah Pembangunan Nasional yaitu: pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengamanan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan tema Pembangunan Provinsi Riau tahun 2021 adalah: Memantapkan Pengembangan Industri Pertanian, Pariwisata yang mendorong Perdagangan dan Jasa untuk meningkatkan daya saing, dengan program prioritas berfokus pada: pembangunan Industri, pembangunan pertanian, pembangunan pariwisata, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Dalam rangka menselaraskan arah kebijakan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi maka Kabupaten Bengkalis menetapkan tema pembangunan tahun 2021 adalah: “Pemantapan pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing”. Arah kebijakan yang ditetapkan adalah Pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang, pemantapan pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Riau untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia yang unggul, menggali potensi sumber ekonomi yang baru dan mengurangi impor pangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1) Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Bengkulu di tahun 2021 khususnya pada perkembangan Triwulan II masih dipengaruhi oleh situasional pandemi Covid-19 yang sejak akhir tahun 2020 masih belum dapat diakhiri perkembangannya baik di tingkat Nasional maupun di daerah. Akibat belum selesainya permasalahan pandemi ini sangat berdampak kepada perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Bengkulu, terutama saat diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Bengkulu tahun 2021 secara eksplisit dapat dilihat pada data perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Bengkulu tahun 2019-2021 yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

1	Pertumbuhan Ekonomi	%				
	- Dengan Migas		-1,89	-3,30	-1,08	-1,08
	- Tanpa Migas		4,39	-0,02	-2,00	-0,95
2	Laju Inflasi Kumulatif	%	1,28	2,89	2,7	2,7
3	PDRB Per Kapita	Rp	247,47	199,99	200,54	201,55
4	Kemiskinan	%	6,27	6,4	6,5	6,45
5	Indeks Gini	Tanpa satuan	0,288	0,28	0,28	0,28
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,62	9,31	9,7	9,55

Sumber : RKPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2021

Berdasarkan tabel II-1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu yang dipengaruhi oleh aktivitas eksploitasi minyak bumi secara umum mengalami pelemahan khususnya pada tahun 2020 yaitu sebesar -3,30 % sebagai akibat berkurangnya cadangan minyak bumi di Kabupaten Bengkulu dan menurunnya aktivitas pengolahan yang bersumber dari minyak bumi, asumsi pertumbuhan ekonomi dengan migas dikonstruksikan menguat sebesar 1,80 % sebagai keyakinan Pemerintah Kabupaten Bengkulu terhadap alih pengelolaan ladang minyak dari Chevron Mobile ke PT. Pertamina disamping keyakinan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu juga berasumsi adanya pengaruh dari sektor-sektor lain yang masih dapat bergerak sekalipun kondisi Nasional sedang menghadapi pandemi Covid-19 terutama dari sektor jasa kesehatan dan penggunaan teknologi dan informasi.
- Jika berbicara pertumbuhan ekonomi riil Kabupaten Bengkulu yang bersumber dari PDRB sektor bukan minyak dan gas, dapat dilihat kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu diasumsikan akan mengalami penguatan diberbagai sektor, sekalipun masih tidak sebaik di tahun 2020,



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

namun pertumbuhan ekonomi yang $-0,95\%$ ini masih lebih meyakinkan dibandingkan dengan asumsi awal di tahun 2021.

- (c) Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Bengkalis dalam kurun 2019-2021 masih relatif besar sebagai akibat masih besarnya tingkat ketergantungan daerah terhadap sejumlah bahan pokok dari luar Kabupaten Bengkalis, laju inflasi yang masih berkisar di angka 2% ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan inflasi di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.
- (d) PDRB per Kapita atas harga berlaku (AHB) menunjukkan kondisi penurunan juga sebagai akibat menurunnya sejumlah sektor di tahun 2020, Kabupaten Bengkalis melakukan perbaikan asumsi dari Rp. 200.540.000,- menjadi Rp. 201.550.000,- dengan mempertimbangkan pergerakan sektor-sektor pendukung masih mengalami perlambatan pertumbuhan khususnya di kelompok sektor primer dan sekunder.
- (e) Pertumbuhan PDRB per Kapita tersebut juga menyebabkan meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bengkalis khususnya pada tahun 2020-2021, sekalipun asumsi positif ditetapkan bahwa angka TPT tahun 2021 sebesar $9,55\%$ di perubahan masih lebih baik dari angka TPT tahun 2019 yaitu sebesar $9,62\%$.
- (f) Peningkatan jumlah pengangguran berpengaruh juga pada peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis khususnya pada tahun 2020-2021, sekalipun asumsi tingkat kemiskinan mengalami koreksi dari $6,50\%$ menjadi $6,45\%$, namun upaya penurunan kemiskinan masih belum dapat mengatasi pertumbuhan orang miskin selama masa pandemi Covid_19 ini.
- (g) Pengaruh peningkatan angka kemiskinan juga berdampak pada peningkatan kesenjangan kesejahteraan yang ditunjukkan oleh Gini ratio atau indeks Gini yang masih berada di kisaran $0,28$ sepanjang tahun 2019-2021. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih menggunakan asumsi yang mengacu pada perkembangan indeks Gini tahun 2020.

Perkembangan indikator Ekonomi Makro tahun 2021 yang mengalami perubahan asumsi tersebut selain sebagai dampak dari pandemi Covid-19 juga sebagai akibat adanya perkembangan asumsi pendapatan bersumber dari dana transfer pusat ke daerah yang masuk di TW II tahun 2021, sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu melakukan beberapa koreksi terhadap indikator Ekonomi Makro tersebut.

2) Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi dimana terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dengan demikian, ketika hanya ada satu atau dua barang saja yang mengalami peningkatan harga hal ini tidak dapat disebut sebagai inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian daerah. Pengendalian inflasi bagi perekonomian domestik, dilakukan untuk menjaga iklim usaha agar tetap kompetitif. Kalau inflasi tidak dikendalikan, akan menciptakan iklim kurang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

bersaing dan tingkat bunga kredit tidak bisa diturunkan. Disamping itu itu inflasi mempengaruhi daya beli yakni besaran jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang nominal tertentu. Semakin tinggi tingkat inflasi semakin menurun daya beli masyarakat ketika pendapatan tidak berubah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan jumlah angka kemiskinan.

Di Provinsi Riau angka inflasi di hitung hanya pada 3 Kabupaten/Kota antara lain: Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk melihat inflasi di Kabupaten Bengkalis merujuk pada angka inflasi pada Kota Dumai. Hal ini karena Kota Dumai merupakan daerah yang terdekat dengan Kabupaten Bengkalis. Selama kurun waktu 2015 -2019 angka inflasi Kota Dumai berfluktuasi dengan angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,78 persen dan terendah terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 1,28. Selama kurun waktu tersebut angka inflasi yang terjadi di Kota Dumai sebagai rujukan Kabupaten Bengkalis berada pada posisi angka rendah dan moderat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat harga-harga barang dan jasa yang belaku di Kabupaten Bengkalis relatif stabil. Tingkat inflasi seperti ini harus tetap dijaga apalagi ditengah wabah Covid-19 , jika tidak dikendalikan besar kemungkinan dapat memicu meningkatnya angka inflasi. Oleh sebab itu peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah menjadi sangat penting terutama untuk menjaga jangan sampai terjadi berkurangnya secara signifikan pasokan barang-barang yang beredar di pasar.

3) Pengangguran.

Pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018, dibandingkan tahun 2017 dari 8,62 persen tahun 2017 meningkat menjadi 10,05 persen. Kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 9,62 persen. Walaupun terjadi penurunan pada tahun 2019, namun angka pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis tahun 2019 masih jauh di atas Provinsi Riau yang berada pada angka 5,97 persen. Tingginya angka pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis dipicu oleh tingginya jumlah angkatan kerja disatu sisi, sementara disisi yang lain tidak diimbangi secara signifikan pertambahan jumlah lapangan pekerjaan. Rendahnya pertambahan lapangan pekerjaan ini disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

4) Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis cenderung menurun dari 38,49 ribu jiwa 2017 menurun menjadi 35,83 ribu jiwa pada tahun 2019. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis juga menurun dari 6,85 persen tahun 2017 menurun menjadi 6,27 persen pada tahun 2019. Penurunan kemiskinan ini sejalan dengan menurunnya angka pengangguran. Dilihat dari sisi persentase penduduk miskin Kabupaten Bengkalis pada 2019 lebih rendah dibandingkan dengan persentasi kemiskinan di Provinsi Riau yang mencapai sebesar 6,90. Walaupun demikian jumlah penduduk miskin



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 masih cukup besar. Berkenaan dengan itu perlu adanya upaya yang terencana untuk senantiasa mengurangi jumlah penduduk miskin.

2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari kapasitas anggaran penerimaan yang tersedia untuk kelola oleh pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal itu, anggaran belanja daerah ditentukan dari hasil analisis perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah.

Perumusan kebijakan keuangan daerah menyangkut pada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memaksimalkan belanja daerah. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut di Kabupapeten Bengkalis mengedepankan prinsip money follow program dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran yang lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD 2016-2021 dan prioritas pembangunan RKPD 2021. Dengan demikian kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 dapat diuraikan pada bagian berikut ini.

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebutuhan pendanaan dalam pembangunan daerah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan masyarakat. Namun pada sisi yang lain ketersediaan anggaran pendapatan dari sumber-sumber pendapatan yang sudah ada sangat terbatas. Penyebaran virus covid-19 yang begitu masif, walaupun diperkirakan pada tahun 2021 akan dapat diatasi, namun ekses-ekses dari dampak penyebarannya akan tetap dirasakan dan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Bagi Kabupaten Bengkalis tidak hanya penyebaran covid-19 sebagai variabel pengganggu pertumbuhan ekonomi tetapi juga menurunnya secara drastis harga minyak dipasaran internasional, dan kecenderungan menurunnya produksi minyak. Kondisi yang demikian diprediksi akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis. Berkenaan dengan hal tersebut untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis maka langkah-langka kebijakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan review atas peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, khususnya terkait dengan teknis operasional dilapangan;
- 2) Melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah
- 3) Meningkatkan manajemen dan tata kelola pendapatan asli daerah;
- 4) Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 5) Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi;
- 6) Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dan antar instansi pengelola pendapatan;

Dengan asumsi diatas diperkirakan akan dapat mengurangi penurunan pendapatan daerah. Berdasarkan asumsi tersebut perkiraan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- a) Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan tetap mengalami penurunan dari anggaran pendapatan tahun berjalan sebesar 10% pada tahun 2021.
- b) Dana Bagi Hasil diperkirakan akan mengalami penurunan sebagai dampak dari menurunnya produksi minyak dan harga minyak dipasaran internasional . Penurunan diprediksi sebesar 10% dari anggaran tahun berjalan.
- c) Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus diperkirakan akan turun sebesar % sebagai dampak menurunnya pendapatan pemerintah pusat sebagai eksese dari Covid-19.
- d) Lain-lain pendapatan yang sah juga di prediksi akan mengalami penurunan sebesar 5%.

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020-2021, sektor pendapatan yang dominan masih berasal dari Dana Perimbangan, yakni berada pada kisaran 77,95 persen dari keseluruhan pendapatan. Keadaan ini disebabkan karena Kabupaten Bengkalis merupakan daerah penghasil minyak terbesar di Provinsi Riau yang mendapatkan porsi dana bagi hasil khususnya bagi hasil sumberdaya alam yang cukup besar. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah belum masih belum dapat dimaksimalkan.

Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah yang menjadi sumber utama dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis masih tergantung pada sumber-sumber yang berasal dari pemerintah pusat. Kondisi ini tentu harus disikapi secara bijak, serta terus memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat melalui inovasi-inovasi daerah dalam merangsang peningkatan pendapatan asli daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan dalam belanja daerah harus memprioritaskan penganggaran pada belanja yang wajib dan mengikat. Belanja yang mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Setelah terpenuhinya belanja wajib dan mengikat selanjutnya barulah menganggarkan belanja yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

tentunya berhubungan dengan kewenangan daerah baik itu urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Walaupun terjadi peningkatan anggaran belanja pada tahun berjalan, namun demikian pada tahun 2021 sebagai tahun rencana diprediksikan anggaran belanja akan mengalami penurunan. Prediksi penurunan belanja ini berdasarkan perkiraan penurunan pendapatan sebagai dampak dari menurunnya aktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh penyebaran wabah virus COVID_19 serta perkiraan menurunnya harga minyak dipasaran internasional dan menurunnya produksi minyak mentah yang berasal dari Kabupaten Bengkalis.

Dengan berlandaskan pada kondisi yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan permasalahan dan isue yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.
- 2) Memprioritaskan belanja wajib dan mengikat, serta belanja serta belanja mandatori seperti belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengembangan SDM aparatur.
- 3) Kebutuhan belanja daerah diarahkan dengan memperbesar belanja langsung untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, yaitu diarahkan untuk mempercepat mengatasi permasalahan pokok daerah seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sector dominan yang mempengaruhi PDRB dan perluasan daya saing investasi.
- 4) Mengefektifkan belanja tidak langsung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi, dan mengefisienkan belanja hibah maupun belanja sosial.

Belanja daerah sebagaimana yang tertuang dalam APBD baik murni maupun APBD Perubahan menggunakan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui penerapan strategi yang mengutamakan pencapaian sasaran program pembangunan dimana alokasinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan penanganan masalah-masalah khusus yang perlu ditangani serta menampung aspirasi masyarakat yang mendesak dan membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Bengkulu pada umumnya berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, yang dipergunakan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak ketiga lainnya serta untuk menutup defisit Anggaran.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 diarahkan pada SILPA yang diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Sementara itu kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2021 diarahkan tidak ada pengeluaran.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai kebijakan keuangan daerah, lebih lanjut dijabarkan dalam indikator pencapaian fiskal daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2021. Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang APBD-P Tahun 2021 yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2021.

Tabel II.2
Indikator Kinerja Fiskal Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN APBD	KENAIKAN /PENURUNAN APBD	
	Rp	Rp	Rp	%
I.Pendapatan	3.045.851,00	3.443.486,00	397.635,00	13,05
I.1.Pendapatan Asli Daerah	327.979,00	344.444,00	16.464,00	5,02
I.2.Dana Perimbangan	2.389.010,00	2.667.080,00	278.070,00	11,64
I.3.Lain-Lain Pendapatan yang sah	0,00	84.924,00	84.924,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

II. Belanja	3.224.258,00	3.594.498,00	370.240,00	11,48
II.1. Belanja Operasi	2.110.732,00	2.430.196,00	319.463,00	15,13
II.2. Belanja Modal	708.763,00	745.222,00	36.459,00	5,14
II.3. Belanja Tidak Terduga	19.599,00	4.248,00	(15.350,00)	(78,32)
II.4. Belanja Transfer	385.163,00	414.831,00	29.667,00	7,70
Surplus/Defisit	(178.407,00)	(151.011,00)	(27.395,00)	(15,36)
III. Pembiayaan	178.407,00	151.011,00	(27.395,00)	(15,36)
III.1. Penerimaan	178.407,00	151.011,00	(27.395,00)	(15,36)
III.2. Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
SILPA Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Tujuan pokok dan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 merupakan penjabaran dan penerjemahan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 untuk rencana pembangunan tahun 2021 serta penyelarasan terhadap RKP 2021 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2021. Selain itu, RKPD juga merupakan kristalisasi dari komitmen teknokratis pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat dalam pencapaian Visi Pembangunan Daerah: “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia” Agar pencapaian Visi Pembangunan 2016-2021 dapat dilaksanakan dengan baik, maka ditetapkanlah sejumlah misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung pencapaian tersebut. Dimana keterhubungan misi, tujuan dan sasaran dapat dijelaskan pada tabel II.3. berikut ini.

Tabel II.3 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD

1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berwibawa, Transparan dan Bertanggung Jawab Serta dapat Melaksanakan Kepimpinan dengan Bijak, Berani dan Ikhlas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
			Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah
			Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
2	Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah dan Sumberdaya Manusia Untuk Kemakmuran Rakyat	Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya kualitas pendidikan
			Meningkatnya daya saing SDM
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya daya saing SDM
			Meningkatnya kinerja perekonomian daerah
			Meningkatnya nilai investasi
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya taraf hidup masyarakat		
	Meningkatnya kesejahteraan petani		



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup
3	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat	Meningkatkan aksesibilitas daerah Meningkatkan kualitas infrastruktur antar wilayah Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah Meningkatnya kualitas sarana, prasarana, dan utilitas umum

Tabel II.4 berikut ini menyajikan konsistensi tema (tujuan pokok) pembangunan tahun 2021 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis.

Tabel II.4 Konsistensi Tema (Tujuan Pokok) Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Melalui Pemantapan Pengembangan Industri, Pertanian, Pariwisata yang Mendorong Perdagangan dan Jasa	Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial melalui Pemantapan Pembangunan yang Berkualitas dan Berdaya Saing
--	--	--

Untuk melihat keterkaitan yang lebih terperinci sasaran antara pemerinatah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.5 Konsistensi Prioritas/Sasaran Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan industri, pariwisata, dan investasi • Reformasi sistem kesehatan nasional • Reformasi sistem jaring pengaman nasional • Reformasi sistem ketahanan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Industri • Pengembangan Pertanian • Pengembangan Pariwisata • Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan • Pengembangan SDM yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang; • Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan; • Pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna; • Pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan
---	---	---

Tahun 2021 merupakan tahun transisi pada perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis. Masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis berakhir pada tahun 2020. Karena itu, penyusunan RKPD 2021 ini dibuat dengan mengacu pada tahun transisi 2021 sebagaimana yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021. Sementara itu, perencanaan pada tingkat Provinsi Riau, tahun 2021 merupakan pelaksanaan Tahun ke-2 RPJMD 2020-2025, demikian pula dengan RPJM Nasional. Konsistensi rencana



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

pembangunan tahun 2021 antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bengkulu adalah pada :

- 1) Pembangunan ekonomi;
- 2) Pembangunan sumberdaya manusia; dan
- 3) Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Konsistensi antara isu strategis dan sasaran pokok (prioritas) pembangunan Kabupaten Bengkulu tahun 2021 dapat dilihat pada tabel II.6 berikut ini.

Tabel II.6 Konsistensi Isu Strategis dan Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021

Percepatan Pewujudan Kualitas Aksesibilitas Wilayah, Penataan Pemukiman dan Perumahan untuk Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang
Pengelolaan Potensi Sumberdaya Ekonomi dan Kinerja Perekonomian yang Dapat Menyumbang Pertumbuhan Ekonomi	Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan
Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan	Pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna
Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan	Pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan

Isu strategis yang bersumber dari periodisasi RPJMD 2016-2021, di tahun 2021 ini diupayakan penyelesaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu dengan program pembangunan yang terfokus pada sejumlah prioritas pembangunan.

Sekalipun munculnya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan wabah tersebut masih belum selesai di Indonesia hingga tahun 2021, isu-isu strategis pembangunan tersebut masih dipandang relevan dengan permasalahan yang muncul sebagai *post major probleme* Nasional yang berdampak hingga ke tataran individu di Indonesia. Disebabkan pandemi ini, derajat kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kinerja sektor-sektor penyumbang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sangat terganggu. Berkembangnya pandemi yang berdampak pada pembatasan kegiatan masyarakat guna mengurangi penyebaran Covid_19, menyebabkan meningkatnya pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkulu.

Prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu pada perubahan tahun 2021, masih relevan dengan kondisi yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu, dikarenakan prioritas-prioritas tersebut diarahkan kepada fokus persoalan penanganan Covid-19 dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sepanjang tahun 2021. Dikarenakan RKPD merupakan turunan/fokus dari RPJMD untuk setiap tahun pelaksanaan dari periode RPJMD, maka perlu dilihat konsistensi antara sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2021 dengan sasaran



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021 seperti terlihat pada tabel II.7 berikut ini :

Tabel II.7 Konsistensi Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021

Pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang	Meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah
Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum
Pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna	Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya Daya Saing SDM
Pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan;	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah Meningkatnya nilai investasi
	Meningkatnya kesejahteraan petani

Prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu yang didukung dengan program-program pembangunan pada perubahan RKPD 2021 selain disiapkan untuk penyelesaian isu-isu strategis pembangunan pada tahun transisi perodesasi RPJMD Kabupaten Bengkulu 2016-2021 juga disiapkan untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid_19 serta pengamanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Bengkulu selama masa pandemi tahun 2021, diantaranya berfokus kepada :

- (1) Pencegahan penyebaran Covid_19 berfokus kepada pemenuhan target vaksinasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkulu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- (2) Penguatan pembiayaan prasarana dan sarana untuk penanganan pasien Covid-19 baik yang melakukan isolasi mandiri maupun yang dirawat di RSUD Kecamatan Bengkulu dan RSUD Kecamatan Mandau;
- (3) Pengamanan jaring sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pembatasan kegiatan perekonomian masyarakat khususnya pada sektor-sektor perdagangan dan jasa perkotaan; dan
- (4) Pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat di perdesaan dan pinggiran wilayah perkotaan melalui kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak berputarnya roda perekonomian masyarakat selama pandemi Covid-19.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 merupakan bagian akhir dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021. Program dan kegiatan yang dituangkan berdasarkan skala prioritas pencapaian visi dan misi daerah yang juga merupakan akumulasi berbagai aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB III

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

**3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

Pada hakekatnya anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan adanya anggaran pada setiap daerah di seluruh Indonesia yang dikelola dengan baik dan transparan maka tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat akan tercapai sebagai mana mestinya. Penyelenggaraan urusan Pemerintah akan terlaksana dengan optimal apabila diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Tahun Anggaran 2021 Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu setelah perubahan sebesar Rp3.594.498.516.273,70 (Tiga Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tujuh Puluh Sen), terdiri dari pendapatan daerah Rp3.443.486.942.467,70 ditambah penerimaan pembiayaan Rp151.011.573.806,00.

APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp344.444.325.365,00, dana Transfer ditargetkan sebesar Rp3.014.118.217.102,70 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan sebesar Rp84.924.400.000,00. Sementara itu belanja dianggarkan sebesar Rp3.594.498.516.273,70 terdiri dari Belanja Operasi Rp2.430.196.251.004,70, Belanja Modal sebesar Rp745.222.567.165,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.248.534.272,00 serta Transfer Rp414.831.163.832,00. Untuk penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp151.011.573.806,00 sementara pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp0,00.

Realisasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selama Tahun Anggaran 2021 secara ringkas dapat digambar pada Tabel III.1.

Tabel III.1.

Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021

(dalam jutaan)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
I. Pendapatan	3.443.486	4.321.920	878.415	25,51
I.1 Pendapatan Asli Daerah	344.444	284.228	(60.215)	(17,48)
I.2 Pendapatan Transfer	3.014.118	3.955.128	941.010	31,22
I.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	84.924	82.544	(2.379)	(2,80)
II. Belanja	3.594.498	3.292.951	301.547	8,39
II.1 Belanja Operasi	2.430.196	2.199.493	230.702	9,49



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selsih	
			Rp	%
II.2 Belanja Modal	745.222	679.492	65.730	8,82
III.3 Belanja Tak Terduga	4.248	0	4.248	100
IV. Transfer	414.831	413.964	866	0,21
Surplus/Defisit	(151.011)	1.028.951	1.179.962	(781,37)
III. Pembiayaan	151.011	151.011	0	0,00
III.1 Penerimaan	151.011	151.011	0	0,00
III.2 Pengeluaran	0	0	0	0,00
SILPA Tahun Berjalan	0	1.179.962	1.179.962	0,00

Tabel III.1 merupakan ringkasan dari Realisasi Anggaran dalam jutaan rupiah, dengan penjelasan sebagai berikut, untuk Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp3.443.486.942.467,70 dengan realisasi sebesar Rp4.321.902.433.413,72 atau 125,51%. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk lebih jelas dan juga sebagai data pembandingan tentang posisi Pendapatan Daerah mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, digambarkan berupa Tabel, hal ini dilakukan guna mempermudah dalam membaca dan memahami isi laporan yang disajikan. Berikut digambarkan tabel dan penjelasan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan beserta realisasi dan persentase perkembangannya.

a. PENDAPATAN

Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas.

1) Pendapatan Asli Daerah

Tabel III.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 s.d. 2021
(dalam juta rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2016	335.584	199.026
2	2017	373.540	271.149
3	2018	444.510	319.280
4	2019	429.370	226.245
5	2020	306.842	251.925
6	2021	344.444	284.228

Secara keseluruhan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 baik target maupun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu mengalami kenaikan kecuali ada penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Untuk Tahun Anggaran 2021 kenaikan target sebesar Rp37.601.935.216,77 atau 12,25% yaitu Rp344.444.325.365,00 dari



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

tahun 2020 sebesar Rp306.842.390.148,23 Dan realisasi tahun 2021 sebesar Rp284.228.993.973,72 terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2020 yang realisasinya sebesar Rp251.925.869.915,53 atau 12,83%.

Dilihat dari realisasi PAD Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp72.838.944.937,98 atau 36,60% dibanding realisasi Tahun 2016. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan Rp. 47.414.915.184,03 atau 17,44% dibandingkan realisasi tahun 2017. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp93.034.626.359,89 atau 29,14% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Pada tahun 2020 sebesar Rp251.925.869.915,53 terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2019 yang realisasinya sebesar Rp226.245.884.732,22.

2) Pendapatan Dana Transfer

Target dan realisasi dana transfer dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, digambarkan dengan tabel dan penjelasan secara rinci guna mempermudah membaca dan memahaminya.

Tabel III. 3

Perkembangan Dana Transfer Tahun Anggaran 2016 s.d. 2021

(dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2016	3.409.853	2.639.454
2	2017	3.536.299	2.909.490
3	2018	3.055.965	3.040.447
4	2019	3.385.824	3.463.146
5	2020	2.538.339	2.573.597
6	2021	3.014.118	3.955.128

Dana Transfer Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp3.014.118.217.102,70 dan target Tahun 2020 sebesar Rp2.538.339.433.269,00, terdapat kenaikan target dari tahun sebelumnya sebesar Rp475.778.783.833,10 atau 18,74%.

Realisasi Dana Transfer tahun 2021 sebesar Rp3.955.128.529.440,00 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2.573.597.479.818,49 mengalami kenaikan sebesar Rp1.381.531.049.621,51 atau 53,68%. Realisasi Dana Transfer tahun 2020 sebesar Rp2.573.597.479.818,49 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.463.146.359.212,47 mengalami penurunan sebesar Rp889.548.879.393,98 atau 25,69%. Realisasi Dana Transfer tahun 2019 sebesar Rp3.463.146.359.212,47 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3.040.447.453.438,88 mengalami kenaikan sebesar Rp422.698.905.773,59 atau 13,90%. Realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 81.530.369.888,94 atau 2,76% dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp 2.909.490.189.881,00. Realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 270.035.686.625,06 atau 10,23% dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp 2.639.454.503.255,94.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021, mencakup beberapa ketentuan antara lain:

- 1) Hibah;
- 2) Dana darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mulai Tahun Anggaran 2013, Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I berupa Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota dimana Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah
- Pendapatan Dana Darurat
- Pendapatan Lainnya

Untuk mempermudah membaca dan memahami perkembangan lain-lain pendapatan yang sah berikut disajikan dengan tabel, grafik dan penjelasan secara rinci.

Tabel III.4
Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2021

(dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2016	44.069	42.118
2	2017	52.315	49.426
3	2018	0.00	0.00
4	2019	86.287	85.045
5	2020	92.243	91.869
6	2021	84.924	82.544

Sebagaimana yang digambarkan pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut, Lain-lain pendapatan yang sah tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp84.924.400.000,00 dan target Tahun 2020 sebesar Rp 92.243.856.470,00, terdapat penurunan target dari tahun sebelumnya sebesar Rp 7.319.456.470,00 atau 7,93%.

Realisasi Lain-lain pendapatan yang sah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.308.436.287,94 atau 17,35%, dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp49.426.893.668,94 atau 100%. Dari tahun 2018 sampai dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp85.045.520.000 atau 100%, tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.824.360.000,00 atau 8,02%, dan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp9.324.970.000,00 atau 10,15%.

b. BELANJA

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan membagi jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas : belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Perbedaan jenis belanja tersebut sangat signifikan, sehingga untuk menghasilkan laporan berupa laporan realisasi anggaran harus dilakukan konversi dari kode rekening ke kode akun.

Tahun Anggaran 2021 belanja ditargetkan sebesar Rp3.594.498.516.273,70 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.159.516.275.514,20, terdapat kenaikan target dari tahun sebelumnya sebesar Rp434.982.240.759,50 atau 13,77%. Untuk tahun anggaran 2021 realisasi belanja sebesar Rp3.292.951.158.157,36 dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi belanja sebesar Rp2.988.472.251.553,84, terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar Rp301.547.358.116,34 atau 8,39%. Perkembangan belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak terduga dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, dapat digambarkan dan dijelaskan melalui tabel sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Tabel III.5
Perkembangan Belanja Operasi Tahun
Anggaran 2016 s.d. 2021

(Dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2016	2.822.151	2.373.545
2	2017	2.541.067	2.234.571
3	2018	2.070.115	1.846.310
4	2019	2.374.493	2.191.978
5	2020	2.079.598	1.981.293
6	2021	2.430.196	2.199.493

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp2.430.196.251.004,70 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.079.598.552.265,06, terdapat kenaikan target sebesar Rp350.597.698.739,64 atau 16,86%, Realisasi belanja operasi tahun 2021 sebesar Rp2.199.493.917.121,94, dibandingkan dengan realisasi Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

2020 sebesar Rp1.981.293.374.799,00, terdapat kenaikan realisasi belanja operasi sebesar Rp230.702.333.882,76 atau 9,49%.

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat perkembangan anggaran dan realisasi Belanja Operasi dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 hampir setiap tahun mengalami penurunan, kecuali tahun 2019 dan tahun 2021.

2) Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Untuk Tahun Anggaran 2021 seperti tahun sebelumnya, juga ada refocussing dan realokasi anggaran Belanja Modal untuk penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Persentase belanja modal dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2016 sebesar 30,12%. Untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 35,68%, Tahun Anggaran 2018 sebesar 28,18%, Tahun Anggaran 2019 sebesar 90,99%, Tahun Anggaran 2020 sebesar 17,72% dan Tahun Anggaran 2021 sebesar 20,73%. Perkembangan belanja modal digambarkan dengan tabel dan penjelasan terinci sebagai berikut:

Tabel III.6
Perkembangan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 s.d. 2021
(dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2016	1.221.641	765.742
2	2017	1.417.368	982.284
3	2018	982.172	903.407
4	2019	1.217.603	1.108.175
5	2020	559.891	500.329
6	2021	745.222	679.492

Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp745.222.567.165,00, dibandingkan dengan target belanja modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 559.891.175.437,55, terdapat kenaikan target belanja modal sebesar Rp185.331.391.727,45 atau 33,10%. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp679.492.555.913,42 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 500.329.662.982,84, terdapat kenaikan realisasi belanja modal sebesar Rp179.162.892.930,58 atau 35,81%.

Perkembangan realisasi belanja modal dari tahun ketahun dapat dijelaskan sebagai berikut: dari tahun 2016 sampai tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

mengalami kenaikan Rp216.541.501.250,05 atau 28,28%, dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan Rp78.877.097.909,68 atau 8,03%, dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp204.768.232.108,67 atau 22,67%, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 607.845.917.912,15 atau 54,85%.

Pembiayaan daerah merupakan salah satu pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus, Tahun Anggaran 2021 penerimaan pembiayaan sebesar Rp151.011.573.806,55 direalisasikan sebesar 100,00%, realisasi penerimaan pembiayaan tersebut merupakan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp151.011.573.806,55. Sedangkan alokasi untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00.

Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2021 dianggarkan defisit sebesar Rp151.011.573.806,55 namun terjadi surplus anggaran sebesar Rp1.028.951.275.256,36 realisasi pendapatan lebih besar dibanding belanja. Sedangkan pembiayaan netto dianggarkan sebesar Rp Rp151.011.573.806,55 dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp Rp151.011.573.806,55 sehingga pembiayaan netto ditambah dengan surplus anggaran terdapat SiLPA sebesar Rp1.179.962.849.062,91.

3.2 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Secara umum faktor-faktor penunjang dalam pencapaian target pendapatan Tahun 2021 antara lain:

- a. Bertambahnya sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- b. Adanya peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pembinaan, baik secara eksternal maupun internal atau peningkatan jenjang pendidikan;
- c. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Penyebarluasan informasi tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi semakin memadai; dan
- e. Adanya rapat evaluasi yang dilaksanakan setiap bulannya dengan memanggil seluruh SKPD yang langsung dipimpin oleh Bupati.

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target pendapatan Tahun 2021 antara lain:

- a. Penyebaran virus covid-19 yang begitu masif, walaupun diperkirakan pada tahun 2021 akan dapat diatasi, namun ekses-ekses dari dampak penyebarannya akan tetap dirasakan dan mengganggu pertumbuhan ekonomi;
- b. Masih rendahnya manajemen dan tata kelola pendapatan asli daerah;
- c. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- d. Peremajaan data dan validasi data objek pajak dan objek retribusi belum memadai;
- e. Pengawasan dan evaluasi dari pejabat terkait terhadap pemungutan pajak dan retribusi kurang optimal; dan
- f. Sosialisasi oleh pejabat terkait terhadap Peraturan Daerah tentang pemungutan pajak dan retribusi belum Optimal;
- g. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi kurang maksimal oleh setiap SKPD penerima pajak atau retribusi;
- h. Pertambahan wajib pajak dan wajib retribusi baru untuk sebagian jenis pajak/retribusi tidak signifikan terutama wajib pajak reklame dan wajib pajak PBB;
- i. Kapasitas yang tersedia tidak mengalami pertambahan sehingga potensi objek retribusi yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal;
- j. Kurangnya kreatifitas dan inovasi dari SKPD penerima pajak dan retribusi untuk menggali potensi-potensi penerimaan daerah;
- k. Birokrasi yang berbelit dan proses yang lama membuat wajib pajak dan wajib retribusi mengurungkan niatnya untuk membayar pajak dan retribusi;
- l. Kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Instansi vertikal lainnya;
- m. Sistem aplikasi pengelolaan pendapatan dan retribusi yang digunakan belum sepenuhnya menghasilkan laporan-laporan yang diinginkan;
- n. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah berkaitan dengan pajak dan retribusi; dan
- o. Kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia terutama aparatur pengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memadai.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

**BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan entitas pelaporan yang melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mengkonsolidasi Laporan Keuangan setiap entitas akuntansi dalam hal ini adalah SKPD dan PPKD (BUD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis sebelum disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu direviu oleh Pengawas internal yakni Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/ITDA-SET/III/2022/246.

Jumlah Entitas Akuntansi yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2021 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk 47 SKPD menyampaikan Laporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan pada SKPD masing-masing, kemudian disampaikan ke Bupati Bengkalis (entitas pelaporan) melalui Bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 menggunakan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Bengkalis. Basis Akrual digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas.

4.3 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) khusus Lampiran I yang mengatur pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di seluruh Indonesia. Kabupaten Bengkalis dalam menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 mengacu pada standar tersebut. Sebagai implementasi dari peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan perubahan keempat atas Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Didalam Kebijakan Akuntansi Nomor 93 Tahun 2020 tersebut telah mengakomodir basis akrual sebagaimana yang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

diamanahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2015 Kementerian Dalam Negeri mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, yang diterbitkan tanggal 18 November 2015. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tersebut tentunya akan berpengaruh pada kebijakan akuntansi yang telah disusun. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis merevisi kebijakan akuntansi dengan mencabut kebijakan akuntansi yang sebelumnya. Perubahan kebijakan tersebut dikarenakan adanya beberapa perubahan terhadap kebijakan akuntansi seperti kebijakan tentang aset tetap, investasi non permanen (dana bergulir) dan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat selama ini guna menciptakan laporan keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selanjutnya pada tahun 2016, kembali dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016. Perubahan ini untuk mengakomodir Perubahan Pencatatan terhadap Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah dari Pendapatan Pajak Tipe B yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment*) menjadi Pendapatan Pajak Tipe A yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah), kemudian pada tahun 2018 dilakukan lagi perubahan terhadap kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018. Perubahan ini untuk mengakomodir temuan atas LHP BPK mengenai waktu perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud dan juga penghapusan piutang tak tertagih. Selanjutnya untuk mengakomodir adanya perubahan masa manfaat dan perubahan kodefikasi barang milik daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang pengelompokan dan kodefikasi barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali melakukan perubahan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2020.

Tanggung jawab penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berada pada entitas pelaporan yakni Bupati Bengkalis, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari setiap entitas akuntansi atau SKPD termasuk laporan keuangan PPKD.

Komponen-komponen yang harus disusun dan disajikan oleh setiap entitas akuntansi (SKPD dan PPKD) dalam satu set Laporan Keuangan Pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen yang harus disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan (Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis) dalam satu Laporan Keuangan Pokok adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan Keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dan informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi.

Setiap komponen Laporan Keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a. Nama SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu;
- b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
- c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d. Mata uang pelaporan adalah rupiah; dan
- e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu berupaya untuk menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang lebih baik.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 berupaya menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang baik sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 22 kebijakan. Berikut ini dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan tentang pengakuan, pengukuran, pencatatan/penyajian dan pengungkapan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

4.3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/defisit-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan pada Entitas Pelaporan yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. LP-SAL memberikan informasi tentang kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun pelaporan sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Investasi jangka pendek;
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi jangka panjang;
- 6) Aset tetap;
- 7) Kewajiban jangka pendek;
- 8) Kewajiban jangka panjang; dan
- 9) Ekuitas.

Informasi yang disajikan dalam Neraca mengungkapkan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas disusun oleh entitas pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktifitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas transitoris.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

e. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- 4) Pos luar biasa, bila ada; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; dan
- 4) Ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

- 1) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 2) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- 3) Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah; dan
- 4) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

h. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- 1) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- 2) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- 3) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

4.3.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tujuan kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

b. **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa terdiri atas Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Penyusutan dan Beban Perjalanan Dinas. Beban Barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS.

Beban Barang diakui ketika timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Metode pencatatan persediaan yaitu metode perpetual dan periodik. Metode perpetual menuntut dilakukannya pemutakhiran setiap terjadi perubahan posisi akun persediaan. Metode periodik tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian persediaan, jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

c. **Hibah dan Bantuan Sosial**

Beban Hibah dan Bantuan SKPD dalam bentuk barang diakui pada saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial.

Beban Hibah dan Bantuan Sosial menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan Beban dan pendekatan Aset.

4.3.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08 TENTANG BELANJA

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD; dan
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Rincian belanja per SKPD;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09 TENTANG PEMBIAYAAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan hanya dapat dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dengan demikian akuntansi pembiayaan tidak diperlukan di SKPD.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10 TENTANG KAS DAN SETARA KAS

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kas yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, missal Bendahara Pengeluaran.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah; dan
- c. Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
- b. Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca pemerintah daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

Kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah. Kas dijurnal di sebelah debit jika bertambah dan dijurnal di sebelah kredit jika berkurang.

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

4.3.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11 TENTANG PIUTANG

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi piutang yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Piutang pemerintah daerah karena pungutan adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang yang termasuk dalam piutang yang timbul karena peristiwa pungutan adalah:

a. Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten terdiri:

- 1) Pajak hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak hiburan;
- 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak penerangan jalan;
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 7) Pajak parkir;
- 8) Pajak air tanah;
- 9) Sarang burung walet;
- 10) PBB pedesaan dan perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi.

b. Piutang Retribusi

Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian izin atau jasa atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Jasa umum;
- 2) Jasa usaha; dan
- 3) Perizinan tertentu.

c. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Piutang PAD lainnya terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang yang berasal dari pungutan diakui pada saat munculnya klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Secara umum, pengakuan piutang yang berasal dari pungutan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Piutang dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.

Piutang yang timbul karena peristiwa perikatan terdiri atas:

- a. Piutang karena Pemberian Pinjaman
Piutang pemerintah daerah karena pemberian pinjaman adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak lain kepada pemerintah daerah karena pemerintah daerah telah memberikan pinjaman kepada pihak tersebut. Contoh piutang ini adalah piutang kepada BUMD karena BUMD meminjam sejumlah uang kepada Pemda. Rencana realisasi penerimaan kas atas piutang ini dianggarkan pada bagian penerimaan pembiayaan (bukan pendapatan) dalam APBD. Dengan demikian, jika piutang ini direalisasikan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan (bukan pendapatan).
- b. Piutang karena Penjualan
Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik daerah antara lain melalui penjualan. Penjualan barang ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara cicilan atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran.
- c. Piutang karena Kemitraan
Pemerintah daerah dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kemitraan ini antara lain Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama. Piutang yang timbul diakui sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Piutang karena Pemberian Fasilitas

Piutang pemerintah daerah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain, misalnya penyewaan gedung kantor, rumah dinas dan alat-alat berat.

Pengakuan piutang karena perikatan dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan yang berasal dari perikatan. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang berasal dari perikatan seperti pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian Fasilitas/Jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Transfer dana bagi hasil dari provinsi dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan yang akan dibagihasilkan. Apabila alokasi definitive telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

Tuntutan ganti rugi (TGR) adalah suatu tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung pemerintah daerah menderita kerugian.

Kerugian pemerintah daerah adalah berkurangnya kekayaan pemerintah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendahara dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian pemerintah daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, hasil verifikasi



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi, dan informasi dari media massa dan media elektronik.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/SK Pembebanan/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/SK Pembebanan/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Tidak semua piutang pemerintah daerah dapat direalisasikan karena belum tentu semua wajib bayar dapat melunasi kewajibannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dengan membuat penyisihan atas piutang tidak tertagih.

Pada prinsipnya, semakin lama umur piutang maka semakin besar pula kemungkinan tidak tertagihnya. Dengan demikian, semakin lama umur piutang maka semakin besar pula penyisihan piutang tidak tertagih yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar;
- b. Kualitas Kurang Lancar;
- c. Kualitas Diragukan;
- d. Kualitas Macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesement*) dilakukan dengan ketentuan:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assesment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Pajak dapat dipilah berdasarkan karakter sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus Retribusi dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan kualitas Piutang Lain-lain PAD yang sah dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Besarnya penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

**Tabel 4.1
Besaran Penyisihan Piutang Setiap Tahun**

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0.5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Piutang pemerintah daerah yang tidak tertagih dapat dihapus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsure pengurang dari piutang yang bersangkutan. Setelah disajikan di Neraca, informasi mengenai piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut harus menjelaskan posisi piutang pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal-usul piutang.

4.3.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12 TENTANG BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi Beban Dibayar Dimuka yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Beban Dibayar Dimuka adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah Daerah telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak ketiga tetapi barang/jasa dari pihak ketiga tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikati oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi Beban Dibayar Dimuka dapat berbentuk pembayaran atas gaji dan tunjangan dibayar dimuka, pembayaran jasa atau sewa dibayar dimuka, atau pembayaran biaya pemeliharaan yang dibayar dimuka.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat terjadi pengeluaran kas terhadap belanja yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Pada saat penyusunan laporan keuangan (akhir tahun anggaran atau semesteran), dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran belanja yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka. Penyesuaian harus dilakukan untuk mengakui besarnya biaya yang menjadi beban tahun pelaporan yang dihitung dari sejak pengeluaran belanja sampai dengan tanggal pembuatan laporan keuangan (cut off).

Beban Dibayar Dimuka diukur sebesar nilai nominal belanja yang dikeluarkan dari kas.

Beban Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok aset sebagai bagian dari Aset Lancar.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

4.3.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13 TENTANG PERSEDIAAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

- a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
- b. Instrumen keuangan.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, misalnya barang pakai habis seperti Alat Tulis Kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas seperti komponen bekas.
- b. Branga atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
 - e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f. Pita cukai dan leges;
 - g. Bahan baku;
 - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga pokok produk siapa bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan:

- a. Metode sistematis berupa FIFO (*First In First Out* – Masuk Pertama Keluar Pertama);
- b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pencatatan beban persediaan dilakukan dengan metode perpetual dan metode periodik.

Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Metode Perpetual ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di Dinas Pertanian.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*), yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Metode Periodik digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di SKPD.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan: kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.3.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.14 TENTANG INVESTASI

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

- a. Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
- b. Investasi dalam perusahaan asosiasi;
- c. Kerja sama operasi; dan
- d. Investasi dalam properti.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrument ekuitas.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c. Berisiko rendah.

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah, karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- a. Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- b. Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana kooperatif.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Penerimaan dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerimaan dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 4) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*)

Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas Lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas Kurang Lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- c. Kualitas Diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan;
- d. Kualitas Macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam property dan kerja sama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalaminya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek).
 - 1) Dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - 2) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

- a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

b. Investasi non permanen:

- 1) Investasi dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
- 2) Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan;
- 3) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh diakhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari aset lancar.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Investasi jangka panjang disajikan sebagai akun Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

4.3.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15 TENTANG ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan aset tetap harus memenuhi kriteria bahwa suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Sedangkan biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Untuk biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Apabila dalam pembelian terdapat potongan dagang dan rabat maka setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Jika aktiva tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Kapitalisasi biaya ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraph diatas dan dengan suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Pengadaan aset tetap pada tahun berjalan sudah dilakukan penyusutan sejak aset tetap tersebut dicatat ke dalam Pencatatan Barang Milik Daerah maupun ke dalam pencatatan akuntansi. Terhadap aset tetap tersebut dilakukan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

proses penyusutan dihitung sebulan penuh. Penyajian laporan penyusutan dilakukan tiap semester dan tahunan.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
- d. Aset Tetap Lainnya berupa Buku/Barang Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan kecuali benda-benda bersejarah.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tetap *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk diproses TGR;
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
- c. Aset Tetap berupa Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, hewan ternak dan tumbuhan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan berupa benda-benda bersejarah.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud di atas:

- a. Direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya;
- b. Tetap dicantumkan dalam Laporan Pengelola Barang/Laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD, dan Negara; dan
- c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal proses penghapusan telah selesai, maka aset tersebut dihapus dari aset lainnya.

Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan proses TGR telah selesai, namun dikemudian hari ditemukan kembali dan setelah diproses ternyata masih diperlukan oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap aset tersebut:

- a. Ditambahkan ke dalam Aset Tetap; dan
- b. Disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud diatas, nilai akumulasi penyusutannya disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya sampai saat aset tersebut ditemukan.

Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2021 merupakan nilai perolehan yang dapat disusutkan.

Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud diatas tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca Pemerintah Daerah. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap.
- c. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tariff penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
- e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap.
- f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
- g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

4.3.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 16 TENTANG KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bias kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Ketentuan-ketentuan dalam standard ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

4.3.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17 TENTANG DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Klasifikasi dana cadangan berdasarkan tujuan pembentukannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk berdasarkan nilai yang dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti rekening Koran bank dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan atau dikapitalisasi ke dana cadangan, seperti: bunga deposito. Sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, seperti: biaya administrasi deposito. Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar hukum pembentukan dana cadangan;
- b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. Sumber dana cadangan;
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

4.3.18 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 18 TENTANG ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud;
- e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau sebesar daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Bangun, Kelola, Serah (BKS);
- b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Catatan:

Pada saat perolehan awal (pencatatan pertama kali) Aset Lain-lain BKS dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap yang dikerjasamakan. Pada akhir masa konsesi, nilai BKS dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan terjadi.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Catatan:

Pada saat perolehan awal (pencatatan pertama kali) Aset Lain-lain BSK dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap yang dikerjasamakan. Pada saat bangunan diserahkan dari pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah maka nilai BSK dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

a. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

b. *Lisensi dan franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

4.3.19 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 19 TENTANG KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancer utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman kewajiban perbankan dan kewajiban jangka panjang lainnya.

Kewajiban pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemerintah.

Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo, Tunggakan, Restrukturisasi dan Penghapusan Kewajiban akan diatur dalam regulasi tersendiri. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timba balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain dimasa depan.
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada diluar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge*)
Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pengukuran untuk kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

- a. Utang Pihak Ketiga
Pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Contoh pembangunan fasilitas atau peralatan oleh kontraktor sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, maka jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
- b. Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Utang Bunga
Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Kewajiban Lancar Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai.

Pengukuran untuk kewajiban jangka panjang:

a. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan

Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

b. Utang Pemerintah yang Dapat Diperjualbelikan

Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.

b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman.
 - 2) Modifikasi persyaratan utang.
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman.
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman.
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman.
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.3.20 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20 TENTANG KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun Saldo Ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang;
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Perlakuan terhadap kesalahan tidak berulang:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan regulasi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- b. Fungsi tersebut tetap ada.
- c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.3.21 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 21 TENTANG LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD), BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan kebijakan akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

4.3.22 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 22 TENTANG LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsure pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. Cakupan entitas pelaporan;
- c. Periode yang dicakup;
- d. Mata uang pelaporan; dan
- e. Satuan angka yang digunakan.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/Defisit dari operasi



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
- f. Pos Luar Biasa
- g. Surplus/Defisit-LO

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB V
PENJELASAN ATAS POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

5.1.1. Pendapatan

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
3.443.486.942.467,70	4.321.908.588.453,72	125,51	2.917.393.229.734,02	1.404.515.358.719,70

Sumber Pendapatan Kabupaten Bengkalis terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pusat (Dana Perimbangan), Pendapatan Transfer Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan Realisasi 2021 serta realisasi TA 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pendapatan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Asli Daerah	344.444.325.365,00	284.235.094.573,72	82,52	251.925.869.915,53	32.309.224.658,19
Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan	2.667.080.654.891,00	3.643.215.136.775,00	136,60	2.275.653.458.310,00	1.367.561.678.465,00
Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	196.952.531.000,00	165.099.615.167,00	83,82	166.857.936.000,00	(1.558.320.833,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	150.075.031.211,70	146.813.831.938,00	97,83	131.286.085.508,49	15.527.746.429,51
Lain-lain Pendapatan yang Sah	84.924.400.000,00	82.544.910.000,00	97,20	91.869.880.000,00	(9.324.970.000,00)
Jumlah	3.443.486.942.467,70	4.321.908.588.453,72	125,51	2.917.393.229.734,02	1.404.515.358.719,70

Realisasi Pendapatan Kabupaten Bengkalis TA 2021 adalah sebesar Rp4.321.902.433.413,72 atau 125,51% dari nilai anggaran sebesar Rp3.443.486.942.467,70. Jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2.917.393.229.734,02 mengalami kenaikan sebesar Rp1.404.509.203.679,70 atau 48,14%.

Masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
344.444.325.365,00	284.235.094.573,72	82,52	251.925.869.915,53	32.309.224.658,19

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis TA 2021 adalah sebesar Rp284.228.993.973,72 atau 82,52% dari nilai anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp251.925.869.915,53 mengalami kenaikan sebesar Rp32.303.124.058,19 atau 12,82%.

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Pajak Daerah	79.095.000.000,00	82.355.513.611,00	104,12	63.664.818.589,25	18.690.695.021,75
Pendapatan Retribusi Daerah	18.794.375.000,00	10.329.501.238,00	54,96	8.956.066.385,34	1.373.434.852,66
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	33.292.209.969,00	33.292.209.969,00	100,00	20.920.504.935,00	12.371.705.034,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	213.262.740.396,00	158.257.869.755,72	74,21	158.384.480.005,94	(126.610.250,22)
Jumlah	344.444.325.365,00	284.235.094.573,72	82,52	251.925.869.915,53	32.309.224.658,19



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2021 dan TA 2020 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
79.095.000.000,00	82.355.513.811,00	104,12	63.664.818.589,25	18.690.695.021,75

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu. Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 serta realisasi TA 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Pendapatan Pajak Daerah

Jenis Pajak	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=e/b	e	f=c-a
Pajak Hotel	3.050.000.000,00	2.771.752.685,00	90,88	1.509.075.439,25	1.262.677.245,75
Pajak Restoran	8.800.000.000,00	11.220.737.099,00	127,51	8.781.178.472,00	2.439.618.627,00
Pajak Hiburan	745.000.000,00	490.353.540,00	65,82	672.591.600,00	(182.238.060,00)
Pajak Reklame	1.800.000.000,00	768.087.825,00	42,67	449.235.275,00	318.862.550,00
Pajak Penerangan Jalan	36.000.000.000,00	37.354.844.432,00	103,76	33.167.031.830,00	4.187.812.602,00
Pajak Parkir	500.000.000,00	312.335.167,00	62,47	286.723.466,00	25.611.701,00
Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	607.489.510,00	60,75	557.236.551,00	50.262.959,00
Pajak Sarang Burung Walet	1.200.000.000,00	497.533.239,00	41,46	336.843.119,00	160.690.120,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	4.178.288.650,00	139,28	3.936.415.145,00	241.873.505,00
Pajak Bagi Hasil dari PBB P2	18.500.000.000,00	19.844.933.613,00	107,27	9.680.396.732,00	10.164.536.881,00
Pajak BPHTB	4.500.000.000,00	4.309.087.851,00	95,76	4.288.090.960,00	20.996.891,00
Jumlah	79.095.000.000,00	82.355.513.811,00	104,12	63.664.818.589,25	18.690.695.021,75

Dengan melihat tabel diatas menunjukkan Penerimaan pajak daerah TA 2021 adalah sebesar Rp82.355.513.611,00 atau 104,12% dari anggaran. Sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp63.664.818.589,25 penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp18.690.695.021,75 atau 29,36%. Pendapatan Pajak Daerah ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pajak Reklame, Pajak Bagi Hasil dari PBB P2 dan Pajak Air bawah tanah menggunakan metode Official Assesment sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN, Pajak Pengambilan Bahan Galian C, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak BPHTB menggunakan metode Self Assesment sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu nomor 11 tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu nomor 1 tahun 2019 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
18.794.375.000,00	10.329.301.238,00	54,96	6.996.066.385,34	1.373.434.852,66

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu tahun 2021 dipungut berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

pajak dan retribusi serta diatur pada peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum, Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Realisasi Pendapatan retribusi sampai dengan TA 2021 sebesar Rp10.328.501.238,00 atau 54,96% dari anggaran sebesar Rp18.794.375.000,00. Jika dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp8.956.066.385,34 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.372.434.852,66 atau 15,32% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Jasa Umum	6.536.375.000,00	4.527.496.700,00	81,78	3.834.835.750,00	692.660.950,00
Jasa Usaha	12.453.000.000,00	4.793.185.263,00	38,49	4.551.142.399,00	242.042.864,00
Perizinan Tertentu	805.000.000,00	1.008.819.275,00	125,32	570.088.236,34	438.731.038,66
Jumlah	18.794.375.000,00	10.328.501.238,00	54,86	8.956.066.385,34	1.372.434.852,66

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa umum dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.5 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Kesehatan	880.000.000,00	557.204.700,00	63,32	0,00	557.204.700,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.300.000.000,00	1.137.056.000,00	87,47	1.161.435.000,00	(24.379.000,00)
Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	800.000.000,00	627.250.000,00	78,41	487.575.000,00	139.675.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	1.448.109.500,00	72,41	1.315.189.500,00	131.920.000,00
Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran	55.125.000,00	38.627.500,00	70,07	41.891.000,00	(3.263.500,00)
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	101.250.000,00	168.056.000,00	165,98	133.005.000,00	35.051.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	210.853.000,00	(210.853.000,00)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	551.193.000,00	137,80	483.887.250,00	67.305.750,00
Jumlah	5.536.375.000,00	4.527.496.700,00	81,76	3.834.835.750,00	692.660.950,00

Anggaran pendapatan retribusi jasa umum selama TA 2021 sebesar Rp5.536.375.000,00 terealisasi sebesar Rp4.527.496.700,00 atau 81,78%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.6 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	1.420.000.000,00	349.035.000,00	24,58	293.260.000,00	55.775.000,00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/Per tokoan	510.000.000,00	469.082.000,00	91,97	211.840.000,00	257.222.000,00
Retribusi Terminal	35.000.000,00	7.899.000,00	22,57	8.536.000,00	(637.000,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa	200.000.000,00	148.340.000,00	74,17	121.195.000,00	27.145.000,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	25.000.000,00	11.915.000,00	47,66	16.895.000,00	(4.980.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000.000,00	3.619.944.263,00	36,20	3.603.566.399,00	16.377.864,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00	9.150.000,00	18,30	7.250.000,00	1.900.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	35.000.000,00	177.840.000,00	508,11	288.600.000,00	(110.760.000,00)
Retribusi Penyebrangan Air	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	12.453.000.000,00	4.793.185.263,00	38,49	4.591.142.399,00	(2.411.524.012,00)

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha TA 2021 sebesar Rp12.453.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.793.185.263,00 atau 38,49%.

Retribusi tidak mencapai 50% dari target anggaran tahun 2021 sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah

Hal ini dikarenakan adanya kasus virus Covid 19 yang berdampak pada kurangnya pemasukan pendapatan baik pada pemasukan retribusi pemakaian kekayaan daerah maupun retribusi tempat penginapan/pesangrahan/vila. Dan target yang ditetapkan pada tahun 2021 cukup tinggi.

2. Tidak tercapainya Retribusi Terminal dikarenakan :

Dari beberapa potensi pungutan retribusi yang ada di terminal, hanya retribusi dari angkot/oplet yang keluar/masuk terminal yang memberikan sumbangsih kepada PAD. Sementara dari sumber -sumber lain tidak ada realisasi pungutan.

Hal ini dikarenakan kurang representatifnya potensi/ letak terminal dengan pusat kegiatan ekonomi, sehingga tidak ada pihak-pihak yang mau memakai ruang, gedung ataupun tempat pada bagian terminal yang bisa dipungut retribusinya.

3. Tidak tercapainya Retribusi Tempat Khusus Parkir dikarenakan :

Dikarenakan lokasi tempat parkir tersebut dipergunakan untuk tempat antrian kendaraan penyeberangan menuju ke Kepulauan Riau. Dimana parkir tersebut dijadikan parkir inap kendaraan yang berada di Pelabuhan Air putih, Pelabuhan Sei.Sefari dan Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja (BSSR).

4. Tidak tercapainya Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Villa dikarenakan :

Target penerimaan retribusi tidak mencapai target karena kamar asrama yang terdapat di UPT BPSDM digunakan sebagai tempat karantina pasien yang terkena COVID-19 hingga pertengahan tahun 2021 setelah selesai dipakai untuk karantina, gedung BPSDM dilakukan Rehap Fisik di beberapa Ruangan yang sudah rusak berat, dan mulai Aktif dipakai bulan Oktober 2021

5. Tidak tercapainya Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan dikarenakan :

Adanya penyakit demam babi afrika ASF (African Swine Fever) sehingga sapi dari Sumatera utara dilarang didistribusikan keluar dari pulau Sumatera yang berakibatberkurangnya jasa retribusi rumah potong hewan dan adanya penjualan daging babi yang dijual secara online.

6. Tidak tercapainya Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dikarenakan :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belum normalnya aktivitas pelayaran dan tidak beroperasinya salah satu pelabuhan yaitu pelabuhan internasional Bandar Sri Setia Raja (BSSR) kecamatan Bantan.

7. Tidak tercapainya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dikarenakan :

Adanya pandemi Covid 19, tempat wisata khususnya selatbaru, sepi pengunjung, sehingga pendapatan kios-kios tidak memadai, akhirnya retribusi tidak dipungut.

8. Tidak tercapainya Retribusi Penyebrangan Air dikarenakan :

Saat ini kapal KMP. Tasik Gemilang dalam keadaan Docking, belum dapat diselesaikan proses dockingnya karena tidak ada rekanan yang berminat meskipun telah dilakukan tiga kali (3x) proses lelang. Hingga saat ini pun belum ada pihak ke-3 yang mengelola KMP. Tasik Gemilang.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu berhubungan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.7 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kesalahan/penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi izin mendirikan Bangunan	800.000.000,00	1.008.819.275,00	126,10	569.518.236,34	439.301.038,66
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi izin Trayek/ Kartu Pengawasan (KP)	0,00	0,00	0,00	570.000,00	(570.000,00)
Jumlah	805.000.000,00	1.008.819.275,00	125,32	570.088.236,34	438.731.038,66

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu TA 2020 sebesar Rp805.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.008.819.275,00 atau 125,32%. Retribusi perizinan tertentu yang tidak mencapai target anggaran TA 2021 adalah Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan dikarenakan kurangnya jumlah pengurusan izin trayek akibat adanya moda transportasi alternatif lainnya. Dan juga izin trayek ini sudah diambil alih oleh dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu.

OPD yang mengelola Pendapatan Retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Rincian Retribusi per OPD

OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kesalahan/penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Kesehatan	880.000.000,00	557.204.700,00	63,32	166.600.000,00	390.604.700,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.000.000.000,00	1.258.139.275,00	125,81	569.518.236,34	688.621.038,66
Dinas Pemadam Kebakaran	55.125.000,00	38.627.500,00	70,07	298.600.000,00	(249.972.500,00)
Dinas Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	1.137.056.000,00	87,47	483.887.250,00	653.168.750,00
Dinas Perhubungan	13.018.000.000,00	5.703.202.763,00	43,81	5.416.436.899,00	286.765.864,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik	400.000.000,00	551.193.000,00	137,80	555.698.000,00	(4.505.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	1.161.435.000,00	(1.161.435.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	50.000.000,00	9.150.000,00	18,30	16.895.000,00	(7.745.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perikanan	35.000.000,00	177.840.000,00	508,11	41.891.000,00	135.949.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	25.000.000,00	11.915.000,00	47,66	0,00	11.915.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	611.250.000,00	637.118.000,00	104,23	7.250.000,00	629.868.000,00
Sekretariat Daerah	1.360.000.000,00	235.790.000,00	17,34	239.390.000,00	(3.600.000,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	60.000.000,00	12.265.000,00	20,44	8.465.000,00	3.800.000,00
Jumlah	18.794.375.000,00	10.329.901.238,00	54,95	8.956.066.395,34	1.373.434.852,66

Realisasi akun pendapatan retribusi per OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

Tabel 5.9 Rincian Retribusi Dinas Kesehatan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Kesehatan	880.000.000,00	557.204.700,00	63,32	166.600.000,00	390.604.700,00
Jumlah	880.000.000,00	557.204.700,00	63,32	166.600.000,00	390.604.700,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 5.10 Rincian Retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	249.320.000,00	124,66	239.390.000,00	9.930.000,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	800.000.000,00	1.008.819.275,00	126,10	330.128.236,34	678.691.038,66
Jumlah	1.000.000.000,00	1.288.139.275,00	125,81	569.518.236,34	688.621.038,66

Dinas Pemadam Kebakaran

Tabel 5.11 Rincian Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	55.125.000,00	38.627.500,00	70,07	288.600.000,00	(249.972.500,00)
Jumlah	55.125.000,00	38.627.500,00	70,07	288.600.000,00	(249.972.500,00)

Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 5.12 Rincian Retribusi Dinas Lingkungan Hidup

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Pembersihan / Kebersihan	1.300.000.000,00	1.137.056.000,00	87,47	483.887.250,00	653.168.750,00
Jumlah	1.300.000.000,00	1.137.056.000,00	87,47	483.887.250,00	653.168.750,00

Dinas Perhubungan

Tabel 5.13 Rincian Retribusi Dinas Perhubungan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	800.000.000,00	627.250.000,00	78,41	487.575.000,00	139.675.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	1.448.109.500,00	72,41	1.316.189.500,00	131.920.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Terminal	35.000.000,00	7.899.000,00	22,57	8.536.000,00	(637.000,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	10.000.000.000,00	3.619.944.263,00	36,20	3.603.566.399,00	16.377.864,00
Retribusi izin Trayek	5.000.000,00	0,00	0,00	570.000,00	(570.000,00)
Retribusi Penyebrangan Air	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	13.010.000.000,00	5.703.202.763,00	43,81	5.416.436.399,00	286.765.864,00

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tabel 5.14 Rincian Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	551.193.000,00	137,80	555.698.000,00	(4.505.000,00)
Jumlah	400.000.000,00	551.193.000,00	137,80	555.698.000,00	-4.505.000,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Tabel 5.15 Rincian Retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	569.518.236,34	(569.518.236,34)
Jumlah	0,00	0,00	0,00	569.518.236,34	(569.518.236,34)

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 5.16 Rincian Retribusi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	50.000.000,00	9.150.000,00	18,30	16.895.000,00	(7.745.000,00)
Jumlah	50.000.000,00	9.150.000,00	18,30	16.895.000,00	(7.745.000,00)

Dinas Perikanan

Tabel 5.17 Rincian Retribusi Dinas Perikanan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan	35.000.000,00	177.840.000,00	508,11	41.891.000,00	135.949.000,00
Jumlah	35.000.000,00	177.840.000,00	508,11	41.891.000,00	135.949.000,00

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

Tabel 5.18 Rincian Retribusi Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	25.000.000,00	11.915.000,00	47,66	0,00	11.915.000,00
Jumlah	25.000.000,00	11.915.000,00	47,66	0,00	11.915.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 5.19 Rincian Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
--------	---------------	----------------	---	----------------	--------------------



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

a	b	c	d=c/b	e	f=c-a
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	101.250.000,00	168.056.000,00	165,98	0,00	168.056.000,00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	510.000.000,00	469.062.000,00	91,97	7.250.000,00	461.812.000,00
Jumlah	611.250.000,00	637.118.000,00	104,23	7.250.000,00	629.868.000,00

Sekretariat Daerah

Tabel 5.20 Rincian Retribusi Sekretariat Daerah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-a
Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	1.200.000.000,00	96.715.000,00	8,06	124.910.000,00	(28.195.000,00)
Retribusi jasa usaha tempat penginapan/ pesangrahan/ villa	160.000.000,00	139.075.000,00	86,92	114.480.000,00	24.595.000,00
Jumlah	1.360.000.000,00	235.790.000,00	17,34	239.390.000,00	(3.600.000,00)

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.21 Rincian Retribusi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-a
Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	20.000.000,00	3.000.000,00	15,00	1.750.000,00	1.250.000,00
Retribusi jasa usaha tempat penginapan/ pesangrahan/ villa	40.000.000,00	9.265.000,00	23,16	6.715.000,00	2.550.000,00
Jumlah	60.000.000,00	12.265.000,00	20,44	8.465.000,00	3.600.000,00

Dinas Pertanian

Tabel 5.22 Rincian Retribusi Dinas Pertanian

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-a
Retribusi Jasa usaha tempat rumah potong hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
33.292.209.969,00	33.292.209.969,00	100,00	20.920.504.935,00	12.371.705.034,00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari dividen sebesar Rp33.292.209.969,00 dari anggaran sebesar Rp33.292.209.969,00 atau 100,00% yang dibagikan oleh PT Bank Riau Kepri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sd TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23 Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
PT Bank Riau	33.292.209.969,00	33.292.209.969,00	100,00	20.920.504.935,00	12.371.705.034,00
Jumlah	33.292.209.969,00	33.292.209.969,00	100,00	20.920.504.935,00	12.371.705.034,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penerimaan pendapatan dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama TA 2021 adalah sebesar Rp33.292.209.969,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp33.292.209.969,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 20.920.504.935,00 menunjukkan adanya kenaikan penerimaan sebesar Rp12.371.705.034,00 atau 37,16%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dikelola oleh BPKAD Kabupaten Bengkalis.

Pendapatan deviden sebesar Rp33.292.209.969,00 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Tahun Buku 2020 Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri disingkat Bank Riau Kepri" tanggal 18 Juni 2020 nomor 21, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pupung Mulyantini, SH, M.H.

4. Lain-lain PAD yang sah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
213.262.740.396,00	158.257.869.755,72	74,21	158.384.480.005,940	(126.610.250,22)

Realisasi Lain-lain PAD yang sah TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	723.380.000,00	(723.380.000,00)
Hasil Penjualan BMD Tidak Dipisahkan	1.720.000.000,00	11.660.000,00	0,68	303.269.700,000	(291.609.700,00)
Jasa Giro Kas Daerah	6.000.000.000,00	9.534.038.489,00	158,90	3.256.110.350,000	6.277.928.139,00
Jasa Giro Pemegang Kas	3.500.000.000,00	580.952.906,00	16,60	830.541.708,000	(249.588.802,00)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.500.000,00	1.636.362,00	109,09	0,00	1.636.362,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	16.500.000.000,00	13.659.531.694,00	82,79	19.481.596.510,00	(5.822.064.816,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
Pendapatan Denda Pajak	221.340.000,00	228.740.417,00	103,34	91.501.945,00	137.238.472,00
Hasil Eksekusi Jaminan	19.776.137.966,00	52.621.357,00	0,27	7.147.958.273,22	(7.095.336.916,22)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	337.689.399,00	337,69	23.675.778,00	314.013.621,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	34.239.767.293,00	9.054.842.068,72	26,45	1.177.969.623,26	7.876.872.445,46
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	6.991.293.456,460	(6.991.293.456,46)
Pendapatan BLUD	111.980.000.000,00	110.382.472.561,00	98,57	104.360.891.054,000	6.021.581.507,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.306.712.000,00	14.287.755.300,00	82,56	13.888.868.100,000	398.887.200,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.917.283.137,00	121.529.202,00	6,34	107.423.508,000	14.105.694,00
Jumlah	213.262.740.396,00	158.257.869.755,72	74,21	158.384.480.005,940	(126.610.250,22)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp158.257.869.755,72 atau 74,21% dari nilai anggaran sebesar Rp213.262.740.396,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp158.384.480.005,94 menunjukkan adanya Penurunan sebesar Rp126.610.250,22 atau 0,08%. Pendapatan lain-lain PAD ini dikelola oleh beberapa OPD sebagai berikut.

a) Badan Pendapatan Daerah

Tabel 5.25 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Denda Pajak Hotel	7.900.000,00	2.853.304,00	36,12	2.697.912,000	155.392,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	42.000.000,00	26.226.125,00	62,44	14.398.842,000	11.827.283,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	4.640.000,00	1.576.764,00	33,98	1.726.572,000	(149.808,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame	3.000.000,00	3.037.798,00	101,26	1.154.540,000	1.883.258,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	18.700.000,00	303.724,00	1,62	9.279.159,000	(8.975.435,00)
Pendapatan Denda Pajak Parkir	3.000.000,00	69.376,00	2,31	21.840,00	47.536,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	6.200.000,00	6.932.688,00	111,82	3.071.256,00	3.861.432,00
Pendapatan Denda Pajak Walat	3.800.000,00	17.636.622,00	464,12	2.100.800,000	15.535.822,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.000.000,00	285.950,00	3,18	1.740.000,00	(1.454.050,00)
Pendapatan Denda PBB P2	120.000.000,00	169.818.066,00	141,52	55.311.024,000	114.507.042,00
Pendapatan Denda BPHTP	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	221.340.000,00	228.748.417,00	103,34	91.591.945,00	137.236.472,00

b) Dinas Kesehatan

Tabel 5.25 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Kesehatan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.306.712.000,00	14.287.755.300,00	82,56	13.888.868.100,00	321.144.030,00
Jumlah	17.306.712.000,00	14.287.755.300,00	82,56	13.888.868.100,00	321.144.030,00

c) RSUD Bengkalis

Tabel 5.27 Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Bengkalis

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan BLUD	56.980.000.000,00	50.085.046.757,00	87,90	50.424.925.340,00	(339.878.583,00)
Jumlah	56.980.000.000,00	50.085.046.757,00	87,90	50.424.925.340,00	(339.878.583,00)

Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Bengkalis TA. 2021 sebesar Rp50.085.046.757,00 atau 87,90% dari anggaran sebesar Rp56.980.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

* Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp 50.000.536.219,00
* Pendapatan Hasil Kerjasama	Rp 54.224.163,00
* Pendapatan Hibah	Rp 0,00
* Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 30.286.375,00 +
Jumlah	Rp 50.085.046.757,00

d) RSUD Kecamatan Mandau

Tabel 5.28 Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Kecamatan Mandau

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenakikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan BLUD	55.000.000.000,00	60.297.425.804,00	109,63	33.593.536.757,00	26.703.889.047,00
Jumlah	55.000.000.000,00	60.297.425.804,00	109,63	33.593.536.757,00	26.703.889.047,00

Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Kecamatan Mandau TA 2021 sebesar Rp60.297.425.804,00 atau 109,63% dari anggaran sebesar Rp55.000.000.000,00 dgn rincian sebagai berikut:

* Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp	60.251.048.896,00
* Pendapatan Hasil Kerjasama	Rp	0,00
* Pendapatan Hibah	Rp	0,00
* Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	46.376.908,00 +
Jumlah	Rp	60.297.425.804,00

e) Dinas Perikanan

Tabel 5.29 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Perikanan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenakikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	11.660.000,00	0,00	0,00	11.660.000,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.500.000,00	1.636.362,00	109,09	909.090,00	727.272,00
Jumlah	1.500.000,00	13.296.362,00	886,42	909.090,00	12.387.272,00

f) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 5.30 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenakikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	28.590.906,00	0,00	26.227.270,00	2.363.636,00
Jumlah	0,00	28.590.906,00	0,00	26.227.270,00	2.363.636,00

g) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Tabel 5.31 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenakikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	60.000.000,00	0,00	26.227.270,00	33.772.730,00
Jumlah	0,00	60.000.000,00	0,00	26.227.270,00	33.772.730,00

h) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 5.32 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenakikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	32.938.296,00	0,00	20.287.148,00	12.651.148,00
Jumlah	0,00	32.938.296,00	0,00	20.287.148,00	12.651.148,00

i) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 5.33 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenakikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya	1.720.000.000,00	0,00	0,00	723.380.000,00	(723.380.000,00)
Jasa Giro Kas Daerah	6.000.000.000,00	9.534.038.489,00	158,90	3.256.110.350,00	6.277.928.139,00
Jasa Giro Pemegang Kas	3.500.000.000,00	580.952.906,00	16,60	830.541.708,00	(249.588.802,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	16.500.000.000,00	13.659.531.694,00	82,79	19.481.596.510,00	(5.822.064.816,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
Hasil Eksekusi Jaminan	19.776.137.966,00	52.621.357,00	0,27	7.147.958.273,22	(7.095.336.916,22)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	337.689.399,00	337,69	23.675.778,00	314.013.621,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	34.239.767.293,00	9.054.842.068,72	26,45	1.177.969.623,26	7.876.872.445,46
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	6.991.293.456,46	(6.991.293.456,46)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.917.283.137,00	0,00	0,00	107.423.508,00	(107.423.508,00)
Jumlah	83.755.186.996,00	33.224.075.913,72	39,67	39.739.949.296,94	(6.515.873.283,22)

Pendapatan Bunga Deposito dari anggaran sebesar Rp 16.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp13.659.531.694,-

Tabel 5.34 Rekap Pendapatan Bunga Deposito

Uraian	Tgl. Terjadi	Jumlah
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	30 Juli 2021	38.194.444,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	30 Juli 2021	19.097.222,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	30 Juli 2021	19.097.222,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	30 Juli 2021	19.097.222,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	30 Juli 2021	19.097.222,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	30 Juli 2021	19.097.222,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	30 Juli 2021	19.097.222,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	30 Juli 2021	19.097.222,00
Total		152.777.776,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	19 Agustus 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	19 Agustus 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	19 Agustus 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	19 Agustus 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	19 Agustus 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	19 Agustus 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	31 Agustus 2021	83.333.333,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	26 Agustus 2021	24.305.554,00
Total		2.503.472.187,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	20 September 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	20 September 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	20 September 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	20 September 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 September 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 September 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 September 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 September 2021	119.791.650,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 September 2021	119.791.650,00
Total		2.635.416.600,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	19 Oktober 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	19 Oktober 2021	479.166.660,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bunga Deposito Bank Riau Kepri	19 Oktober 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	19 Oktober 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	11 Oktober 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	11 Oktober 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	11 Oktober 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	11 Oktober 2021	119.791.650,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	11 Oktober 2021	119.791.650,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	11 Oktober 2021	2.635.416.660,00
Total		
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	19 November 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	19 November 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	19 November 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	19 November 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	08 November 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 November 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 November 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 November 2021	119.791.650,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 November 2021	119.791.650,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 November 2021	2.635.416.660,00
Total		
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	20 Desember 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	20 Desember 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	20 Desember 2021	479.166.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	20 Desember 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 Desember 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 Desember 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 Desember 2021	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 Desember 2021	93.750.000,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 Desember 2021	93.750.000,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	29 Desember 2021	68.493.151,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	29 Desember 2021	68.493.151,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	29 Desember 2021	68.493.151,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	29 Desember 2021	34.246.575,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	29 Desember 2021	68.493.151,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	29 Desember 2021	68.493.151,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	29 Desember 2021	68.493.151,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	29 Desember 2021	34.246.575,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	29 Desember 2021	34.246.575,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	29 Desember 2021	3.097.031.931,00
Total		13.669.531.694,00
Total Juli sd Des 2021		

i) Dinas Pertanian

Tabel 5.35 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Pertanian

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	c/b	d	e=c-d
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)
Jumlah	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)

B. Pendapatan Transfer

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
3.014.118.217.102,70	3.955.128.529.440,00	131,22	2.573.597.479.818,49	1.381.531.104.061,51

Pendapatan transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pembagian hasil pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Realisasi pendapatan transfer TA 2021 adalah sebesar Rp3.955.128.529.440,00 atau 131,22% dari anggaran sebesar Rp3.014.118.217.102,70, sementara realisasi pendapatan transfer TA. 2020 sebesar Rp2.573.597.479.818,49.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat-lainnya serta transfer pemerintah provinsi. Rincian realisasi pendapatan transfer selama TA 2021 dan Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.36 Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.667.080.654.891,00	3.643.215.136.775,00	136,60	2.275.653.458.310,00	1.367.561.678.465,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	196.962.531.000,00	165.099.615.167,00	83,82	166.667.936.000,00	(1.558.320.833,00)
Transfer Pemerintah Provinsi	150.075.031.211,70	146.813.831.938,00	97,83	131.286.085.508,49	15.527.746.429,51
Jumlah	3.014.118.217.102,70	3.955.128.583.880,00	131,22	2.573.597.479.818,49	1.381.531.104.061,51

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
	2.667.080.654.891,00	3.643.215.136.775,00	136,60	2.275.653.458.310,00	1.367.561.678.465,00

Berikut ini adalah rincian realisasi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu TA 2021 dan TA. 2020 :

Tabel 5.37 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Dana Bagi Hasil	2.079.905.950.291,00	3.066.476.067.593,00	147,43	1.728.780.988.415,00	1.337.695.079.178,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	336.787.052.000,00	336.787.052.000,00	100,00	338.731.609.000,00	(1.944.587.000,00)
Dana Alokasi Khusus - Fisik	100.775.011.000,00	93.311.533.266,00	92,59	73.318.351.993,00	19.993.181.273,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	149.612.641.600,00	146.640.483.918,00	98,01	134.822.508.902,00	11.817.975.014,00
Jumlah	2.667.080.654.891,00	3.643.215.136.775,00	136,60	2.275.653.458.310,00	1.367.561.678.465,00

Selama TA 2021 realisasi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan adalah sebesar Rp3.643.215.136.775,00 atau 136,60% dari anggaran sebesar Rp2.667.080.654.891,00. Bila dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2020 sebesar Rp2.275.653.458.310,00 terdapat kenaikan sejumlah Rp1.367.561.678.465,00 atau 60,10%, dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Dana Bagi Hasil Pajak	1.681.121.425.952,00	2.658.352.990.601,00	158,13	1.050.702.831.784,00	1.607.650.158.817,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)	398.784.524.339,00	408.123.076.992,00	102,34	678.078.166.631,00	(269.955.079.639,00)
Jumlah	2.079.905.950.291,00	3.066.476.067.593,00	147,43	1.728.780.988.415,00	1.337.695.079.178,00

i) Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
	1.681.121.425.952,00	2.658.352.990.601,00	158,13	1.050.702.831.784,00	1.607.650.158.817,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Bagi Hasil Pajak selama TA.2021 sebesar Rp2.658.352.990.601,00 atau 158,13% dari anggaran sebesar Rp1.681.121.425.952,00 dan jika dibandingkan TA. 2020 sebesar Rp1.050.702.831.784,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.607.650.158.817,00 atau 153,01%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB Pertambangan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 dan Wajib Pajak Orang Pribadi, PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, PBB Bag. Pemerintah Pusat Bagi Rata, serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bagi Hasil dari PBB	1.449.000.756.876,00	2.602.448.020.701,00	179,60	982.451.114.510,00	1.619.996.906.191,00
Bagi Hasil dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	231.143.001.276,00	54.927.302.100,00	23,76	59.289.165.551,00	(4.361.864.451,00)
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29	977.667.800,00	977.667.800,00	100,00	1.643.380.893,00	(665.713.093,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	0,00	0,00	0,00	3.399.342.940,00	(3.399.342.940,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	0,00	0,00	0,00	3.860.526.654,00	(3.860.526.654,00)
Bagi Hasil Pajak dan Bangunan (Sektor Lainnya)	0,00	0,00	0,00	59.300.236,00	(59.300.236,00)
Lainnya	1.681.121.425.952,00	2.658.352.990.601,00	158,13	1.050.702.831.784,00	1.607.650.158.817,00

Tabel 5.39 Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Realisasi berdasarkan Alokasi TA 2021	Kurang Bayar	Total
a	b	c	d= b+c
Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	42.527.265.000,00	12.400.037.100,00	54.927.302.100,00
DBH PPh, Triwulan ke 1 TA 2021	8.505.453.000,00	0,00	8.505.453.000,00
DBH PPh, Triwulan ke 2 TA 2021	8.505.453.000,00	0,00	8.505.453.000,00
DBH PPh, Triwulan ke 3 TA 2022	8.505.453.000,00	0,00	8.505.453.000,00
DBH PPh, Triwulan ke 4 TA 2023	17.010.906.000,00	0,00	17.010.906.000,00
Alokasi Sementara KB DBH PPh TA. 2020 yang dialokasikan pada TA 2021	0,00	12.400.037.100,00	12.400.037.100,00
Bagi Hasil DBH Pajak Pasal 25/29	755.920.000,00	221.747.800,00	977.667.800,00
DBH PPh, Triwulan ke 1 TA 2021	151.184.000,00	0,00	151.184.000,00
DBH PPh, Triwulan ke 2 TA 2021	151.184.000,00	0,00	151.184.000,00
DBH PPh, Triwulan ke 3 TA 2022	151.184.000,00	1,00	151.184.001,00
DBH PPh, Triwulan ke 4 TA 2023	302.368.000,00	2,00	302.368.002,00
Alokasi Sementara KB DBH PPh TA. 2020 yang dialokasikan pada TA 2021	0,00	221.747.800,00	221.747.800,00
	1.383.717.917.000,00	1.218.730.103.701,00	2.602.448.020.701,00
Bagi Hasil dari PBB			
DBH PBB Migas, Triwulan ke 1 TA 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	264.579.712.200,00	0,00	264.579.712.200,00
DBH PBB Migas, Triwulan ke 1 TA 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	8.819.323.800,00	0,00	8.819.323.800,00
DBH PBB Migas, Triwulan ke 2 TA 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	330.724.640.250,00	0,00	330.724.640.250,00
DBH PBB Migas, Triwulan ke 2 TA 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	11.024.154.750,00	0,00	11.024.154.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Migas, Triwulan ke-3 TA. 2021	463.014.496.350,00	0,00	463.014.496.350,00
DBH PBB Migas, Triwulan ke 3 TA 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	15.433.816.650,00	0,00	15.433.816.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Migas, Triwulan ke-4 TA. 2021	264.579.712.200,00	0,00	264.579.712.200,00
DBH PBB Migas, Triwulan ke 4 TA 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	8.819.323.800,00	0,00	8.819.323.800,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 (Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	70.198.718.500,00	70.198.718.500,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 (Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	429.023.467.042,00	429.023.467.042,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 (Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	2.347.963.100,00	2.347.963.100,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 (Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	16.701.403.268,00	16.701.403.268,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten / kota (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	103.407.950.588,00	103.407.950.588,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten / kota (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	5.113.726.583,00	5.113.726.583,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten / kota (003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	555.448.397.140,00	555.448.397.140,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten / kota (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	20.245.784.316,00	20.245.784.316,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611215 DBH PBB Bagi Rata	0,00	1.153.653.617,00	1.153.653.617,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611215 DBH PBB Bagi Rata (Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	265.689.700,00	265.689.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Tahap I Tahun 2021 => 611215 DBH PBB Bagi Rata (Alokasi DBH yang disalurkan)	874.102.500,00	0,00	874.102.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata, Tahap ke 2 TA. 2021 => 611215 DBH PBB Bagi Rata (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	1.456.837.500,00	0,00	1.456.837.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata, Tahap ke 3 TA. 2021 => 611215 DBH PBB Bagi Rata (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	582.735.000,00	0,00	582.735.000,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 DBH PBB Daerah untuk Kab/Kota	0,00	6.298.312.585,00	6.298.312.585,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kab/Kota	0,00	308.759.246,00	308.759.246,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 DBH PBB Daerah untuk Kab/Kota	0,00	2.115.413.700,00	2.115.413.700,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kab/Kota	0,00	94.005.900,00	94.005.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 1 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 1 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 2 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 2 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 3 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 3 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 4 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 4 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 5 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 5 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 6 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 6 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 7 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 7 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 8 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 8 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 9 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 9 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 10 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 10 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 11 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 11 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 12 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 12 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 13 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 13 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 14 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 14 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 15 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 15 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	0,00	66.213.875,00	66.213.875,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 16 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 16 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 17 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	362.517.500,00	0,00	362.517.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 17 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	16.111.900,00	0,00	16.111.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 18 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	1.087.552.500,00	0,00	1.087.552.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke 18 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	48.335.700,00	0,00	48.335.700,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	0,00	262.147.733,00	262.147.733,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 DBH PBB Daerah untuk Kab/Kota	0,00	85.956.118,00	85.956.118,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kab/Kota	0,00	3.160.446,00	3.160.446,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 DBH PBB Daerah untuk Kab/Kota	0,00	8.604.300,00	8.604.300,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kab/Kota	0,00	286.800,00	286.800,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 1 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 1 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 2 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 2 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 3 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 3 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 4 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 4 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 5 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 5 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 6 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 6 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 7 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 7 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 8 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 8 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 9 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 9 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 10 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 10 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 11 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 11 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 12 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 12 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 13 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 13 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 14 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 14 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 15 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 15 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	41.740.329,00	41.740.329,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 611212 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	1.391.349,00	1.391.349,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 16 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 16 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 17 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.075.250,00	0,00	3.075.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 17 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	102.550,00	0,00	102.550,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 18 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	9.225.750,00	0,00	9.225.750,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke 18 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	307.650,00	0,00	307.650,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi Kurang Bayar DBH Pajak yang disalurkan)	0,00	165.254.378,00	165.254.378,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi Kurang Bayar DBH Pajak yang disalurkan)	0,00	5.508.498,00	5.508.498,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 DBH PBB Daerah untuk Kab/Kota	0,00	3.407.081.520,00	3.407.081.520,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kab/Kota	0,00	146.145.941,00	146.145.941,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kab/Kota	0,00	1.602.950.700,00	1.602.950.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 611212 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kab/Kota	0,00	62.333.100,00	62.333.100,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 1 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 1 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 2 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 2 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 3 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 3 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 4 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 4 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 5 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 5 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 6 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 6 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 7 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 7 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 8 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 8 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 9 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 9 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 10 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 10 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 11 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 11 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 12 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 12 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 13 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 13 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 14 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 14 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 15 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 15 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	0,00	29.860.894,00	29.860.894,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 16 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 16 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 17 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	297.092.300,00	0,00	297.092.300,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 17 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	11.553.600,00	0,00	11.553.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 18 TA. 2021 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	891.276.900,00	0,00	891.276.900,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke 18 TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	34.660.800,00	0,00	34.660.800,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	118.222.435,00	118.222.435,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Total	1.427.001.102.000,00	1.231.361.888.601,00	2.858.362.890.601,00
-------	----------------------	----------------------	----------------------

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak selama TA 2021 dicatat berdasarkan ketetapan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- Bagi Hasil PPh 21, 25 dan 29

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp18.700.475.776,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp433.239.287,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp18.267.236.489,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021, Rincian Lebih Bayar DBH Pajak Penghasilan sampai dengan tahun anggaran 2018 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp18.700.475.775,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp433.239.287,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp2.625.886.650,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 16 September 2021, Rincian Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada TA 2021 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 Kurang Bayar Defenitif TA 2020 sebesar Rp10.581.581.834,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp861.420.186,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp9.720.161.648,00 dengan penyaluran KB DBH sementara TA 2020 PPh Pasal 25/29 sebesar Rp221.747.800,- dan PPH Pasal 21 sebesar Rp12.400.037.100,00

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

- Bagi Hasil PBB dan PBB Pertambangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Lampiran rincian DBH PBB, Bagi Rata sebesar Rp. 1.153.653.617,00. Bagian Daerah sebesar Rp438.871.005.574,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp6.947.080.845,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp3.758.033.671,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp428.071.080.886,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp94.810.172,00. Biaya Pemungutan sebesar Rp14.727.101.546,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp308.759.246,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp146.145.941,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp14.269.035.913,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp3.160.446,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021, Rincian Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun anggaran 2019, Bagian Daerah sebesar Rp461.065.752.246,00 dan Biaya Pemungutan sebesar Rp16.701.403.268,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021, Rincian Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada TA 2021 PBB Kurang Bayar Defenitif TA 2020 sebesar Rp877.413.210.338,00 dengan dengan penyaluran KB DBH sementara TA 2020 sebesar Rp76.695.965.800,00 dan KB TA 2020 yang belum diselesaikan sebesar Rp800.717.244538,00

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

Lampiran Kertas kerja PMK

ii) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaik/Panurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
398.784.524.339,00	408.123.076.992,00	102,34	678.078.156.631,00	(269.955.079.639)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2021 adalah sebesar Rp408.123.076.992,00 atau 102,34% dari anggaran sebesar Rp398.784.524.339,00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan, Bagi Hasil dari Dana Reboisasi, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp678.078.156.631,00 mengalami penurunan sebesar Rp269.955.079.639,00 atau 39,81%.

Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=b/b	e	f=c-e
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas	378.070.474.929,00	378.598.933.710,00	100,14	666.565.099.432,00	(287.966.165.722,00)
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba	1.900.908.219,00	2.071.794.136,00	108,99	1.418.038.691,00	653.755.445,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.674.500.150,00	1.674.500.150,00	100,00	788.276.289,00	886.223.861,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	17.138.641.041,00	25.777.841.891,00	150,41	9.306.618.019,00	16.471.223.872,00
Cukai Hasil Tembakau	0,00	7.105,00	0,00	124.200,00	(117.095,00)
Jumlah	398.784.524.339,00	408.123.076.992,00	102,34	678.078.156.631,00	(269.955.079.639,00)

Tabel 5.41 Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

Uraian	Realisasi berdasarkan Alokasi TA 2021	Kurang Bayar 2020	Total
a	b	c	d= b+c
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	357.136.294.000,00	19.388.754.000,00	376.525.048.000,00
DBH SDA Minyak Bumi, Triwulan ke 1 TA 2021 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15%	69.123.153.600,00	0,00	69.123.153.600,00
DBH SDA Minyak Bumi, Triwulan ke 1 TA 2021 => 612112 DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	2.304.105.200,00	0,00	2.304.105.200,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15% (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	18.763.310.400,00	18.763.310.400,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 612112 DBH SDA Minyak Bumi 0,5% (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	625.443.600,00	625.443.600,00
DBH SDA Minyak Bumi, Triwulan ke 2 TA 2021 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15%	86.403.942.000,00	0,00	86.403.942.000,00
DBH SDA Minyak Bumi, Triwulan ke 2 TA 2021 => 612112 DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	2.880.131.500,00	0,00	2.880.131.500,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke-3 TA, 2021 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15% (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	120.965.518.800,00	0,00	120.965.518.800,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke-3 TA, 2021 => 612112 DBH SDA Minyak Bumi 0,5% (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	4.032.184.100,00	0,00	4.032.184.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke-4 TA. 2021 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15% (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	69.123.153.600,00	0,00	69.123.153.600,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke-4 TA. 2021 => 612112 DBH SDA Minyak Bumi 0,5% (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	2.304.105.200,00	0,00	2.304.105.200,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi	1.401.534.000,00	672.351.710,00	2.073.885.710,00
DBH SDA Gas Bumi, Triwulan ke 1 TA 2021 => 612211 DBH SDA Gas Bumi 30%	275.711.600,00	0,00	275.711.600,00
DBH SDA Gas Bumi, Triwulan ke 1 TA 2021 => 612212 DBH SDA Gas Bumi 0,5%	4.595.200,00	0,00	4.595.200,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 612211 DBH SDA Gas Bumi 30% (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	10.242.900,00	10.242.900,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 612212 DBH SDA Gas Bumi 0,5% (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	170.700,00	170.700,00
DBH SDA Gas Bumi, Triwulan ke 1 TA 2021 => 612211 DBH SDA Gas Bumi 30%	344.639.500,00	0,00	344.639.500,00
DBH SDA Gas Bumi, Triwulan ke 1 TA 2021 => 612212 DBH SDA Gas Bumi 0,5%	5.744.000,00	0,00	5.744.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke-3 TA. 2021 => 612211 DBH SDA Gas Bumi 30% (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	482.495.300,00	0,00	482.495.300,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke-3 TA. 2021 => 612212 DBH SDA Gas Bumi 0,5% (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	8.041.600,00	0,00	8.041.600,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke-4 TA. 2021 => 612211 DBH SDA Gas Bumi 30% (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	275.711.600,00	0,00	275.711.600,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke-4 TA. 2021 => 612212 DBH SDA Gas Bumi 0,5% (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	4.595.200,00	0,00	4.595.200,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 612211 DBH SDA Gas Bumi 30% (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	131.291.087,00	131.291.087,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 612212 DBH SDA Gas Bumi 0,5% (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	218.824,00	218.824,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 612211 DBH SDA Gas Bumi 30% (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	519.795.298,00	519.795.298,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 612212 DBH SDA Gas Bumi 0,5% (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	8663483,00	8.663.483,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba	1.701.039.000,00	370.755.136,00	2.071.794.136,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba, Triwulan ke 1 TA 2021 => 612312 DBH SDA Minerba - Royalti	340.207.800,00	0,00	340.207.800,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 612312 DBH SDA Minerba - Royalti (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	69.567.475,00	69.567.475,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba, Triwulan ke 2 TA 2021 => 612312 DBH SDA Minerba - Royalti	425.259.750,00	0,00	425.259.750,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara dan Potongan Berdasarkan KMK Nomor 17/KM.7/2021, Triwulan ke-3 TA. 2021 => 612312 DBH SDA Minerba-Royalti (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	595.363.650,00	0,00	595.363.650,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Triwulan ke-4 TA. 2021 => 612312 DBH SDA Minerba-Royalti (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	340.207.800,00	0,00	340.207.800,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 612312 DBH SDA Minerba-Royalti (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	60.734.269,00	60.734.269,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 612312 DBH SDA Minerba-Royalti (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	240.453.392,00	240.453.392,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.128.319.000,00	546.181.150,00	1.674.500.150,00
DBH SDA Perikanan, Triwulan ke 1 TA 2021 => 612611 DBH SDA Perikanan	169.247.850,00	0,00	169.247.850,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 612611 DBH SDA Perikanan	0,00	229.300.150,00	229.300.150,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 612611 DBH SDA Perikanan (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	316.881.000,00	316.881.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Triwulan ke 2 TA 2021 => 612611 DBH SDA Perikanan (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	169.247.850,00	0,00	169.247.850,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Triwulan ke-3 TA. 2021 => 612611 DBH SDA Perikanan (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	394.911.650,00	0,00	394.911.650,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Triwulan ke-4 TA. 2021 => 612611 DBH SDA Perikanan (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	394.911.650,00	0,00	394.911.650,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	9.303.921.000,00	16.473.927.996,00	25.777.848.996,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH	0,00	7.434.542.476,00	7.434.542.476,00
DBH SDA Kehutanan, Triwulan ke 1 TA 2021 => 612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH	1.395.588.150,00	0,00	1.395.588.150,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA 2021 => 612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	1.902.544.975,00	1.902.544.975,00
DBH SDA Kehutanan, Triwulan ke 2 TA 2021 => 612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH	1.395.588.150,00	0,00	1.395.588.150,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Triwulan ke-3 TA. 2021 => 612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	3.256.372.350,00	0,00	3.256.372.350,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	394.397.786,00	394.397.786,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH (003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	1.359.607.154,00	1.359.607.154,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH (003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	5.382.828.500,00	5.382.828.500,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Triwulan ke-4 TA. 2021 => 612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	3.256.372.350,00	0,00	3.256.372.350,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 613111 DBH Cukai Hasil Tembakau (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	1433,00	1.433,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2020 yang Dialokasikan pada TA. 2021 => 613111 DBH Cukai Hasil Tembakau (Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan)	0,00	5672,00	5.672,00
Total	376.671.107.000,00	37.451.369.982,00	408.523.076.992,00

Realisasi Dana Bagi Hasil bukan Pajak selama TA 2021 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2021 sebesar Rp358.537.828,00 dengan rincian Minyak Bumi sebesar Rp357.136.294,00 dan Gas Bumi sebesar Rp358.537.828,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021, Rincian Lebih Bayar DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sampai dengan Tahun Anggaran 2018, Minyak Bumi sebesar Rp45.384.094.632,00 dan Gas Bumi sebesar Rp.45.384.094.632

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021, Rincian Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada TA 2021 PBB Lebih Bayar sampai dengan TA 2019 sebesar Rp45.384.094.632,00, Penyelesaian lebih bayar s.d 2019 sebesar Rp13.341.809.428 dan sisa lebih bayar s.d TA. 2019 Rp32.042.285.204,00.

- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2021 sebesar Rp1.701.039,00 dengan Rincian Royalti sebesar Rp1.701.039,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021, Rincian Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp69.567.475,00

- Bagi Hasil SDA Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp1.128.319,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021, Rincian Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp316.881.000,-

- Bagi Hasil dari Provisi Daya Hutan dan Dana Reboisasi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp9.303.921,00 dengan Rincian IUPH sebesar Rp0,00, PSDH sebesar Rp9.303.921,00 dan DR sebesar Rp0,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021, Rincian Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam kehutanan sebesar Rp1.902.544.975,00

- Bagi Hasil SDA Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021, Rincian Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada TA 2021 PBB Kurang Bayar Definitif sampai dengan TA 2020 sebesar Rp7.105,00.

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan PMK dengan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
336.787.052.000,00	336.787.052.000,00	100,00	338.731.609.000,00	(1.944.557.000)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2021 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10, tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sebesar Rp336.787.052.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama TA. 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.42 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU	Anggaran 2020	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dana Alokasi Umum	336.787.052.000,00	336.787.052.000,00	100,00	338.731.609.000,00	(1.944.557.000,00)
Jumlah	336.787.052.000,00	336.787.052.000,00	100,00	338.731.609.000,00	(1.944.557.000,00)

c). Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik

Tabel 5.43 Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik

DAK Fisik	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
DAK Bidang Pendidikan	33.509.260.000,00	32.354.346.087,00	96,55	33.188.479.029,000	(834.132.942,00)
DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	28.478.579.000,00	24.724.290.403,00	86,82	19.484.492.836,000	5.239.797.567,00
DAK Bidang Pertanian Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.978.125.000,00	1.972.898.568,00	99,74	0,00	1.972.898.568,00
DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	1.102.500.000,00	1.082.312.360,00	98,17	1.004.638.350,00	77.674.010,00
DAK Bidang Jalan Reguler	15.097.197.000,00	14.535.552.962,00	96,28	0,00	14.535.552.962,00
DAK Fisik Bidang Jalan Penugasan	4.813.923.000,00	4.556.432.300,00	94,65	0,00	4.556.432.300,00
DAK Bidang Air Minum Penugasan	5.467.631.000,00	5.279.878.806,00	96,57	0,00	5.279.878.806,00
DAK Bidang Sanitasi Penugasan	2.642.346.000,00	2.632.652.000,00	99,63	0,00	2.632.652.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	299.934.000,00	299.903.960,00	99,99	0,00	0,00
DAK Bidang Transportasi Laut Reguler	3.368.212.000,00	3.222.095.169,00	95,66	0,00	3.222.095.169,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	2.452.504.000,00	1.104.368.651,00	45,03	0,00	1.104.368.651,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	407.000.000,00	397.882.000,00	97,76	0,00	397.882.000,00
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.157.800.000,00	1.148.920.000,00	99,23	0,00	1.148.920.000,00
DAK Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.216.867.750,000	(2.216.867.750,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	649.241.000,00	(649.241.000,00)
DAK Afirmasi Bidang Penguatan Puskesmas DTPK	0,00	0,00	0,00	5.915.039.982,00	(5.915.039.982,00)
DAK Cadangan Afirmasi Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	570.501.000,00	(570.501.000,00)
DAK Cadangan Penugasan Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.112.337.434,00	(1.112.337.434,00)
DAK Cadangan Afirmasi Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	5.714.326.047,00	(5.714.326.047,00)
DAK Cadangan Afirmasi Bidang Perumahan Permukiman	0,00	0,00	0,00	3.462.428.565,00	(3.462.428.565,00)
Jumlah	100.775.011.000,00	93.311.533.266,00	92,59	73.318.351.993,000	19.693.277.313,00

d). Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Tabel 5.44 Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik

DAK Non Fisik	Menurut Surat Ketetapan	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	0,00	240.000.000,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	0,00	240.000.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	112.812.546.000,00	112.812.546.000,00	100,00	101.677.829.000,00	11.134.717.000,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru	993.000.000,00	993.000.000,00	100,00	894.000.000,00	99.000.000,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	7.853.400.000,00	7.089.600.000,00	90,27	7.435.800.000,00	(346.200.000,00)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.372.000.000,00	1.126.300.000,00	82,09	1.349.200.000,00	(222.900.000,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.757.310.600,00	18.252.050.145,00	143,07	7.023.749.851,00	11.228.300.294,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.430.253.000,00	2.769.822.625,00	80,75	2.233.525.000,00	536.297.625,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	521.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.085.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	4.409.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00	390.304.000,00	100,00	0,00	390.304.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.584.749.000,00	1.991.251.146,00	77,04	2.230.729.976,00	(239.478.830,00)
DAK Non Fisik Dana Fasilitas Penanaman Modal	326.122.000,00	326.122.000,00	100,00	0,00	326.122.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	374.976.000,00	187.488.000,00	50,00	0,00	187.488.000,00
DAK Non Fisik- Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	222.000.000,00	222.000.000,00	100,00	0,00	222.000.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	0,00	0,00	11.659.944.275,00	(11.659.944.275,00)
DAK Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00	0,00	0,00	317.730.800,00	(317.730.800,00)
Jumlah	149.612.641.600,00	146.540.483.916,00	98,01	134.822.508.902,00	11.817.975.014,00

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
196.962.531.000,00	165.099.615.167,00	83,82	166.657.936.000,00	(1.558.320.833,00)

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan berdasarkan ketetapan sebagai berikut:

Tabel 5.45 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

DAK Non Fisik	Menurut Surat Ketetapan	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dana Penyesuaian	196.962.531.000,00	165.099.615.167,00	83,82	166.657.936.000,00	(1.558.320.833,00)
Jumlah	196.962.531.000,00	165.099.615.167,00	83,82	166.657.936.000,00	(1.558.320.833,00)

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp165.099.615.167,00 berupa dana Penyesuaian yang terdiri dari Dana Insentif Daerah Sebesar Rp31.134.698.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp133.964.917.167,00

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp165.099.615.167,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.558.320.833,00 atau 0,94% bila dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp166.657.936.000,00.

3. Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
150.075.031.211,70	146.813.831.938,00	97,83	131.286.085.508,49	15.527.746.429,51

Realisasi transfer Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis TA 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a). Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
131.899.031.211,70	129.050.630.338,00	97,84	104.662.859.108,49	24.387.771.229,51

Penerimaan yang berasal dari transfer Pemerintah Provinsi TA 2021 adalah sebesar Rp129.050.630.338,00 atau 97,84% dari anggaran sebesar Rp131.899.031.211,70, mengalami kenaikan sebesar Rp24.387.771.229,51 atau 23,30% bila dibandingkan realisasi tahun 2020 yang berjumlah Rp104.662.859.108,49

Tabel 5.46 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Transfer Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=e/b	e	f=c-e



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pajak Kendaraan Bermotor	33.802.156.378,00	38.126.230.282,51	112,79	27.011.248.346,49	11.114.981.936,02
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.139.125.223,37	22.117.233.130,49	84,61	14.501.043.214,00	7.616.189.916,49
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.070.884.801,00	41.675.574.344,00	94,56	35.356.482.824,00	6.319.091.520,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.541.798.034,00	1.070.056.597,00	65,18	879.211.510,00	190.844.987,00
Pajak Rokok	26.245.066.775,33	26.061.535.984,00	99,30	28.914.873.114,00	(853.337.130,00)
Jumlah	131.896.031.211,70	129.050.930.338,00	97,84	104.662.889.108,49	24.387.771.228,51

Realisasi dana bagi hasil dari selama TA 2021 dicatat berdasarkan ketetapan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 572 / V / 2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.641.355.941,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.509.965.010,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.918.306.975,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp246.125.975,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 523 / V / 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I tahun 2021 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.730.354.070,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 524 / V / 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) tahun 2020 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau sebesar Rp3.424.488.053,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 834 / VIII / 2021 tanggal 03 Agustus 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Tahun 2021 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.677.142.209,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 833 / VIII / 2021 tanggal 03 Agustus 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.533.961.046,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.012.998.044,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.610.616.634,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp235.535.523,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1141 / X / 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.686.784.617,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.660.318.667,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.461.520.491,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp316.231.988,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1167 / XI / 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III Tahun 2021 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.561.770.885,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 753 / VII / 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2020) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.343.490.159,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.311.986.503,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.882.466.950,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp52.941.796,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1382 / XII / 2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.820.512.767,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.397.664.651,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.050.892.449,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp196.816.296,00.

b). Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
18.176.000.000,00	17.763.201.600,00	97,73	26.623.226.400,00	(8.860.024.800,00)

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi TA 2021 adalah sebesar Rp17.763.147.160,00 atau 97,73% dari anggarannya sebesar Rp18.176.000.000,00

Tabel 5.47 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	18.176.000.000,00	17.763.201.600,00	97,73	26.623.226.400,00	(8.860.024.800,00)
Jumlah	18.176.000.000,00	17.763.201.600,00	97,73	26.623.226.400,00	(8.860.024.800,00)

Pengalokasian Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau No: KPTS.1201/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.488/V/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor: KPTS.74/1/2021, Berupa Gaji Guru Bantu sebesar Rp.6.936.000.000,-, Bantuan Kecamatan sebesar Rp1.100.054.440,-, Rumah Layak Huni sebesar Rp10.140.000.000,-

Dalam keputusan tersebut ditetapkan Alokasi Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah sebesar Rp18.176.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp17.763.146.160,00 atau 97,73% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan per OPD

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	18.176.000.000,00	17.763.147.160,00	97,73	26.623.226.400,00	(8.860.079.240,00)
Bantuan Keuangan COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	18.176.000.000,00	17.763.147.160,00	97,73	26.623.226.400,00	(8.860.079.240,00)

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
84.924.400.000,00	82.544.910.000,00	97,20	91.869.880.000,00	(9.324.970.000,00)

Lain-lain Pendapatan yang Sah selama TA 2021 adalah sebesar Rp82.544.910.000,00 atau 97,20% dari anggaran sebesar Rp84.924.400.000,00 dan realisasi tahun 2020 yang berjumlah Rp91.869.880.000,00.

Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.49 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan Hibah	84.924.400.000,00	82.544.910.000,00	97,20	91.438.330.000,00	(8.893.420.000,00)
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	431.550.000,00	(431.550.000,00)
Jumlah	84.924.400.000,00	82.544.910.000,00	97,20	91.869.330.000,00	(8.324.870.000,00)

Pendapatan Hibah sebesar Rp83.024.910.000 terdiri dari Pendapatan Hibah Dana Bos yang disahkan berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) nomor 03/SP2H/BUD/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp82.544.910.000, DAK Non Fisik-Bos Afirmasi Rp240.000.000,00 dan DAK Non Fisik - Bos Kinerja sebesar Rp240.000.000,- .

5.1.2. Belanja

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
3.179.667.352.441,70	2.878.986.473.035,36	90,54	2.634.561.696.928,84	244.424.776.106,52

Realisasi Belanja Kabupaten Bengkalis TA 2021 adalah sebesar Rp2.878.986.473.035,36 atau 90,54% dari nilai anggaran sebesar Rp3.179.667.352.441,70. Jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2.634.561.696.928,84 mengalami kenaikan sebesar Rp244.424.776.106,52 atau 9,28% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.50 Belanja dan Transfer

Belanja	Anggaran 2020	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-b
Belanja Operasi	2.430.196.251.004,70	2.199.493.917.121,94	90,51	1.981.293.374.799,00	218.200.542.322,94
Belanja Modal	745.222.567.165,00	679.492.555.913,42	91,18	500.329.662.982,84	179.162.892.930,58
Belanja Tidak Terduga	4.248.534.272,00	9.655.040,00	0,23	152.938.659.147,00	(152.929.004.107,00)
Jumlah	3.179.667.352.441,70	2.878.996.128.075,36	90,54	2.634.561.696.928,84	244.434.431.148,52

A. Belanja Operasi

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
2.430.196.251.004,70	2.199.493.917.121,94	90,51	1.981.293.374.799,00	218.200.542.322,94

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Bengkalis TA 2021 adalah sebesar Rp2.199.493.917.121,94 atau 90,51% dari nilai anggaran sebesar Rp2.430.196.251.004,70. Jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1.981.293.374.799,00 mengalami kenaikan sebesar Rp218.200.542.322,94 atau 11,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Belanja Pegawai	1.098.111.270.828,00	1.018.335.441.328,20	92,74	967.266.480.083,00	51.068.961.245,20
Belanja Barang dan Jasa	1.238.509.280.437,70	1.097.486.691.696,15	88,61	933.384.530.032,00	164.102.161.564,15
Belanja Subsidi	10.642.684.920,00	10.642.584.920,00	100,00	9.618.696.893,00	1.023.888.027,00
Belanja Hibah	40.945.646.000,00	35.834.828.114,59	87,52	71.023.667.791,00	(35.188.839.676,41)
Belanja Bantuan Sosial	41.987.368.819,00	37.194.371.163,00	88,58	0,00	37.194.371.163,00
Jumlah	2.430.196.251.004,70	2.199.493.917.121,94	90,51	1.981.293.374.799,00	218.200.542.322,94

I. Belanja Pegawai

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.098.111.270.828,00	1.018.335.441.328,20	92,74	967.266.480.083,00	51.068.961.245,20

Realisasi belanja pegawai selama TA 2021 sebesar Rp1.018.335.441.328,20 atau 92,74% dari anggaran sebesar Rp1.098.111.270.828,00. Jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp967.266.480.083,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp51.068.961.245,20 atau 5,28%.

Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 5.52 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Belanja Gaji dan Tunjangan	511.187.649.004,00	464.155.385.419,00	90,80	479.340.587.981,00	(15.185.202.562,00)
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	0,00	0,00	0,00	341.144.645.529,00	(341.144.645.529,00)
Belanja Gaji Pokok ASN	361.650.188.280,00	339.929.339.408,00	93,99	0,00	339.929.339.408,00
Tunjangan Keluarga ASN	42.000.475.772,00	34.265.572.645,00	81,58	34.536.571.402,00	(270.998.757,00)
Tunjangan Jabatan ASN	10.978.911.291,00	8.983.952.950,00	81,83	10.926.155.680,00	(1.942.202.730,00)
Tunjangan Fungsional ASN	24.009.895.865,00	22.233.244.600,00	92,60	21.595.659.200,00	637.585.400,00
Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.120.678.267,00	4.785.897.420,00	78,19	5.051.250.000,00	(265.352.580,00)
Tunjangan Beras ASN	23.701.823.633,00	21.335.607.640,00	90,02	18.704.081.875,00	2.631.525.765,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.190.357.840,00	1.435.068.383,00	65,52	1.419.939.987,00	15.128.396,00
Pembulatan Gaji ASN	9.839.473,00	5.013.938,00	50,96	4.879.170,00	134.768,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	37.600.453.442,00	28.391.016.353,00	75,51	23.405.003.357,00	4.986.012.996,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	755.256.293,00	697.668.017,00	92,25	0,00	697.668.017,00
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.168.768.848,00	2.093.004.065,00	96,51	0,00	2.093.004.065,00
Uang Paket	0,00	0,00	0,00	84.609.000,00	(84.609.000,00)
Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	0,00	0,00	27.861.750,00	(27.861.750,00)
Tunjangan Komisi	0,00	0,00	0,00	55.175.400,00	(55.175.400,00)
Tunjangan Badan Anggaran	0,00	0,00	0,00	26.674.200,00	(26.674.200,00)
Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	0,00	0,00	7.764.750,00	(7.764.750,00)
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.620.850,00	(15.620.850,00)
Tunjangan Perumahan	0,00	0,00	0,00	8.748.000.000,00	(8.748.000.000,00)
luran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00	0,00	701.548.952,00	(701.548.952,00)
luran Jaminan Kematian	0,00	0,00	0,00	2.104.646.879,00	(2.104.646.879,00)
Tunjangan Transportasi	0,00	0,00	0,00	8.869.500.000,00	(8.869.500.000,00)
Tunjangan Reses	0,00	0,00	0,00	1.911.000.000,00	(1.911.000.000,00)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	400.772.374.396,00	375.135.529.001,20	93,60	479.589.732.102	37.515.753.312,20
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	141.593.200.480,00	134.066.405.222,70	94,68	99.955.271.981,00	34.111.133.241,70
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas	990.000.000,00	796.687.500,00	80,47	1.561.363.125,00	(764.675.625,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	9.845.788.913,00	9.074.157.243,30	92,16	6.511.370.898,00	2.562.786.345,30
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	6.808.281.411,00	6.717.966.235,00	98,67	5.624.342.651,00	1.093.623.584,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	241.535.103.592,00	224.480.312.800,20	92,94	242.436.059.405,00	(17.955.746.604,80)
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	147.668.178.425,00	141.969.956.413,00	96,14	123.501.324.042,00	18.468.632.371,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.739.284.300,00	4.369.853.748,00	92,20	0,00	0,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	630.517.500,00	262.352.500,00	40,02	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	112.812.546.000,00	112.449.017.460,00	99,68	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	993.000.000,00	987.750.000,00	99,47	0,00	0,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	200.000.000,00	30.726.122,00	15,36	0,00	0,00
Belanja Honorarium	28.267.630.625,00	23.855.056.583,00	84,39	0,00	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	8.336.160.000,00	(8.336.160.000,00)
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	7.805.700.000,00	(7.805.700.000,00)
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	157.500.000,00	(157.500.000,00)
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	0,00	0,00	0,00	372.960.000,00	(372.960.000,00)
Gaji dan Tunjangan DPRD	31.911.825.307,00	31.152.168.193,00	97,62	0,00	31.152.168.193,00
Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	0,00	1.004.010.000,00
Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	98.460.600,00	70,05	0,00	98.460.600,00
Tunjangan Beras DPRD	182.498.400,00	138.901.560,00	76,11	0,00	138.901.560,00
Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	0,00	86.058.000,00
Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	0,00	1.455.814.500,00
Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	148.717.800,00	133.873.425,00	90,02	0,00	133.873.425,00
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00	0,00	7.938.000.000,00
Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.955.100.000,00	98,52	0,00	1.955.100.000,00
Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	271.520.231,00	109.819.788,00	40,45	0,00	109.819.788,00
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.097.715.975,00	8.988.130.320,00	98,80	0,00	8.988.130.320,00
Tunjangan Transportasi DPRD	9.459.000.000,00	9.244.000.000,00	97,73	0,00	9.244.000.000,00
Uang Jasa Pengabdian DPRD	143.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	347.722.696,00	149.937.302,00	43,12	0,00	149.937.302,00
Gaji Pokok KDH/WKDH	117.546.492,00	54.600.000,00	46,45	0,00	54.600.000,00
Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	18.463.710,00	4.032.000,00	24,51	0,00	4.032.000,00
Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	203.972.048,00	84.240.000,00	41,30	0,00	84.240.000,00
Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.482.432,00	5.069.400,00	67,75	0,00	5.069.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDHAWKDH	2.252.950,00	1.993.942,00	88,50	0,00	1.993.942,00
Pembulatan Gaji KDHAWKDH	15.064,00	1.960,00	13,01	0,00	1.960,00
Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHAWKDH	1.873.520.000,00	1.758.620.000,00	93,87	0,00	1.758.620.000,00
Dana Operasional Pimpinan DPRD	469.920.000,00	469.920.000,00	100,00	0,00	469.920.000,00
Dana Operasional KDHAWKDH	1.403.600.000,00	1.288.700.000,00	91,81	0,00	1.288.700.000,00
Belanja Pegawai BLUD	4.350.000.000,00	4.013.845.000,00	92,27	0,00	4.013.845.000,00
Jumlah	1.093.111.270.828,00	1.018.335.441.328,20	92,74	987.266.480.083,00	51.088.961.245,20

Rincian Belanja Pegawai berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.53 Rincian Belanja Pegawai Per OPD

OPD	Anggaran 2021	Realisasi Semester I TA 2021	%	Realisasi 2020	Kerugian/Penurunan
	a	b	c=a/b	d	e=c-d
Dinas Pendidikan	531.700.017.936,00	513.255.081.724,00	96,53	484.881.740.478,00	28.373.341.246,00
Dinas Kesehatan	90.495.695.206,00	83.649.483.970,00	92,43	72.535.057.441,00	11.114.416.529,00
RSUD Bengkalis	34.906.017.804,00	34.074.917.106,00	97,62	30.538.944.084,00	3.535.973.022,00
RSUD Kecamatan Mandau	35.130.410.422,00	34.572.257.435,00	98,41	27.862.717.740,00	6.709.539.695,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.635.412.036,00	12.237.703.828,00	89,75	10.767.147.961,00	1.470.555.867,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	9.646.512.890,00	7.533.116.828,00	78,09	7.564.610.751,00	(31.493.923,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.024.561.970,00	4.422.741.242,00	88,02	4.494.980.572,00	(72.239.330,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	5.772.501.917,00	5.361.068.662,00	92,87	5.347.698.565,00	13.370.097,00
Saluran Polisi Pamong Praja	10.608.160.761,00	9.760.492.931,00	92,01	9.571.201.173,00	189.291.758,00
Dinas Sosial	7.943.391.830,00	7.391.377.490,00	93,05	7.184.657.577,00	206.719.913,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.848.671.612,00	6.036.820.784,00	88,15	5.610.080.366,00	426.740.418,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.329.579.439,00	5.903.657.997,00	93,27	5.879.625.572,00	224.032.425,00
Dinas Ketahanan Pangan	5.029.778.625,00	4.563.650.974,00	90,73	4.324.014.612,00	239.636.362,00
Dinas Lingkungan Hidup	10.359.848.924,00	8.246.245.854,20	79,60	8.443.224.481,00	(196.978.626,80)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.475.932.460,00	9.230.026.426,00	97,40	7.453.678.733,00	1.776.347.693,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.391.616.727,00	7.076.868.764,00	84,33	5.408.837.079,00	1.668.031.685,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.649.759.088,00	5.391.187.339,00	70,48	5.151.008.087,00	240.179.252,00
Dinas Perhubungan	15.011.717.288,00	12.040.903.780,00	80,21	12.129.541.817,00	(88.638.037,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.299.304.410,00	5.150.670.236,00	97,20	4.909.599.532,00	241.070.704,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.361.446.962,00	6.265.701.792,00	85,12	6.081.032.532,00	184.669.260,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	9.125.798.155,00	8.777.665.408,00	96,19	8.249.241.147,00	528.424.261,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	8.506.247.134,00	8.009.006.507,00	94,15	7.848.765.964,00	160.240.543,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.194.895.040,00	8.035.420.046,00	98,05	7.600.629.208,00	434.790.838,00
Dinas Perikanan	8.548.618.625,00	7.124.915.824,00	83,35	6.772.828.420,00	352.087.404,00
Dinas Perkebunan	7.531.744.743,00	5.333.002.934,00	70,81	0,00	5.333.002.934,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	15.471.536.179,00	14.109.175.606,00	91,19	0,00	14.109.175.606,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.829.712.204,00	7.978.995.305,00	90,37	8.006.488.599,00	(27.493.294,00)
Sekretariat Daerah	33.846.566.844,00	30.070.650.052,00	88,84	26.308.751.320,00	3.761.898.732,00
Sekretariat DPRD	41.656.552.410,00	39.098.272.018,00	93,85	37.646.874.158,00	1.449.397.860,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.564.646.256,00	8.860.454.460,00	76,62	8.000.405.955,00	860.048.505,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.053.468.513,00	12.999.602.298,00	68,23	34.797.264.597,00	(21.797.662.399,00)
Badan Pendapatan Daerah	20.026.014.298,00	17.034.367.623,00	85,06	12.736.554.045,00	4.297.813.578,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.467.860.544,00	7.004.695.458,00	93,80	6.243.964.556,00	760.730.902,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	5.113.610.210,00	3.917.537.469,00	76,61	3.965.188.424,00	(47.630.955,00)
Inspektorat	8.614.051.071,00	6.929.416.088,00	80,44	6.535.536.211,00	393.879.877,00
Kecamatan Bengkalis	7.349.836.977,00	6.725.346.907,00	91,50	6.705.714.407,00	19.632.500,00
Kecamatan Bantan	3.374.170.222,00	3.046.174.756,00	90,28	2.857.201.611,00	188.973.145,00
Kecamatan Bukit Batu	4.074.502.787,00	3.494.623.642,00	85,77	3.707.939.602,00	(213.315.960,00)
Kecamatan Siak Kecil	3.452.882.287,00	3.163.096.911,00	91,61	3.122.008.010,00	41.088.901,00
Kecamatan Bandar Laksamana	2.599.451.399,00	2.192.426.192,00	84,34	1.989.546.269,00	202.879.923,00
Kecamatan Rupat	5.634.514.102,00	4.802.399.200,00	85,23	5.054.840.455,00	(232.441.255,00)
Kecamatan Rupat Utara	3.934.132.906,00	3.530.250.668,00	89,73	3.375.824.373,00	154.426.295,00
Kecamatan Mandau	12.988.620.272,00	11.287.185.874,00	86,90	11.377.282.946,00	(90.097.072,00)
Kecamatan Pinggir	4.606.775.561,00	4.021.837.330,00	87,30	4.016.946.499,00	4.890.831,00
Kecamatan Bathin Solapan	2.528.991.884,00	2.378.105.432,00	94,03	2.314.260.227,00	63.845.265,00
Kecamatan Talang Muandau	2.089.597.279,00	1.672.285.852,00	80,03	1.478.671.668,00	195.614.184,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.306.134.617,00	4.576.556.246,00	86,25	4.678.210.015,00	(101.653.769,00)
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	232.288.844,00	(232.288.844,00)
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	15.705.863.300,00	(15.705.863.300,00)
Jumlah	1.098.114.270.828,00	1.018.335.441.328,20	92,74	867.266.460.063,00	51.068.961.245,20

2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.238.509.280.437,70	1.097.486.691.596,15	88,61	833.384.530.032,00	164.102.161.564,15



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi belanja barang dan Jasa selama TA 2021 sebesar Rp1.097.486.691.596,15 atau 88,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.238.509.280.437,70, jika dibandingkan TA 2020 sebesar Rp933.384.530.032,00 mengalami kenaikan Rp164.102.161.564,15 atau 17,58%.

Belanja barang dan jasa merupakan pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan/dimanfaatkan kurang dari 12 (dua belas) bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terdiri dari belanja barang habis pakai, bahan material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, biaya cetak, penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan perlengkapan pakaian dinas serta perjalanan dinas dan lain-lain. Rincian realisasi belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Tabel 5.54 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Bahan Habis Pakai	198.880.988.345,70	172.319.444.112,41	86,64	57.266.015.905,00	115.053.428.207,41
Belanja Barang Tak Habis Pakai	193.906.000,00	189.058.000,00	97,50	0,00	189.058.000,00
Belanja Jasa Kantor	503.700.362.302,00	464.489.590.651,00	92,22	0,00	464.489.590.651,00
Belanja Premi Asuransi	25.517.176.186,00	25.225.920.306,00	98,86	1.248.488.420,00	23.977.431.886,00
Belanja Sewa Tanah	70.000.000,00	60.000.000,00	85,71	0,00	60.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.064.324.000,00	3.805.180.910,00	75,14	0,00	3.805.180.910,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.943.040.000,00	5.197.805.794,00	65,44	2.797.607.914,00	2.400.197.880,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	30.150.000,00	25.650.000,00	85,07	0,00	25.650.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	108.600.000,00	30.600.000,00	28,18	0,00	30.600.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.338.125.750,00	9.906.278.061,60	74,27	0,00	9.906.278.061,60
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.328.916.500,00	1.835.284.660,00	78,80	0,00	1.835.284.660,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	380.175.000,00	374.140.000,00	98,41	0,00	374.140.000,00
Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00	13.170.473.315,00	(13.170.473.315,00)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	255.000.000,00	255.000.000,00	100,00	209.511.000,00	45.489.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.038.944.000,00	12.088.460.000,00	86,11	5.916.992.910,00	6.171.457.090,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	774.000.000,00	356.664.000,00	46,08	0,00	356.664.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	217.900.000,00	216.985.000,00	99,12	0,00	216.985.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.510.316.875,00	24.497.671.748,00	92,41	4.159.689.800,00	20.337.982.148,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.049.648.700,00	22.484.944.729,14	97,55	454.129.000,00	22.030.815.729,14
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.443.079.999,00	7.407.370.190,00	99,52	1.132.634.140,00	6.274.736.050,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	56.280.000,00	56.280.000,00	100,00	1.073.244.783,00	(1.016.964.783,00)
Belanja Perjalanan Dinas	211.400.106.609,00	158.044.322.928,00	74,76	128.718.002.452,00	29.326.320.476,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	16.291.620.000,00	14.725.149.800,00	90,38	7.437.028.565,00	7.288.121.235,00
Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	17.351.631.000,00	15.120.368.065,00	87,14	0,00	15.120.368.065,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	64.005.408.171,00	64.463.165.184,00	100,72	0,00	64.463.165.184,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	99.559.580.000,00	94.312.367.457,00	94,73	90.966.626.794,00	3.345.740.663,00
Belanja Bahan/ Material	0,00	0,00	0,00	40.261.778.974,00	(40.261.778.974,00)
Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	378.230.261.743,00	(378.230.261.743,00)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	21.407.500.385,00	(21.407.500.385,00)
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	12.312.805.967,00	(12.312.805.967,00)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	1.141.570.000,00	(1.141.570.000,00)
Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	(19.000.000,00)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	1.776.461.181,00	(1.776.461.181,00)
Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	32.756.781.786,00	(32.756.781.786,00)
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	893.310.000,00	(893.310.000,00)
Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	849.617.500,00	(849.617.500,00)
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	1.595.366.000,00	(1.595.366.000,00)
Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	0,00	0,00	0,00	4.541.700.000,00	(4.541.700.000,00)
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00	25.460.000,00	(25.460.000,00)
Belanja Barang Dana BOS	0,00	0,00	0,00	39.965.187.757,00	(39.965.187.757,00)
Belanja Pemeliharaan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	562.307.004,00	(562.307.004,00)
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	14.642.862.909,00	(14.642.862.909,00)
Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	211.540.000,00	(211.540.000,00)
Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	16.301.165.500,00	(16.301.165.500,00)
Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	22.332.679.908,00	(22.332.679.908,00)
Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	7.146.645.000,00	(7.146.645.000,00)
Belanja Pegawai Dana BOS	0,00	0,00	0,00	21.860.083.620,00	(21.860.083.620,00)
Jumlah	1.239.509.280.437,70	1.097.486.691.596,15	88,61	933.384.530.032,00	164.102.161.564,15

Rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.55 Rincian Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2021	Realisasi (2021)	%	Realisasi 2020	Kemungkinan Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-a
Dinas Pendidikan	207.813.556.517,00	189.372.487.577,56	91,13	167.909.875.382,00	21.462.611.595,56
Dinas Kesehatan	145.938.311.683,00	126.300.798.496,00	86,54	100.781.898.379,00	25.518.900.117,00
RSUD Bengkalis	94.983.393.784,00	88.786.067.858,00	93,48	76.133.806.789,00	12.652.261.069,00
RSUD Kecamatan Mandau	96.649.723.915,00	90.307.991.998,57	93,44	82.372.985.960,00	7.935.006.038,57
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.763.183.941,00	33.517.154.207,00	86,47	16.908.872.851,00	18.610.281.356,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	50.418.209.446,00	45.626.782.121,00	90,30	33.110.445.746,00	12.416.336.375,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.114.238.346,00	9.757.727.803,00	96,48	7.673.866.653,00	2.083.861.150,00
Dinas Pemadam Kebakaran	13.014.621.634,00	11.578.545.346,00	88,97	9.427.435.713,00	2.151.109.633,00
Satuan Polisi Pamong Praja	16.734.774.236,00	14.924.125.377,00	89,18	11.185.415.506,00	3.738.709.871,00
Dinas Sosial	12.395.869.681,00	10.552.446.868,00	85,13	29.285.951.889,00	(18.733.505.021,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.436.401.043,00	5.348.873.471,20	98,39	3.854.987.541,00	1.493.885.930,20
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.630.070.957,00	6.807.386.068,00	87,59	3.290.693.759,00	2.516.692.309,00
Dinas Ketahanan Pangan	5.209.014.911,00	5.014.588.810,00	96,27	3.943.097.088,00	1.071.491.722,00
Dinas Lingkungan Hidup	31.886.912.416,00	31.263.148.876,00	98,04	28.496.440.823,00	2.766.708.063,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.476.774.980,70	12.953.922.289,00	89,48	8.061.866.241,00	4.892.056.048,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26.115.241.580,00	24.637.415.635,00	94,34	20.761.387.869,00	3.876.027.766,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.389.890.000,00	6.508.447.758,00	77,57	4.033.798.116,00	2.474.649.642,00
Dinas Perhubungan	22.755.589.603,00	19.342.730.873,27	85,00	13.613.900.018,00	5.728.830.855,27
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.406.058.400,00	6.196.446.161,00	83,66	6.262.262.342,00	(66.816.181,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.648.906.217,00	7.293.144.281,00	84,32	4.701.632.809,00	2.591.511.472,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	4.175.332.436,00	3.886.542.526,00	93,08	3.918.974.649,00	(32.432.123,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	16.459.882.915,00	14.658.815.473,00	89,06	9.339.474.016,00	5.319.341.457,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.755.207.700,00	4.712.513.641,00	99,10	3.493.351.096,00	1.218.562.545,00
Dinas Penanaman	8.581.195.010,00	7.073.258.804,00	82,43	6.600.602.394,00	472.657.410,00
Dinas Perkebunan	5.287.479.600,00	3.935.897.628,00	74,44	0,00	3.935.897.628,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	12.970.306.724,00	11.560.862.015,00	89,13	0,00	11.560.862.015,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	16.099.282.340,00	14.416.017.861,00	89,54	12.402.693.664,00	2.013.324.197,00
Sekretariat Daerah	92.149.993.822,00	80.305.756.767,00	87,15	71.830.296.443,00	8.475.460.324,00
Sekretariat DPRD	68.494.065.571,00	58.132.137.450,00	84,87	65.477.024.269,00	(7.344.886.819,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.410.305.039,00	12.460.105.073,00	71,57	9.910.771.848,00	2.549.333.225,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	50.367.361.297,00	39.793.546.002,00	79,01	36.471.874.489,00	3.321.671.513,00
Badan Pendapatan Daerah	19.467.721.212,00	15.541.568.659,15	79,83	10.427.420.980,00	5.114.147.679,15
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	11.291.017.547,00	7.151.120.760,00	63,33	4.182.073.599,00	2.969.047.161,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	5.007.729.270,00	4.670.927.735,00	93,27	2.688.845.997,00	1.982.081.738,00
Inspektorat	8.546.479.673,00	5.111.204.086,00	59,80	4.223.430.890,00	887.773.196,00
Kecamatan Bengkalis	5.544.227.789,00	5.354.525.962,00	96,58	4.319.750.236,00	1.034.775.726,00
Kecamatan Bantan	3.429.282.966,00	3.296.931.405,00	96,14	2.516.074.422,00	780.856.983,00
Kecamatan Bukit Batu	4.383.247.289,00	4.052.177.836,00	92,45	3.021.989.045,00	1.030.188.791,00
Kecamatan Siak Kecil	2.848.292.886,00	2.666.950.761,00	93,63	2.496.927.400,00	170.923.361,00
Kecamatan Bandar Laksamana	3.788.673.112,00	3.648.916.252,00	96,31	2.384.509.130,00	1.264.407.122,00
Kecamatan Rupat	8.145.410.724,00	8.068.089.138,00	99,05	6.926.374.027,00	2.141.695.111,00
Kecamatan Rupat Utara	4.083.279.072,00	3.813.000.850,00	93,38	3.299.248.700,00	513.762.150,00
Kecamatan Mandau	24.887.394.904,00	23.523.819.545,40	94,52	17.173.595.051,00	6.350.224.484,40
Kecamatan Pinggir	5.494.939.563,00	5.075.803.558,00	92,37	4.647.294.041,00	428.509.517,00
Kecamatan Bathin Solapan	4.096.970.396,00	3.985.034.506,00	97,27	2.681.402.312,00	1.303.632.194,00
Kecamatan Talang Muandau	3.837.639.499,00	3.395.795.525,00	88,49	2.483.821.010,00	911.974.515,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.126.818.791,00	2.205.158.903,00	70,52	1.680.621.618,00	524.537.285,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	7.976.866.622,00	(7.976.866.622,00)
Jumlah	1.238.509.280.437,70	1.097.486.691.586,15	88,61	953.384.530.032,00	164.102.161.564,15

3. Belanja Subsidi

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
10.642.684.920,00	10.642.584.920,00	100,00	9.618.696.893,00	1.023.888.027,00

Realisasi belanja subsidi selama TA 2021 adalah sebesar Rp10.642.584.920,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp10.642.684.920,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.023.888.027,00 atau 10,64% dibandingkan realisasi TA 2020 yang berjumlah Rp9.618.696.893,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56 Belanja Subsidi

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/a	e	f=e-a
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	10.642.684.920,00	10.642.584.920,00	100,00	9.618.696.893,00	1.023.888.027,00
Jumlah	10.642.684.920,00	10.642.584.920,00	100,00	9.618.696.893,00	1.023.888.027,00

Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalokasikan dana subsidi kepada Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Mekanisme Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

4. Belanja Hibah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
40.945.646.000,00	35.834.828.114,59	87,52	71.023.667.791,00	(35.188.839.676,41)

Realisasi belanja hibah selama TA 2021 adalah sebesar Rp35.834.828.114,59 atau 87,52% dari anggaran sebesar Rp40.945.646.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.188.839.676,41 atau 49,55% dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp71.023.667.791,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.57 Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=e/b	e	f=c-e
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	39.288.083.500,00	34.177.755.114,59	86,99	0,00	34.177.755.114,59
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.657.562.500,00	1.657.073.000,00	99,97	0,00	1.657.073.000,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	43.016.390.862,00	(43.016.390.862,00)
Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	13.701.866.551,00	(13.701.866.551,00)
Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.636.221.378,00	(4.636.221.378,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOP PAUD Masyarakat / Swasta	0,00	0,00	0,00	7.048.800.000,00	(7.048.800.000,00)
BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.103.500.000,00	(1.103.500.000,00)
Belanja Hibah kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	1.516.889.000,00	(1.516.889.000,00)
Jumlah	40.945.646.000,00	35.834.828.114,59	87,52	71.023.667.791,00	(35.188.839.676,41)

Rincian Belanja Hibah berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.58 Rincian Belanja Hibah Berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=e/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	13.117.116.000,00	9.332.804.951,87	71,15	0,00	9.332.804.951,87
Dinas Kesehatan	440.000.000,00	428.873.196,00	97,47	0,00	428.873.196,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.584.000.000,00	10.147.920.907,72	95,88	0,00	10.147.920.907,72
Dinas Sosial	600.780.000,00	598.238.272,00	99,58	0,00	598.238.272,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	6.415.000.000,00	6.414.577.277,00	99,99	0,00	6.414.577.277,00
Dinas Perikanan	1.114.187.500,00	1.099.164.360,00	98,65	0,00	1.099.164.360,00
Sekretariat Daerah	7.017.000.000,00	6.156.176.150,00	87,73	0,00	6.156.176.150,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.657.562.500,00	1.657.073.000,00	99,97	0,00	1.657.073.000,00
PPKD	0,00	0,00	0,00	71.023.667.791,00	(71.023.667.791,00)
Jumlah	40.945.646.000,00	35.834.828.114,59	87,52	71.023.667.791,00	(35.188.839.676,41)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
41.987.368.819,00	37.194.371.163,00	88,58	0,00	37.194.371.163,00

Realisasi belanja bantuan sosial selama TA 2021 adalah sebesar Rp37.194.371.163,00 atau 88,58% dari anggaran sebesar Rp41.987.368.819,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp37.194.371.163,00 dari realisasi TA 2020 berjumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.043.428.819,00	6.292.659.161,00	62,65	0,00	6.292.659.161,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	29.942.000.000,00	29.249.772.002,00	97,69	0,00	29.249.772.002,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.976.940.000,00	1.626.940.000,00	82,30	0,00	1.626.940.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	25.000.000,00
Jumlah	41.987.368.819,00	37.194.371.163,00	88,58	0,00	37.194.371.163,00

Tabel 5.60 Rincian Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Sosial	41.632.228.819,00	37.189.231.163,00	89,33	0,00	37.189.231.163,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	640.000,00	640.000,00	100,00	0,00	640.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Mandau	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	4.500.000,00
Jumlah	41.987.368.819,00	37.194.371.163,00	88,58	0,00	37.194.371.163,00

B. Belanja Modal

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
745.222.567.165,00	679.492.555.913,42	91,18	500.329.662.982,84	179.162.892.930,58

Realisasi belanja modal TA 2021 sebesar Rp679.492.555.913,42 atau 91,18% dari anggaran sebesar Rp745.222.567.165,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp179.162.892.930,58 atau 35,81% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp500.329.662.982,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61 Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Tanah	449.000.000,00	412.940.853,70	91,97	815.248.000,00	(402.307.146,30)
Belanja Peralatan dan Mesin	144.778.803.836,00	121.410.901.246,66	83,86	97.002.850.538,45	24.408.050.608,21
Belanja Gedung dan Bangunan	152.951.705.243,00	131.209.405.612,36	88,78	131.718.395.987,69	(508.990.375,33)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	435.735.010.686,00	415.733.389.785,70	95,41	260.976.621.697,70	154.756.768.088,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	11.308.047.400,00	10.725.918.415,00	94,85	9.816.546.659,00	909.371.766,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	745.222.567.165,00	679.462.555.913,42	91,18	500.329.662.982,64	179.162.892.930,58

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Rincian realisasi modal berdasarkan jenis aset tetap dan hak kepemilikannya tahun Anggaran 2021. Adapun realisasi belanja modal selama TA 2021 dan TA 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Tanah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
449.000.000,00	412.940.853,70	91,97	815.248.000,00	(402.307.146,30)

Realisasi belanja modal tanah selama TA 2021 sebesar Rp412.940.853,70 atau 91,97% dari anggaran sebesar Rp449.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp402.307.146,30 atau 49,35% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp815.248.000,00.

Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp412.940.853,70 merupakan belanja modal tanah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62 Belanja Tanah

Belanja Tanah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Belanja Modal Tanah Persil	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lapangan	414.000.000,00	412.940.853,70	99,74	0,00	412.940.853,70
Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	0,00	0,00	0,00	94.060.000,00	(94.060.000,00)
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	721.188.000,00	(721.188.000,00)
Jumlah	449.000.000,00	412.940.853,70	91,97	815.248.000,00	(402.307.146,30)

Rincian Belanja Modal Tanah berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.63 Rincian Belanja Modal Tanah berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Dinas Pendidikan	200.000.000,00	199.468.598,70	99,73	0,00	199.468.598,70
Dinas Kesehatan	35.000.000,00	0,00	0,00	721.188.000,00	(721.188.000,00)
Dinas Sosial	214.000.000,00	213.472.255,00	99,75	0,00	213.472.255,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	94.060.000,00	(94.060.000,00)
Jumlah	449.000.000,00	412.940.853,70	91,97	815.248.000,00	(402.307.146,30)

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
144.776.803.836,00	121.410.901.246,66	83,86	97.002.850.638,45	24.408.050.608,21



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin selama TA 2021 sebesar Rp121.410.910.246,66 atau 83,86% dari anggaran sebesar Rp144.778.803.836,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp24.408.050.608,21 atau 25,16% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp97.002.850.638,45.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp121.410.910.246,66 merupakan belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2021		Realisasi 2021		%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
	a	b	c	d=cb			
Belanja Modal Alat Besar		9.291.787.340,00	9.013.312.173,56	97,00		0,00	9.013.312.173,56
Belanja Modal Alat Angkutan		11.288.252.548,00	7.713.261.164,00	68,33		0,00	7.713.261.164,00
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur		168.509.000,00	157.631.700,00	93,54		0,00	157.631.700,00
Belanja Modal Alat Pertanian		433.388.000,00	416.617.000,00	96,13		0,00	416.617.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		30.730.859.117,00	28.486.579.569,00	92,70		0,00	28.486.579.569,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		3.206.116.000,00	3.171.221.200,00	98,91		0,00	3.171.221.200,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		41.609.096.222,00	36.587.272.011,00	87,93		0,00	36.587.272.011,00
Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium		4.680.523.720,00	1.089.849.430,00	23,28		862.778.000,00	227.071.430,00
Belanja modal Pengadaan Komputer		24.137.718.100,00	19.716.295.555,10	81,68		7.116.011.200,00	12.600.284.355,10
Belanja Modal Alat Eksplorasi		131.672.000,00	131.246.000,00	99,68		0,00	131.246.000,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		56.312.600,00	44.349.000,00	78,76		0,00	44.349.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		225.283.000,00	205.417.000,00	91,18		0,00	205.417.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		39.980.000,00	35.690.000,00	89,27		0,00	35.690.000,00
Belanja Modal Alat Peraga		215.038.000,00	206.059.950,00	95,82		0,00	206.059.950,00
Belanja Modal Rambu-Rambu		1.963.988.000,00	1.951.797.450,00	99,38		0,00	1.951.797.450,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga		1.012.000.000,00	1.010.435.100,00	99,85		0,00	1.010.435.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		10.710.362.189,00	10.507.583.201,00	98,11		0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		4.877.920.000,00	966.283.743,00	19,81		0,00	966.283.743,00
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu		0,00	0,00	99,40		498.951.000,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor		0,00	0,00	0,00		1.891.093.287,00	(1.891.093.287,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin		0,00	0,00	0,00		38.597.600,00	(38.597.600,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	33.950.000,00	(33.950.000,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	250.700.000,00	(250.700.000,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	1.893.462.445,45	(1.893.462.445,45)
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	4.595.971.100,00	(4.595.971.100,00)
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	6.232.026.260,00	(6.232.026.260,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	2.094.258.800,00	(2.094.258.800,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	33.550.000,00	(33.550.000,00)
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	118.943.000,00	(118.943.000,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	35.103.800.962,00	(35.103.800.962,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.513.565.236,00	(2.513.565.236,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	1.176.041.930,00	(1.176.041.930,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)
Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00	0,00	167.230.000,00	(167.230.000,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	88.973.000,00	(88.973.000,00)
Belanja Modal BLUD	0,00	0,00	0,00	11.689.627.770,00	(11.689.627.770,00)
Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00	0,00	21.595.819.048,00	(21.595.819.048,00)
Jumlah	144.778.803.338,00	121.430.901.246,86	63,86	97.002.850.638,45	14.398.416.407,21

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.65 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Ketahanan/Perumihan
a	b	c	d=a/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	27.719.525.614,00	19.941.679.506,10	71,94	24.783.182.978,00	(4.841.503.471,90)
Dinas Kesehatan	18.827.361.595,00	13.561.781.495,00	80,53	13.081.061.383,00	470.720.112,00
RSUD Bengkalis	26.280.604.127,00	22.261.500.053,56	84,77	27.497.731.129,00	(5.236.231.075,44)
RSUD Kecamatan Mandau	14.102.703.492,00	10.899.045.105,00	75,87	10.642.582.176,00	65.462.929,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.469.587.000,00	4.222.115.400,00	94,46	303.555.000,00	3.918.660.400,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	59.357.000,00	59.160.000,00	99,67	0,00	59.160.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	325.598.000,00	325.478.000,00	99,96	277.300.000,00	48.178.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran	1.543.908.250,00	997.953.000,00	64,64	904.238.700,00	93.714.300,00
Satuan Polisi Pamong Praja	136.317.000,00	122.300.000,00	89,72	0,00	122.300.000,00
Dinas Sosial	1.120.836.000,00	1.064.190.900,00	94,95	299.374.500,00	764.816.400,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	148.368.600,00	147.767.900,00	99,60	0,00	147.767.900,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	241.807.000,00	232.573.500,00	96,18	0,00	232.573.500,00
Dinas Ketahanan Pangan	164.708.000,00	163.451.000,00	99,24	0,00	163.451.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	946.086.220,00	916.571.830,00	96,88	998.103.887,00	(81.532.057,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.517.874.000,00	2.042.302.000,00	81,11	2.215.664.200,00	(173.362.200,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55.038.400,00	36.565.400,00	66,44	12.100.000,00	24.465.400,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	330.476.000,00	330.203.000,00	99,92	63.100.000,00	267.103.000,00
Dinas Perhubungan	5.186.278.888,00	3.895.053.750,00	75,10	1.083.363.000,00	2.811.890.750,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.229.210.000,00	1.226.312.400,00	99,76	775.294.200,00	451.018.200,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	436.778.600,00	426.300.000,00	97,60	0,00	426.300.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	198.004.000,00	192.269.000,00	97,10	42.300.000,00	149.969.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.569.247.000,00	1.551.944.200,00	98,90	39.990.000,00	1.511.954.200,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	688.662.000,00	685.646.000,00	99,56	242.890.000,00	442.756.000,00
Dinas Perikanan	439.064.000,00	437.201.500,00	99,58	119.446.000,00	317.755.500,00
Dinas Perkebunan	1.459.951.800,00	1.380.632.400,00	94,57	0,00	1.380.632.400,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.280.573.500,00	1.225.707.000,00	95,72	0,00	1.225.707.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.066.722.000,00	1.060.635.350,00	97,60	203.150.000,00	857.485.350,00
Sekretariat Daerah	8.065.959.000,00	7.964.461.400,00	98,74	4.915.984.690,00	3.048.476.710,00
Sekretariat DPRD	4.250.484.000,00	4.029.884.975,00	94,81	2.548.557.245,45	1.481.327.729,55



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.336.725.000,00	1.846.582.800,00	78,98	1.140.410.050,00	705.172.750,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.935.553.000,00	9.235.859.000,00	92,96	2.583.899.700,00	6.651.959.300,00
Badan Pendapatan Daerah	2.050.063.000,00	1.894.576.720,00	92,42	0,00	1.894.576.720,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	288.557.200,00	280.117.200,00	97,08	58.985.000,00	221.132.200,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	309.450.000,00	309.050.000,00	99,87	44.498.000,00	264.552.000,00
Inspektorat	646.534.000,00	616.205.000,00	95,31	2.500.000,00	613.705.000,00
Kecamatan Bengkalis	44.423.800,00	44.423.800,00	100,00	74.500.000,00	(30.076.200,00)
Kecamatan Bantan	176.919.000,00	176.266.000,00	99,63	44.062.500,00	132.203.500,00
Kecamatan Bukit Batu	446.124.650,00	442.077.900,00	99,09	22.300.000,00	419.777.900,00
Kecamatan Siak Kecil	173.335.300,00	171.438.300,00	98,91	61.250.000,00	110.188.300,00
Kecamatan Bandar Laksamana	842.973.500,00	840.141.262,00	99,66	157.411.000,00	682.730.262,00
Kecamatan Rupat	744.060.400,00	743.760.400,00	99,96	203.670.000,00	540.090.400,00
Kecamatan Rupat Utara	282.537.000,00	275.605.000,00	97,55	22.110.000,00	253.495.000,00
Kecamatan Mandau	2.207.522.800,00	2.176.267.500,00	98,58	880.004.300,00	1.287.263.200,00
Kecamatan Pinggir	100.216.000,00	93.848.000,00	93,65	71.182.000,00	22.666.000,00
Kecamatan Bathin Solapan	686.949.000,00	670.311.900,00	97,58	418.696.000,00	251.615.900,00
Kecamatan Talang Muandau	582.176.100,00	359.349.400,00	61,73	154.403.000,00	204.946.400,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	63.593.000,00	45.335.000,00	71,29	0,00	45.335.000,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
Jumlah	144.778.903.838,00	121.410.901.246,86	83,86	97.002.850.638,45	24.408.050.608,21

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenalkali/ Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
152.951.705.243,00	131.209.405.612,36	85,78	131.718.395.987,69	(608.990.375,33)

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan selama TA 2021 sebesar Rp131.209.405.612,36 atau 85,78% dari anggaran sebesar Rp152.951.705.243,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp508.990.375,33 atau 0,39% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp131.718.395.987,69.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp131.209.405.612,36 merupakan belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.66 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	134.488.390.435,00	117.275.395.942,64	87,20	124.412.877.842,69	(7.137.481.700,06)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5.140.132.308,00	4.601.227.462,67	89,52	3.146.670.300,00	1.454.557.162,67
Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	11.010.682.500,00	7.749.712.207,05	70,38	292.087.000,00	7.457.625.207,05
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.312.500.000,00	1.583.070.000,00	68,46	0,00	1.583.070.000,00
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	1.055.367.000,00	(1.055.367.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	0,00	0,00	594.438.000,00	(594.438.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	7.610.000,00	(7.610.000,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	2.209.346.045,00	(2.209.346.045,00)
Jumlah	152.951.705.243,00	131.209.405.612,36	85,78	131.718.395.997,69	(606.990.375,33)

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.67 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	60.934.230.275,00	47.937.730.125,83	78,67	40.150.608.453,73	7.787.121.672,10
Dinas Kesehatan	17.336.400.000,00	15.535.364.481,01	89,61	18.750.793.382,73	(3.215.428.901,72)
RSUD Bengkalis	5.891.390.000,00	5.329.656.804,85	90,47	206.025.000,00	5.123.631.804,85
RSUD Kecamatan Mandau	2.100.000.000,00	1.644.787.612,09	78,32	2.590.731.831,86	(945.944.219,77)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.180.000.000,00	26.895.036.459,35	83,58	29.278.195.862,00	(2.381.159.402,65)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	1.035.000.000,00	783.071.800,00	75,66	2.182.309.088,00	(1.399.237.288,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	208.458.000,00	207.546.940,00	99,56	1.784.498.715,00	(1.576.951.775,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	510.000.000,00	470.426.500,00	92,24	244.196.000,00	226.230.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(27.000.000,00)
Dinas Sosial	1.259.860.000,00	1.257.076.090,00	99,78	296.717.300,00	960.358.790,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	802.282.500,00	796.206.766,16	99,24	620.369.163,00	175.837.603,16
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	31.370.000,00	(31.370.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan	460.803.000,00	459.327.000,00	99,68	0,00	459.327.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Lingkungan Hidup	205.000.000,00	204.693.000,00	99,85	1.813.985.334,00	(1.609.292.334,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.400.000.000,00	1.391.635.000,00	99,40	882.563.428,00	509.071.572,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.374.380.000,00	3.366.451.414,00	99,77	5.714.328.200,00	(2.347.876.786,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.012.432.900,00	988.737.826,00	98,65	1.338.608.858,00	(339.871.032,00)
Dinas Perhubungan	2.120.653.010,00	2.096.597.213,55	98,87	4.601.651.921,90	(2.505.054.708,35)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	96.693.000,00	(96.693.000,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	88.588.000,00	(88.588.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	110.000.000,00	109.772.000,00	99,79	451.869.000,00	(342.097.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.955.000.000,00	2.876.878.760,00	97,36	4.326.530.260,00	(1.449.651.500,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	897.300.000,00	891.266.160,22	99,33	524.203.400,00	367.062.760,22
Dinas Perikanan	488.312.500,00	476.961.000,00	97,68	81.630.000,00	395.331.000,00
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.453.050.000,00	1.448.151.239,00	99,66	0,00	1.448.151.239,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.078.800.000,00	7.022.319.633,13	99,20	2.783.350.960,00	4.238.968.673,13
Sekretariat Daerah	1.757.000.000,00	1.741.388.000,00	99,11	8.036.812.534,35	(6.295.424.534,35)
Sekretariat DPRD	1.331.600.000,00	1.314.147.134,80	98,69	2.171.769.252,10	(857.622.117,30)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.050.000.000,00	2.006.260.600,00	97,87	796.413.808,12	1.209.846.791,88
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	174.391.000,00	(174.391.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	285.000.000,00	284.608.609,41	99,86	0,00	284.608.609,41
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	129.000.000,00	128.312.000,00	99,47	0,00	128.312.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	825.000.000,00	821.707.000,00	99,60	394.013.000,00	427.694.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Kecamatan Bengkalis	498.300.000,00	494.989.400,00	99,34	0,00	494.989.400,00
Kecamatan Bantan	208.732.308,00	208.322.732,00	99,80	4.500.000,00	203.822.732,00
Kecamatan Bukit Batu	145.000.000,00	144.277.000,00	99,50	199.533.500,00	(55.256.500,00)
Kecamatan Siak Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Kecamatan Bandar Laksamana	374.700.000,00	370.586.110,64	98,90	181.186.000,00	189.400.110,64
Kecamatan Rupal	513.619.750,00	511.699.500,00	99,63	107.320.000,00	404.379.500,00
Kecamatan Rupal Utara	86.000.000,00	85.950.000,00	99,94	0,00	85.950.000,00
Kecamatan Mandau	909.401.000,00	872.548.700,32	95,95	187.752.734,90	684.795.965,42
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Kantor Camat Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Kantor Camat Talang Muandau	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.000.000,00	24.915.000,00	99,66	0,00	24.915.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	599.887.000,00	(599.887.000,00)
Jumlah	152.951.705.243,00	131.209.405.642,95	85,78	131.718.396.987,59	(508.996.375,33)

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
435.735.010.686,00	415.733.389.785,70	95,41	260.976.621.697,70	154.756.768.088,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan Jaringan selama TA 2021 sebesar Rp415.733.389.785,70 atau 95,41% dari anggaran sebesar Rp435.735.010.686,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp154.756.768.088,00 atau 59,30% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp260.976.621.697,70.

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp415.733.389.785,70 merupakan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja modal Pengadaan Jalan	319.967.900.277,00	310.137.253.416,94	96,93	190.505.311.790,76	119.631.941.626,18
Belanja Modal Jembatan	2.737.627.574,00	2.662.314.063,00	97,25	6.503.064.464,00	(3.840.750.401,00)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.712.650.000,00	6.486.552.331,74	84,10	6.641.068.705,28	(154.516.373,54)
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	9.090.000.000,00	9.080.444.402,93	99,89	0,00	9.080.444.402,93
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	15.777.000.000,00	14.407.400.698,80	91,32	2.658.880.725,00	11.748.519.973,80
Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	89.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	859.000.000,00	368.243.892,96	41,70	26.693.886.785,00	(26.335.642.892,04)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	27.287.780.000,00	24.657.925.233,05	90,36	10.543.647.020,42	14.114.278.212,63
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	22.750.000.000,00	21.733.223.837,45	95,53	0,00	21.733.223.837,45
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.003.133.335,00	992.228.845,00	98,91	0,00	992.228.845,00
Belanja Modal Instalasi Lain	403.500.000,00	395.664.000,00	98,06	0,00	395.664.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	20.000.000.000,00	18.012.199.825,74	90,06	0,00	18.012.199.825,74
Belanja Modal Jaringan Listrik	7.177.319.500,00	5.936.255.938,09	82,71	0,00	5.936.255.938,09
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	880.000.000,00	873.683.500,00	99,28	0,00	873.683.500,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	48.898.000,00	(48.898.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	224.590.000,00	(224.590.000,00)
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	683.236.348,24	(683.236.348,24)
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	16.474.038.859,00	(16.474.038.859,00)
Jumlah	435.735.010.686,00	415.733.389.765,70	95,41	250.976.621.697,70	154.756.768.088,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.69 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2021		Realisasi 2021		Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan	
	a	b	c	d=c/b		e	f=c-e
Dinas Pendidikan		289.100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dinas Kesehatan		0,00	0,00	0,00	224.590.000,00		(224.590.000,00)
RSUD Bengkalis		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RSUD Kecamatan Mandau		880.000.000,00	873.683.500,00	99,28	0,00		873.683.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		299.297.297.451,00	287.668.463.551,75	96,11	191.259.520.718,28		96.408.942.833,47
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		117.335.001.000,00	109.499.050.863,20	93,32	55.879.442.827,07		53.619.608.036,13
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		221.778.000,00	221.004.785,00	99,65	0,00		221.004.785,00
Dinas Pemadam Kebakaran		70.000.000,00	69.571.000,00	99,39	0,00		69.571.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dinas Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		180.000.000,00	179.814.892,96	99,90	0,00		179.814.892,96
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dinas Ketahanan Pangan		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dinas Lingkungan Hidup		785.133.335,00	774.619.000,00	98,66	0,00		774.619.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		229.999.500,00	227.634.000,00	98,97	0,00		227.634.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0,00	0,00	0,00	49.632.000,00		(49.632.000,00)
Dinas Perhubungan		3.326.452.000,00	3.198.052.671,17	96,14	79.200.000,00		3.118.852.671,17
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		675.000.000,00	674.189.000,00	99,88	0,00		674.189.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	648.000.000,00	646.600.000,00	99,78	174.568.000,00	472.042.000,00
Dinas Perkebunan	3.473.630.000,00	3.444.191.685,71	99,15	0,00	3.444.191.685,71
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	4.793.625.000,00	4.770.487.993,00	99,52	0,00	4.770.487.993,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	716.000.000,00	696.297.731,66	97,25	0,00	696.297.731,66
Sekretariat Daerah	337.750.000,00	337.238.000,00	99,85	167.243.000,00	169.995.000,00
Sekretariat DPRD	170.000.000,00	166.914.000,00	98,18	0,00	166.914.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	9.550.000,00	(9.550.000,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	200.000.000,00	199.290.000,00	99,65	0,00	199.290.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bengkalis	417.062.400,00	414.148.000,00	99,30	2.208.205.117,00	(1.794.059.117,00)
Kecamatan Bantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Batu	28.500.000,00	28.235.000,00	99,07	486.710.700,00	(458.475.700,00)
Kecamatan Siak Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupat	525.232.000,00	521.793.000,00	99,35	2.713.622.800,00	(2.191.829.800,00)
Kecamatan Rupat Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Mandau	940.400.000,00	928.013.111,25	98,68	3.975.637.554,35	(3.047.624.443,10)
Kecamatan Pinggir	186.300.000,00	185.350.000,00	99,49	1.017.848.981,00	(832.498.981,00)
Kecamatan Bathin Solehan	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00	8.750.000,00
Kantor Camat Talang Muandau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.730.860.000,00	(2.730.860.000,00)
Jumlah	435.735.010.686,00	415.733.389.785,70	95,41	260.976.621.697,70	154.756.768.088,00

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
11.308.047.400,00	10.725.918.415,00	94,85	9.816.546.659,00	909.371.756,00

Realisasi belanja modal Aset tetap lainnya selama TA 2021 sebesar Rp10.725.918.415,00 atau 94,85% dari anggaran sebesar Rp11.308.047.400,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp909.371.756,00 atau 9,26% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp9.816.546.659,00.

Realisasi belanja modal Aset tetap lainnya sebesar Rp10.725.918.415,00 merupakan belanja modal Aset Tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70 Belanja Aset Tetap Lainnya

Unsur	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/a	e	f=c-e
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	319.115.000,00	233.402.265,00	73,14	0,00	233.402.265,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Modal Bahan Perustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	10.643.000,00	10.450.000,00	98,19	0,00	10.450.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.425.859.800,00	1.022.809.800,00	71,73	0,00	1.022.809.800,00
Belanja Modal Alat Bercorak kebudayaan	1.052.745.000,00	1.041.769.700,00	98,96	0,00	1.041.769.700,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	340.000.000,00	279.100.000,00	82,09	0,00	279.100.000,00
Belanja modal Pengadaan Buku	0,00	0,00	0,00	45.492.000,00	(45.492.000,00)
Belanja modal Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	(4.050.000,00)
Belanja Modal Aset tetap lainnya Dana BOS	8.159.664.600,00	8.138.386.650,00	99,74	9.767.004.659,00	(1.628.618.009,00)
Jumlah	11.308.847.400,00	10.725.918.415,00	94,85	9.816.546.659,00	909.371.756,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.71 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=cb	e	f=a-e
Dinas Pendidikan	8.543.164.600,00	8.521.246.450,00	99,74	9.767.004.659,00	(1.245.758.209,00)
Dinas Kesehatan	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	0,00	19.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41.843.000,00	41.636.700,00	99,51	24.992.000,00	16.644.700,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	-4.050.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	160.000.000,00	153.163.265,00	95,73	0,00	153.163.265,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.028.000.000,00	625.387.200,00	60,84	0,00	625.387.200,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.475.000,00	6.475.000,00	100,00	0,00	6.475.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	123.500.000,00	73.450.000,00	59,47	0,00	73.450.000,00
Sekretariat Daerah	791.345.000,00	780.143.000,00	98,58	0,00	780.143.000,00
Sekretariat DPRD	95.368.000,00	83.100.000,00	87,14	0,00	83.100.000,00
Badan pendapatan Daerah	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100.000.000,00	99.500.000,00	99,50	0,00	99.500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penelitian dan pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bengkulu	241.800,00	241.800,00	100,00	5.500.000,00	-5.258.200,00
Kecamatan Bukit Batu	37.694.000,00	37.567.000,00	99,66	0,00	37.567.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Muanda	2.784.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
Kecamatan Bandar Laksamana	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	900.000,00
Kecamatan Rupat	283.000.000,00	282.600.000,00	99,86	0,00	282.600.000,00
Kecamatan Pinggir	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muanda	2.900.000,00	1.508.000,00	52,00	0,00	1.508.000,00
Jumlah	11.306.047.400,00	10.725.918.415,00	94,85	9.816.546.659,00	909.371.756,00

6. Belanja Aset Lainnya

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak ada realisasi belanja modal Aset lainnya pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

C. Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
4.248.534.272,00	9.655.040,00	0,23	152.938.659.147,00	(152.929.004.107,00)

Realisasi Belanja Tidak Terduga selama TA 2021 adalah sebesar Rp9.655.040,00 atau 0,23% dari anggarannya sebesar Rp4.248.534.272,00 mengalami penurunan sebesar Rp152.929.004.107,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp152.938.659.147,00.

5.1.3. Transfer

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
414.831.163.832,00	413.964.685.122,00	99,79	353.910.554.625,00	60.054.130.497,00

Realisasi Transfer Kabupaten Bengkalis tahun selama 2021 adalah sebesar Rp413.964.685.122,00 atau 99,79% dari nilai anggaran sebesar Rp414.831.163.832,00. Jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp353.910.554.625,00 mengalami kenaikan sebesar Rp60.054.130.497,00 atau 16,97% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72 Transfer

Urutan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	d	d=c/b	e	f=e-c
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	11.268.728.603,00	11.265.978.968,00	99,98	5.678.949.377,00	5.587.029.591,00
Transfer Bantuan Keuangan	403.662.435.229,00	402.698.706.154,00	99,79	348.231.605.248,00	54.467.100.906,00
Jumlah	414.831.163.832,00	413.964.685.122,00	99,79	353.910.554.625,00	60.054.130.497,00

A. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
11.268.728.603,00	11.265.978.968,00	99,98	5.678.949.377,00	5.587.029.591,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan selama TA 2021 adalah sebesar Rp11.265.978.968,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp11.268.728.603,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.587.029.591,00 atau 98,38% dibandingkan realisasi TA 2020 yang berjumlah Rp5.678.949.377,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Urutan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-c
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	9.308.845.804,00	9.306.096.195,00	99,97	4.915.347.049,00	4.390.749.146,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.959.882.799,00	1.959.882.773,00	100,00	763.602.328,00	1.196.280.445,00
Jumlah	11.266.728.603,00	11.265.978.368,00	99,98	5.879.549.377,00	5.567.029.691,00

Transfer Bagi hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bengkalis Nomor 8 Tahun 2021 tentang pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.

B. Transfer Bantuan Keuangan

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
403.562.435.229,00	402.698.706.154,00	99,79	348.231.605.248,00	54.467.100.906,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan selama selama TA 2021 adalah sebesar Rp402.698.706.154,00 atau 99,79% dari anggaran sebesar Rp403.562.435.229,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.467.100.906,00 atau 15,64% dibandingkan realisasi TA 2020 yang berjumlah Rp348.231.605.248,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74 Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	376.362.435.229,00	375.634.217.396,00	99,81	0,00	375.634.217.396,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	27.200.000.000,00	27.064.488.758,00	99,50	0,00	27.064.488.758,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - ADD Se-Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	0,00	203.271.413.648,00	(203.271.413.648,00)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Dan Desa Adat dari APBN Se-Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	0,00	131.360.191.500,00	(131.360.191.500,00)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - P3ID / Bantuan Khusus Se-Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	0,00	13.600.000.000,00	(13.600.000.000,00)
Jumlah	403.562.435.229,00	402.698.706.154,00	99,79	348.231.605.248,00	54.467.100.906,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - ADD Se-Kabupaten Bengkalis terealisasi sebesar Rp241.669.300.229,00 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Dan Desa Adat dari APBN Se-Kabupaten Bengkalis terealisasi sebesar Rp133.964.917.167,00 berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - P3ID / Bantuan Khusus Se-Kabupaten Bengkalis terealisasi sebesar Rp27.064.488.758 berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 93/KPTS/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus Percepatan Pembangunan Penyediaan Infrastruktur Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.

5.1.4. Surplus (Defisit)

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
(151.011.573.806,00)	1.028.947.775.256,36	(681,37)	(71.079.021.319,82)	1.100.026.797.076,18

Jumlah Surplus (Defisit) sebesar Rp1.028.951.275.256,36 tersebut merupakan surplus anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun Anggaran 2021 dimana jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan lebih besar dari jumlah belanja daerah dan transfer. Total realisasi pendapatan daerah TA 2021 sebesar Rp4.321.902.433.413,72 sementara total realisasi belanja daerah dan transfer TA 2021 sebesar Rp3.292.951.158.157,36.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.1.5. Pembiayaan

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
151.011.573.806,00	151.011.573.806,55	100,00	222.090.595.626,37	(71.079.021.819,82)

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama TA 2021 sebesar Rp151.011.573.806,55 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu atau akhir tahun 2020.

Tabel 5.75 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=e/b	e	f=c-e
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	151.011.573.806,00	151.011.573.806,55	100,00	222.090.595.626,37	(71.079.021.819,82)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	151.011.573.806,00	151.011.573.806,55	100,00	222.090.595.626,37	(71.079.021.819,82)

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan selama TA 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Tabel 5.76 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=e/b	e	f=c-e
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.6. SiLPA

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	1.179.959.349.062,91	0,00	222.090.595.626,37	957.868.753.436,54

Jumlah SiLPA sebesar Rp1.179.962.849.062,91 tersebut merupakan selisih lebih anggaran untuk tahun Anggaran 2021 dimana jumlah pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan secara keseluruhan lebih besar dari jumlah belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Total realisasi penerimaan TA 2021 sebesar Rp4.472.914.007.220,27 sementara total realisasi pengeluaran TA 2021 sebesar Rp3.292.951.158.157,36.

Tabel 5.77 SiLPA

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=e/c	e	f=c-e
Pendapatan Daerah	3.443.486.942.467,70	4.321.908.588.453,72	125,51	2.917.393.229.734,02	1.404.515.358.719,70
Belanja dan Transfer Daerah	3.594.498.516.273,70	3.292.960.813.197,36	91,61	2.988.472.251.553,84	304.488.561.643,52
Surplus/ (Defisit): 1- 2	(151.011.573.806,00)	1.028.947.775.256	(681,37)	(71.079.021.819,82)	1.100.026.797.076,18
Penerimaan Pembiayaan	151.011.573.806,00	151.011.573.806,55	100,00	222.090.595.626,37	(71.079.021.819,82)
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pembiayaan Netto : 4-5	151.011.573.806,00	151.011.573.806,55	100,00	222.090.595.626,37	(71.079.021.819,82)
SILPA (SIKPA) 346	0,00	1.179.959.349.062,91	0,00	151.011.573.806,55	1.028.947.775.256,36

Jumlah SILPA selama TA 2021 sebesar Rp1.179.959.349.062,91 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.028.951.275.256,36 atau 781,37% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp151.011.573.806,55 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.78 Rincian SILPA

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	%
Kas di BUD	1.168.554.249.066,37	144.655.673.806,01	12,38
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.581.400,00	1.876.550.420,00	118,663,87
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	6.308,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	1.758.070,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara JKN	0,00	1.624.173.188,00	0,00
Kas di Bendahara BLUD	11.349.091.689,54	2.715.869.028,54	23,93
Kas di Bendahara BOS	52.662.329,00	139.307.364,00	264,53
Jumlah	1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55	781,37

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5. 2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**5. 2. 1. Saldo Anggaran Lebih Awal**

Adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 sebesar Rp151.011.573.806,55, mengalami penurunan sebesar Rp71.079.021.819,82 atau 32,00% jika dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp222.090.595.626,37.

5. 2. 2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.

Tahun 2021, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp151.011.573.806,37, mengalami penurunan sebesar Rp71.079.021.819,82 atau 32,00% jika dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp222.090.595.626,37.

5. 2. 3. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA selama TA 2021 sebesar Rp1.179.962.849.062,91 mengalami kenaikan sebesar Rp1.028.951.275.256,36 atau 681,37 % jika dibandingkan TA 2020 sebesar Rp151.011.573.806,55.

5. 2. 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya.

Untuk Tahun 2021 tidak terdapat koreksi.

5. 2. 5. Saldo Anggaran Lebih selama TA 2021 sebesar Rp1.179.962.849.062,91 terdiri dari :

Saldo Anggaran Lebih TA 2021 sebesar Rp1.179.962.849.062,91

Tabel 5. 81 Rincian Saldo Anggaran Lebih

	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Tren
	Rp	Rp	%
Kas di BUD	1.168.554.249.086,37	144.655.673.806,01	707,82
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.581.400,00	1.876.550.420,00	-99,92
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	6.308,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	1.758.070,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara JKN	0,00	1.624.173.188,00	-100,00
Kas di Bendahara BLUD	11.349.091.889,54	2.715.869.028,54	317,88
Kas di Bendahara BOS	52.862.329,00	139.307.364,00	-62,20
Jumlah	1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55	607,90

SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp151.011.573.806,55.

Penerimaan SAL TA 2021 terdiri dari :

Tabel 5. 82 Rincian Penerimaan SAL

	Tahun 2021	Tahun 2020	Tren
Pendapatan Asli Daerah	284.235.094.573,72	251.925.869.915,53	12,82
Pendapatan Transfer	3.955.128.583.880,00	2.573.597.479.818,49	53,68
Lain-lain Pendapatan yang Sah	82.544.910.000,00	91.869.880.000,00	-10,15
Jumlah	4.321.908.588.453,72	2.917.393.229.734,02	48,14
Belanja Operasi	2.199.493.917.121,94	1.981.293.374.799,00	11,01

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Modal	679.492.555.913,42	500.329.662.982,84	35,81
Belanja Tidak Terduga	9.655.040,00	152.938.659.147,00	-99,99
Transfer	413.964.685.122,00	353.910.554.625,00	16,97
Jumlah	3.292.960.813.197,36	2.988.472.251.553,84	10,19
Penerimaan Pembiayaan	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37	-32,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37	(32,00)

Tabel 5. 83 Rincian SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2021	Tahun 2020	Perubahan
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37	-32,00
Pendapatan	4.321.908.588.453,72	2.917.393.229.734,02	48,14
Belanja dan Transfer	3.292.960.813.197,36	2.988.472.251.553,84	10,19
Penerimaan Pembiayaan	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37	-32,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55	681,37

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2021 berasal dari:

Tabel 5. 84 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

	Tahun 2021	Tahun 2020	Perubahan
Realisasi Pendapatan	4.321.908.588.453,72	2.917.393.229.734,02	48,14
Realisasi Belanja dan Transfer	3.292.960.813.197,36	2.988.472.251.553,84	10,19
Penerimaan Pembiayaan	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37	(32,00)
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
SiLPA	1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55	681,37

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5. 3. PENJELASAN POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas.

5. 3. 1. Aset

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
9.358.688.744.217,05	9.298.185.596.626,77	60.483.147.590,28

Aset Pemerintah Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp9.358.688.744.217,05 dan Rp9.298.185.596.626,77 terdiri dari:

Tabel 5. 83 Rincian Aset Kabupaten Bengkulu

	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Lancar	1.327.884.329.697,55	684.450.486.246,14	643.433.843.451,41
Investasi Jangka Panjang	518.272.400.090,00	518.962.048.762,00	-689.648.672,00
Aset Tetap	7.309.978.441.934,47	7.879.234.544.017,06	-569.256.102.082,60
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	202.533.572.495,04	215.538.517.601,57	-13.004.945.106,53
	9.358.688.744.217,05	9.298.185.596.626,77	60.483.147.590,28

A. Aset Lancar

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
1.327.884.329.697,55	684.450.486.246,14	643.433.843.451,41

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing Rp1.327.884.329.697,55 dan Rp684.450.486.246,14 terdiri dari:

Tabel 5. 84 Rincian Aset Lancar

	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Kas di Kas Daerah	1.168.554.249.066,37	144.655.673.806,01	1.023.898.575.260,36
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.581.400,00	1.876.550.420,00	-1.874.969.020,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	6.308,00	0,00	6.308,00
Kas di Bendahara Penerimaan	1.758.070,00	0,00	1.758.070,00
Kas di Bendahara JKN	0,00	1.624.173.188,00	-1.624.173.188,00
Kas di BLUD	11.349.091.889,54	2.715.869.028,54	8.633.222.861,00
Kas di Bendahara BOS	52.662.329,00	139.307.364,00	-86.645.035,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	90.008.134.003,73	82.404.274.028,73	7.603.859.975,00
Piutang Retribusi Daerah	5.701.751.469,50	5.631.891.569,50	69.859.900,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	19.692.453.118,00	2.682.331.914,00	17.010.121.204,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	0,00	428.603.107.748,00	-428.603.107.748,00
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	11.352.317.619,51	5.965.064.148,51	5.387.253.471,00
Piutang Lainnya	11.803.187.344,24	11.493.903.651,24	309.283.693,00
Penyisihan Piutang	-74.229.823.209,38	-65.197.972.723,62	-9.031.850.485,76
Beban Dibayar Dimuka	48.875.000,00	77.190.900,00	-28.315.900,00
Persediaan	83.548.085.289,04	61.779.121.203,23	21.768.964.085,81
	1.327.884.329.697,55	684.450.486.246,14	643.433.843.451,41

1. Kas di Kas Daerah

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaiakan/(Penurunan)
1.168.554.249.066,37	144.655.673.806,01	1.023.898.575.260,36

Akun ini merupakan kas sebesar Rp1.168.554.249.066,37 yang berada di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan Rp144.655.673.806,01 di Kas Daerah per 31 Desember 2020. Nilai kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 85 Rincian Kas di Kas Daerah

Nama Bank	Nomor Rekening	31 Des 2021	31 Des 2020
Bank Riau Cabang Bengkalis	108-02-00180	1.168.575.762.066,37	144.649.973.806,01
Bank Riau Cabang Bengkalis	108-03-00022		0,00
Deposito Bank Riau Cabang Bengkalis	108-02-96000		0,00
Koreksi Kurang Kesalahan Pencalatan		-21.513.000,00	5.700.000,00
Jumlah Kas di Kas Daerah		1.168.554.249.066,37	144.655.673.806,01

Terjadinya perbedaan Saldo Rekening Koran Bank Riau dengan Saldo Pembukuan karena adanya:

Salah Setor Dana BOS Tahun 2021 SD IT Al Huda Duri (21.513.000,00)

Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis

Nomor Rekening : 108-02-00180

Tabel 5. 86 Mutasi Kas di Kas Daerah Bank Riau Kepri Cab. Bengkalis

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	144.649.973.806,01
Pendapatan	3.980.266.763.247,72		4.124.916.737.053,73
Setoran UYHD 2020	1.876.550.420,00		4.126.793.287.473,73
Setoran Giro BOS 2020	2.420.000,00		4.126.795.707.473,73
Setoran UYHD 2021	24.660.474.806,00		4.151.456.182.279,73
Belanja (SP2D)		2.985.004.741.949,36	1.166.451.440.330,37

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Tak Terduga		9.655.040,00	1.166.441.785.290,37
Setoran SILPA JKN	2.106.763.776,00		1.168.548.549.066,37
Dobel posting SP2D-LS/06977 BOP KB Amanah Bunda Siak Kecil	5.700.000,00		1.168.554.249.066,37
Salah setor Dana BOS Th 2021 SD IT Al Huda Duri	21.513.000,00		1.168.575.762.066,37
	4.008.940.185.249,72	2.985.014.396.989,36	

Saldo kas pada Bank Riau Kepri per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.168.575.762.066,37.

Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis

Nomor Rekening : 108-02-00180

Tabel 5. 87 Mutasi Kas di Kas Daerah Bank Riau Kepri (PFK) Cab. Bengkalis

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan PFK	136.003.660.775,45	0,00	136.003.660.775,45
Pengeluaran PFK	0,00	136.003.660.775,45	0,00
	136.003.660.775,45	136.003.660.775,45	

Untuk melihat rincian Kas di Kasda dapat di lihat pada:

Lampiran Kas di Kasda**2. Kas di Bendahara Pengeluaran**

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	1.581.400,00	1.876.550.420,00	-1.874.969.020,00

Akun ini merupakan saldo kas yang masih dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 88 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	0,00	1.876.550.420,00	-1.876.550.420,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	400,00	0,00	400,00
Kecamatan Talang Muandau	1.581.000,00	0,00	1.581.000,00
Jumlah	1.581.400,00	1.876.550.420,00	-1.874.969.020,00

Atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp400,00 dan pada Kecamatan Talang Muandau telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 06 Januari 2022 sebesar Rp1.581.000,00.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan kas yang dilakukan oleh masing-masing OPD, dalam Berita Acara tersebut dijelaskan posisi kas pada OPD yang bersangkutan.

Untuk melihat rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat di lihat pada:

Lampiran Kas di Bendahara Pengeluaran

3. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	6.308,00	0,00	6.308,00

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.308,00 terdiri dari Jasa Giro di Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial yang belum disetor ke Kas Daerah serta utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti: PPh dan PPN.

4. Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	1.758.070,00	0,00	1.758.070,00

Akun ini merupakan saldo kas yang ada dalam pengelolaan bendahara penerimaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 89 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Badan Pendapatan Daerah	1.758.070,00	0,00	1.758.070,00
Jumlah	1.758.070,00	0,00	1.758.070,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan kas yang dilakukan oleh masing-masing OPD, dalam Berita Acara tersebut dijelaskan posisi kas pada OPD yang bersangkutan.

5. Kas di Bendahara JKN

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	1.624.173.188,00	(1.624.173.188,00)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Kas di Bendahara JKN merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2021 yang merupakan dana yang masih berada di rekening maupun tangan Bendahara Penerimaan JKN pada FKTP - UPT Kesehatan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5. 90 Rincian Kas di Bendahara JKN

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
UPT Puskesmas Bengkalis	0,00	367.325.940,00	-367.325.940,00
UPT Puskesmas Pematang Duku	0,00	73.480,00	-73.480,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

UPT Puskesmas Selat Baru	0,00	221.943.075,00	-221.943.075,00
UPT Puskesmas Teluk Pambang	0,00	87.954.153,00	-87.954.153,00
UPT Puskesmas Sungai Pakning	0,00	127.546.800,00	-127.546.800,00
UPT Puskesmas Lubuk Muda	0,00	171.510,00	-171.510,00
UPT Puskesmas Sadar Jaya	0,00	4.853.651,00	-4.853.651,00
UPT Puskesmas Batu Panjang	0,00	144.310.892,00	-144.310.892,00
UPT Puskesmas Teluk Lecah	0,00	195.627.200,00	-195.627.200,00
UPT Puskesmas Tanjung Medang	0,00	25.607.820,00	-25.607.820,00
UPT Puskesmas Duri Kota	0,00	199.764.918,00	-199.764.918,00
UPT Puskesmas Balai Makam	0,00	79.871.418,00	-79.871.418,00
UPT Puskesmas Sebangar	0,00	53.457.476,00	-53.457.476,00
UPT Puskesmas Sebang	0,00	46.194.970,00	-46.194.970,00
UPT Puskesmas Muara Basung	0,00	36.025.325,00	-36.025.325,00
UPT Puskesmas Serai Wangi	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00
UPT Puskesmas Tenggayun	0,00	22.444.560,00	-22.444.560,00
UPT Puskesmas Pematang Pudu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	1.624.173.188,00	-1.624.173.188,00

6. Kas di BLUD

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	11.349.091.889,54	2.715.869.028,54	8.633.222.861,00

Kas di BLUD merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2021 yang merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis dan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5. 91 Rincian Kas di BLUD per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	953.521.139,10	186.037.729,10	767.483.410,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	10.395.570.750,44	2.529.831.299,44	7.865.739.451,00
Jumlah	11.349.091.889,54	2.715.869.028,54	8.633.222.861,00

OPD	Kas Di Bank	Kas Tunai	Jumlah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	948.916.546,10	4.604.593,00	953.521.139,10
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	10.346.541.411,44	49.029.339,00	10.395.570.750,44
Jumlah	11.295.457.957,54	53.633.932,00	11.349.091.889,54

Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 92 Mutasi Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	186.037.729,10
Pendapatan BLUD	50.085.046.757,00	0,00	50.271.084.486,10
Belanja BLUD	0,00	49.317.563.347,00	953.521.139,10
Jumlah	50.085.046.757,00	49.317.563.347,00	

Adapun Kas di Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat pada :

Tabel 5. 93 Rincian Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis

No	Keterangan	No Rekening	Saldo
1	Kas Tunai	-	4.604.593,00
2	Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis	108-02-00086	364.298,00
3	Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis	108-02-00087	0,00
4	Bank BRI Cabang Bengkalis	18901000921307	948.552.212,10
5	Kesalahan Bank		36,00
	Jumlah		953.521.139,10

Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

Tabel 5. 94 Mutasi Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	2.529.831.299,44
Pendapatan BLUD	60.297.425.804,00	0,00	62.827.257.103,44
Belanja BLUD	0,00	52.431.686.353,00	10.395.570.750,44
Jumlah	60.297.425.804,00	52.431.686.353,00	

Adapun Kas di Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau terdapat pada:

Tabel 5. 95 Rincian Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

No	Keterangan	No Rekening	Saldo
1	Kas Tunai	-	49.029.339,00
2	Bank Riau Kepri Cabang Duri Kota	122-03-00006	19.655.241,00
3	Bank Riau Kepri Cabang Duri Kota	122-03-00034	3.289.610.789,59
4	Bank BRI Cabang Duri Kota	56001000834306	7.037.275.380,85
	Jumlah		10.395.570.750,44

7. Kas di Bendahara Dana BOS

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenalkan/(Penurunan)
52.662.329,00	139.307.364,00	-86.645.035,00

Kas di bendahara Dana BOS merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2021 yang merupakan dana yang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

masih berada di tangan Bendahara Dana BOS pada SD dan SMP Negeri di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5. 96 Rincian Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Dana BOS Reguler / 393 Sekolah	51.083.262,00	135.112.897,00	-84.029.635,00
Dana BOS Afiriasi / 6 Sekolah	720.686,00	916.086,00	-195.400,00
Dana BOS Kinerja / 4 Sekolah	237.660,00	237.660,00	0,00
Jumlah	52.041.608,00	136.266.643,00	-84.225.035,00

Tabel 5. 97 Rincian Kas di Bendahara BOS (Jasa Giro)

Kas di Bendahara BOS	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Jasa Giro	620.721,00	3.040.721,00	-2.420.000,00
Jumlah	620.721,00	3.040.721,00	-2.420.000,00

8. Piutang

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenalkan/(Penurunan)
	64.376.895.345,60	471.659.791.236,36	(407.282.895.890,76)

Akun ini merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp64.376.895.345,60 dan Rp471.659.791.236,36 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 98 Rincian Piutang

Jenis Piutang	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Piutang Pajak Daerah	90.008.134.003,73	82.404.274.028,73	7.603.859.975,00
Piutang Retribusi Daerah	5.701.751.469,50	5.631.891.569,50	69.859.900,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	19.692.453.118,00	2.682.331.914,00	17.010.121.204,00
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	0,00	428.603.107.748,00	-428.603.107.748,00
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	11.352.317.619,51	5.965.064.148,51	5.387.253.471,00
Piutang Lainnya	11.803.187.344,24	11.493.903.651,24	309.283.693,00
Penyisihan Piutang	-74.229.823.209,38	-65.197.972.723,62	-9.031.850.485,76
Beban Dibayar Dimuka	48.875.000,00	77.190.900,00	-28.315.900,00
	64.376.895.345,60	471.659.791.236,36	(407.282.895.890,76)

a) Piutang Pajak Daerah

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenalkan/(Penurunan)
	90.008.134.003,73	82.404.274.028,73	7.603.859.975,00

Akun piutang pajak merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bengkalis dengan nilai yang dibayarkan oleh wajib pajak daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 99 Mutasi Piutang Pajak

Jenis Piutang	Saldo Awal 2021	01 Jan	Mutasi 2021	Saldo Akhir 2021
Pajak Hiburan		1.145.760,00	-1.145.760,00	0,00
Pajak Hotel		1.236.353.444,56	-318.548.018,00	917.805.426,56
Pajak Restoran		472.193.338,00	-14.443.830,00	457.749.508,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN		682.528.891,24	-282.677.391,00	399.851.500,24
Pajak Sarang Burung Walet		84.965.000,00	-880.000,00	84.085.000,00
Pajak Air Bawah Tanah		52.145.812,60	185.850.192,00	217.996.004,60
Pajak PBB P2		79.806.846.699,00	8.051.927.907,00	87.858.774.606,00
Pajak Reklame		68.095.083,33	3.776.875,00	71.871.958,33
Jumlah	82.404.274.028,73		7.603.859.975,00	90.008.134.003,73

b) Piutang Retribusi Daerah

31 Des 2021	31 Des 2020	kenaikan/(Penurunan)
5.701.751.469,50	5.631.891.569,50	69.859.900,00

Akun piutang retribusi daerah merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh objek pajak termasuk tunggakan tahun sebelumnya. Retribusi yang menimbulkan piutang adalah yang melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen penetapan retribusi lainnya. Adapun rincian piutang retribusi daerah per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 100 Mutasi Piutang Retribusi

Jenis Piutang	Saldo Awal 2021	01 Jan	Mutasi 2021	Saldo Akhir 2021
Retribusi Izin Gangguan / HO Golongan		3.002.227.945,50	0,00	3.002.227.945,50
Retribusi Tempat Pesangrahan/Vila		0,00	0,00	0,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan		952.225.500,00	54.700.000,00	1.006.925.500,00
Retribusi Pelayanan Pasar		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Retribusi Limbah Cair		3.517.300,00	0,00	3.517.300,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		490.000.000,00	0,00	490.000.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan		764.551.746,00	15.159.900,00	779.711.646,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		116.100.000,00	0,00	116.100.000,00
Jasa umum Pasien 2011		12.706.150,00	0,00	12.706.150,00
Ambulance		0,00	0,00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jamkesmas	0,00	0,00	0,00
BPJS Kesehatan	280.259.100,00	0,00	280.259.100,00
BPJS Ketenagakerjaan	2.803.828,00	0,00	2.803.828,00
Jumlah	5.631.831.569,50	69.999.900,00	5.701.731.469,50

Untuk Piutang Retribusi Berdasarkan Jenis Retribusinya adalah sebagai berikut :

Retribusi HO Golongan**Tabel 5. 101 Rincian Piutang Retribusi HO Golongan**

- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	426.426.125,00
- Badan Pendapatan Daerah	2.575.801.820,50
Jumlah	3.002.227.945,50

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**Tabel 5. 102 Rincian Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.006.925.500,00
Jumlah	1.006.925.500,00

Retribusi Pelayanan Pasar**Tabel 5. 103 Rincian Piutang Retribusi Jasa Pelayanan Pasar**

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.500.000,00
Jumlah	7.500.000,00

Retribusi Limbah Cair**Tabel 5. 104 Rincian Piutang Retribusi Limbah Cair**

- Dinas Lingkungan Hidup	3.517.300,00
Jumlah	3.517.300,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**Tabel 5. 105 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
- Dinas Perhubungan	490.000.000,00
Jumlah	490.000.000,00

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**Tabel 5. 106 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**

- Dinas Perhubungan	779.711.646,00
Jumlah	779.711.646,00

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**Tabel 5. 107 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- Dinas Perhubungan	116.100.000,00
Jumlah	116.100.000,00

Jasa umum Pasien 2011

Tabel 5. 108 Rincian Piutang Retribusi Jasa umum Pasien 2011

- Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	12.706.150,00
Jumlah	12.706.150,00

BPJS Kesehatan

Tabel 5. 109 Rincian Piutang Retribusi BPJS Kesehatan

- Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	280.259.100,00
Jumlah	280.259.100,00

BPJS Ketenagakerjaan

Tabel 5. 110 Rincian Piutang Retribusi BPJS Ketenagakerjaan

- Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	2.803.828,00
Jumlah	2.803.828,00

Jenis Piutang Retribusi Berdasarkan OPD terdiri dari :

Tabel 5. 111 Rincian Piutang Retribusi per OPD

Piutang Retribusi	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaihan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	12.706.150,00	12.706.150,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	283.062.928,00	283.062.928,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.517.300,00	3.517.300,00	0,00
Dinas Perhubungan	1.385.811.646,00	1.370.651.746,00	15.159.900,00
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	426.426.125,00	426.426.125,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.014.425.500,00	959.725.500,00	54.700.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	2.575.801.820,50	2.575.801.820,50	0,00
Jumlah	5.701.751.469,50	5.631.391.569,50	69.859.900,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 disajikan berdasarkan Surat Ketetapan besarnya retribusi yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2021 oleh pelanggan kepada pengelola pendapatan retribusi.

Untuk rincian Piutang retribusi per OPD dapat dilihat pada:

Lampiran Piutang Retribusi

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
19.692.453.118,00	2.682.331.914,00	17.010.121.204,00

Akun piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah Piutang BLUD yang merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh objek pajak termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis dan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau. Adapun rincian piutang BLUD per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis**Tabel 5. 112 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis**

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
BPJS	72.151.867,00	2.220.347.000,00	-2.148.195.133,00
Ambulance BPJS	70.376.000,00	70.376.000,00	0,00
Jamkesda Meranti	107.516.997,00	256.709.791,00	-149.192.794,00
Covid-19	19.293.265.500,00	0,00	19.293.265.500,00
Jumlah	19.543.310.364,00	2.547.432.791,00	16.995.877.573,00

Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau**Tabel 5. 113 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau**

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Jamkesda Siak	46.605.773,00	64.255.429,00	-17.649.656,00
Jampersal Siak	80.108.072,00	70.643.694,00	9.464.378,00
Jampersal Rohil	7.428.909,00	0,00	7.428.909,00
Sewa ATM BRI	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Jumlah	149.142.754,00	134.899.123,00	14.243.631,00

d) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
0,00	428.603.107.748,00	-428.603.107.748,00

Akun piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat merupakan selisih antara surat ketetapan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan dana yang telah disalurkan ke daerah.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp428.603.107.748,00. Piutang ini merupakan Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 114 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

Jenis Piutang	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	0,00	420.221.813.497,00	-420.221.813.497,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DBH Pajak Penghasilan	0,00	51.920.311,00	-51.920.311,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	420.169.893.186,00	-420.169.893.186,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	0,00	8.381.294.251,00	-8.381.294.251,00
DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00
DBH SDA Mineral dan Batu Bara	0,00	698.814.018,00	-698.814.018,00
DBH SDA Kehutanan	0,00	7.453.180.083,00	-7.453.180.083,00
DBH SDA Perikanan	0,00	229.300.150,00	-229.300.150,00
Jumlah	0,00	428.603.107.748,00	-428.603.107.748,00

Tabel 5. 115 Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

Jenis Piutang	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	428.603.107.748,00
DBH Pajak Penghasilan	13.261.457.286,00	13.313.377.597,00	428.551.187.437,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.355.180.365.852,00	1.775.350.259.038,00	8.381.294.251,00
DBH CHT	7.105,00	7.105,00	8.381.294.251,00
DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	20.061.105.710,00	20.061.105.710,00	8.381.294.251,00
DBH SDA Mineral dan Batu Bara	370.755.136,00	1.069.569.154,00	7.682.480.233,00
DBH SDA Kehutanan	9.039.378.415,00	16.492.558.498,00	229.300.150,00
DBH SDA Perikanan	316.881.000,00	546.181.150,00	0,00
Jumlah	1.398.229.350.504,00	1.826.833.058.252,00	

Piutang DBH Pusat berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 dan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021. Dan berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2021 menetapkan bahwa PMK Nomor 113/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 di cabut dan tidak berlaku lagi.

e) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
11.352.317.619,51	5.965.064.148,51	5.387.253.471,00

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi disajikan berdasarkan saldo bagi hasil yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dari Pemerintah Provinsi Riau pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar dan Rp11.352.317.619,51 dan Rp5.965.064.148,51. Piutang ini merupakan Piutang Bagi Hasil dari Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 116 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jenis Piutang	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.380.306.947,00	4.100.125.752,51	-719.818.805,51
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	3.442.814.587,51	0,00	3.442.814.587,51
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	4.347.243.458,00	1.751.770.845,00	2.595.472.613,00
Pajak Air Permukaan (Pajak AP)	91.190.095,00	22.405.019,00	68.785.076,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	86.712.532,00	86.712.532,00	0,00
Jumlah	11.352.317.619,51	5.965.064.148,51	5.387.253.471,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.352.317.619,51 berdasarkan rincian piutang dari Dinas Pendapatan Daerah. Terdapat saldo awal sebesar Rp5.965.064.148,51, koreksi Piutang per 02 Januari 2021 sebesar Rp21.501.228.804,00, pelunasan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.889.675.077,51 dan penambahan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp775.699.744,51.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi berupa Retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan, Pasal 26 dengan pembagian 70% Provinsi Riau dan 30% untuk Kabupaten/Kota.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi berupa Pendapatan Lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang Pengelolaan, Pendapatan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kapal Kabupaten Bengkalis No 13/PK/III/2011 dan No 03/PJJ-HK/IV/2011 tanggal 23 Maret 2011 dengan pembagian Provinsi Riau 60% dan Kabupaten/Kota 40%.

f) Piutang Lainnya

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenalkan/(Penurunan)
	11.803.187.344,24	11.493.903.651,24	309.283.693,00

Akun piutang lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mempunyai saldo sebesar Rp11.803.187.344,24 dan Rp11.493.903.651,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 117 Rincian Piutang Lainnya

Jenis Piutang Lainnya	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Belanja Penunjang Operasi Pimpinan DPRD	182.064.000,00	182.064.000,00	0,00
Tunjangan Komunikasi Insentif Anggota DPRD	1.375.373.000,00	1.375.373.000,00	0,00
Piutang dari PT BLJ atas Bagi Hasil Penyediaan Tenaga Listrik di Bengkalis dan Selat Panjang	490.180.223,00	490.180.223,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang pada PT Tenganau Mandiri	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Piutang pada Pihak Ketiga	7.446.286.428,24	7.446.286.428,24	0,00
Piutang Dana Bantuan Keuangan	309.277.893,00	0,00	309.277.893,00
Piutang Beban Lain-lain	5.800,00	0,00	5.800,00
Jumlah	11.803.187.344,24	11.483.903.651,24	309.283.693,00

Akun Piutang Lain-lain merupakan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.803.187.344,24 terdiri atas :

Belanja Penunjang Operasi Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis

Saldo awal piutang penunjang operasi pimpinan DPRD sebesar Rp265.608.000,00 pada Tahun Anggaran 2008. Atas piutang tersebut telah diangsur ke kas daerah TA 2010 sebesar Rp21.000.000,00, TA 2011 sebesar Rp62.544.000,00 sehingga sisanya Per 31 Desember 2013 sebesar Rp182.064.000,00.

Tunjangan Komunikasi Insentif Anggota DPRD

Saldo awal sebesar Rp2.191.626.000,00 pada tahun anggaran 2008. Atas piutang tersebut telah diangsur ke kas daerah TA 2009 sebesar Rp576.168.000,00, TA 2011 sebesar Rp30.500.000,00, TA 2012 sebesar Rp109.295.000,00, TA 2013 sebesar Rp72.095.000,00, TA 2014 sebesar Rp28.195.000,00 sehingga sisanya Per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.375.373.000,00.

Kewajiban Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD. Terhadap saldo tersebut telah sesuai dengan berita acara rekonsiliasi Piutang lain-lain khususnya pengembalian dana belanja operasional pimpinan dan tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis TA 2013 antara sub Bagian Keuangan pada Bagian umum sekretariat DPRD dengan sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis tanggal 31 Desember 2014.

Piutang Bagi Hasil dengan PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) atas keuntungan pengelolaan Jual Beli Listrik dan Pengelolaan PKS dengan Rincian sebagai berikut:

Tahun anggaran 2008, PT. BLJ berdasarkan perjanjian Kerjasama Nomor 07/PJJ-HK/VII/2007 dan atau nomor 002/PPJ-BLJ/LIST/IV/2008 tanggal 2 Januari 2008 antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. Bumi Laksamana Jaya (PT. BLJ) tentang Bagi Hasil Pembelian/ Penyediaan (Jual Beli Daya) Tenaga Listrik di Bengkalis dan Selat Panjang. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak menerima pendapatan Bersih sebesar 70% dari hasil penjualan daya listrik yang diterima oleh PT. BLJ dan harus dibayarkan oleh PT. BLJ paling lambat tanggal 20 setiap bulannya melalui penyeteroran langsung ke Kas Daerah. Saldo awal piutang bagi hasil kepada BUMD sebesar Rp1.601.755.223,00 dan telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.111.575.000,00 sehingga saldo piutang bagi hasil Per 31 Desember 2012 sebesar Rp490.180.223,00 sesuai berita acara rekonsiliasi realisasi pembayaran piutang lain-lain pada PT. Bumi Laksamana Jaya TA 2012 tanggal 10 Jan 2012 antara PT. Bumi Laksamana Jaya dengan Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi Setda Kab. Bengkalis.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang pada PT Tengganau Mandiri

Piutang Kabupaten Bengkalis pada Koperasi Tengganau Mandiri tercatat sebesar Rp2.000.000.000,00. Piutang tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 29 Agustus 2005 sesuai perjanjian kerjasama.

Nomor : 573 /EK /93

Nomor : 21 / KOP-TM / VIII / 2005

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1125K/Pid.sus/2014 Tanggal 17 September 2014 JO putusan pengadilan tindak korupsi pada pengadilan tinggi Riau nomor 05TIPIKOR/2014/PTR Tanggal 6 Mei 2014 jo putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 42/Pid.sus/TIPIKOR/2013/PN.pbr tanggal 4 Februari 2014, bahwa atas aset-aset pada PMKS Tengganau mandiri tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Piutang Pada Pihak Ketiga

Terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan atau kontraktor) atas pelaksanaan kegiatan TA 2009 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp7.446.286.428,24. Kelebihan ini timbul akibat adanya perbedaan penetapan hutang yang lebih rendah berdasarkan LHP BPK RI No.52/S/XVIII.PEK/02/2011 tanggal 21 Februari 2011 dengan SK Bupati Bengkalis No. 171/KPTS/V/2010 tanggal 03 Mei 2010.

Piutang Dana Bantuan Keuangan

Terdapat Sisa Belanja Dana Transfer Bantuan Keuangan Khusus Desa (P3ID) yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada 21 Desa sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nilai Rp 309.277.893,00

Piutang Beban Lain-lain

Merupakan Sisa Pengembalian Uang yang di serahkan kepada masyarakat yang masih belum di setor ke Kas Daerah sampai 31 Desember 2021

9. Penyisihan Piutang

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaiakan/(Penurunan)
(74.229.823.209,38)	(65.197.972.723,62)	(9.031.850.485,76)

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan.

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp74.229.823.209,38 sebagai berikut:

Tabel 5. 118 Rincian Penyisihan Piutang per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaiakan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	-2.447.732.490,00	-394.144.540,00	-2.053.587.950,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	-304.445.528,25	-369.953.763,68	65.508.235,43
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-7.446.286.428,24	-7.446.286.428,24	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	-3.517.300,00	-3.517.300,00	0,00
Dinas Perhubungan	-1.367.495.923,10	-1.348.125.735,10	-19.370.188,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-426.426.125,00	-426.426.125,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-939.938.500,00	-789.330.000,00	-150.608.500,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-4.047.617.223,00	0,00	-4.047.617.223,00
Badan Pendapatan Daerah	-57.246.363.691,79	-50.372.571.608,60	-6.873.792.083,19
PPKD	0,00	-4.047.617.223,00	4.047.617.223,00
Jumlah	-74.229.823.209,38	-65.197.972.723,62	-9.031.850.485,76

Tabel 5. 119 Rincian Jenis Penyisihan Piutang per OPD

	Penyisihan Piutang			
	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis				
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	12.706.150,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	32.027.480,00	1.050.274.010,00	1.282.348.850,00	70.376.000,00
Total				2.447.732.490,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau				
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	283.062.928,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	112.144,55	10.521.616,70	10.748.839,00	0,00
Total				304.445.526,25
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.446.286.428,24
Total				7.446.286.428,24
Dinas Lingkungan Hidup				
Piutang Retribusi Limbah Cair	0,00	0,00	0,00	3.517.300,00
Total				3.517.300,00
Dinas Perhubungan				
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	490.000.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	38.879,10	493.678,00	6.135.680,00	767.727.686,00
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	103.100.000,00
Total				1.367.495.923,10
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Piutang Retribusi HO Golongan	0,00	0,00	0,00	426.426.125,00
Total				426.426.125,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	52.250,00	3.580.000,00	24.375.000,00	911.925.500,00
Piutang Retribusi Jasa Pelayanan Pasar	750,00	5.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Total				939.938.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.047.617.223,00
Total				4.047.617.223,00
Badan Pendapatan Daerah				
Piutang Pajak	47.740.402,64	1.784.397.826,06	9.777.651.572,59	43.080.772.070,00
Piutang Retribusi HO Golongan	0,00	0,00	0,00	2.575.801.820,50
Total				57.246.363.691,79
TOTAL PENYISIHAN PIUTANG				74.229.823.209,38

10. Beban Dibayar Dimuka

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	48.875.000,00	77.190.900,00	-28.315.900,00

Akun Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran belanja tahun 2021 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2021 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Akun Beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2021 mempunyai saldo sebesar Rp48.875.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 120 Rincian Beban Dibayar Dimuka per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pemadam Kebakaran	28.875.000,00	28.875.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	20.000.000,00	48.315.900,00	-28.315.900,00
Jumlah	48.875.000,00	77.190.900,00	-28.315.900,00

Beban dibayar dimuka pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis merupakan pembayaran belanja sewa terhadap pemakaian gedung untuk UPT pada satu kecamatan, yaitu kecamatan Mandau terhitung mulai bulan Desember 2021. Jangka waktu sewa selama 12 (dua belas) bulan terhitung masa pembayaran.

Tabel 5. 121 Rincian Beban Dibayar Dimuka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis

Uraian	Nilai Belanja	Nilai Beban Sewa	Nilai Sewa di Bayar Dimuka
UPT Kecamatan Mandau (Masa Pembayaran Bulan Desember)	31.500.000,00	2.625.000,00	28.875.000,00
Jumlah	31.500.000,00	2.625.000,00	28.875.000,00

Beban dibayar dimuka pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan pembayaran belanja barang/jasa terhadap Sewa Ruko/Gudang Bagian Umum terhitung mulai bulan Mei 2021. Jangka waktu sewa selama 12 (dua belas) bulan terhitung masa pembayaran.

Tabel 5. 122 Rincian Beban Dibayar Dimuka Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Uraian	Nilai Belanja	Nilai Beban Sewa	Nilai Sewa di Bayar Dimuka
--------	---------------	------------------	----------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Ruko/Gudang Bagian Umum (Masa Pembayaran Bulan Mei)	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
Jumlah	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00

11. Persediaan

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
83.548.085.289,04	61.779.121.203,23	21.768.964.085,81

Persediaan per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp83.548.085.289,04 terdiri dari persediaan obat sebesar Rp21.838.619.189,57 dan persediaan non obat sebesar Rp67.867.467.061,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 123 Rincian Persediaan

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Persediaan Obat	21.838.619.189,33	22.881.348.638,42	(1.042.729.449,09)
Persediaan Alat Kesehatan	13.733.132.449,31	13.536.278.688,47	196.853.760,84
Persediaan ATK	1.654.643.442,08	440.528.448,83	1.214.114.993,25
Persediaan Barang Cetak	1.338.427.816,91	963.631.750,97	374.796.065,94
Persediaan Alat Kebersihan	3.873.299.777,12	835.006.967,89	3.038.292.809,23
Persediaan Perlengkapan Listrik	166.003.040,14	194.488.909,20	(28.485.869,06)
Persediaan Perangkat, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.379.900,00	10.133.600,00	(5.753.700,00)
Persediaan Pupuk/ Pakan/ Benih	64.041.500,00	118.494.845,00	(54.453.345,00)
Persediaan Suku Cadang	258.615.542,67	109.926.468,00	148.689.074,67
Persediaan Bahan Bakar	2.280.000,00	400.000,00	1.880.000,00
Persediaan Bahan Kimia	2.626.928.749,37	2.137.567.272,03	489.361.477,34
Persediaan Hibah pada Pihak Ketiga/ Masyarakat	37.508.210.082,11	20.179.501.814,42	17.328.708.267,69
Persediaan Makanan Pokok	479.503.800,00	371.813.800,00	107.690.000,00
Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	83.548.085.289,04	61.779.121.203,23	21.768.964.085,81

a) Persediaan Obat

Nilai persediaan obat per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.846.875.884,33 berada pada OPD:

Tabel 5. 124 Rincian Persediaan Obat per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	8.398.077.524,62	8.673.210.872,57	-275.133.347,95
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	6.629.860.935,00	9.258.301.958,00	-2.628.441.023,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	6.453.450.156,96	4.872.514.481,85	1.580.935.675,11
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	310.163.616,75	77.321.326,00	232.842.290,75



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perikanan	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	42.346.956,00	0,00	42.346.956,00
Jumlah	21.838.619.189,33	22.881.348.638,42	-1.042.729.449,09

Terdapat Persediaan Vaksin Pada Dinas Kesehatan Berupa Vaksin Astrazenica @10 Dosis sebanyak 99 Vial, Coronavac @2 Dosis Sebanyak 2.110 Vial dan Moderna @10 Dosis sebanyak 375 Vial yang tidak memiliki nilai

b) Persediaan ATK

Nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.654.643.442,08 berada pada OPD:

Tabel 5. 125 Rincian Persediaan ATK per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	232.000,00	2.735.400,00	-2.503.400,00
Dinas Kesehatan	1.109.800,00	0,00	1.109.800,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	1.427.800,00	1.017.700,00	410.100,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	121.677.828,33	173.827.898,80	-52.150.070,47
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.438.400,00	1.819.000,00	2.619.400,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	373.600,00	364.300,00	9.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	787.600,00	2.280.000,00	-1.492.400,00
Dinas Pemadam Kebakaran	690.000,00	287.000,00	403.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	2.134.700,00	1.839.900,00	294.800,00
Dinas Sosial	3.303.500,00	650.000,00	2.653.500,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.307.300,00	578.060,00	4.729.240,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	104.800,00	530.000,00	-425.200,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.937.900,00	4.661.700,00	276.200,00
Dinas Lingkungan Hidup	525.000,00	494.500,00	30.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.402.036.550,00	161.600.100,00	1.240.436.450,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.904.300,00	1.190.000,00	1.714.300,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.105.900,00	1.060.800,00	45.100,00
Dinas Perhubungan	0,00	3.674.400,00	-3.674.400,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.550.000,00	4.767.900,00	-1.217.900,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	579.600,00	1.123.600,00	-544.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.304.000,00	1.383.700,00	-79.700,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.292.400,00	397.000,00	895.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.318.400,00	770.000,00	548.400,00
Dinas Perikanan	3.592.000,00	2.901.200,00	690.800,00
Dinas Perkebunan	18.839.260,00	0,00	18.839.260,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	8.200.651,00	0,00	8.200.651,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	862.800,00	3.011.800,00	-2.149.000,00
Sekretariat Daerah	3.472.272,75	2.866.600,03	605.672,72
Sekretariat DPRD	4.608.600,00	4.820.100,00	-211.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	376.200,00	674.200,00	-298.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.210.300,00	22.462.900,00	-12.252.600,00
Badan Pendapatan Daerah	1.135.600,00	3.670.400,00	-2.534.800,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	321.800,00	185.500,00	136.300,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	11.711.100,00	5.313.500,00	6.397.600,00
Inspektorat	993.200,00	854.000,00	139.200,00
Kecamatan Bengkalis	12.000,00	76.200,00	-64.200,00
Kecamatan Bantan	1.187.000,00	1.459.300,00	-272.300,00
Kecamatan Bukit Batu	305.000,00	282.000,00	23.000,00
Kecamatan Siak Kecil	4.069.430,00	3.287.500,00	781.930,00
Kecamatan Bandar Laksamana	719.300,00	788.200,00	-68.900,00
Kecamatan Rupat	312.000,00	516.600,00	-204.600,00
Kecamatan Rupat Utara	3.582.000,00	4.476.300,00	-894.300,00
Kecamatan Mandau	3.683.800,00	937.200,00	2.746.600,00
Kecamatan Pinggir	2.605.000,00	2.180.500,00	424.500,00
Kecamatan Bathin Solapan	4.394.100,00	1.429.000,00	2.965.100,00
Kecamatan Talang Muandau	5.436.100,00	1.693.000,00	3.743.100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.872.550,00	6.807.000,00	-3.934.450,00
Dinas Pertanian	0,00	2.782.490,00	-2.782.490,00
Jumlah	1.654.643.442,08	440.526.448,83	1.214.114.993,25

c) Persediaan Barang Cetak

Nilai persediaan barang cetakan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.338.427.816,91 berada pada OPD:

Tabel 5. 126 Rincian Persediaan Barang Cetak per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	150.000,00	300.000,00	-150.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	31.125.000,00	21.770.000,00	9.355.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	165.709.035,91	223.257.472,97	-57.548.437,06

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.977.900,00	1.237.500,00	740.400,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	675.000,00	575.800,00	99.200,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	223.500,00	118.700,00	104.800,00
Dinas Pemadam Kebakaran	935.000,00	935.000,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.234.000,00	1.300.800,00	-66.800,00
Dinas Sosial	311.400,00	0,00	311.400,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.612.700,00	2.664.000,00	-51.300,00
Dinas Lingkungan Hidup	515.000,00	702.800,00	-187.800,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	551.823.600,00	471.333.750,00	80.489.850,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.515.000,00	1.975.000,00	-460.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	300.500,00	110.000,00	190.500,00
Dinas Perhubungan	554.971.060,00	221.684.450,00	333.286.600,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	280.000,00	346.000,00	-66.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	587.400,00	583.400,00	4.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	608.300,00	467.500,00	140.800,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	500.000,00	0,00	500.000,00
Dinas Perikanan	0,00	975.000,00	-975.000,00
Dinas Perkebunan	3.890.600,00	0,00	3.890.600,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	7.733.721,00	0,00	7.733.721,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	225.000,00	808.000,00	-583.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	288.000,00	-288.000,00
Sekretariat DPRD	1.286.700,00	1.955.500,00	-668.800,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	160.000,00	241.000,00	-81.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.672.000,00	-1.672.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1.724.200,00	1.210.000,00	514.200,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	283.000,00	424.500,00	-141.500,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Inspektoral	1.370.400,00	2.016.320,00	-645.920,00
Kecamatan Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bantan	461.600,00	432.330,00	29.270,00
Kecamatan Bukit Batu	135.000,00	280.000,00	-145.000,00
Kecamatan Siak Kecil	1.405.000,00	1.744.000,00	-339.000,00
Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupal	13.500,00	22.500,00	-9.000,00
Kecamatan Rupal Utara	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Mandau	877.200,00	270.000,00	607.200,00
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	1.753.500,00	0,00	1.753.500,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.054.000,00	1.541.000,00	-487.000,00
Dinas Pertanian	0,00	389.418,00	-389.418,00
Jumlah	1.338.427.816,91	963.631.750,97	374.796.065,94

d) Persediaan Alat Kebersihan

Nilai persediaan alat kebersihan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.873.299.777,12 berada pada OPD:

Tabel 5. 127 Rincian Persediaan Alat Kebersihan per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	10.065.500,00	3.355.000,00	6.710.500,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	3.766.677.649,78	795.022.508,89	2.971.655.140,89
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.391.000,00	205.900,00	2.185.100,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	11.804.500,00	3.737.000,00	8.067.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	327.000,00	490.000,00	(163.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	645.000,00	395.000,00	250.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	220.000,00	148.100,00	71.900,00
Dinas Sosial	537.000,00	680.000,00	-143.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.374.000,00	0,00	2.374.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	253.200,00	149.000,00	104.200,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.311.600,00	4.658.000,00	-346.400,00
Dinas Lingkungan Hidup	18.000,00	74.400,00	-56.400,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	169.300,00	460.100,00	-290.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.709.000,00	730.000,00	5.979.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	496.000,00	182.800,00	313.200,00
Dinas Perhubungan	18.564.900,00	7.098.000,00	11.466.900,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	984.000,00	406.000,00	578.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	305.000,00	218.000,00	87.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	805.000,00	0,00	805.000,00
Dinas Perkebunan	12.124.000,00	0,00	12.124.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.996.600,00	0,00	3.996.600,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	173.000,00	3.946.000,00	-3.773.000,00
Sekretariat Daerah	5.130.927,34	2.052.350,00	3.078.577,34
Sekretariat DPRD	1.642.100,00	2.474.000,00	-831.900,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.984.000,00	0,00	2.984.000,00
Badan Pendapatan Daerah	80.000,00	375.000,00	-295.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	104.000,00	42.000,00	62.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	3.996.000,00	772.600,00	3.223.400,00
Inspektorat	182.000,00	88.009,00	93.991,00
Kecamatan Bengkalis	66.000,00	9.000,00	57.000,00
Kecamatan Bantan	792.400,00	835.000,00	-42.600,00
Kecamatan Bukit Batu	243.800,00	89.400,00	154.400,00
Kecamatan Siak Kecil	1.729.000,00	927.000,00	802.000,00
Kecamatan Bandar Laksamana	58.000,00	50.000,00	8.000,00
Kecamatan Rupal	266.000,00	104.300,00	161.700,00
Kecamatan Rupal Utara	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Mandau	3.207.100,00	1.037.200,00	2.169.900,00
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bathin Solapan	162.000,00	233.900,00	-71.900,00
Kecamatan Talang Muandau	7.122.000,00	160.000,00	6.962.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.583.200,00	1.057.600,00	525.600,00
Dinas Pertanian	0,00	2.743.800,00	-2.743.800,00
Jumlah	3.873.259.777,12	835.006.967,69	3.038.292.809,23



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

e) **Persediaan Perlengkapan Listrik**

Nilai persediaan perlengkapan listrik per 31 Desember 2021 sebesar Rp166.003.040,14 berada pada OPD:

Tabel 5. 128 Rincian Persediaan Perlengkapan Listrik per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	111.912.500,00	171.076.000,00	-59.163.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	15.739.000,00	1.865.000,00	13.874.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	680.000,00	510.000,00	170.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	309.000,00	323.000,00	-14.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	770.000,00	0,00	770.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.615.000,00	1.189.000,00	2.426.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	825.000,00	0,00	825.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.194.000,00	160.000,00	1.034.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	122.500,00	126.000,00	-3.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perkebunan	9.583.000,00	0,00	9.583.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	216.000,00	0,00	216.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	270.000,00	1.475.000,00	-1.205.000,00
Sekretariat Daerah	4.581.740,14	3.838.909,20	742.830,94



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	604.000,00	227.400,00	376.600,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.643.000,00	4.978.000,00	-2.335.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	925.000,00	-925.000,00
Inspektorat	42.000,00	375.000,00	-333.000,00
Kecamatan Bengkulu	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bantan	121.000,00	100.000,00	21.000,00
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siak Kecil	549.300,00	861.000,00	-311.700,00
Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupal	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupal Utara	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Mandau	3.979.000,00	0,00	3.979.000,00
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bathin Solapan	154.000,00	98.600,00	55.400,00
Kecamatan Talang Muandau	8.093.000,00	279.000,00	7.814.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	6.082.000,00	-6.082.000,00
Jumlah	166.003.040,14	194.488.909,20	-28.485.869,06

f) Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Nilai persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.379.900,00 berada pada OPD:

Tabel 5. 129 Rincian Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaiikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	730.000,00	150.000,00	580.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	825.000,00	-825.000,00
Dinas Kelahanan Pangan	1.200.000,00	2.400.000,00	-1.200.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150.000,00	135.000,00	15.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	40.000,00	12.000,00	28.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	5.393.600,00	-5.393.600,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00
Inspektoral	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bantan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siak Kecil	90.000,00	90.000,00	0,00
Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupal	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupal Utara	120.000,00	90.000,00	30.000,00
Kecamatan Mandau	600.000,00	90.000,00	510.000,00
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	1.449.900,00	693.000,00	756.900,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	255.000,00	-255.000,00
Jumlah	4.379.900,00	10.133.800,00	-5.753.700,00

g) Persediaan Pupuk/ Pakan/ Benih

Nilai persediaan pupuk/ pakan/ benih per 31 Desember 2021 sebesar Rp64.041.500,00 berada pada OPD:

Tabel 5. 130 Rincian Persediaan Pupuk/ Pakan/ Benih per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Perikanan	4.369.500,00	118.494.845,00	(114.125.345,00)
Dinas Perkebunan	59.672.000,00	0,00	59.672.000,00
Jumlah	64.041.500,00	118.494.845,00	-54.453.345,00

h) Persediaan Suku Cadang

Nilai persediaan suku cadang per 31 Desember 2021 sebesar Rp258.615.542,67 berada pada OPD:

Tabel 5. 131 Rincian Persediaan Suku Cadang Mobil per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	244.997.542,67	109.926.468,00	135.071.074,67
Dinas Perkebunan	13.618.000,00	0,00	13.618.000,00
Jumlah	258.615.542,67	109.926.468,00	148.689.074,67

i) Persediaan Bahan Bakar

Nilai persediaan bahan bakar per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.280.000,00 berada pada OPD:

Tabel 5. 132 Rincian Persediaan Bahan Bakar per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
Kecamatan Rupal Utara	650.000,00	400.000,00	250.000,00
Jumlah	2.280.000,00	400.000,00	1.880.000,00

j) Persediaan Bahan Kimia

Nilai persediaan bahan kimia per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.626.928.749,37 berada pada OPD:

Tabel 5. 133 Rincian Persediaan Bahan Kimia per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	779.493.027,00	867.941.834,00	(88.448.807,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	1.788.635.722,37	1.269.625.438,03	519.010.284,34



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	58.800.000,00	0,00	58.800.000,00
Jumlah	2.626.928.749,37	2.137.587.272,03	489.361.477,34

k) Persediaan Hibah

Nilai persediaan yang akan dihibahkan pada masyarakat per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.508.210.082,11 berada pada OPD:

Tabel 5. 134 Rincian Persediaan Hibah per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	7.850.497.699,81	7.850.497.699,81	0,00
Dinas Kesehatan	698.435.369,96	1.121.588.199,00	(423.152.829,04)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.286.966.686,73	6.779.350.860,00	8.507.615.826,73
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	12.221.143.063,00	2.776.918.063,00	9.444.225.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	199.980.000,00	-199.980.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	635.403.828,00	635.403.828,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	815.763.434,61	815.763.164,61	270,00
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	37.508.210.082,11	20.179.501.814,42	17.328.708.267,69

l) Persediaan Makanan Pokok

Nilai persediaan makanan pokok per 31 Desember 2021 sebesar Rp479.503.800,00 Berada pada OPD:

Tabel 5. 135 Rincian Persediaan Makanan Pokok per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Dinas Ketahanan Pangan	479.503.800,00	371.813.800,00	107.690.000,00
Jumlah	479.503.800,00	371.813.800,00	107.690.000,00

m) Persediaan Alat Kesehatan

Nilai persediaan alat kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.733.132.449,31 berada pada OPD:

Tabel 5. 136 Rincian Persediaan Alat Kesehatan per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	13.733.132.449,31	7.737.907.385,61	5.995.225.063,70
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	0,00	5.205.726.859,86	-5.205.726.859,86
Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	592.644.443,00	-592.644.443,00
Jumlah	13.733.132.449,31	13.536.278.686,47	196.853.760,84

Rincian Persediaan Per OPD dapat dilihat pada:

Lampiran Persediaan

B. Investasi Jangka Panjang

1. Investasi Nonpermanen

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi nonpermanen	31.547.255.555,00	31.670.421.119,00	(123.165.564,00)
Investasi nonpermanen diragukan tertagih	(31.189.055.555,00)	(31.262.521.119,00)	63.465.564,00
Nilai Bersih	358.200.000,00	417.900.000,00	(59.700.000,00)

Akun Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.547.255.555,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp31.670.421.119,00 merupakan pinjaman kepada masyarakat berupa Dana Bergulir, Pinjaman Lunak, Buffer Stock, Pinjaman Modal Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyerahkan penagihan piutang terhadap investasi non permanen kepada KPKNL untuk diproses lebih lanjut, sampai dengan saat laporan keuangan dibuat investasi non permanen pada Dinas Perikanan sudah dilakukan proses penagihan kepada debitur.

Berdasarkan surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau Nomor SPnPPN-01/PUPNC.03.03/2016 perihal penolakan pengurusan Piutang Negara, proyek P3TP dan PUPR dikeluarkan dari investasi non permanen dikarenakan:

- 1) Tidak adanya kepastian ada dan besarnya piutang negara
- 2) Tidak adanya dokumen yang mendukung dan membuktikan sebagai piutang negara
- 3) Sesuai dengan surat nomor 5.24.3/DISTANNAK/XI/2015/135 tanggal 23 November 2015 terhadap dua proyek tersebut diatas telah dinyatakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Bahwa bukan Pinjaman bagi petani tetapi merupakan bantuan saprodi langsung habis pakai kepada petani.

Tabel 5. 137 Rincian Investasi Non Permanen per OPD

OPD	Nilai Kotor	Diragukan Tertagih	Nilai Bersih
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	19.392.687.773,00	(19.392.687.773,00)	0,00
Dinas Perikanan	2.165.795.818,00	(2.165.795.818,00)	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	4.345.161.400,00	(3.986.961.400,00)	358.200.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.443.610.564,00	(5.443.610.564,00)	0,00
Pabrik VCO Yayasan Melayu	200.000.000,00	(200.000.000,00)	0,00
Jumlah	31.547.255.555,00	(31.189.055.555,00)	358.200.000,00

a) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Investasi non permanen per 31 Desember 2021 pada Dinas Koperasi dan UKM rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 138 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi non permanen	19.392.687.773,00	19.421.278.679,00	(28.590.906,00)
Investasi non permanen diragukan tertagih	(19.392.687.773,00)	(19.421.278.679,00)	28.590.906,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

Perlu kami informasikan Dinas Koperasi dan UKM mempunyai 3 (tiga) rekening penampung yaitu: No.108-0321034, 108-0321046 dan 108-0307740. Saldo pada rekening penampung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0321034, sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0321046 dan sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0307740.

Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM berasal dari Proyek Penguatan Modal Usaha Koperasi dan UKM, Proyek Pengembangan Usaha Koperasi di Kecamatan Bantan dan Rangsang, Proyek Pembangunan Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kegiatan Pengembangan Koperasi Unggulan.

b) Dinas Perikanan

Investasi non permanen per 31 Desember 2021 pada Dinas Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 139 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Perikanan

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi non permanen	2.165.795.818,00	2.167.432.180,00	-1.636.362,00
Investasi non permanen diragukan tertagih	(2.165.795.818,00)	(2.167.432.180,00)	1.636.362,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

Perlu kami informasikan Dinas Perikanan mempunyai 1 (satu) rekening penampung dengan saldo per 31 Desember 2021 yaitu: No.108-2000231 sebesar Rp0,00.

Investasi Non Permanen pada Dinas Perikanan berasal dari kegiatan Proyek Pinjaman Lunak Untuk Percepatan Ekonomi Kerakyatan dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Jaring Apung.

c) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

Investasi non permanen per 31 Desember 2021 pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 140 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Pertanian

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi Non Permanen	4.345.161.400,00	0,00	4.345.161.400,00
Investasi non permanen diragukan tertagih	(3.986.961.400,00)	0,00	-3.986.961.400,00
Nilai bersih investasi non permanen	358.200.000,00	0,00	358.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Perlu kami informasikan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan mempunyai 1 (satu) rekening penampung dengan No.10-80-32221-1 yang telah berstatus tidak aktif dan telah ditutup.

Investasi Non Permanen pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan berasal dari Proyek Pinjaman Lunak Percepatan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Bengkalis (PPL PEK) dan Proyek Pengembangan Tanaman Holtikultura Kabupaten Bengkalis (PPTH) Tahun 2002.

d) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Investasi non permanen per 31 Desember 2021 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 141 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenakan/(Penurunan)
Investasi non permanen	5.443.610.564,00	5.476.548.860,00	(32.938.296,00)
Investasi non permanen diragukan tertagih	(5.443.610.564,00)	(5.476.548.860,00)	32.938.296,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

Perlu kami informasikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai 2 (dua) rekening penampung dengan saldo per 31 Desember 2021 yaitu: No.108-0317190 sebesar Rp205.705.035,00 dan pada Rekening nomor 108-0300571 sebesar Rp51.993.230,00.

Investasi non permanen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berasal dari kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kecil Kabupaten Bengkalis dan Proyek Peningkatan Pengembangan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2001, Proyek Pinjaman Lunak untuk Percepatan Ekonomi Tahun 2005 dan Penguatan Modal Usaha Kecil Kec. Pinggir dan Mandau, Penguatan Modal Usaha Kec. Merbau, T. Tinggi dan T. Tinggi Barat, Penguatan Modal Usaha Kec. Bantan, Bengkalis, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupert dan Rupert Utara.

e) Pabrik VCO Yayasan Melayu

Berdasarkan hasil inventarisasi, Investasi non permanen per 31 Desember 2021 pada Pabrik VCO Yayasan Melayu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 142 Rincian Investasi Non Permanen Pabrik VCO Yayasan Melayu

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenakan/(Penurunan)
Investasi non permanen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Investasi non permanen diragukan tertagih	(200.000.000,00)	(200.000.000,00)	0,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

f) Dinas Pertanian

Investasi non permanen per 31 Desember 2021 pada Dinas Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 143 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Pertanian

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenakan/(Penurunan)
--------	------------	------------	---------------------



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Investasi Non Permanen	0,00	4.405.161.400,00	-4.405.161.400,00
Investasi non permanen diragukan tertagih	0,00	(3.987.261.400,00)	3.987.261.400,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	417.900.000,00	(417.900.000,00)

Perlu kami informasikan Dinas Pertanian mempunyai 1 (satu) rekening penampung dengan No.10-80-32221-1 yang telah berstatus tidak aktif dan telah ditutup.

Investasi Non Permanen pada Dinas Pertanian berasal dari Proyek Pinjaman Lunak Percepatan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Bengkalis (PPL PEK) dan Proyek Pengembangan Tanaman Holtikultura Kabupaten Bengkalis (PPTH) Tahun 2002.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
517.914.200.090,00	518.544.148.762,00	-629.948.672,00

Akun investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan terdiri dari penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 144 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jenis Penyertaan	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Penyertaan Modal pada PDAM Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT. Riau Air Line	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri	131.606.200.000,00	131.606.200.000,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis	378.308.000.090,00	378.937.948.762,00	-629.948.672,00
Penyertaan Modal pada PT. SJMT Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Jumlah	517.914.200.090,00	518.544.148.762,00	-629.948.672,00

Penyertaan modal pemerintah daerah (PMP) dilakukan kepada 5 Badan Usaha dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp517.914.200.090,00.

Penyertaan awal Modal Pemerintah Daerah (PMP) Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada 5 Badan Usaha tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyertaan Modal Pada PDAM Bengkalis



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pembentukan PDAM Bengkalis berdasarkan atas Perda Kabupaten Bengkalis No. 04 Tahun 1994 tanggal 20 Januari 1994. Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki 100% kepemilikan atas PDAM Bengkalis. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis di PDAM Bengkalis hingga akhir tahun 2021 tercatat sebesar Rp28.006.482.531,00. Berdasarkan laporan keuangan PDAM tahun 2021 (Unaudit) diketahui bahwa PDAM Kabupaten Bengkalis memperoleh kerugian sebesar Rp549.859.078,00. Sehingga rugi tersebut mengurangi saldo laba ditahan tahun sebelumnya yang bernilai minus Rp63.586.142.090,94. Konsisten dengan metode ekuitas, nilai PMPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PDAM Kabupaten Bengkalis disajikan senilai Rp0,00 di karenakan Rugi PDAM masih belum melebihi penyertaan modal sebesar minus Rp64.136.001.168,94.

Hal tersebut didasarkan atas Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 6 Revisi Tahun 2016 tentang Akuntansi Investasi paragraf 47 yang menyatakan bahwa Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, maka penyertaan modal PT. PDAM di sajikan Rp0,00 atau Nihil.

Tabel 5. 145 Rincian Penyertaan Modal Pada PDAM Bengkalis

Tahun	Jumlah
2000	350.000.000,00
2001	1.109.400.000,00
2002	1.000.000.000,00
2003	3.000.000.000,00
2004	3.187.500.000,00
2005	6.000.000.000,00
2006	6.000.000.000,00
2007	8.200.000.000,00
2012	(8.224.347.689,00)
2014	3.044.859.174,00
2016	4.339.071.046,00
Jumlah	28.006.482.531,00

Penyertaan Modal Pada PT Riau Airlines

Berdasarkan data/informasi yang tersedia, kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas saham Maskapai Penerbangan Riau Airlines adalah 5,5% dari keseluruhan modal PT. Riau Airlines sesuai dengan Surat Pernyataan Penyertaan Modal tanggal 17 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis di PT.Riau Airlines tercatat sebesar Rp8.000.000.000,00 yang terdiri dari 8.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- per lembar saham. Pada Tanggal 12 Juli 2012 PT. Riau Air Line dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan No.03/PAILIT/2012/PN. Atas putusan pailit tersebut Gubernur Riau melakukan upaya hukum dalam rangka penyelamatan PT. RAL, sehingga status pailit PT. RAL dinyatakan berakhir.

Tabel 5. 146 Rincian Penyertaan Modal Pada PT Riau Airlines

Tahun	Jumlah
2005	8.000.000.000,00
Jumlah	8.000.000.000,00

Penyertaan Modal Pada Bank Riau Kepri



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

PT. Bank Riau merupakan perusahaan daerah di Provinsi Riau yang bergerak di bidang perbankan di mana sahamnya dimiliki oleh beberapa Pemerintah Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Sampai dengan 31 Desember 2019 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Bank Riau sebesar Rp131.606.200.000,00, persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas PT. Bank Riau sebesar 11,81% untuk posisi Per 31 Desember 2019.

Kabupaten Bengkalis melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri pada Tahun 2017 sebesar Rp5.248.746.825,00 akan tetapi penyertaan modal tersebut belum bisa di akui sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis dikarenakan belum terbitnya Perda Penyertaan Modal dan akan diakui sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis setelah di Perdakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri tanggal 19 Agustus 2019, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dengan realisasi sebesar Rp10.000.000.000,00.

Tabel 5. 147 Rincian Penyertaan Modal Pada Riau Kepri

Tahun	Jumlah
2006	15.004.000.000,00
2007	25.000.000.000,00
2008	2.000.200.000,00
2009	50.000.000.000,00
2011	9.602.000.000,00
2012	20.000.000.000,00
2019	10.000.000.000,00
Jumlah	131.606.200.000,00

Penyertaan Modal Pada PT Bumi Laksamana Jaya

Pembentukan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 46 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001. Seluruh kepemilikan saham PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis ini dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkalis menambahkan penyertaan modal ke PT. Bumi Laksamana Jaya sebesar Rp300.000.000.000,-. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis di PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis hingga akhir tahun 2012 sebesar Rp426.630.3993.067,00.

Terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya sebesar Rp300.000.000.000,00 sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkalis menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor B-3284/L.4.13/Fu.1/11/2019 tentang Jawaban Permohonan Pengembalian Aset PT. Bumi Laksamana Jaya tanggal 25 November 2019, bahwa barang bukti berupa Aset PT. Bumi Laksamana Jaya telah di Lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 162/2017 tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp154.690.000,00 dan hasilnya telah disetor ke Kas Negara, serta barang bukti berupa Uang sebesar Rp2.750.973.000,00 yang telah ditransfer ke Kas Daerah Bank Riau Kepri dengan bukti setoran Bank BRI tanggal 19 September 2018 dan 14 Maret 2019.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Berdasarkan laporan keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis per 31 Desember 2021 (Unaudit) diketahui bahwa PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis mengalami kerugian sebesar Rp629.948.672,00, dengan metode ekuitas, nilai PMPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya Kabupaten Bengkalis disajikan senilai Rp378.308.000.090,00.

Tabel 5. 148 Rincian Penyertaan Modal Pada PT Bumi Laksamana Jaya

Tahun	Jumlah
2001	10.000.000.000,00
2002	2.000.000.000,00
2003	41.621.000.000,00
2004	11.150.000.000,00
2005	5.000.000.000,00
2007	7.500.000.000,00
2008	40.906.480.267,00
2009	8.452.912.800,00
2012	300.000.000.000,00
Jumlah	426.630.393.067,00

Penyertaan Modal Pada PT SJMT

Jumlah penyertaan modal berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Sri Junjungan Media Televisi (PT. SJMT) yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran televisi hingga akhir tahun 2013 masih tercatat sebesar Rp8.236.000.000,00. PT SJMT sampai dengan laporan keuangan dibuat tidak beroperasi lagi. PT SJMT semula dikelola oleh PT. BLJ namun dilatarbelakangi oleh telah berakhirnya KSO antara Pemkab. Bengkalis dan PT. BLJ dalam pengelolaan PT. SJMT dan PT. BLJ tidak berhak melakukan Penyiaran televisi sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. melalui surat kepada Bupati Bengkalis No.133/BLJ-Dirut/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 hal rencana serah terima, PT BLJ berkeinginan untuk menyerahkan seluruh aset dan pengelolaan PT.SJMT. Seluruh Aset PT SJMT telah diserahkan dan dicatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5. 149 Rincian Penyertaan Modal Pada PT SJMT

Tahun	Jumlah
2005	1.236.000.000
2006	3.500.000.000
2007	3.500.000.000
Jumlah	8.236.000.000,00

Rincian Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada:
Lampiran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

C. Aset Tetap

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
7.309.978.441.934,47	7.879.234.644.017,06	(569.256.102.082,59)

Jumlah Aset Tetap 31 Desember 2021 sebesar Rp7.309.978.441.934,47 dan 31 Desember 2020 sebesar

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Rp7.879.234.544.017,06. Nilai aset tetap TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp569.256.102.082,60. Rincian aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 150 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenalkani(Penurunan)
Tanah	1.113.920.111.347,51	1.118.098.988.741,31	4.178.877.393,80
Peralatan dan Mesin	1.840.891.216.160,18	1.720.936.637.948,03	119.954.578.212,15
Gedung dan Bangunan	3.278.033.677.342,66	3.135.001.432.141,73	143.032.245.200,93
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.327.286.533.125,75	8.975.413.810.264,85	351.872.722.860,90
Aset Tetap Lainnya	135.015.878.085,72	126.159.968.170,72	8.855.909.915,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	355.705.505.591,46	335.652.200.689,21	20.053.304.902,25
Akumulasi Penyusutan	(8.740.874.479.718,82)	(7.532.028.493.938,79)	(1.208.845.985.780,03)
Jumlah	7.309.978.441.934,47	7.879.234.544.017,06	(569.256.102.082,60)

Rincian dan uraian per masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

I. Tanah

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenalkani(Penurunan)
1.113.920.111.347,51	1.118.098.988.741,31	4.178.877.393,80

Nilai aset tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.113.920.111.347,51 dan Rp1.118.098.988.741,31 maka terdapat penurunan dari periode sebelumnya sebesar Rp4.178.877.393,80.

Mutasi aset tetap tanah sebesar Rp1.113.920.111.347,51 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 (Audited)	1.118.098.988.741,31
Mutasi Tambah	
Pembelian (sesuai harga perolehan)	
Belanja modal Tanah	199.468.598,70
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Hutang Pihak Ketiga	0,00
Transfer Masuk	3.659.971.369,07
Koreksi BPK	0,00
Koreksi Pencatatan	4.292.344.961,00
Reklasifikasi	0,00
Hibah	0,00
Total Mutasi Tambah	8.151.784.928,77
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	3.659.971.369,07
Reklasifikasi	0,00
Penghapusan	0,00
Koreksi Pencatatan	8.670.690.953,50
Total Mutasi Kurang	12.330.662.322,57
Saldo aset tetap per 31 Desember 2021	1.113.920.111.347,51



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Rincian aset tetap tanah sebesar Rp1.113.920.111.347,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 151 Rincian Aset Tetap Tanah

Jenis	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Tanah Persil			
Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	89.976.441.094,40	89.831.015.094,40	145.426.000,00
Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	85.807.539.394,72	85.805.706.714,72	1.832.680,00
Tanah Untuk Bangunan Industri	20.490.951.100,00	20.490.951.100,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	480.777.649.520,85	479.363.971.102,15	1.413.678.418,70
Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	24.668.278.789,07	24.668.278.789,07	0,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	5.423.717.490,00	5.423.717.490,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
Tanah Non Persil			
Tanah Basah	13.851.048.000,00	13.851.048.000,00	0,00
Tanah Kering	6.180.798.800,00	5.321.118.800,00	859.680.000,00
Tanah Perkebunan	242.674.500,00	266.524.500,00	-23.850.000,00
Tanah Hutan	6.799.979.600,00	6.799.979.600,00	0,00
Tanah Tandus	1.476.384.000,00	1.476.384.000,00	0,00
Tanah Pertanian	1.019.488.000,00	1.019.290.000,00	198.000,00
Lapangan			
Tanah Lapangan Olah Raga	22.324.993.570,00	22.324.993.570,00	0,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	17.593.785.066,66	17.593.785.066,66	0,00
Tanah Lapangan Pemancar Dan Studio Alam	4.242.101.480,00	4.242.101.480,00	0,00
Tanah Untuk Jalan	239.158.130.466,84	245.942.478.075,34	-6.784.347.608,50
Tanah Untuk Bangunan Air	36.788.722.364,97	36.580.337.248,97	208.385.116,00
Tanah Untuk Bangunan Instalasi	76.625.000,00	76.625.000,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Jaringan	3.070.279.000,00	3.070.279.000,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	59.900.000,00	59.900.000,00	0,00
Tanah Untuk Makam	26.789.823.950,00	26.789.823.950,00	0,00
Tanah Untuk Taman	14.957.693.160,00	14.957.573.160,00	120.000,00
Tanah Kampung	12.143.107.000,00	12.143.107.000,00	0,00
Jumlah	1.113.920.111.347,51	1.118.098.988.741,31	(4.178.877.393,80)

Kenaikan Penurunan Aset Tanah dapat di lihat pada:
Lampiran Aset Tanah

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

2. Peralatan dan Mesin

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
1.840.891.216.160,18	1.720.936.637.948,03	119.954.578.212,15

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.840.891.216.160,18 dan Rp1.720.936.637.948,03.

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.840.891.216.160,18 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 (Audited)		1.720.936.637.948,03
Mutasi Tambah		
Pembelian (sesuai harga perolehan)		
Belanja Barang dan Jasa	1.951.073.696,00	
Belanja Tanah		
Belanja Peralatan dan Mesin	110.817.751.715,66	
Belanja Gedung dan Bangunan	820.463.530,21	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	254.145.000,00	
Belanja Aset Tetap Lainnya	749.361.008,00	
Koreksi BPK	0,00	
Hutang Pihak Ketiga	2.644.727.218,00	
Total Pembelian		117.237.522.167,87
Hibah	3.741.539.974,00	
Transfer masuk	16.835.691.754,84	
Koreksi Pencatatan	3.316.378.600,00	
Reklasifikasi	0,00	
Aset Covid-19	0,00	
Koreksi BPK	0,00	
Total Mutasi Tambah		23.893.610.328,84
Mutasi Kurang		
Transfer keluar	16.835.691.754,84	
Penghapusan	1.614.755.161,19	
Hibah	279.280.208,00	
Reklasifikasi	2.446.827.160,53	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Kurang		21.176.554.284,56
Saldo aset tetap per 31 Desember 2021		1.840.891.216.160,18

Rincian aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.840.891.216.160,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 152 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Jenis	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	64654002955	62.426.616.910,01	2.227.386.045,00
Alat Besar Apung	614047937,2	482.279.137,24	131.768.800,00
Alat Bantu	62763086933	61.816.138.388,38	946.948.545,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	2,85418E+11	275.911.112.196,49	9.507.156.389,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2093388029	1.889.094.179,35	204.293.850,00
Alat Angkutan Apung Bermotor	27126919338	27.126.919.338,22	0,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	10289897406	10.289.897.406,00	0,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	2955361305	2.762.546.304,85	192.815.000,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	3493341596	3.421.388.416,82	71.953.179,04
Alat Ukur	12259042127	12.252.970.517,77	6.071.608,96
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	24.978.792.194,96	24.608.202.543,96	370.589.651,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	110.933.139.207,95	102.720.710.027,02	8.212.429.180,93
Alat Rumah Tangga	292.215.706.787,64	278.225.552.984,89	13.990.153.802,75
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	30.709.308.924,10	27.037.722.160,20	3.671.586.763,90
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	33.139.108.255,91	30.663.595.695,91	2.475.512.560,00
Alat Komunikasi	9.323.177.126,87	9.212.615.326,87	110.561.800,00
Peralatan Pemancar	20.405.909.216,62	19.093.207.850,52	1.312.701.366,10
Peralatan Komunikasi Navigasi	23.978.000,00	23.978.000,00	0,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	354.766.117.421,88	327.009.303.467,38	27.756.813.954,50
Alat Kesehatan Umum	6.937.717.474,28	1.321.678.474,28	5.616.039.000,00
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	185.858.700.558,87	175.062.376.419,40	10.796.324.139,47
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1.991.673.970,00	4.001.974.722,00	-2.010.300.752,00
Alat Peraga Praktek Sekolah	89.524.974.772,60	87.722.698.158,60	1.802.276.614,00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	541.722.522,72	432.912.022,72	108.810.500,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	3.625.501.607,84	3.682.637.807,84	-57.136.200,00
Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	2.397.500,00	2.397.500,00	0,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.678.954.864,93	3.370.788.338,43	308.166.526,50
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	3.728.730.068,92	3.727.396.068,92	1.334.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	752.427.742,00	717.212.042,00	35.215.700,00
Alat Persenjataan			
Senjata Api	263.766.527,00	242.809.527,00	20.957.000,00
Persenjataan Non Senjata Api	2.093.599.315,21	1.717.851.535,21	375.747.780,00
Senjata Sinar	9.772.458,00	9.772.458,00	0,00
Alat Khusus Kepolisian	942.794.221,00	693.373.821,00	249.420.400,00
Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00
Komputer			
Komputer Unit	118.160.232.171,75	98.587.082.545,75	19.573.149.626,00
Peralatan Komputer	45.313.908.574,58	38.508.907.983,58	6.805.000.591,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemukiman			
Sumur	19.849.000,00	0,00	19.849.000,00
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	75.592.900,00	0,00	75.592.900,00
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	74.250.000,00	86.625.000,00	-12.375.000,00
Alat Pelindung	4.885.041,00	4.885.041,00	0,00
Alat Sar	7.697.865.041,07	5.693.480.762,07	2.004.384.279,00
Alat Kerja Penerbangan	268.426.000,00	141.770.000,00	126.656.000,00
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.595.605.900,00	0,00	1.595.605.900,00
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	29.667.140,00	0,00	29.667.140,00
Rambu-Rambu			
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	17.964.570.611,35	16.893.583.611,35	1.070.987.000,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	522.894.000,00	522.894.000,00	0,00
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	1.048.142.829,00	817.679.257,00	230.463.572,00
Jumlah	1.840.891.216.160,18	1.720.936.637.948,03	119.954.578.212,15

Kenaikan Penurunan Aset Peralatan dan Mesin dapat di lihat pada:
Lampiran Aset Peralatan dan Mesin

3. Gedung dan Bangunan

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
3.278.033.677.342,66	3.135.001.432.141,73	143.032.245.200,93

Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.278.033.677.342,66 dan Rp3.135.001.432.141,73.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Mutasi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.278.033.677.342,66 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 (Audited)		3.135.001.432.141,73
Mutasi Tambah		
Pembelian (sesuai harga perolehan)		
Belanja Barang dan Jasa	25.261.236.211,06	
Belanja Tanah	213.472.255,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	917.681.900,00	
Belanja Gedung dan Bangunan	102.783.575.586,59	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.830.472.532,83	
Belanja Aset Tetap Lainnya	426.087.700,00	
Hutang Pihak Ketiga	12.619.644.863,21	
Total Pembelian		148.052.171.048,69
Transfer masuk	6.612.374.600,00	
Aset Dari KDP	4.530.059.466,56	
Hibah	1.488.239.000,00	
Reklasifikasi	463.325.900,00	
Aset Covid-19	0,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Tambah		13.093.998.966,56
Mutasi Kurang		
Transfer keluar	6.612.374.600,00	
Diserahkan Ke Pemda Lain	0,00	
Reklasifikasi	11.501.550.214,32	
Penghapusan	0,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Kurang		18.113.924.814,32
Saldo aset tetap per 31 Desember 2021		3.278.033.677.342,66

Rincian aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.278.033.677.342,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 153 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenalkani (Penurunan)
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.913.669.760.491,90	2.791.116.269.245,22	122.553.491.246,68
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	254.131.344.624,35	240.437.789.197,21	13.693.555.427,14
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	35.189.908.861,45	34.426.806.561,45	763.102.300,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	4.063.817.404,85	4.063.817.404,85	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Tugu/Tanda Batas	70.978.845.960,11	64.966.749.733,00	6.022.096.227,11
Jumlah	3.278.033.677.342,66	3.135.001.432.141,73	143.032.245.200,93

Kenaikan Penurunan Aset Gedung dan Bangunan dapat di lihat pada:
Lampiran Gedung dan Bangunan

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenalkan/(Penurunan)
	9.327.286.533.125,75	8.975.413.810.264,85	351.872.722.860,90

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp9.327.286.533.125,75 dan Rp8.975.413.810.264,85.

Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.327.286.533.125,75 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 (Audited) 8.975.413.810.264,85

Mutasi Tambah**Pembelian (sesuai harga perolehan)**

Belanja Barang dan Jasa	6.639.393.851,01	
Belanja Tanah	0,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	202.698.200,00	
Belanja Gedung dan Bangunan	1.498.285.020,56	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	339.365.570.016,61	
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	
Hutang Kepada Pihak Ketiga	4.529.986.794,72	
Koreksi Pencatatan	4.280.347.284,00	
Total Pembelian		356.516.281.166,90

Transfer Masuk	71.341.081.620,36	
Aset dari KDP	725.988.580,00	
Reklasifikasi	0,00	
Aset Covid-19	0,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Tambah		72.067.070.200,36

Mutasi Kurang

Transfer Keluar	71.341.081.620,36	
Diserahkan Ke Pemda Lain	0,00	

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Reklasifikasi	5.369.546.886,00
Koreksi BPK	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00

Total Mutasi Kurang 76.710.628.506,36
Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 9.327.286.533.125,75

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.327.286.533.125,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 154 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Jalan dan Jembatan			
Jalan	6.783.860.734.354,04	6.520.578.663.309,70	263.282.071.044,34
Jembatan	530.651.221.100,76	523.408.864.540,76	7.242.356.560,00
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	341.850.486.128,34	340.980.152.634,34	870.333.494,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	15.671.828.933,96	15.671.828.933,96	0,00
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	3.729.662.176,05	3.729.662.176,05	0,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	869.105.608.061,96	828.658.035.717,07	40.447.572.344,89
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	5.559.582.527,74	4.944.205.227,74	615.377.300,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	463.714.003.879,86	425.869.607.183,19	37.844.396.696,67
Bangunan Air Kotor	12.208.563.465,83	12.208.563.465,83	0,00
Instalasi			
Instalasi Air Bersih / Air Baku	44.109.854.497,53	44.109.854.497,53	0,00
Instalasi Air Kotor	647.980.178,51	647.980.178,51	0,00
Instalasi Pengolahan Sampah	559.744.000,00	0,00	559.744.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	6.259.815.001,05	6.259.815.001,05	0,00
Instalasi Gardu Listrik	2.200.412.086,28	2.200.412.086,28	0,00
Instalasi Pertahanan	1.129.114.308,00	1.129.114.308,00	0,00
Instalasi Gas	388.540.793,10	388.540.793,10	0,00
Instalasi Pengaman	417.030.256,70	417.030.256,70	0,00
Jaringan			
Jaringan Air Minum	130.866.233.784,59	129.855.362.363,59	1.010.871.421,00
Jaringan Listrik	113.689.854.568,26	113.689.854.568,26	0,00
Jaringan Telepon	666.263.023,19	666.263.023,19	0,00
Jumlah	9.327.286.533.125,75	8.975.413.810.254,85	351.872.722.880,90

Kenaikan Penurunan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat di lihat pada:

Lampiran Jalan, Irigasi dan Jaringan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5. Aset Tetap Lainnya

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
135.015.878.085,72	126.159.968.170,72	8.855.909.915,00

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp135.015.878.085,72 dan Rp126.159.968.170,72.

Mutasi aset tetap lainnya sebesar Rp135.015.878.085,72 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 (Audited)	126.159.968.170,72
Mutasi Tambah	
Pembelian (sesuai harga perolehan)	
Belanja Barang dan Jasa	7.960.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	528.000.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	8.319.949.915,00
Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00
Total Pembelian	8.855.909.915,00
Transfer Masuk	0,00
Reklasifikasi	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Saldo aset tetap per 31 Desember 2021	135.015.878.085,72

Rincian aset tetap lainnya sebesar Rp135.015.878.085,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 155 Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/Penurunan
Bahan Perpustakaan			
Bahan Perpustakaan Tercetak	118.452.747.823,38	109.780.434.665,38	8.672.313.158,00
Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	125.577.840,00	125.577.840,00	0,00
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	4.337.881.681,00	4.337.881.681,00	0,00
Musik	118.023.500,00	152.943.000,00	-34.919.500,00
Karya Grafika (Graphic Material)	21.306.498,00	21.306.498,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Three Dimensional Artefacts And Realita	110.828.469,00	110.828.469,00	0,00
Tarscalt	790.000,00	790.000,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
Barang Bercorak Kesenian	2.569.540.824,95	2.052.957.567,95	516.583.257,00
Alat Bercorak Kebudayaan	2.023.852.285,00	2.321.919.285,00	-298.067.000,00
Tanda Penghargaan	30.966.700,00	30.966.700,00	0,00
Hewan			
Hewan Piaraan	0,00	0,00	0,00
Tanaman			
Tanaman	2.864.032.717,39	2.864.032.717,39	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Aset Tetap Dalam Renovasi	4.360.329.747,00	4.360.329.747,00	0,00
Jumlah	135.015.878.085,72	126.158.968.170,72	8.855.909.915,00

6. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
355.705.505.591,46	335.652.200.689,21	20.053.304.902,25

Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp355.705.505.591,46 dan Rp335.652.200.689,21.

Mutasi KDP sebesar Rp355.705.505.591,46 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal 31 Desember 2020 (Audited)		335.652.200.689,21
Pembelian (sesuai harga perolehan)		
Belanja Barang dan Jasa	2.038.603.223,00	
Belanja Tanah	0,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	
Belanja Gedung dan Bangunan	24.656.891.475,19	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.493.446.771,33	
Utang Pihak Ketiga	149.611.000,00	
Total Pembelian		41.338.552.469,52
Transfer Masuk	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	0,00	
Reklasifikasi	21.260.829.567,45	

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aset di Serahkan Pemda Lain	0,00
Penghapusan	24.417.999,82
Koreksi BPK	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Total Mutasi Kurang	21.285.247.567,27
Saldo aset tetap per 31 Desember 2021	355.705.505.591,46

Rincian aset tetap KDP per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 156 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	4.632.885.147,91	11.555.714.290,00	-6.922.829.142,09
Dinas Kesehatan	8.690.307.209,45	3.750.112.652,56	4.940.194.556,89
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	0,00	2.539.875.000,00	-2.539.875.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	235.051.000,00	235.051.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	314.872.248.562,27	293.742.262.850,71	21.129.965.711,56
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	9.357.396.837,51	4.690.347.147,00	4.667.049.690,51
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
Saluan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	2.095.198.645,51	2.095.198.645,51	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	38.427.425,00	38.427.425,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	514.226.000,00	514.226.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	148.696.309,00	98.800.309,00	49.896.000,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.968.000,00	39.968.000,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	7.292.961.553,00	8.464.830.467,80	-1.171.848.914,80
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	0,00	81.630.000,00	-81.630.000,00
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	199.800.000,00	0,00	199.800.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	24.417.999,82	-24.417.999,82
Sekretariat DPRD	99.396.000,00	99.396.000,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	172.224.000,00	172.224.000,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.785.343.104,81	6.785.343.104,81	0,00
Badan Pendapatan Daerah	200.769.797,00	200.769.797,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bantan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siak Kecil	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bandar Laksamana	181.186.000,00	181.186.000,00	0,00
Kecamatan Rupal	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupal Utara	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Mandau	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	193.000.000,00	-193.000.000,00
Jumlah	355.703.505.591,46	335.652.200.689,21	20.053.304.902,25

7. Akumulasi Penyusutan

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	(8.740.874.479.718,82)	(7.532.028.493.938,79)	(1.208.845.985.780,03)

Akumulasi Penyusutan Tahun 2021 sebesar Rp8.740.874.479.718,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 157 Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.545.495.198.585,51	-1.430.450.968.470,36	-115.044.230.115,15

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1.061.497.171.843,54	-954.785.318.054,54	-106.711.853.789,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-6.129.880.256.088,15	-5.066.892.120.199,48	-1.042.988.135.888,67
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-4.001.853.201,62	-59.900.087.214,41	55.898.234.012,79
Jumlah	(8.740.374.479.718,82)	(7.532.028.493.938,79)	(1.208.845.985.780,03)

Tabel 5. 158 Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	(617.608.058.692,35)	-616.077.305.787,94	(1.530.752.904,41)
Dinas Kesehatan	(137.390.566.176,52)	-121.571.349.951,68	(15.819.216.224,84)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	(215.453.593.870,29)	-188.734.312.069,62	(26.719.281.800,67)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	(186.391.634.821,35)	-169.573.161.323,88	(16.818.473.497,47)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(4.361.668.197.040,62)	-3.557.991.939.782,58	(803.676.257.258,04)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	(1.359.940.964.402,66)	-1.240.001.221.403,19	(119.939.742.999,47)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(8.457.915.200,92)	-6.953.643.687,36	(1.504.271.513,56)
Dinas Pemadam Kebakaran	(24.301.849.155,22)	-22.951.800.900,22	(1.350.048.255,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(9.034.699.673,40)	-8.270.763.592,57	(763.936.080,83)
Dinas Sosial	(27.971.596.798,07)	-15.944.949.255,07	(12.026.647.543,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(22.406.729.488,65)	-20.295.150.351,11	(2.111.579.137,54)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(5.923.003.051,23)	-5.690.515.076,23	(232.487.975,00)
Dinas Ketahanan Pangan	(7.699.370.531,89)	-7.692.225.196,45	(7.145.335,44)
Dinas Lingkungan Hidup	(61.945.208.405,04)	-55.702.556.607,62	(6.242.651.797,42)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(16.814.474.718,88)	-12.874.918.772,68	(3.939.555.946,00)
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(22.088.152.403,83)	-19.502.987.396,83	(2.585.165.007,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(5.596.858.588,71)	-4.568.077.862,14	(1.028.780.726,57)
Dinas Perhubungan	(406.506.192.428,47)	-328.739.078.257,47	(77.767.114.171,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(9.002.113.637,04)	-7.181.511.497,60	(1.820.602.139,44)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(9.389.188.130,12)	-8.752.761.366,12	(636.426.764,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(9.118.663.926,09)	-8.515.510.574,09	(603.153.352,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(65.994.510.363,10)	-56.272.799.423,66	(9.721.710.939,44)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(18.423.728.790,13)	-22.779.129.415,46	4.355.400.625,33
Dinas Perikanan	(25.469.513.820,47)	-21.022.832.489,76	(4.446.681.330,71)
Dinas Perkebunan	(836.489.023,00)	0,00	(836.489.023,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	(68.009.228.813,38)	0,00	(68.009.228.813,38)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(71.110.673.663,88)	-61.792.523.319,88	(9.318.150.344,00)
Sekretariat Daerah	(315.474.426.592,20)	-300.768.648.784,28	(14.705.777.807,92)
Sekretariat DPRD	(61.353.399.174,57)	-61.008.095.532,77	(345.303.641,80)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(12.880.833.449,24)	-12.390.013.088,24	(490.820.361,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(286.173.331.215,91)	-263.005.805.262,21	(23.167.525.953,70)
Badan Pendapatan Daerah	(18.676.339.938,82)	-17.310.971.645,82	(1.365.368.293,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(20.336.911.905,85)	-20.297.343.715,85	(39.568.190,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	(17.254.364.128,71)	-14.994.719.335,01	(2.259.644.793,70)
Inspektorat	(8.454.633.281,25)	-8.392.900.273,25	(61.733.008,00)
Kecamatan Bengkalis	(31.455.947.318,17)	-25.584.061.436,14	(5.871.885.882,03)
Kecamatan Bantan	(18.525.981.588,73)	-16.176.331.070,73	(2.349.650.518,00)
Kecamatan Bukit Batu	(20.971.567.342,00)	-17.677.049.674,00	(3.294.517.668,00)
Kecamatan Siak Kecil	(15.542.865.265,28)	-11.571.834.906,66	(3.971.030.358,62)
Kecamatan Bandar Laksamana	(1.846.278.724,00)	-1.343.570.093,00	(502.708.631,00)
Kecamatan Rupal	(31.041.295.807,90)	-25.813.662.390,54	(5.227.633.417,36)
Kecamatan Rupal Utara	(16.197.556.799,33)	-13.355.399.936,17	(2.842.156.861,16)
Kecamatan Mandau	(57.429.685.287,54)	-45.813.482.458,15	(11.616.202.829,39)
Kecamatan Pinggir	(23.232.304.717,18)	-19.342.035.620,70	(3.890.269.096,48)
Kecamatan Bathin Solapan	(1.509.160.485,67)	-1.047.207.339,67	(461.953.146,00)
Kecamatan Talang Muandau	(2.418.345.554,00)	-1.748.634.481,00	(669.711.073,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5.546.075.527,36)	-4.837.425.345,80	(708.650.181,56)
Dinas Pertanian	0,00	-60.096.276.185,59	60.096.276.185,59
Jumlah	(8.740.674.479.718,82)	(7.532.028.493.938,79)	(1.208.645.985.780,03)

D. Dana Cadangan

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	0,00	0,00

Akun Dana Cadangan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mempunyai saldo sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. Aset Lainnya

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	202.533.572.495,04	215.538.517.601,57	(13.004.945.106,53)

Jumlah Aset lainnya sebesar Rp202.533.572.495,04 dan Rp215.538.517.601,57 merupakan aset yang tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap seperti: Tuntutan ganti rugi, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 159 Rincian Aset Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jenis Aset Tetap	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Tuntutan Ganti Rugi	6.306.966.250,66	6.306.966.250,66	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	488.750.000,00	488.750.000,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.382.272.002,28	3.604.936.620,03	(1.222.664.617,75)
Aset Lain-lain	193.355.584.242,10	205.137.864.730,88	-11.782.280.488,78
Jumlah	202.533.572.495,04	215.538.517.601,57	-13.004.945.106,53

1. Tuntutan Ganti Rugi

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	6.306.966.250,66	6.306.966.250,66	0,00

Rincian Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai Berikut:

Tabel 5. 160 Mutasi Tuntutan Ganti Rugi

Instansi	Saldo 01 Januari 2021	Mutasi 2021	Saldo 30 Juni 2021
IK	3.096.695.428,00	0,00	3.096.695.428,00
MK	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
AS	799.783.820,00	0,00	799.783.820,00
FM		0,00	
ED	364.045.684,00	0,00	364.045.684,00
MN	663.828.068,00	0,00	663.828.068,00
KH	651.250.097,00	0,00	651.250.097,00
AL	447.454.860,00	0,00	447.454.860,00
BAPENDA	126.908.294,00	0,00	126.908.293,66
JUMLAH	6.306.966.250,66	0,00	6.306.966.250,66

Rincian Mutasi TGR per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 161 Rincian Tuntutan Ganti Rugi per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Satuan Polisi Pamong Praja	364.045.684,00	364.045.684,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	447.454.860,00	447.454.860,00	0,00
Dinas Perhubungan	651.250.097,00	651.250.097,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	663.828.068,00	663.828.068,00	0,00
Sekretariat DPRD	3.096.695.428,00	3.096.695.428,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	126.908.293,66	126.908.293,66	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	799.783.820,00	799.783.820,00	0,00
Jumlah	6.306.966.250,66	6.306.966.250,66	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Proses Hukum TGR dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk TGR pada Badan Penelitian dan Pengembangan telah melalui proses hukum serta telah dijatuhkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Petikan Putusan No. 18/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Pbr.
2. Untuk TGR pada Sekretariat DPRD telah melalui proses hukum serta telah dijatuhkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Petikan Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/Tipikor/2017/PN.Pbr.
3. Untuk TGR pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melalui proses hukum serta telah dijatuhkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Petikan Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
488.750.000,00	488.750.000,00	0,00

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp488.750.000,00 berada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. Riau Angkasa Indah, surat perjanjian Nomor 01/PJJ-PSR/2000 tentang perjanjian kerjasama bagi tempat usaha dalam pembangunan pasar tradisional dan pusat pertokoan di Duri Kabupaten Bengkalis-Riau. Dalam kerjasama ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyediakan lahan senilai Rp488.750.000,00 untuk dibangun lokasi dagang dan kantor UPTD dengan rincian :

9 unit kios @ Rp. 50.000.000,00	450.000.000,00
1 unit kantor UPTD	38.750.000,00
	<u>488.750.000,00</u>

dimana sistem kerjasama adalah BOT (*Build Operate Transfer*) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ditambah 3 (tiga) tahun masa pembangunan pasar tradisional dan pusat pertokoan, terhitung bulan April 2000.

3. Aset Tidak Berwujud

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
2.382.272.002,28	3.604.936.620,03	(1.222.664.617,75)

Aset Tidak Berwujud disajikan sebesar nilai buku, yaitu nilai perolehan sebesar Rp22.417.026.493,57 setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp20.034.754.491,29. Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.382.272.002,28, sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.604.936.620,03.

Mutasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.382.272.002,28 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 (Audited) 3.604.936.620,03

Mutasi Tambah**Pembelian (sesuai harga perolehan)**

Belanja Barang dan Jasa	645.340.300,00
Belanja Peralatan dan Mesin	62.718.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Koreksi Pencatatan		
Hutang Pihak Ketiga		
Total Pembelian		708.058.300,00
Transfer Masuk		
Total Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar		
Aset diserahkan ke Pemda lain		
Amortisasi 2021	1.924.210.417,75	
Koreksi Amortisasi	6.512.500,00	
Koreksi Pencatatan		
Total Mutasi Kurang		1.930.722.917,75
Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021		2.382.272.002,28

Rincian Aset Tidak Berwujud berdasarkan Nilai Perolehan sebesar Rp22.417.026.493,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 162 Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD

Nama ATB	Nilai Perolehan	Tahun Pembelian	Perusahaan
Dinas Pendidikan			
Perangkat Lunak Sistem Operasi	21.000.000,00	2011	CV. Adira
Software / Aplikasi Komputer	401.955.000,00	2013	CV. Putra Wijaya
Belanja Modal Software / Aplikasi Komputer	96.066.500,00	2014	CV. Panjera Jaya
Software / Aplikasi Komputer	63.520.000,00	2016	CV. Panjera Jaya
Aplikasi Komputer SDN. 16 Pangkalan Batang	1.724.317,00	2016	CV. Panjera Jaya
Alat Sistem Penilaian Sekolah Terintegrasi Sistem Database	989.642.048,00	2016	CV. Bintang Nurjaya Lestari
Sarana dan Prasarana Pendukung Kurikulum 2013 Jenjang SMP dan Sederajat Se-Kabupaten Bengkulu	936.232.000,00	2016	CV. Citra Gemilang
Sarana dan Prasarana Micro Teaching Jenjang SMP dan Sederajat	545.302.482,00	2016	CV. Gemilang Abadi
Media Pembelajaran Edukatif Berbasis Animasi Interaktif	374.741.813,00	2016	CV. Ade Liany

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Media Pembelajaran Edukatif Berbasis Animasi Interaktif Untuk SMP dan Aplikasi Peningkatan Keterampilan TIK Berbasis Video Interaktif	1.582.578.486,00	2016	CV. Mifta Mafuh Mandiri
Alat Sistem Penilaian Sekolah Terintegrasi Sistem Database untuk Jenjang SMP	1.069.644.455,00	2016	CV. Ek Mandiri
Sumber Belajar Terpadu Berbasis IT	316.582.375,00	2016	UD. Putra Mas
Sarana dan Prasarana Pendukung Penerapan Kurikulum 2013 Jenjang SD dan Sederajat Se - Kabupaten Bengkalis	934.379.520,00	2016	CV. Prima Perkasa
Sarana dan Prasarana Micro Teaching Jenjang SD dan Sederajat	545.302.482,00	2016	CV. Surya Asyifa
Alat Peningkatan Mengajar Berbasis ICT	809.658.397,00	2016	CV. Riau Jaya
Komputer SDN. 35 Pematang Duku	1.729.240,00	2016	CV. Anugrah Persada
Perangkat Lunak Data Pendidikan dan Software Papan Informasi Pendidikan	122.898.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Perlengkapan Sarana Infrastruktur Sekolah Majalah Dinding Digital Interaktif Jenjang SD	607.951.341,00	2017	CV. Vibi Nabila
Alat Pembelajaran Terintegrasi Media Visual Interaktif Jenjang SD	639.222.473,00	2017	CV. Berkah Karya Mandiri
Alat Pembelajaran Terintegrasi Media Visual Interaktif	640.714.600,00	2017	CV. Megah Mandiri Sejahtera
Perlengkapan Sarana Infrastruktur Sekolah Majalah Dinding Digital Interaktif	618.807.004,00	2017	CV. Cahaya Anugerah
Alat Pembelajaran Berbasis Multimedia Animasi Interaktif Jenjang SMP	151.329.780,00	2018	CV. Putra Wijaya
Perangkat Lunak	173.910.000,00	2019	PT. Aditya Rama Daya Cipta
Aplikasi Master Bank Soal Tryout UN	76.335.900,00	2019	PT. Apsara Tiyasa Sambada
Microsoft (Windows Server STD CORE) WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic	181.800.000,00	2019	PT. Astragraphia Xprins Indonesia
Aplikasi Absensi Kependidikan (e-Absen)	73.384.000,00	2021	CV. Ikrar Utama

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aplikasi Manajemen Kearsipan Surat (e-Arsip)	70.796.000,00	2021	CV. Ikrar Utama
Jumlah			12.047.200.213,00
Dinas Kesehatan			
Software Website (dinkes.bengkaliskab.go.id)	86.661.400,00	2013	CV. Inti Media
Aplikasi Laporan Obat dan Perbekalan Kesehatan	95.219.196,00	2019	PT. Nuasa Cerah Informasi
Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	175.900.000,00	2020	PT. Nuasa Cerah Informasi
Software Website (corona.bengkaliskab.go.id)	39.567.000,00	2021	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah			397.347.596,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau			
Aplikasi Komputer (Software Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG RSUD)	50.436.900,00	2014	CV. Mandiri Karya
Pengembangan SIM dan IT/ Pengembangan Website RSUD (www.rsudmandau.com)	28.820.000,00	2016	PT. Raja Sakti Telematika
Perengkapan pendukung SIM RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)	9.459.000,00	2017	Toko Alfa Komputer
Jumlah			88.715.900,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Aplikasi Keuangan	34.850.000,00	2011	CV. Guna Dharma
Software Website (http://pupr.bengkaliskab.go.id/)	124.135.000,00	2015	PT. Hegar Daya
Aplikasi Surat Menyurat (Sistem Informasi Aplikasi Persuratan) (http://puprbengkalis.com/sipp/)	128.972.500,00	2019	CV. Mmw
Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat Berbasis WEB (http://simawar.puprbengkalis.com/)	131.613.500,00	2019	CV. Riau Cyber Teknologi
Aplikasi Kerusakan Jalan Kabupaten	99.744.000,00	2020	CV. Web Dragon
Sistem Informasi PUPR Kabupaten Bengkalis (pupr.bengkaliskab.com)	99.917.000,00	2021	CV. Mahputra
Jumlah			619.222.000,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan			
Aplikasi Database Tanah Berbasis Website (eSigab Perkimtan Bengkalis) di Google Playstore	144.550.000,00	2019	CV. Indosoft Media
Jumlah			144.550.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aplikasi Data Sistem Manajemen Pemulihan dan Penanggulangan Bencana	48.058.200,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
Software Website (bpbddamkar.bengkaliskab.go.id)	49.800.000,00	2016	CV. Ikrar Utama
Software Website Pusdatin (www.bpbd.bengkaliskab.go.id)	49.720.000,00	2019	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah	147.578.200,00		
Dinas Pemadam Kebakaran			
Software Website (www.damkar.bengkaliskab.go.id)	39.024.000,00	2019	CV. Djitoe Pesisir
Software Website (https://damkar.bengkaliskab.go.id)	24.805.000,00	2021	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah	63.829.000,00		
Dinas Ketahanan Pangan			
Aplikasi Sistem Informasi Harga Pasar	25.428.000,00	2013	CV. Media Jasa
Aplikasi Software Database Kelompok Tani pada Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Penyuluh	29.080.000,00	2013	Toko JC Computer
Software Website (www.dkp.bengkaliskab.go.id)	43.450.400,00	2016	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah	97.958.400,00		
Dinas Lingkungan Hidup			
Software Website Bank Sampah (http://Jakstradakabbengkaliskab.go.id)	74.778.000,00	2019	CV. Karya Anugrah Konsultan
Jumlah	74.778.000,00		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Software Website (http://sidupa.bengkaliskab.go.id/login)	199.670.000,00	2019	CV. Quantum Solution
Jumlah	199.670.000,00		
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Software Website (www.disdakduk-kb.bengkaliskab.go.id)	39.500.000,00	2018	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah	39.500.000,00		
Dinas Perhubungan			
Software Website (www.dishubkominfo.bengkaliskab.go.id)	44.979.000,00	2013	PT. Bumi Marna Indonusa



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	57.532.000,00	2018	CV. Hanin Tama
SIM PKB (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	66.155.910,00	2019	CV. Hanin Tama
Aplikasi Pemeriksaan Tab dan Capture (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	66.155.910,00	2019	CV. Hanin Tama
Aplikasi E-KIR Gadget	99.000.000,00	2020	CV. Yustini
Aplikasi SMS Gateway	38.500.000,00	2020	CV. Yustini
Modul Display	49.747.500,00	2021	CV. Baskhara
Modul Aplikasi Pengujian Keiling	93.390.000,00	2021	CV. Baskhara
Modul Software Aplikasi Uji Keiling	62.150.000,00	2021	CV. Baskhara
Jumlah		577.810.320,00	
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Software Website Pemkab Bengkulu (www.bengkalis.kab.go.id)	29.056.500,00	2013	CV. Citra Buana
Aplikasi Buku Tamu Elektronik	60.039.400,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (pesonabengkalis.id)	39.600.000,00	2020	CV. Putra Malay Cooperation
Aplikasi SMS Gateway	14.461.800,00	2021	CV. Cloud Code Indonesia
Jumlah		143.157.700,00	
Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Sistem Aplikasi Perizinan	96.078.702,00	2012	PT. Murfa Surya Mahardika
Software Website www.bpmp2t.co.id	38.821.000,00	2013	CV. Melco (Melayu Era Technology)
Sistem Informasi Manajemen (SKRD)	91.491.500,00	2013	CV. Junio Jaya
Sistem Informasi (PTSP)	282.381.000,00	2013	CV. Putra Malay Cooperation
SIM PTSP	9.194.400,00	2014	CV. Wahana Mitra Intermedia
SIMPEG	85.302.300,00	2014	CV. Putra Malay Cooperation
Anjungan Informasi Mandiri	97.324.800,00	2014	CV. Wahana Mitra Intermedia
SIM PTSP	87.015.400,00	2015	CV. Putra Malay Cooperation
SIM SKRD	60.854.600,00	2015	CV. Wahana Mitra Intermedia
Sistem Layanan Antrian	48.317.500,00	2017	CV. Media Gema Mandiri
Arsipan Digital	49.052.400,00	2017	CV. Media Gema Mandiri
Sistem Informasi Berbasis IT	55.363.900,00	2017	CV. Tri Jaya Multimedia
ePINTER DPMPSP BENGKALIS	37.400.000,00	2018	CV. Tri Jaya Multimedia
warning system (e-PINTER)	31.300.000,00	2019	CV. Tri Jaya Multimedia
Mobile layanan perizinan dan non perizinan	34.000.000,00	2019	CV. Media Gema Mandiri

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Arsip digital	33.800.000,00	2019	CV. Media Gema Mandiri
Tanda Tangan Digital	41.800.000,00	2019	CV. Tri Jaya Multimedia
Jumlah			1.179.497.502,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Komputer Server /Main Frame (Mikro Film) Perangkat Lunak NCI Book Man	122.300.000,00	2008	CV. Berkama Karya
Software Database Sistem Kearsipan	68.460.900,00	2011	CV. Defitra Konsultan
Aplikasi Untuk Pendataan Dan Penilaian Dokumen/Arsip Daerah (Digital Arsip)	33.733.483,00	2018	CV. Ladini
Jumlah			224.494.383,00
Dinas Perikanan			
Software Website (www.dinaskelautan.bengkalis.kab.go.id)(software codeigniter3)	39.800.000,00	2018	CV. Ikrar Utama
Jumlah			39.800.000,00
Dinas Pertanian			
Aplikasi Data Keuangan & Administrasi Umum (Perencanaan)	49.950.000,00	2010	CV. De Fitra Konsultan
Aplikasi Pada Laptop (Citra Alus + Handling)	45.126.647,77	2011	CV. Tanjung Tipah
Software Website www.disbunhut.bengkalis.kab.go.id	40.642.000,00	2016	CV. Panjera Jaya
Software Website (www.distan.bengkalis.kab.go.id)	29.850.000,00	2016	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah			165.568.647,77
Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
Software Voip WEB based Voip Software	34.521.000,00	2013	CV. Indra Rukmana Karya Teknik
Server Xeon E3110 (3.0 Ghz, Fsb 1333 Mhz, Chace 6Mb)	9.862.850,00	2011	CV. Adira
Pembuatan Aplikasi Database IKM	49.940.000,00	2021	CV. Tuan Muda
Jumlah			94.323.850,00
Sekretariat Daerah			
Software/Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan	57.530.000,00	2011	CV. Adira
Website Dinamis dan Interaktif (bengkalis.kab.go.id)	19.900.000,00	2011	CV. Liandino Utama
Software/Aplikasi SMS Gateway Berbasis Web	34.950.000,00	2011	CV. Liandino Utama
Software/Aplikasi SIMBADA	18.500.000,00	2011	CV. Gold Print



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Software/Aplikasi Gaji	189.000.000,00	2012	CV. Ikrar Utama
Software/Aplikasi SIMPEG	97.800.000,00	2012	CV. Serantau Mandiri
Software OS Window Server	10.196.400,00	2013	CV. Ikrar Utama
Software/Aplikasi Operating System	21.243.000,00	2015	CV. Ikrar Utama
Software/ Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	73.194.000,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
Software SIAP	61.899.000,00	2015	CV. Mahmudal Fata Akber
Software/Aplikasi Data Rumah Ibadah	14.780.000,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
Sistem dan Aplikasi Laporan Online untuk Bagian Penyusunan Program	49.398.000,00	2016	CV. Ikrar Utama
Software Sistem Informasi Manajemen Ruangan Setda dan Software Sistem Informasi Document Sharing Berbasis Cloud	147.666.000,00	2016	CV. Pratama Cipta
Software OS Window Server	10.500.000,00	2016	CV. Ikrar Utama
Aplikasi Dashboard Pengadaan Barang dan Jasa	74.855.000,00	2020	CV. Rishan Anugrah
Jumlah			881.411.400,00
Sekretariat DPRD			
Software Website (http://dprd-bengkalis.kab.go.id/admin/dprd)	300.580.000,00	2011	CV. Lialindo Utama
Software Website (www.DPRD.Bengkalis.kab.go.id)	58.711.700,00	2016	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.e-wartawan.bengkalis.kab.go.id/HumasSetwan/)	44.598.400,00	2017	CV. Putra Malay Cooperation
Software Website (www.SPPD.Bengkalis.kab.go.id)	47.960.000,00	2019	CV. Putra Malay Cooperation
Software Website (www.DPRD.bengkalis.kab.go.id/perpustakaan/)	54.000.000,00	2019	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah			505.850.100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Software Website (www.bappeda.bengkalis.kab.go.id)	17.618.183,00	2012	CV. Guna Dharma
Software E-Planning	194.150.000,00	2018	PT. Raja Sakti Telematika
Software E-Monev	187.000.000,00	2019	PT. Adityarama Daya Cipta
Jumlah			398.768.183,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Software Website (www.dpk.bengkaliskab.go.id)	34.320.000,00	2015	CV. Putra Malay Cooperation
Software Website (www.bpkad.bengkaliskab.go.id)	49.000.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpkad.bengkaliskab.go.id)	35.625.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpkad.bengkaliskab.go.id)	36.000.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpp.bengkaliskab.go.id)	41.100.000,00	2016	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah		196.045.000,00	
Badan Pendapatan Daerah			
Lisensi Software Database Aplikasi SIM PBB : SQLSvrStdCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL Core Lic Qlfd	81.257.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Software Database Aplikasi SIM PBB : SQLSvrStdCore 2012 ENG DiskKit MVL DVD	693.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Sistem Operasi Aplikasi SIM PBB : WinSvrEssntls 2012 SNGL	14.410.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Sistem Operasi Aplikasi SIM PBB : WinSvrEssntls 2012 64Bit	715.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Software Pemetaan Aplikasi SIM PBB : Aplikasi Pemetaan Mapinfo Profesional V 11.5	51.315.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Software Aplikasi Simpeg, Aplikasi Pajak Daerah dan Sistim Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (Simpeda)	650.570.000,00	2011	CV. Serantau Mandiri
Software/Aplikasi Sistem Informasi Manajemen PBB Online	261.118.205,80	2012	CV. Llandino Utama.
Software/Aplikasi Perjalanan Dinas dan Website Dispenda	69.025.000,00	2012	CV. Serantau Mandiri
Software/Aplikasi POS (Payment Online System) untuk PBB-P2	198.800.000,00	2013	PT. Citra Media Interaktif.
Software/Aplikasi Komputer (Smart Map) untuk Pengelolaan PBB-P2	170.500.000,00	2014	PT. Global Aero Dinamika
Connector LAN - AMP Ori	750.000,00	2015	CV. Guna Dharma

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kabel LAN - Belden Ori	2.810.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Anti Virus Komputer Desktop (3 user) - Kaspersky 2016	5.460.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Aplikasi Dashboard PBB-P2 - Anti Virus Karpersky - 1 Server 5 Client	4.000.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Aplikasi Dashboard PBB-P2	126.500.000,00	2015	PT. Cartenz Technology International.
Software/Aplikasi Komputer Sistem Informasi PBB-P2	65.827.200,00	2016	PT. Eloku Mitra Utama
Aplikasi Perhitungan Piutang PBB-P2	65.492.800,00	2016	PT. Bonion Mitra Utama
Software Aplikasi Komputer SMS Gateway	66.630.000,00	2016	PT. Cipta Pusaka Utama
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Self Assesment berupa iTax - Hotel Tax Application dan iTax- Restaurant Tax Application.	197.890.000,00	2017	PT. Cartenz Technology Indonesia.
Pemeliharaan Aplikasi Komputer Pengelolaan PBB-P2	20.000.000,00	2017	PT. Mentari Kode Informatika
Aplikasi Imotax Pendataan Wajib Pajak	194.535.000,00	2018	PT. Mentari Kode Informatika
Sistem Aplikasi Informasi Manajemen Pajak Daerah Official Assesment dan Self Assesment	378.840.000,00	2018	PT. Cartenz Technology Indonesia
Windows Server	39.800.000,00	2019	CV. Dwi Mandiri
Aplikasi Informasi Pajak Daerah (Software Sistem Informasi Dashboard)	149.710.000,00	2019	PT. Cartenz Technology Indonesia.
Aplikasi E-SPTPD Untuk Penerapan pajak secara On-Line	194.590.000,00	2019	PT. Mentari Kode Informatika.
Aplikasi System Informasi Pembukuan Pajak Daerah	97.289.000,00	2019	PT. Geo Space Intimatika.
Aplikasi Pendataan Pajak Daerah Berbasis Mobile - Tax Survey	129.900.000,00	2021	PT. Cartenz Technology Indonesia
Jumlah			3.238.427.205,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
Software Sistem Aplikasi Keabsahan, Disposisi dan Pelayanan Kepegawaian	82.280.000,00	2012	CV. Masya
Jumlah			82.280.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan			
Software /Aplikasi Ellbrary/ fitur	21.158.313,00	2012	CV. Metoo (Melayu Era Teknologi)
Software /Aplikasi Database berbasis WEB	20.993.313,00	2012	CV. Metoo (Melayu Era Teknologi)
Visualisasi Website Ekominia Wisata Tasik Biospher (www.ecominawisatabiosphere.com)	57.924.467,00	2012	CV. Mitra Utama Konsultan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Software Website (www.balitbang.bengkalskab.go.id)	31.185.000,00	2014	CV. Delapan Media Teknologi
Aplikasi sistem Keuangan	12.000.000,00	2014	CV. Putra Malay Cooperation
Aplikasi Penatausahaan Keuangan	13.500.000,00	2016	CV. Mahmudal Fata Akbar
Aplikasi sistem Keuangan	31.037.600,00	2017	CV. Mahmudal Fata Akbar
Optimalisasi Website	19.990.300,00	2017	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah			207.708.993,00
Inspektorat			
Software /perangkat komputer (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan - SIMHP)	53.067.500,00	2015	Toko New Visicom
Jumlah			53.067.500,00
Kecamatan Bengkulu			
Software/Aplikasi dan Perangkat Aplikasi SI- KEL Kota Bengkulu. Alamat Lokal Server : 192.168.99.1/sikel	70.000.000,00	2017	CV. Panjera Jaya
Jumlah			70.000.000,00
Kecamatan Bantan			
Software Website (https://camatbantabengkalskab.go.id)	15.000.000,00	2017	Toko Smart Com
Jumlah			15.000.000,00
Kecamatan Siak Kecil			
Software Website Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kecamatan Siak Kecil Kab. Bengkulu (siap.appsiakecil.id)	15.000.000,00	2020	Toko Hendri Computer
Jumlah			15.000.000,00
Kecamatan Bandar Laksamana			
Software Website (https://camatbandarlaksamana.web.id)	24.750.000,00	2020	PT. Azli Internet dan Teknologi Informasi
Jumlah			24.750.000,00
Kecamatan Rupa Utara			
Software Website Kecamatan (http://camatrupautara.bengkalskab.go.id)	30.000.000,00	2017	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah			30.000.000,00
Kecamatan Mandau			
Software Website (https://camatmandau.bengkalskab.go.id)	27.182.500,00	2016	CV. Putra Malay Cooperation
Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (PATEN)	98.207.500,00	2018	CV. Annur Kegemilangan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jaringan "SIMANTAP" (Pembuatan Aplikasi SIMANTAP)	149.728.400,00	2019	CV. Tyra Abadi Engineering
Jumlah			275.118.400,00
Kecamatan Talang Muandau			
Software Website (https://camattalangmuandau.bengkaliskab.go.id/)	29.700.000,00	2020	CV. Ikrar Utama
Jumlah			29.700.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Software Website (www.kesbangpol.bengkaliskab.go.id)	49.000.000,00	2014	CV. Delapan Media Teknologi
Jumlah			49.000.000,00
Jumlah	22.417.026.493,57		22.417.026.493,57

Tabel 5. 163 Rincian Nilai Buku Aset Tidak Berwujud

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Tidak Berwujud	22.417.026.493,57	21.708.968.193,57	708.058.300,00
Software	22.268.636.493,57	21.560.578.193,57	708.058.300,00
Lisensi	148.390.000,00	148.390.000,00	0,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-20.034.754.491,29	-18.104.031.573,54	-1.930.722.917,75
Software	-19.916.042.491,29	-18.000.158.573,54	-1.915.883.917,75
Lisensi	-118.712.000,00	-103.873.000,00	-14.839.000,00
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	2.382.272.002,28	3.604.936.620,03	-1.222.664.617,75

Tabel 5. 164 Rincian Nilai Buku Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 per OPD

OPD	Nilai Perolehan	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Nilai Buku
Dinas Pendidikan	12.047.208.213,00	-11.725.079.743,00	322.128.464,00
Dinas Kesehatan	397.347.596,00	-238.632.165,58	158.715.430,42
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	88.715.900,00	-88.715.900,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	619.232.000,00	-339.924.041,67	279.307.958,33
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	144.550.000,00	-75.266.458,00	69.283.542,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	147.578.200,00	-124.789.866,67	22.788.333,33
Dinas Pemadam Kebakaran	63.829.000,00	-23.280.770,83	40.548.229,17
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Ketahanan Pangan	97.958.400,00	-97.958.400,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	74.778.000,00	-49.852.000,00	24.926.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.670.000,00	-103.994.791,67	95.675.208,33
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.500.000,00	-31.270.833,33	8.229.166,67
Dinas Perhubungan	577.610.320,00	-218.138.983,33	359.471.336,67
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	143.157.700,00	-105.373.475,00	37.784.225,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.179.497.502,00	-1.122.970.418,67	56.527.083,33
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.494.383,00	-216.763.822,90	7.730.560,10
Dinas Perikanan	39.800.000,00	-31.508.333,33	8.291.666,67
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	165.568.647,77	-165.568.647,77	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94.323.850,00	-44.383.850,00	49.940.000,00
Sekretariat Daerah	881.411.400,00	-826.829.700,00	54.581.700,00
Sekretariat DPRD	505.850.100,00	-462.367.600,00	43.482.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	398.768.183,00	-292.984.841,00	105.783.342,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	196.045.000,00	-196.045.000,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	3.238.427.205,80	-2.742.861.351,63	495.565.854,17
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	82.280.000,00	-82.280.000,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	207.788.993,00	-207.788.993,00	0,00
Inspektorat	53.067.500,00	-53.067.500,00	0,00
Kecamatan Bengkalis	70.000.000,00	-61.250.000,00	8.750.000,00
Kecamatan Bantan	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siak Kecil	15.000.000,00	-5.937.500,00	9.062.500,00
Kecamatan Bandar Laksamana	24.750.000,00	-11.343.750,00	13.406.250,00
Kecamatan Rupit	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupat Utara	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00
Kecamatan Mandau	275.118.400,00	-183.986.997,91	91.131.402,09
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	29.700.000,00	-10.518.750,00	19.181.250,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.000.000,00	-49.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jumlah 22.417.026.493,57 (20.034.754.491,29) 2.382.272.002,28

Tabel 5. 165 Rincian Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	12.047.208.213,00	11.903.028.213,00	144.180.000,00
Dinas Kesehatan	397.347.596,00	357.780.596,00	39.567.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	88.715.900,00	88.715.900,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	619.232.000,00	519.315.000,00	99.917.000,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	144.550.000,00	144.550.000,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	147.578.200,00	147.578.200,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	63.829.000,00	39.024.000,00	24.805.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	97.958.400,00	97.958.400,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	74.778.000,00	74.778.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.670.000,00	199.670.000,00	0,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	577.610.320,00	372.322.820,00	205.287.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	143.157.700,00	128.695.900,00	14.461.800,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.179.497.502,00	1.179.497.502,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.494.383,00	224.494.383,00	0,00
Dinas Perikanan	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	165.568.647,77	0,00	165.568.647,77
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94.323.850,00	44.383.850,00	49.940.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sekretariat Daerah	881.411.400,00	881.411.400,00	0,00
Sekretariat DPRD	505.850.100,00	505.850.100,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	398.768.183,00	398.768.183,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	196.045.000,00	196.045.000,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	3.238.427.205,80	3.108.527.205,80	129.900.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	82.280.000,00	82.280.000,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	207.788.993,00	207.788.993,00	0,00
Inspektorat	53.067.500,00	53.067.500,00	0,00
Kecamatan Bengkalis	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
Kecamatan Bantan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siak Kecil	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Kecamatan Bandar Laksamana	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00
Kecamatan Rupal	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupal Utara	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Kecamatan Mandau	275.118.400,00	275.118.400,00	0,00
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	165.568.647,77	-165.568.647,77
Jumlah	22.417.026.493,57	21.708.968.193,57	708.058.300,00

Tabel 5. 166 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	-11.725.079.749,00	-10.940.575.667,00	-784.504.082,00
Dinas Kesehatan	-238.632.165,58	-127.108.265,58	-111.523.900,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	-88.715.900,00	-86.548.212,50	-2.167.687,50
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-339.924.041,67	-247.759.937,50	-92.164.104,17
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-75.286.458,00	-39.148.958,00	-36.137.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-124.789.866,67	-112.359.866,67	-12.430.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran	-23.280.770,83	-13.008.000,00	-10.272.770,83
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	-97.958.400,00	-97.958.400,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	-49.852.000,00	-31.157.500,00	-18.694.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-103.994.791,67	-54.077.291,67	-49.917.500,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-31.270.833,33	-21.395.833,33	-9.875.000,00
Dinas Perhubungan	-218.138.983,33	-127.749.283,33	-90.389.700,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-105.373.475,00	-87.365.975,00	-18.007.500,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-1.122.970.418,67	-1.060.588.597,84	-62.381.820,83
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-216.763.822,90	-208.330.451,90	-8.433.371,00
Dinas Perikanan	-31.508.333,33	-21.558.333,33	-9.950.000,00
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	-165.568.647,77	0,00	-165.568.647,77
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-44.383.850,00	-44.383.850,00	0,00
Sekretariat Daerah	-826.829.700,00	-808.115.900,00	-18.713.800,00
Sekretariat DPRD	-462.367.600,00	-429.444.533,33	-32.923.066,67
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-292.984.841,00	-197.697.345,00	-95.287.496,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-196.045.000,00	-172.670.000,00	-23.375.000,00
Badan Pendapatan Daerah	-2.742.861.351,63	-2.407.152.601,63	-335.708.750,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-82.280.000,00	-82.280.000,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	-207.788.993,00	-196.095.099,25	-11.693.893,75
Inspektorat	-53.067.500,00	-53.067.500,00	0,00
Kecamatan Bengkalis	-61.250.000,00	-61.250.000,00	0,00
Kecamatan Bantan	-15.000.000,00	-11.562.500,00	-3.437.500,00
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siak Kecil	-5.937.500,00	-625.000,00	-5.312.500,00
Kecamatan Bandar Laksamana	-11.343.750,00	-2.062.500,00	-9.281.250,00
Kecamatan Rupal	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupal Utara	-30.000.000,00	-23.125.000,00	-6.875.000,00
Kecamatan Mandau	-183.986.997,91	-122.003.022,91	-61.983.975,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	-10.518.750,00	-1.237.500,00	-9.281.250,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-49.000.000,00	-49.000.000,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	-165.568.647,77	165.568.647,77
Jumlah	(20.034.754.491,29)	(18.104.031.573,54)	(1.930.722.917,75)

5. Aset Lain-lain

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	193.355.584.242,10	205.137.864.730,88	-11.782.280.488,78

Aset lain-lain per 31 Desember 2021 seluruhnya diperoleh dari hasil inventarisasi karena adanya reklasifikasi dari aset tetap yang tidak layak disajikan dalam aset tetap. Aset lain-lain disajikan sebesar nilai buku, yaitu nilai perolehan sebesar Rp243.608.911.002,10 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp50.253.326.760,87. Rincian Aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 167 Rincian Aset Lain-lain

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Lain-lain	243.608.911.002,97	252.944.364.331,22	-9.335.453.328,25
Aset Rusak Berat	9.157.589.122,97	39.435.680.705,64	-30.278.091.582,67
Aset Tidak Ditemukan	36.802.652.454,03	36.802.652.454,03	0,00
Aset Lain-lainnya	197.648.669.425,97	176.706.031.171,55	20.942.638.254,42
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-50.253.326.760,87	-47.806.499.600,34	-2.446.827.160,53
Aset Rusak Berat	-38.499.143.669,59	-36.052.316.509,06	-2.446.827.160,53
Aset Tidak Ditemukan	-7.764.374.758,28	-7.764.374.758,28	0,00
Aset Lain-lainnya	-3.989.808.333,00	-3.989.808.333,00	0,00
Jumlah	193.355.584.242,10	205.137.864.730,88	-11.782.280.488,78

Tabel 5. 168 Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per OPD

OPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Dinas Pendidikan	31.027.836.142,09	-3.989.808.333,00	27.038.027.809,09
Dinas Kesehatan	2.840.849.610,00	-1.166.914.730,00	1.673.934.880,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	9.175.484.198,77	-9.175.484.198,77	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	3.628.234.710,53	-3.216.589.010,53	411.645.700,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	141.097.653.704,88	-3.550.450.000,00	137.547.203.704,88
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	135.454.225,00	-163.333,33	135.290.891,67
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Satuan Polisi Pamong Praja	600.246.379,15	-540.834.973,83	59.411.405,32
Dinas Sosial	807.325.179,72	-684.093.151,13	123.232.028,59
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	246.693.865,77	-237.928.056,00	8.765.809,77
Dinas Ketahanan Pangan	588.551.448,46	-296.406.445,57	292.145.002,89
Dinas Lingkungan Hidup	1.856.136.117,04	-1.129.904.059,00	726.234.058,04
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.602.976.810,00	-1.602.976.810,00	0,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.714.712.039,00	-290.195.298,00	3.424.516.741,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.772.265.113,80	-403.536.374,00	2.368.728.739,80
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	177.725.582,13	-172.644.991,00	5.080.591,13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	256.086.151,00	-86.767.167,33	169.318.983,67
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	4.969.037.263,00	-1.601.807.492,00	3.367.229.771,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	371.849.100,00	-244.851.112,00	126.997.988,00
Dinas Perikanan	8.976.318.002,03	-2.097.844.198,59	6.878.473.803,44
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	4.788.551.460,34	-1.612.790.526,67	3.175.760.933,67
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.558.280.172,00	-4.506.828.578,53	1.051.451.593,47
Sekretariat Daerah	1.878.285.866,00	-983.308.478,67	894.977.387,33
Sekretariat DPRD	821.046.944,60	-709.992.716,95	111.054.227,65
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.377.166.492,74	-1.373.382.805,00	3.783.687,74
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.348.828.757,07	-2.757.906.224,74	2.590.922.532,33
Badan Pendapatan Daerah	247.635.000,00	-247.635.000,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.049.893.123,78	-979.376.023,00	70.517.100,78
Badan Penelitian dan Pengembangan	867.285.127,00	-787.493.055,33	79.792.071,67
Inspektorat	1.703.921.960,00	-1.689.254.376,00	14.667.584,00
Kecamatan Bengkalis	335.117.060,14	-179.241.269,23	155.875.790,91
Kecamatan Bantan	1.049.010.188,00	-891.651.835,00	157.358.353,00
Kecamatan Bukit Batu	186.993.599,00	-163.924.724,00	23.068.875,00
Kecamatan Siak Kecil	543.532.861,66	-247.852.208,99	295.680.652,67
Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rупat	42.025.000,00	-39.008.697,92	3.016.302,08

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Rupal Utara	79.980.581,81	-49.954.491,54	30.026.090,27
Kecamatan Mandau	1.597.107.811,79	-1.308.336.032,79	288.771.779,00
Kecamatan Pinggir	666.027.990,00	-666.027.990,00	0,00
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	622.783.364,67	-570.161.992,43	52.621.372,24
Jumlah	243.608.911.002,87	-50.263.326.780,67	193.355.584.242,10

5.3.2. Kewajiban

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	159.418.991.183,13	82.537.732.628,60	76.881.258.554,53

Jumlah Kewajiban sebesar Rp159.418.991.183,13 dan Rp82.537.732.628,60 merupakan nilai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 169 Rincian Kewajiban

Jenis Kewajiban	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Kewajiban Jangka Pendek	159.418.991.183,13	82.537.732.628,60	76.881.258.554,53
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	159.418.991.183,13	82.537.732.628,60	76.881.258.554,53

A. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	159.418.991.183,13	82.537.732.628,60	76.881.258.554,53

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp159.418.991.183,13 dan Rp82.537.732.628,60 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 170 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
Hutang Biaya Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	95.720.570.681,77	57.533.376.593,10	38.187.194.088,67
Hutang Pihak Ketiga	60.699.149.905,36	22.100.255.714,50	38.598.894.190,86
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.999.270.596,00	2.904.100.321,00	95.170.275,00
Jumlah	159.418.991.183,13	82.537.732.628,60	76.881.258.554,53

1. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	0,00	

Perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp0,00 merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti: PPh dan PPN.

Rincian perhitungan pihak ketiga sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 171 Rincian Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Kecamatan Rupat Utara	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

2. Hutang Biaya Pinjaman Luar Negeri

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	0,00	0,00

Hutang Biaya Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp948.812.752,57, berdasarkan surat Bupati Bengkalis Nomor 900/Keu/IV/697/2009 Tanggal 28 April 2009 perihal Permohonan Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah disetujui sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-750/MK.05/2011 Tanggal 23 November 2011 perihal persetujuan Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Daerah. Penghapusan mutlak akan dilaksanakan paling cepat dua tahun setelah tanggal penetapan penghapusan bersyarat dimaksud.

Sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan tersebut diatas, maka antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah ditandatangani Naskah Perjanjian Perubahan (Amandemen) Pinjaman No. AMA-461/SLA-1085/DSMI/2014 tanggal 08 Oktober 2014.

Berdasarkan Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Riau tentang Hutang Biaya Pinjaman Luar Negeri Nomor SLA-1085/DP3/1998 tanggal 23 Desember 1998, dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BA: BA-009/WPB.04/2015 diketahui bahwa saldo akhir hutang biaya pinjaman luar negeri Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp948.812.752,57.

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 833/KMK.05/2016 tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Atas Nama Pemerintah Kabupaten Karawang dan 22 (Dua Puluh Dua) Penanggung Utang Lainnya, Pinjaman Luar Negeri Kabupaten Bengkalis dengan nomor Pinjaman SLA-1085/DP3/1998 sebagaimana diubah dengan AMA-461/SLA-1085/DSMI/2012 sebesar Rp948.812.752,57 telah dihapuskan hak tagih atas piutang negara tersebut.

3. Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	95.720.570.681,77	57.533.376.593,10	38.187.194.088,67

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp95.720.570.681,77. Bila dibandingkan dengan saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp57.533.376.593,10 mengalami kenaikan sebesar Rp38.187.194.088,67 dengan rincian :

Tabel 5. 172 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per OPD



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

OPD	Pendapatan Diterima Dimuka	Saldo 2021	Saldo 2020
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	Sewa Lahan Bank Riau	46.666.666,76	81.666.666,76
	Sewa Lahan ATM Bank BRI	7.000.000,00	19.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	Sewa Lahan ATM Bank	73.166.666,67	119.666.666,67
Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Sewa Lahan Gardu Listrik	10.666.666,67	11.666.666,67
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Lebih Bayar DBH Pusat (Dana Perimbangan)	95.277.860.840,00	57.132.028.243,00
Badan Pendapatan Daerah	Pajak Reklame	305.209.841,67	169.348.350,00
Jumlah		95.720.570.681,77	57.533.376.593,10

4. Hutang Kepada Pihak Ketiga

	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	60.699.149.905,36	22.100.255.714,50	38.598.894.190,86

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.699.149.905,36. Sedangkan saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.100.255.714,50.

Rincian hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp60.699.149.905,36 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 173 Rincian Hutang Kepada Pihak Ketiga

Hutang Kepada Pihak Ketiga	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Utang Belanja Pegawai	4.265.465.240,00	542.937.176,00	3.722.528.064,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	25.707.756.840,92	13.979.617.078,00	11.728.139.762,92
Utang Belanja Hibah	298.483.028,01	70.091.969,00	228.391.059,01
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.733.853.918,00	82.065.050,00	2.651.788.868,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.386.674.391,47	1.332.081.310,00	11.054.593.081,47
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.306.916.486,96	6.093.463.131,50	9.213.453.355,46
Saldo	60.699.149.905,36	22.100.255.714,50	38.598.894.190,86

Tabel 5. 174 Mutasi Hutang Kepada Pihak Ketiga

Hutang Kepada Pihak Ketiga	APBD	BLUD	Jumlah
Saldo Awal Hutang	7.956.273.586,50	14.143.982.128,00	22.100.255.714,50
Koreksi Hutang	-30.871.500,00	380.680.075,00	349.808.575,00
Hutang 2020 di Bayar 2021	14.413.955.573,00	0,00	14.413.955.573,00
Penambahan Tahun 2021	52.663.041.188,86	0,00	52.663.041.188,86
Saldo	46.177.487.702,36	14.524.662.203,00	60.699.149.905,36

Tabel 5. 175 Rincian Hutang Kepada Pihak Ketiga per OPD



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Hutang Kepada Pihak Ketiga	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	12.807.450.838,21	0,00	12.807.450.838,21
Dinas Kesehatan	1.246.296.943,00	542.937.176,00	703.359.767,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	25.221.388.863,92	14.143.982.128,00	11.077.406.735,92
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	587.672.472,00	0,00	587.672.472,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.118.453.724,23	5.465.671.481,50	1.652.782.242,73
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	3.999.875.580,00	260.644.000,00	3.739.231.580,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	4.280.347.284,00	444.730.000,00	3.835.617.284,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.377.306.200,00	0,00	5.377.306.200,00
Badan Pendapatan Daerah	10.408.000,00	10.408.000,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00
Inspektoral	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bantan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siak Kecil	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupa	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupa Utara	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Mandau	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00
PPKD	0,00	1.181.932.929,00	-1.181.932.929,00
Jumlah	60.699.149.905,36	22.100.255.714,50	38.598.894.190,86

Rincian Hutang Pihak Ketiga dapat dilihat pada:

Lampiran Hutang Pihak Ketiga

5. Hutang Jangka Pendek Lainnya

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
2.999.270.596,00	2.904.100.321,00	95.170.275,00

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.999.270.596,00. Bila dibandingkan dengan saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.904.100.321,00.

Rincian hutang jangka pendek lainnya sebesar Rp2.999.270.596,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 176 Rincian Hutang Jangka Pendek Lainnya per OPD

OPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	1.790.500,00	1.105.000,00	685.500,00
Dinas Kesehatan	33.454.715,00	41.812.473,00	-8.357.758,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	150.967.300,00	114.807.250,00	36.160.050,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	148.011.600,00	164.933.913,00	-16.922.313,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.176.640,00	16.871.161,00	6.305.479,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	27.601.581,00	1.788.267.651,00	-1.760.666.070,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.765.800,00	8.120.471,00	-354.671,00
Dinas Pemadam Kebakaran	13.278.000,00	12.422.968,00	855.032,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.068.892,00	8.341.379,00	-2.272.487,00
Dinas Sosial	14.096.536,00	11.227.248,00	2.869.288,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.124.035,00	20.587.511,00	-2.463.476,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.353.140,00	6.781.939,00	1.571.201,00
Dinas Kelahanan Pangan	8.282.401,00	8.882.064,00	-599.663,00
Dinas Lingkungan Hidup	17.124.434,00	16.414.040,00	710.394,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29.119.117,00	23.076.880,00	6.042.237,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.048.479,00	9.415.701,00	632.778,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.943.361,00	11.411.170,00	-467.809,00
Dinas Perhubungan	1.806.947.849,00	45.201.414,00	1.761.746.435,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	11.468.001,00	7.031.885,00	4.436.116,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.227.150,00	12.491.308,00	2.735.842,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.139.554,00	15.279.321,00	860.233,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	21.861.846,00	13.208.150,00	8.653.696,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.042.558,00	13.383.818,00	-341.260,00
Dinas Perikanan	18.267.790,00	14.454.549,00	3.813.241,00
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	16.854.524,00	0,00	16.854.524,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	53.778.289,00	44.871.099,00	8.907.190,00
Sekretariat Daerah	301.526.017,00	251.633.925,00	49.892.092,00
Sekretariat DPRD	2.512.500,00	4.134.000,00	-1.621.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.590.793,00	27.305.923,00	-2.715.130,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29.052.392,00	15.979.721,00	13.072.671,00
Badan Pendapatan Daerah	32.344.365,00	31.301.400,00	1.042.965,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	15.719.874,00	18.848.764,00	-3.128.890,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	11.052.394,00	8.312.399,00	2.739.995,00
Inspektorat	9.748.663,00	8.907.331,00	841.332,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Bengkalis	16.106.816,00	17.048.864,00	-942.048,00
Kecamatan Bantan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Batu	9.436.952,00	9.759.972,00	-323.020,00
Kecamatan Siak Kecil	4.196.780,00	3.211.285,00	985.495,00
Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupal	13.370.500,00	14.453.440,00	-1.082.940,00
Kecamatan Rupal Utara	2.233.367,00	3.495.285,00	-1.261.918,00
Kecamatan Mandau	14.164.612,00	35.991.975,00	-21.827.363,00
Kecamatan Pinggir	5.911.911,00	6.316.593,00	-404.682,00
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.508.568,00	5.313.404,00	195.164,00
Dinas Pertanian	0,00	11.685.677,00	-11.685.677,00
Jumlah	2.999.270.596,00	2.904.100.321,00	95.170.275,00

5. 3. 3. Ekuitas

31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/(Penurunan)
9.199.249.753.033,92	9.215.647.863.998,17	(16.398.110.964,25)

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.199.2249.753.033,92 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.215.647.863.998,17.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4. PENJELASAN POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit-LO Kabupaten Bengkalis.

5.4.1. Pendapatan - LO

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkani/(Penurunan)
	2.948.007.230.812,48	2.450.428.050.457,24	497.579.180.355,24

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Bengkalis sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp. 2.948.007.230.812,48 dan tahun 2020 sebesar Rp2.450.428.050.457,24 telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 5.176 Realisasi Pendapatan LO

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkani/(Penurunan)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	309.000.920.742,05	251.321.533.656,18	57.679.387.085,87
Pendapatan Transfer	2.546.731.688.130,00	2.097.742.834.399,00	448.988.853.731,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	92.274.621.940,43	101.363.682.402,06	(9.089.060.461,63)
Jumlah	2.948.007.230.812,48	2.450.428.050.457,24	497.579.180.355,24

5.4.1.A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkani/(Penurunan)
	309.000.920.742,05	251.321.533.656,18	57.679.387.085,87

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember untuk periode TA. 2021. Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp.309.000.920.742,05 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.177 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkani/(Penurunan)
Pendapatan Pajak Daerah	90.021.270.953,33	72.112.407.050,33	17.908.863.903,00
Pendapatan Retribusi Daerah	10.399.361.138,00	9.147.885.825,34	1.251.475.312,66
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.292.209.969,00	20.920.504.935,00	12.371.705.034,00
Lain-lain PAD yang Sah	175.288.078.681,72	149.140.735.845,51	26.147.342.836,21
Jumlah	309.000.920.742,05	251.321.533.656,18	57.679.387.085,87



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci dan di jelaskan sebagai berikut :

1). Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaiakan/(Penurunan)
90.021.270.953,33	72.112.407.050,33	17.908.863.903,00

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2021, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2021 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (OPDKB) yang ditetapkan tahun 2021.

Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.178 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaiakan/(Penurunan)
Pajak Hotel	2.452.029.349,00	1.488.664.571,25	963.364.777,75
Pajak Restoran	11.206.353.269,00	8.794.951.522,00	2.411.401.747,00
Pajak Hiburan	488.053.480,00	671.437.300,00	(183.383.820,00)
Pajak Reklame	626.270.708,33	398.743.393,08	227.527.315,25
Pajak Penerangan Jalan PLN	21.135.785.611,00	19.340.014.933,00	1.795.770.678,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	16.219.058.821,00	13.995.255.847,00	2.223.802.974,00
Pajak Parkir	312.335.167,00	266.723.466,00	25.611.701,00
Pajak Air Tanah	700.493.288,00	531.112.588,00	169.380.700,00
Pajak Sarang Burung Walet	496.653.239,00	337.783.119,00	158.870.120,00
Pajak Bahan Galian Golongan "C" (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	4.178.288.650,00	3.936.415.145,00	241.873.505,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	27.896.861.520,00	18.043.214.206,00	9.853.647.314,00
Pajak BPHTB	4.309.087.851,00	4.288.090.960,00	20.996.891,00
Jumlah	90.021.270.953,33	72.112.407.050,33	17.908.863.903,00

Tabel 5.179 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Pajak Hotel	2.771.752.685,00	2.452.029.349,00	319.723.336,00
			Pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp. 319.723.336.000 pada Dinas bapenda
Pajak Restoran	11.219.893.499,00	11.206.353.269,00	13.540.230,00
			Pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp. 13.540.230.000 pada Dinas bapenda
Pajak Hiburan	490.353.540,00	488.053.480,00	2.300.060,00
			Pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.300.060 pada Dinas bapenda



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pajak Reklame	768.097.825,00	626.270.708,33	141.827.116,67	Pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp.169.348.350 pada dinas Bapenda
				Pendapatan diterima dimuka tahun berjalan (2021) sebesar Rp.(305.209.841,67) pada Bapenda
				pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp. (12.280.625) pada Dinas bapenda
				Piutang Tahun 2021 sebesar Rp. 6.315.000 pada Bapenda
Pajak Penerangan Jalan PLN	37.354.844.432,00	37.354.844.432,00	0,00	
Pajak Parkir	312.335.167,00	312.335.167,00	0,00	
Pajak Air Tanah	607.489.510,00	700.493.288,00	(93.003.778,00)	pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp. (86.946.851) pada Dinas bapenda
				Koreksi kurang catat tahun 2021 sebesar Rp.101.222.778 pada Badan Pendapatan Daerah
				Piutang Tahun 2021 sebesar Rp. 78.727.851 pada Bapenda
Pajak Sarang Burung Walet	497.533.239,00	496.653.239,00	880.000,00	Penerimaan Pembayaran Piutang 2020 sebesar Rp880.000,00
				Penerimaan Penurunan penyisihan tahun sebelumnya sebesar Rp(4.400,00)
Pajak Bahan Galian Golongan "C" (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	4.178.288.650,00	4.178.288.650,00	0,00	
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	19.844.933.613,00	27.896.861.520,00	(8.051.927.907,00)	Penerimaan Pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp(1.309.886.992,00)
				Penerimaan Pembayaran atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp9.361.814.899,00
Pajak BPHTB- Pemindahan Hak	4.309.087.851,00	4.309.087.851,00	0,00	
Jumlah	82.354.610.913,00	94.021.270.863,33	(7.666.660.942,33)	

2). Pendapatan Retribusi Daerah

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	kenaikan/(Penurunan)
	10.399.361.138,00	9.147.885.825,34	1.251.475.312,66

Masing – masing realisasi pendapatan retribusi pada pendapatan LO tahun 2021 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Retribusi Jasa Umum

Tabel 5.180 Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.137.056.000,00	1.161.435.000,00	(24.379.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	627.250.000,00	472.075.000,00	155.175.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	222.380.000,00	218.353.000,00	4.027.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.448.109.500,00	1.316.189.500,00	131.920.000,00
Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	38.627.500,00	41.891.000,00	(3.263.500,00)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	551.193.000,00	483.887.250,00	67.305.750,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	557.204.700,00	0,00	557.204.700,00
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	168.056.000,00	133.005.000,00	35.051.000,00
Jumlah	4.749.876.700,00	3.826.835.750,00	923.040.950,00

Retribusi Jasa Usaha

Tabel 5.181 Rincian Realisasi Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	349.035.000,00	293.260.000,00	55.775.000,00
Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	301.382.000,00	431.340.000,00	(129.958.000,00)
Retribusi Terminal	7.899.000,00	8.536.000,00	(637.000,00)
Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	148.340.000,00	121.195.000,00	27.145.000,00
Retribusi Tempat/Rumah Polong Hewan	11.915.000,00	16.895.000,00	(4.980.000,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.150.000,00	7.250.000,00	1.900.000,00
Retribusi Jasa Kepelabuhan	3.635.104.163,00	3.583.885.839,00	51.218.324,00
Jumlah	4.462.825.163,00	4.462.361.839,00	463.324,00

Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel 5.182 Rincian Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.008.819.275,00	569.518.236,34	439.301.038,66
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Trayek/Kartu Pengawasan (KP)	0,00	570.000,00	(570.000,00)
Retribusi izin Usaha Perikanan	177.840.000,00	268.600.000,00	(110.760.000,00)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jumlah	1.186.659.275,00	858.688.236,34	327.971.036,66
--------	------------------	----------------	----------------

Realisasi akun pendapatan retribusi per OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Sekretariat Daerah**Tabel 5.183 Realisasi Pendapatan Retribusi Sekretariat Daerah**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	96.715.000,00	52.120.000,00	44.595.000,00
Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	139.075.000,00	114.480.000,00	24.595.000,00
Jumlah	235.790.000,00	166.600.000,00	69.190.000,00

b) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**Tabel 5.184 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	551.193.000,00	483.887.250,00	67.305.750,00
Jumlah	551.193.000,00	483.887.250,00	67.305.750,00

c) Dinas Kelautan dan Perikanan**Tabel 5.185 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi izin Usaha Perikanan	177.840.000,00	288.600.000,00	(110.760.000,00)
Jumlah	177.840.000,00	288.600.000,00	(110.760.000,00)

d) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**Tabel 5.186 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata	0,00	16.650.000,00	(16.650.000,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.150.000,00	7.250.000,00	1.900.000,00
Jumlah	9.150.000,00	23.900.000,00	(14.750.000,00)

e) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu**Tabel 5.187 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	569.518.236,34	(569.518.236,34)
Jumlah	0,00	569.518.236,34	(569.518.236,34)

f) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**Tabel 5.188 Realisasi Pendapatan Retribusi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	3.000.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	9.265.000,00	6.715.000,00	2.550.000,00
Jumlah	12.265.000,00	8.465.000,00	3.800.000,00

g) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 5.189 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	222.380.000,00	210.853.000,00	11.527.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	168.056.000,00	133.005.000,00	35.051.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	301.382.000,00	385.040.000,00	(83.658.000,00)
Jumlah	691.818.000,00	728.898.000,00	(37.080.000,00)

h) Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 5.190 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Lingkungan Hidup

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.137.056.000,00	1.161.435.000,00	(24.379.000,00)
Jumlah	1.137.056.000,00	1.161.435.000,00	(24.379.000,00)

i) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertenakan

Tabel 5.191 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertenakan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	11.915.000,00	16.895.000,00	(4.980.000,00)
Jumlah	11.915.000,00	16.895.000,00	(4.980.000,00)

j) Dinas Perhubungan

Tabel 5.192 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	627.250.000,00	472.075.000,00	155.175.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.448.109.500,00	1.316.189.500,00	131.920.000,00
Retribusi Terminal	7.899.000,00	8.536.000,00	(637.000,00)
Retribusi Jasa Kepelabuhan	3.635.104.163,00	3.583.885.839,00	51.218.324,00
Retribusi Izin Trayek/Kartu Pengawasan (KP)	0,00	570.000,00	(570.000,00)
Jumlah	5.718.362.663,00	5.381.256.339,00	337.106.324,00

k) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.193 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	249.320.000,00	239.390.000,00	9.930.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.008.819.275,00	0,00	1.008.819.275,00
Jumlah	1.258.139.275,00	239.390.000,00	1.018.749.275,00

l) Dinas Pemadam Kebakaran

Tabel 5.194 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	38.627.500,00	41.891.000,00	(3.263.500,00)
Jumlah	38.627.500,00	41.891.000,00	(3.263.500,00)

m) Dinas Kesehatan

Tabel 5.195 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Kesehatan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	557.204.700,00	0,00	557.204.700,00
Jumlah	557.204.700,00	0,00	557.204.700,00

Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 dipungut berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi serta diatur pada peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum, Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO sampai dengan 31 Desember pada tahun 2021 sebesar Rp10.399.361.138,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.196 Realisasi Pendapatan Retribusi Per OPD

OPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	236.790.000,00	166.600.000,00	69.190.000,00
Dinas Kesehatan	557.204.700,00	0,00	557.204.700,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	177.840.000,00	288.600.000,00	(110.760.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	9.150.000,00	7.250.000,00	1.900.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	569.518.236,34	(569.518.236,34)
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	12.265.000,00	8.465.000,00	3.800.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	691.818.000,00	782.698.000,00	(90.880.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Lingkungan Hidup	1.137.056.000,00	1.161.435.000,00	(24.379.000,00)
Dinas Pertanian	11.915.000,00	16.895.000,00	(4.980.000,00)
Dinas Perhubungan	5.718.362.663,00	5.381.256.339,00	337.106.324,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.258.139.275,00	239.390.000,00	1.018.749.275,00
Dinas Pemadam Kebakaran	38.627.500,00	41.891.000,00	(3.263.500,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	551.193.000,00	483.887.250,00	67.305.750,00
Jumlah	10.399.361.138,00	9.147.885.825,34	1.251.475.312,66

Tabel 5.197 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Retribusi Pelayanan Kesehatan	557.204.700,00	557.204.700,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.137.056.000,00	1.137.056.000,00	0,00
Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	627.250.000,00	627.250.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar	222.380.000,00	222.380.000,00	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.448.109.500,00	1.448.109.500,00	0,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	38.627.500,00	38.627.500,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	168.056.000,00	168.056.000,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	551.193.000,00	551.193.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	348.035.000,00	349.035.000,00	(1.000.000,00)
			Koreksi kurang catat Belanja tak terduga tahun 2021 sebesar Rp. 1.000.000 pada Sekretaris Daerah
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	246.682.000,00	301.382.000,00	(54.700.000,00)
			Pembayaran Piutang dan Pengakuan Piutang tahun berjalan Rp. 54.700.000,00
Retribusi Terminal	7.899.000,00	7.899.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Prasangrahan/Villa	148.340.000,00	148.340.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	11.915.000,00	11.915.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	3.619.944.263,00	3.635.104.163,00	(15.159.900,00)
			Selisih antara pendapatan yang terealisasi dengan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp9.824.060 dikurangi dengan pendapatan yang belum terealisasi sebesar Rp24.983.960.
Retribusi izin Usaha Perikanan	177.840.000,00	177.840.000,00	0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.008.819.275,00	1.008.819.275,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
	10.328.561.238,00	10.389.361.138,00	(70.859.800,00)

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkani/(Penurunan)
33.292.208.969,00	20.920.504.935,00	12.371.705.034,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

4) Lain-lain PAD yang sah

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkani/(Penurunan)
175.268.078.681,72	149.140.735.845,51	26.147.342.836,21

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut jenisnya adalah :

Tabel 5.198 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkani/(Penurunan)
Hasil Penjualan Perikanan	11.660.000,00	303.269.700,00	(291.609.700,00)
Penerimaan Jasa Giro Daerah	9.534.038.489,00	3.256.110.350,00	6.277.928.139,00
Penerimaan Jasa Giro Bendahara	580.952.906,00	830.541.708,00	(249.588.802,00)
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	13.659.531.694,00	19.481.596.510,00	(5.822.064.816,00)
Pendapatan Denda Pajak	228.740.417,00	91.501.945,00	137.238.472,00
Pendapatan dari Denda Keterlambatan bidang Pekerjaan Umum	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	52.621.357,00	7.147.958.273,22	(7.095.336.916,22)
Pendapatan dari Pengembalian	9.387.430.867,72	8.192.938.857,72	1.194.492.010,00
Hasil dari Pemantauan Kekayaan daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	127.426.970.143,00	88.976.081.659,00	38.450.888.484,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan Kerja Sama BLUD	8.624.908,00	362.606.798,24	(353.981.890,24)
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	99.252.000,00	43.778.333,33	55.473.666,67
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.287.755.300,00	13.888.868.100,00	398.887.200,00
Pendapatan LO lain-lain BLUD	0,00	6.564.483.611,00	(6.564.483.611,00)
Jumlah	175.282.978.061,72	149.140.735.845,51	26.142.242.236,21

Tabel 5.199 Selisih Realisasi LRA dan LO Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Hasil Penjualan Perikanan	11.660.000,00	11.660.000,00	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	52.621.357,00	52.621.357,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro Daerah	9.534.038.489,00	9.534.038.489,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro Bendahara	580.952.906,00	580.952.906,00	0,00
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	13.659.531.694,00	13.659.531.694,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	228.740.417,00	228.740.417,00	0,00
Pendapatan dari Denda Keterlambatan Pekerjaan Umum	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	9.387.430.867,72	9.387.430.867,72	0,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	0,0	1.000.000,00	(1.000.000,00)
			Merupakan pendapatan sewa diterima dimuka tahun 2017 sebesar Rp15.000.000,00 untuk 15 tahun. Pertahun Rp1.000.000,00.
Pendapatan BLUD	110.382.472.561,00	127.534.847.051,00	(17.152.374.490,00)
			Pembayaran Piutang TA 2020 Rp 2.235.029.791,00 dan Piutang tahun 2021 sebesar Rp19.543.310.364,00 Pendapatan diterima dimuka Rp 47.000.000,- pada RSUD Bengkalis
			Pendapatan sewa diterima dimuka 2021 RSUD Mandau sebesar Rp.46.500.000,00
			Koreksi Kurang Catat Pendapatan Giro - BLUD sebesar Rp15.000.000,00 pada RSUD Mandau
			Pembayaran Piutang 2020 Rp (328.172.837,00) dan Piutang BLUD tahun 2021 Sebesar Rp134.142.754,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.287.755.300,00	14.287.755.300,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	121.529.202,00	0,00	121.529.202,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Hasil Pengelolaan dana Bergulir atau penerimaan pendapatan investasi non permanen untuk LRA dikelompokkan kedalam lain-lain PAD yang sah lainnya, dan untuk LO tidak terealisasi karena masuk ke dalam pendapatan lainnya.

Jumlah	158.251.132.793,72	175.282.978.061,72	(17.153.374.490,00)
---------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

Realisasi akun lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah per OPD dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Dinas Kesehatan

Tabel 5.200 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Dinas Kesehatan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.287.755.300,00	13.888.868.100,00	398.887.200,00
Jumlah	14.287.755.300,00	13.888.868.100,00	398.887.200,00

b) Badan Pendapatan Daerah

Tabel 5.201 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Denda Pajak	0,00	91.501.945,00	(91.501.945,00)
Jumlah	0,00	91.501.945,00	(91.501.945,00)

c) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Tabel 5.202 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Jumlah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

d) Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 5.203 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Hasil Penjualan Perikanan	11.660.000,00	303.269.700,00	(291.609.700,00)
Jumlah	11.660.000,00	303.269.700,00	(291.609.700,00)

e) RSUD Bengkalis

Tabel 5.204 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah RSUD Bengkalis

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Jasa Layanan Umum BLUD	67.369.951.330,00	41.055.629.564,00	26.314.321.766,00
Pendapatan Kerja sama BLUD	0,00	288.055.577,24	(288.055.577,24)
Pendapatan Jasa Giro BLUD	0,00	6.564.483.611,00	(6.564.483.611,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	0,00	835.000,00	(835.000,00)
Jumlah	67.369.951.330,00	47.909.003.752,24	19.460.947.577,76

f) RSUD Kec. Mandau

Tabel 5.205 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah RSUD Kec. Mandau

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Jasa Layanan Umum BLUD	60.057.018.813,00	47.920.452.095,00	12.136.566.718,00
Pendapatan Jasa Giro BLUD	8.624.908,00	74.551.221,00	(65.926.313,00)
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	99.252.000,00	42.943.333,33	56.308.666,67
Jumlah	60.164.895.721,00	48.037.946.649,33	12.126.949.071,67

g) PPKD

Tabel 5.206 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah PPKD

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Penerimaan Jasa Giro Daerah	9.534.038.489,00	3.255.110.350,00	6.277.928.139,00
Penerimaan Jasa Giro Bendahara	580.952.906,00	830.541.708,00	(249.588.802,00)
Pendapatan dari Denda Kelertambatan Pekerjaan Umum	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pegawai	336.785.799,00	0,00	336.785.799,00
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	13.659.531.694,00	19.481.596.510,00	(5.822.064.816,00)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	7.147.958.273,22	(7.147.958.273,22)
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	9.050.645.068,72	8.192.938.857,72	857.706.211,00
Jumlah	33.166.353.956,72	38.909.145.898,94	(5.742.791.942,22)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Realisasi Pendapatan tersebut untuk 31 Desember tahun anggaran 2021 sebesar Rp175.282.978.081,72 di rincikan sebagai berikut:

Tabel 5.207 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Per OPD

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	14.287.755.300,00	13.888.868.100,00	398.887.200,00
Badan Pendapatan Daerah	228.740.417,00	91.501.945,00	137.238.472,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	11.660.000,00	303.269.700,00	(291.609.700,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

RSUD Bengkalis	67.369.951.330,00	47.909.003.752,24	19.460.947.577,76
RSUD Kec. Mandau	60.169.996.321,00	48.037.946.649,33	12.132.049.671,67
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	33.218.975.313,72	38.909.145.698,94	(5.690.170.385,22)
Jumlah	175.288.078.681,72	149.140.735.845,51	26.147.342.636,21

5.4.1.B. Pendapatan Transfer

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	2.546.731.688.130,00	2.097.742.834.399,00	448.988.853.731,00

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pembagian hasil pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.546.731.688.130,00.

Pendapatan Transfer-LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya serta Transfer Pemerintah Provinsi. Rincian realisasi pendapatan transfer per 31 Desember 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.208 Realisasi Pendapatan Transfer

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.374.411.278.182,00	1.940.237.142.509,00	434.174.135.673,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	31.134.698.000,00	35.625.236.000,00	(4.490.538.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	141.185.711.948,00	121.880.455.890,00	19.305.256.058,00
Jumlah	2.546.731.688.130,00	2.097.742.834.399,00	448.988.853.731,00

Tabel 5.209 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Transfer

Uraian	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.643.215.136.775,00	2.374.411.278.182,00	1.268.803.858.593 Pembayaran Piutang Dana Perimbangan DBH Pusat sebesar Rp.1.268.803.858.593
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	165.099.615.167,00	31.134.698.000,00	133.964.917.167 Pendapatan Dana Desa yang tidak dicatat di LO sebesar Rp.133.964.917.167
Transfer Pemerintah Provinsi	146.813.777.498,00	141.185.711.948,00	5.628.065.550,00 Koreksi kurang catat pendapatan bagi hasil pajak tahun 2021 sebesar Rp. 10.485.855.343 pada BPKAD Merupakan total pembayaran piutang tahun lalu sebesar Rp.16.889.675.077,51 dan penambahan piutang sebesar Rp.775.699.744,51
Jumlah	3.955.128.529.440,00	2.546.731.688.130,00	1.408.396.841.310,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaiakan/(Penurunan)
2.374.411.278.182,00	1.940.237.142.509,00	434.174.135.673,00

Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2021:

Tabel 5.210 Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaiakan/(Penurunan)
Bagi Hasil Pajak	1.797.672.209.000,00	1.393.364.672.614,00	404.307.536.386,00
Dana Alokasi Umum	336.787.052.000,00	338.731.609.000,00	(1.944.557.000,00)
Dana Alokasi Khusus - Fisik	93.311.533.266,00	73.318.351.993,00	19.993.181.273,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	146.640.483.916,00	134.822.508.902,00	11.817.975.014,00
Jumlah	2.374.411.278.182,00	1.940.237.142.509,00	434.174.135.673,00

Tahun 2021 realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah sebesar Rp2.374.411.278.182,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaiakan/(Penurunan)
1.427.001.102.000,00	1.393.364.672.614,00	33.636.429.386,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.427.001.102.000,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Non Migas, Sektor Pertambangan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Bagi Hasil Bagian Pemerintah Pusat bagi Rata serta bagi Hasil PBB Sektor lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.211 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaiakan/(Penurunan)
Bagi Hasil PBB	1.383.717.917.000,00	820.973.572.570,00	562.744.344.430,00
Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan	0,00	3.860.526.654,00	(3.860.526.654,00)
Bagi Hasil dari PBB Sektor Perhutanan	0,00	3.399.342.940,00	(3.399.342.940,00)
Bagi Hasil PPh 21, 25 & 29	43.283.185.000,00	48.992.326.114,00	(5.709.141.114,00)
Bagi Hasil PBB Sektor lainnya	0,00	59.300.236,00	(59.300.236,00)
Jumlah	1.427.001.102.000,00	877.285.968.514,00	549.715.033.486,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember TA 2021 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Bagi Hasil PBB dan PBB Pertambangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Lampiran rincian DBH PBB, Bagi Rata sebesar Rp. 1.153.653.617,00. Bagian Daerah sebesar Rp438.871.005.574,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp6.947.080.845,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp3.758.033.671,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp428.071.080.886,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp94.810.172,00. Biaya Pemungutan sebesar Rp14.727.101.546,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp308.759.246,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp146.145.941,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp14.269.035.913,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp3.160.446,00.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021, Rincian Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun anggaran 2019, Bagian Daerah sebesar Rp461.065.752.246,00 dan Biaya Pemungutan sebesar Rp16.701.403.268,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021, Rincian Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada TA 2021 PBB Kurang Bayar Defenitif TA 2020 sebesar Rp877.413.210.338,00 dengan dengan penyaluran KB DBH sementara TA 2020 sebesar Rp76.695.965.800,00 dan KB TA 2020 yang belum diselesaikan sebesar Rp800.717.244538,00

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

Bagi Hasil PPh 21, 25 dan 29

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp18.700.475.776,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp433.239.287,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp18.267.236.489,00

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021, Rincian Lebih Bayar DBH Pajak Penghasilan sampai dengan tahun anggaran 2018 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp18.700.475.775,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp433.239.287,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp2.625.886.650,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 16 September 2021, Rincian Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada TA 2021 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 Kurang Bayar Defenitif TA 2020 sebesar Rp10.581.581.834,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp861.420.186,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp9.720.161.648,00 dengan penyaluran KB DBH sementara TA 2020 PPh Pasal 25/29 sebesar Rp221.747.800,- dan PPH Pasal 21 sebesar Rp12.400.037.100,00

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (SDA)

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
370.671.107.000,00	518.079.604.100,00	(145.408.497.100,00)

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajakper 31 Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp370.671.107.000,00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi hasil dari provinsi sumber daya hutan, bagi hasil dari dana reboisasi, bagi hasil dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti), bagi hasil dari pungutan perikanan, bagi hasil dari pertambangan minyak bumi, bagi hasil dari pertambangan gas bumi.

Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.212 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.701.039.000,00	773.227.050,00	927.811.950,00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan	1.128.319.000,00	784.599.000,00	343.720.000,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	357.136.294.000,00	508.889.468.800,00	(151.753.174.800,00)
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	124.200,00	(124.200,00)
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.401.534.000,00	0,00	1.401.534.000,00
Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasa Hutan	9.303.921.000,00	5.632.185.050,00	3.671.735.950,00
Jumlah	370.671.107.000,00	516.079.604.100,00	(145.408.497.100,00)

Realisasi Dana Bagi Hasil bukan Pajak per 31 Desember TA 2021 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2021 sebesar Rp1.701.039,00 dengan Rincian Royalti sebesar Rp1.701.039,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021, Rincian Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp69.567.475,00

Bagi Hasil SDA Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp1.128.319,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021, Rincian Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp316.881.000,-

Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2021 sebesar Rp358.537.828,00 dengan rincian Minyak Bumi sebesar Rp357.136.294,00 dan Gas Bumi sebesar Rp358.537.828,00.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021, Rincian Lebih Bayar DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sampai dengan Tahun Anggaran 2018, Minyak Bumi sebesar Rp45.384.094.632,00 dan Gas Bumi sebesar Rp.45.384.094.632

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021, Rincian Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada TA 2021 PBB Lebih Bayar sampai dengan TA 2019 sebesar Rp45.384.094.632,00, Penyelesaian lebih bayar s.d 2019 sebesar Rp13.341.809.428 dan sisa lebih bayar s.d TA. 2019 Rp32.042.285.204,00.

Bagi Hasil dari Provisi Daya Hutan dan Dana Reboisasi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp9.303.921,00 dengan Rincian IUPH sebesar Rp0,00, PSDH sebesar Rp9.303.921,00 dan DR sebesar Rp0,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021, Rincian Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam kehutanan sebesar Rp1.002.544.075,00

Bagi Hasil SDA Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021, Rincian Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada TA 2021 PBB Kurang Bayar Definitif sampai dengan TA 2020 sebesar Rp7.105,00.

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan PMK dengan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikani/(Penurunan)
336.787.052.000,00	338.731.609.000,00	(1.944.557.000,00)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2021 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10, tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sebesar Rp336.787.052.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama s/d 31 Desember TA. 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.213 Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikani/(Penurunan)
Dana Alokasi Umum (DAU)	336.787.052.000,00	338.731.609.000,00	(1.944.557.000,00)
Jumlah	336.787.052.000,00	338.731.609.000,00	(1.944.557.000,00)

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikani/(Penurunan)
239.952.017.182,00	208.140.860.895,00	31.811.156.287,00

Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

i). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pemerintah Kabupaten Bengkulu menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selama per 31 Desember 2021 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 . Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2021 sebesar Rp239.952.017.182,00

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.214 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
DAK Reguler Bidang Jalan (221)	14.535.552.962,00	0,00	14.535.552.962,00
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	397.882.000,00	19.484.492.836,00	(19.086.610.836,00)
DAK Reguler Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	0,00	5.714.326.047,00	(5.714.326.047,00)
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.082.312.360,00	1.004.638.350,00	77.674.010,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan	0,00	649.241.000,00	(649.241.000,00)
DAK Bidang Pertanian	1.972.898.568,00	0,00	1.972.898.568,00
DAK Reguler Bidang Pendidikan	32.354.346.087,00	33.188.479.029,00	(834.132.942,00)
DAK Afirmasi Bidang Kesehatan	1.078.238.626,00	2.216.867.750,00	(1.138.629.124,00)
DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	1.148.920.000,00	3.462.428.565,00	(2.313.508.565,00)
Dak Penugasan Bidang Air Minum	5.279.878.806,00	1.112.337.434,00	4.167.541.372,00
DAK Penugasan Bidang Sanitasi	2.632.852.000,00	570.501.000,00	2.062.151.000,00
DAK Penugasan Bidang Jalan	4.556.432.300,00	0,00	4.556.432.300,00
DAK Afirmasi Bidang Transportasi (224)	4.326.463.820,00	0,00	4.326.463.820,00
DAK Reguler Bid. Kesehatan dan KB (Dinas Kesehatan, KB & RSUD Mandau) (212)	3.112.910.400,00	0,00	3.112.910.400,00
DAK Penugasan Bidang Kesehatan (229)	20.833.045.337,00	0,00	20.833.045.337,00
DAK Afirmasi Bidang Kesehatan / Bidang Penguatan Puskesmas DTPK (222)	0,00	5.915.039.982,00	(5.915.039.982,00)
Jumlah	93.311.533.286,00	73.318.351.893,00	19.993.181.273,00

ii). Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.215 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------------



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tunjangan Profesi Guru PNSD	112.812.546.000,00	101.677.829.000,00	11.134.717.000,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru	993.000.000,00	894.000.000,00	99.000.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	7.089.600.000,00	7.435.800.000,00	(346.200.000,00)
Bantuan Operasional Kesehatan	18.252.050.145,00	11.659.944.275,00	6.592.105.870,00
Bantuan Operasional KB	2.769.822.625,00	2.233.525.000,00	536.297.625,00
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.126.300.000,00	1.349.200.000,00	(222.900.000,00)
Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	317.730.800,00	(317.730.800,00)
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.991.251.146,00	2.230.729.976,00	(239.478.830,00)
Pendapatan Dana BOS - Afirmasi	480.000.000,00	7.023.749.851,00	(6.543.749.851,00)
Dana Ketahanan pangan dan pertanian	222.000.000,00	0,00	222.000.000,00
Dana fasilitasi penanaman modal	326.122.000,00	0,00	326.122.000,00
Dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak	187.488.000,00	0,00	187.488.000,00
PK2UKM	390.304.000,00	0,00	390.304.000,00
Jumlah	148.840.483.916,00	134.822.508.902,00	11.817.975.014,00

2) Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya

a) Dana Penyesuaian

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkan/(Penurunan)
	31.134.698.000,00	35.625.236.000,00	(4.490.538.000,00)

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya per 31 Desember pada tahun 2021 sebesar Rp31.134.698.000,00.

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkan/(Penurunan)
	141.185.711.948,00	121.880.455.890,00	19.305.256.058,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2021 sebesar Rp141.185.711.948,00 Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Tabel 5.216 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Pajak Kendaraan Bermotor	34.062.921.318,00	27.629.136.205,00	6.433.785.113,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.248.061.215,00	12.769.773.056,00	11.478.288.159,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.388.580.007,00	33.755.933.451,00	7.632.646.556,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.085.899.877,00	825.717.359,00	260.182.518,00
Pajak Rokok	22.637.047.931,00	20.276.669.419,00	2.360.378.512,00
Jumlah	123.422.510.348,00	95.257.229.490,00	26.165.200.856,00

Realisasi dana bagi hasil dari TA 2021 dicatat berdasarkan ketetapan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 572 / V / 2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.641.355.941,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.509.965.010,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.918.306.975,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp246.125.975,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 523 / V / 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I tahun 2021 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.730.354.070,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 524 / V / 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) tahun 2020 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau sebesar Rp3.424.488.053,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 834 / VIII / 2021 tanggal 03 Agustus 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Tahun 2021 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.677.142.209,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 833 / VIII / 2021 tanggal 03 Agustus 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.533.961.046,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.012.998.044,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.610.616.634,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp235.535.523,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1141 / X / 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.686.784.617,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.660.318.667,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.461.520.491,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp316.231.988,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1167 / XI / 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III Tahun 2021 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.561.770.885,00.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 753 / VII / 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2020) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.343.490.159,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.311.986.503,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.882.466.950,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp52.941.796,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1382 / XII / 2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.820.512.767,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.397.664.651,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.050.892.449,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp196.816.296,00.

b). Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kab./ Kota Lainnya

Penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.763.147.160,00 yang berasal dari PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Bengkalis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.217 Realisasi Bantaun Keuangan Provinsi

Bantuan Keuangan Provinsi	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	17.763.201.600,00	26.623.226.400,00	(8.860.024.800,00)
Jumlah	17.763.201.600,00	26.623.226.400,00	(8.860.024.800,00)

Pengalokasian Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau No: KPTS.1201/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.488/V/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor: KPTS.74/1/2021, Berupa Gaji Guru Bantu sebesar Rp.6.936.000.000,- , Bantuan Kecamatan sebesar Rp1.100.000.000,-, Rumah Layak Huni sebesar Rp10.140.000.000,-

Dalam keputusan tersebut ditetapkan Alokasi Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 26.623.226.400,00 jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 17.763.147.160,00 mengalami penurunan Rp 8.860.079.240,00 atau 33,28% dari anggaran.

5.4.1.C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkan/(Penurunan)
	92.274.621.940,43	101.363.682.402,06	(9.089.060.461,63)

Lain-lain Pendapatan yang Sah per 31 Desember pada tahun 2021 adalah sebesar Rp92.274.621.940,43 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.218 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Pendapatan Hibah	92.028.271.351,96	99.896.028.750,00	(7.867.757.398,04)
Pendapatan Lainnya	246.350.588,47	1.467.653.652,06	(1.221.303.063,59)
Jumlah	92.274.621.940,43	101.363.682.402,06	(9.089.060.461,63)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.219 Selisih Realisasi LRA dan LO Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Pendapatan Hibah	82.544.910.000,00	92.028.271.351,96	(9.483.361.351,96)
			Hibah dari Kemendikbud Ristek berupa Barang Peralatan Pendidikan sebesar Rp.1.489.568.000
			Hibah dari Pemerintah Provinsi untuk Dinas Kesehatan berupa Alat kesehatan dan Alat Labor, dan Bangunan kesehatan sebesar Rp2.885.637.088,96
			Hibah dari BKKBN untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa Alat Obat Kontrasepsi sebesar Rp737.707.163,00
			Hibah dari Kementerian Pertanian berupa Computer Personal dan Peralatan Jaringan (Modem) senilai Rp.59.961.000,00
			Penerimaan Hibah dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.17.638.500,00
			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO (Alat Pendingin) sebesar Rp. 376.200.000,00
			Hibah dari Kementerian Kesehatan - RI, Dinkes Provinsi Riau sebesar Rp 841.296.000,00 dan Rp. 285.453.600,00
			Koreksi kurang catat pendapatan Hibah tahun 2021 sebesar Rp. 2.809.900.000 pada Dinas Pendidikan
Pendapatan Lainnya	0,00	246.350.588,47	(246.350.588,47)
			Penyisihan Piutang dana Bergilir dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah sebesar Rp28.590.906,00
			Penyisihan Piutang dana Bergilir dari Dinas Perikanan sebesar Rp1.636.362,00
			Penyisihan Piutang BLUD Rp150.540.442,07 pada RSUD mandau
			Penyisihan Piutang dana Bergilir dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan sebesar Rp300.000,00
			Penyisihan Piutang dana Bergilir dari Bapenda sebesar Rp32.419.582,40
			Koreksi lebih catat penyisihan piutang BLUD tahun 2021 sebesar Rp. 75.000,00 pada RSUD Mandau
			Penyisihan Piutang dana Bergilir pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp32.938.296,00
Jumlah	82.544.910.000,00	92.274.621.940,43	(9.729.711.940,43)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1) Pendapatan Hibah

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
92.028.271.351,96	99.896.028.750,00	(7.867.757.398,04)

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Berikut adalah OPD yang menerima Hibah dari Pemerintah Lainnya serta keterangan Aset yang diterima adalah sebagai berikut :

Tabel 5.220 Realisasi Pendapatan Hibah Per OPD

OPD	Realisasi 2021	Keterangan
Dinas kesehatan	2.885.637.088,96	Hibah dari Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk Dinas Kesehatan berupa BHP (Obat-obatan) dan Aset (peralatan, mesin, Gedung, bangunan)
Dinas Pendidikan	4.299.468.000,00	Hibah dari Kemendikbud Ristek berupa Barang Peralatan Pendidikan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	59.961.000,00	Hibah dari Kementerian Pertanian berupa Computer Personal dan Peralatan Jaringan (Modem) senilai Rp.59.961.000
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	737.707.163,00	Hibah dari BKKBN berupa Alat Obat Kontrasepsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	17.638.500,00	Penerimaan Hibah dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa Peralatan dan Mesin
RSUD Kabupaten Bengkalis	265.453.600,00	Penerimaan Pendapatan berupa aset dan BMHP (Obat-obatan) dari Dinas Kesehatan Provinsi
Kecamatan Mandau	376.200.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO (Alat Pendingin)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	82.544.910.000,00	Pendapatan Hibah BOS
RSUD Kecamatan Mandau	841.296.000,00	Hibah dari Kementerian Kesehatan - RI, Dinkes Provinsi Riau berupa Alat Kedokteran
Jumlah	92.028.271.351,96	

2) Pendapatan Lainnya

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
246.350.588,47	1.467.653.652,06	(1.221.303.063,59)

Pendapatan Lainnya merupakan pendapatan yang bukan merupakan Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Lain-lain PAD yang Sah, Pendapatan Transfer, maupun Pendapatan Hibah. Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp246.350.588,47 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.221 Realisasi Pendapatan Lainnya Per OPD

OPD	Realisasi 2020	Keterangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28.590.906,00	Penyisihan Investasi non permanen



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kelautan dan Perikanan	1.636.362,00	Penyisihan Investasi non permanen
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	32.938.296,00	Penyisihan Investasi non permanen
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	300.000,00	Penyisihan Investasi non permanen
Badan Pendapatan Daerah	32.419.582,40	Penyisihan Investasi non permanen
RSUD Kec. Mandau	150.465.442,07	Penyisihan Piutang BLUD
Jumlah	248.350.588,47	

5.4.2. Beban - LO

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
3.382.581.432.681,23	3.309.350.282.481,56	73.249.061.934,67

Beban LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berjalan, dengan realisasi Beban Kabupaten Bengkulu Tengah 31 Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp3.382.581.432.681,23. Beban LO dibagi menjadi Beban Operasi dan Beban Transfer dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.A. Beban Operasi

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
3.102.608.854.354,23	3.086.472.427.856,56	16.336.426.497,67

Beban Operasi merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berjalan, dengan realisasi Beban Operasi Kabupaten Bengkulu Tengah 31 Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp3.102.608.854.354,23. Rincian dan realisasi Beban Operasi dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.222 Rincian Realisasi Beban Operasi

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Pegawai	1.017.081.423.128,20	967.266.480.083,00	49.814.943.045,20
Beban Persediaan	208.811.591.511,32	146.227.778.397,64	62.583.813.113,68
Beban Jasa	631.426.922.790,00	621.807.784.795,33	9.619.137.994,67
Beban Pemeliharaan	100.416.766.337,90	47.889.394.732,47	52.527.371.605,43
Beban Perjalanan Dinas	153.646.382.311,50	129.718.994.022,00	23.927.388.289,50
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	10.642.584.920,00	9.618.696.893,00	1.023.888.027,00
Beban Hibah	65.868.005.997,87	174.181.813.556,46	(108.313.807.558,59)
Beban Bantuan Sosial	37.194.371.163,00	0,00	37.194.371.163,00
Beban Penyusutan	838.152.774.546,60	842.136.619.622,64	(3.983.845.076,04)
Beban Amortisasi	1.924.210.417,75	3.817.484.659,92	(1.893.274.242,17)
Beban Penyisihan Piutang	9.204.270.253,09	6.328.008.927,10	2.876.261.325,99
Beban Hibah Aset	0,00	0,00	-
Beban Lain-lain	28.439.650.977,00	137.479.372.167,00	(109.039.821.190,00)
Beban Dana BOS	0,00	0,00	0,00
Beban Tak terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.102.608.854.354,23	3.086.472.427.856,56	16.336.426.497,67

a). Beban Pegawai

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
1.017.081.423.128,20	967.266.480.083,00	49.814.943.045,20

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Pegawai menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.223 Rincian dan Realisasi Beban Pegawai

Beban Pegawai	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Gaji dan Tunjangan	461.517.364.190,00	479.340.687.981,00
Tambahan Penghasilan PNS	375.342.947.234,20	356.088.408.060,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	143.146.541.209,00	123.501.324.042,00
Belanja Pegawai BLUD	4.013.845.000,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.069.975.175,00	7.805.700.000,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.758.620.000,00	530.460.000,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	18.232.130.320,00	0,00
Jumlah	1.017.081.423.128,20	967.266.480.083,00

Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah diterbitkan dan diterima PPK. Realisasi Beban Pegawai 31 Desember 2021 sebesar Rp1.017.081.423.128,20 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.224 Rincian Realisasi Beban Pegawai Per OPD

OPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kanalkan(Penurunan)
Dinas Pendidikan	513.254.481.724,00	484.881.740.478,00	28.372.741.246,00
Dinas Kesehatan	83.614.083.970,00	72.535.067.441,00	11.079.016.529,00
RSUD Bengkalis	34.074.917.106,00	30.538.944.084,00	3.535.973.022,00
RSUD Kecamatan Mandau	34.572.257.435,00	27.862.717.740,00	6.709.539.695,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.164.369.628,00	10.767.147.961,00	397.221.667,00
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	7.416.516.828,00	7.564.610.751,00	(148.093.923,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.422.141.242,00	4.494.980.572,00	(72.839.330,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	5.358.088.662,00	5.347.698.565,00	10.370.097,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	9.760.492.931,00	9.571.201.173,00	189.291.758,00
Dinas Sosial	7.391.377.490,00	7.184.657.577,00	206.719.913,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.036.820.784,00	5.610.080.366,00	426.740.418,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.903.657.997,00	5.679.625.572,00	224.032.425,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.563.650.974,00	4.324.014.612,00	239.636.362,00
Dinas Lingkungan Hidup	8.246.245.854,20	8.443.224.481,00	(196.978.626,80)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9.230.026.426,00	7.453.678.733,00	1.776.347.693,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.076.868.764,00	5.408.837.079,00	1.668.031.685,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.391.187.339,00	5.151.008.087,00	240.179.252,00
Dinas Perhubungan	12.040.903.780,00	12.129.541.817,00	(88.638.037,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.150.670.236,00	4.909.599.532,00	241.070.704,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	6.264.081.792,00	6.081.032.532,00	183.049.260,00
Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	8.775.865.408,00	8.249.241.147,00	526.624.261,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	8.009.006.507,00	7.848.765.964,00	160.240.543,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.032.020.046,00	7.600.629.208,00	431.390.838,00
Dinas Perikanan	7.124.915.824,00	6.772.828.420,00	352.087.404,00
Dinas Perkebunan	5.333.002.934,00	0,00	5.333.002.934,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	14.108.175.606,00	0,00	14.108.175.606,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.978.995.305,00	8.006.488.599,00	(27.493.294,00)
Sekretariat Daerah	30.066.086.052,00	26.308.751.320,00	3.757.334.732,00
Sekretariat DPRD	39.096.272.018,00	37.646.874.158,00	1.449.397.860,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.860.454.460,00	8.000.405.955,00	860.048.505,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.999.602.298,00	34.797.264.697,00	(21.797.662.399,00)
Badan Pendapatan Daerah	17.032.167.623,00	12.736.554.045,00	4.295.613.578,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.004.695.458,00	6.243.964.556,00	760.730.902,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	3.917.537.469,00	3.965.168.424,00	(47.630.955,00)
Inspektorat	6.929.416.088,00	6.535.536.211,00	393.879.877,00
Kantor Camat Bengkulu	6.725.346.907,00	6.705.714.407,00	19.632.500,00
Kantor Camat Bantan	3.046.174.756,00	2.857.201.611,00	188.973.145,00
Kantor Camat Bukit Batu	3.494.623.642,00	3.707.939.602,00	(213.315.960,00)
Kantor Camat Siak Kecil	3.163.096.911,00	3.122.008.010,00	41.088.901,00
Kantor Camat Bandar Laksmana	2.192.626.192,00	1.989.546.269,00	203.079.923,00
Kantor Camat Rupat	4.802.399.200,00	5.054.840.455,00	(252.441.255,00)
Kantor Camat Rupat Utara	3.530.250.668,00	3.375.624.373,00	154.626.295,00
Kantor Camat Mandau	11.277.285.874,00	11.377.282.946,00	(99.997.072,00)
Kantor Camat Pinggir	4.021.637.330,00	4.016.946.499,00	4.690.831,00
Kantor Camat Balhin Solapan	2.378.105.492,00	2.314.260.227,00	63.845.265,00
Kantor Camat Talang Muandau	1.672.285.852,00	1.476.671.668,00	195.614.184,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.576.556.246,00	4.678.210.015,00	(101.653.769,00)
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	0,00	232.288.844,00	(232.288.844,00)
PPKD	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pertanian	0,00	15.705.863.300,00	(15.705.863.300,00)
Jumlah	1.017.081.423.128,20	967.266.480.093,00	49.814.943.045,20

b). Beban Persediaan

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	208.811.591.511,32	146.227.778.397,64	62.583.813.113,68

Beban Persediaan menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.225 Rincian Realisasi Beban Persediaan

Beban Persediaan	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Beban Bahan Pakai Habis	81.975.326.473,86	52.632.246.234,64
Beban Persediaan Bahan/Material	76.698.569.727,81	36.383.391.311,33
Beban Cetak dan Penggandaan	768.696.300,00	12.089.658.488,03
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	890.445.000,00
Beban Pakaian Kerja	447.171.500,00	1.080.417.500,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	1.367.431.000,00
Beban Persediaan BOS	48.921.827.509,65	387.315.892.70,64
Beban Persediaan BLUD	0,00	3.052.600.593,00
Jumlah	208.811.591.511,32	146.227.778.397,64

Pencatatan persediaan Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian bahan pakai habis akan dicatat sebagai beban persediaan, hingga pada akhir periode, beban persediaan yang masih menjadi persediaan akan disesuaikan dan dikeluarkan dari beban operasional. Realisasi beban persediaan periode 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp208.811.591.511,32 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.226 Rincian Realisasi Beban Persediaan Per OPD

OPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	4.485.215.100,00	6.174.967.957,00	(1.689.752.857,00)
Dinas Kesehatan	19.889.003.236,25	17.780.863.864,82	2.108.139.371,43
RSUD Bengkulu	34.741.117.647,92	30.047.940.991,56	4.693.176.656,36
RSUD Kecamatan Mandau	33.207.738.177,90	26.422.669.650,83	6.785.068.527,07
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.521.046.671,00	694.803.900,00	826.242.771,00
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	2.855.268.593,00	416.849.494,00	2.438.419.099,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.293.626.600,00	583.140.318,00	710.486.282,00
Dinas Pemadam Kebakaran	1.019.906.820,00	611.483.700,00	408.423.120,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	758.617.000,00	226.232.079,00	532.384.921,00
Dinas Sosial	1.422.388.500,00	14.818.840.919,57	(13.396.452.419,57)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.167.138.215,00	364.687.390,00	802.450.825,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.126.977.949,00	325.958.710,00	801.019.239,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Ketahanan Pangan	1.025.428.742,00	635.820.200,00	389.608.542,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.213.739.296,00	841.465.949,00	4.372.273.347,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.167.456.177,00	2.291.053.605,00	876.402.572,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.308.015.500,00	1.558.111.478,00	749.904.022,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.824.113.738,25	954.559.922,00	869.553.816,25
Dinas Perhubungan	2.361.159.134,00	869.447.575,00	1.491.711.559,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	716.479.300,00	646.611.500,00	69.867.800,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.006.817.100,00	551.863.860,00	454.953.240,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	623.163.600,00	641.228.600,00	(18.065.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.665.624.700,00	1.069.505.550,00	1.596.119.150,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	620.079.759,00	207.855.100,00	412.224.659,00
Dinas Perikanan	1.154.859.787,00	1.182.017.899,00	(27.158.112,00)
Dinas Perkebunan	590.952.840,00	0,00	590.952.840,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	2.000.321.380,00	0,00	2.000.321.380,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.350.296.933,00	2.258.148.023,00	92.148.910,00
Sekretariat Daerah	24.077.997.567,00	10.801.296.702,43	13.276.700.864,57
Sekretariat DPRD	18.815.727.600,00	4.870.612.478,43	13.945.115.121,57
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.664.947.812,00	1.113.443.758,00	1.551.504.054,00
Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.547.376.070,00	5.839.899.090,00	4.707.476.980,00
Badan Pendapatan Daerah	2.423.323.868,00	1.819.835.010,00	603.488.858,00
Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	840.569.600,00	380.940.785,00	459.628.815,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	732.865.300,00	390.210.800,00	342.654.500,00
Inspektorat	926.424.153,00	309.891.330,00	616.532.823,00
Kantor Camat Bengkalis	1.323.285.100,00	850.563.090,00	472.732.010,00
Kantor Camat Bantan	1.265.595.035,00	350.355.513,00	915.239.522,00
Kantor Camat Bukit Batu	922.362.000,00	376.868.400,00	545.493.600,00
Kantor Camat Siak Kecil	629.111.770,00	239.185.650,00	389.926.120,00
Kantor Camat Bandar Laksmana	950.479.500,00	345.948.470,00	604.531.030,00
Kantor Camat Rupal	1.729.996.100,00	730.781.551,00	999.214.549,00
Kantor Camat Rupal Utara	979.107.400,00	770.684.850,00	208.422.550,00
Kantor Camat Mandau	5.315.479.500,00	2.194.826.531,00	3.120.652.969,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Pinggir	815.812.300,00	668.167.900,00	247.644.400,00
Kantor Camat Batin Solapan	1.226.576.100,00	482.860.400,00	743.715.700,00
Kantor Camat Talang Muandau	582.280.300,00	232.324.700,00	349.955.600,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	360.584.421,00	219.172.107,00	141.412.314,00
PPKD	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	1.163.791.046,00	(1.163.791.046,00)
Jumlah	208.246.453.932,32	146.227.779.397,64	62.018.675.594,68

c). Beban Jasa

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaiikan/(Penurunan)
631.426.322.790,00	621.807.784.795,33	9.618.537.994,67

Beban Jasa menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.227 Rincian Realisasi Beban Jasa

Beban Jasa	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaiikan/(Penurunan)
Jasa Kantor	460.741.902.778,00	377.954.376.165,00	82.787.526.613,00
Premi Asuransi	270.891.611.005,00	1.138.834.703,00	25.950.326.402,00
Perawatan Kendaraan Bermotor	3.929.557.910,00	21.360.490.015,00	(17.430.932.105,00)
Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.234.971.694,00	2.727.417.747,33	2.507.553.946,67
Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.121.770.000,00	(1.121.770.000,00)
Sewa Alat Berat	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.941.411.181,00	(1.941.411.181,00)
Makanan dan Minuman	0,00	32.763.831.786,00	(32.763.831.786,00)
Perjalanan Pindah Tugas	0,00	25.460.000,00	(25.460.000,00)
Jasa Konsultasi	5.998.909.002,00	13.559.715.515,00	(7.560.806.513,00)
Beasiswa Pendidikan PNS	255.000.000,00	4.751.211.000,00	(4.496.211.000,00)
Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	11.584.481.400,00	5.916.992.910,00	5.667.488.490,00
Beban Diklat Kepemimpinan	899.818.600,00	0,00	899.818.600,00
Belanja Jasa Keahlian / Profesional	0,00	3.658.552.000,00	(3.658.552.000,00)
Beban Pegawai BLUD	0,00	3.277.100.000,00	(3.277.100.000,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	51.229.955.117,00	53.055.788.808,00	(1.825.833.691,00)
Honorarium PNS	0,00	17.732.613.375,00	(17.732.613.375,00)
Honorarium Non PNS	0,00	18.024.272.033,00	(18.024.272.033,00)
Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0,00	0,00	0,00
Beban Pegawai Dana BOS-LO	0,00	21.860.083.620,00	(21.860.083.620,00)
Belanja Jasa Dana BOS	64.463.165.184,00	39.965.187.757,00	24.497.977.427,00
Jasa Petugas Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Jasa kesehatan	0,00	971.176.180,00	(971.176.180,00)
Jumlah	631.426.922.790,00	621.807.784.795,33	9.619.137.994,67

Beban Jasa merupakan Beban Jasa periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp631.426.922.790,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.228 Rincian Realisasi Beban Jasa Per OPD

OPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	169.604.731.690,00	160.835.036.831,00	8.769.694.859,00
Dinas Kesehatan	85.903.411.920,00	62.475.482.774,00	23.427.929.146,00
RSUD Bengkalis	60.623.189.456,00	46.036.526.599,00	14.586.662.857,00
RSUD Kecamatan Mandau	53.325.123.024,00	50.353.051.627,00	2.972.071.397,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.512.340.478,00	8.094.350.448,00	1.417.990.030,00
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	25.576.435.953,00	27.339.652.304,00	(1.763.216.351,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.739.952.262,00	5.172.534.136,00	(432.581.874,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	8.098.539.784,00	8.317.020.461,33	(218.480.677,33)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	11.302.953.077,00	9.571.204.073,00	1.731.749.004,00
Dinas Sosial	6.054.990.518,00	5.943.282.494,00	111.708.024,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.456.212.809,00	2.366.051.086,00	90.161.723,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.731.955.070,00	1.915.778.472,00	816.176.598,00
Dinas Kelangkaan Pangan	1.094.567.250,00	1.534.807.543,00	(440.240.293,00)
Dinas Lingkungan Hidup	21.019.037.297,00	25.876.423.862,00	(4.857.386.565,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.028.437.577,00	5.106.407.247,00	922.030.330,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	16.251.916.968,00	16.140.998.447,00	110.918.521,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.541.147.448,00	2.220.106.119,00	321.041.329,00
Dinas Perhubungan	10.534.330.177,00	10.776.946.780,00	(242.616.603,00)
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	3.045.081.284,00	4.250.953.042,00	(1.205.871.758,00)
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.058.162.204,00	1.986.760.860,00	71.401.344,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1.742.589.386,00	1.941.193.640,00	(198.604.254,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8.160.688.718,00	6.828.876.740,00	1.331.811.978,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.786.756.024,00	2.821.418.417,00	(34.662.393,00)
Dinas Perikanan	3.143.680.581,00	3.151.666.729,00	(7.986.148,00)
Dinas Perkebunan	1.050.452.705,00	0,00	1.050.452.705,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	5.191.601.531,00	0,00	5.191.601.531,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.305.280.879,00	8.056.895.989,00	(751.615.110,00)
Sekretariat Daerah	25.186.761.078,00	42.123.363.460,00	(16.936.602.382,00)
Sekretariat DPRD	11.808.997.425,00	21.806.144.649,00	(9.997.147.224,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.635.243.547,00	4.070.809.017,00	(435.565.470,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.867.875.253,00	22.366.021.148,00	(6.498.145.895,00)
Badan Pendapatan Daerah	4.478.432.186,00	4.239.152.332,00	239.279.854,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.903.503.035,00	2.285.020.833,00	1.618.482.202,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	1.710.902.965,00	1.574.199.007,00	136.703.958,00
Inspektorat	1.146.491.494,00	1.840.944.077,00	(694.452.583,00)
Kantor Camat Bengkulu	2.994.265.973,00	3.088.396.999,00	(94.121.026,00)
Kantor Camat Bantan	1.165.755.000,00	1.718.474.359,00	(552.719.359,00)
Kantor Camat Bukit Batu	1.985.625.508,00	2.156.073.929,00	(170.448.421,00)
Kantor Camat Siak Kecil	1.021.222.562,00	1.694.338.414,00	(673.115.852,00)
Kantor Camat Bandar Laksmana	1.401.052.767,00	1.535.206.000,00	(134.153.233,00)
Kantor Camat Rupal	3.676.748.537,00	4.561.636.665,00	(884.888.128,00)
Kantor Camat Rupal Utara	1.277.279.982,00	1.733.136.797,00	(455.856.815,00)
Kantor Camat Mandau	11.634.910.608,00	14.012.775.753,00	(2.377.865.145,00)
Kantor Camat Pinggir	2.781.886.076,00	3.565.433.155,00	(783.547.079,00)
Kantor Camat Batin Solapan	1.486.792.805,00	1.568.692.240,00	(81.899.435,00)
Kantor Camat Talang Muandau	1.436.616.670,00	1.617.174.797,00	(180.558.127,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	942.993.249,00	854.253.963,00	88.739.286,00
PPKD	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	4.283.120.481,00	(4.283.120.481,00)
Jumlah	631.426.922.790,00	621.807.784.795,33	9.619.137.994,67

d). Beban Pemeliharaan

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
	100.416.766.337,90	47.889.394.732,47	52.527.371.605,43

Beban Pemeliharaan menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.229 Rincian Realisasi Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.785.810.813,00	6.043.686.225,00	24.742.124.588,00
Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	8.535.160.718,97	5.409.500.008,47	3.125.660.710,50



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.489.005.544,93	1.513.968.400,00	57.975.037.144,93
Beban Pemeliharaan Jalan	0,00	21.574.098.492,00	(21.574.098.492,00)
Beban Pemeliharaan Jembatan	0,00	2.276.698.592,00	(2.276.698.592,00)
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	1.193.426.920,00	(1.193.426.920,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan	0,00	6.315.052.946,00	(6.315.052.946,00)
Beban Pemeliharaan Gedung	0,00	1.118.140.000,00	(1.118.140.000,00)
Beban Pemeliharaan Tanah	78.485.000,00	0,00	78.485.000,00
Beban pemeliharaan peralatan/perengkapan gedung kantor-LO	0,00	119.420.363,00	(119.420.363,00)
Beban service peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	9.366.900,00	(9.366.900,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan keamanan-LO	0,00	32.960.000,00	(32.960.000,00)
Beban Pemeliharaan BLUD	1.499.524.261,00	1.902.636.772,00	(403.112.511,00)
Beban Pemeliharaan Aset lainnya	28.780.000,00	380.439.114,00	(351.659.114,00)
Jumlah	100.416.766.337,93	47.889.394.732,47	52.527.371.605,43

Tabel 5.230 Rincian Realisasi Beban Pemeliharaan Per OPD

OPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	2.572.261.172,00	859.671.773,00	1.712.609.399,00
Dinas Kesehatan	1.946.206.350,00	261.136.800,00	1.685.069.550,00
RSUD Bengkalis	1.355.931.438,00	1.408.891.612,00	(52.960.174,00)
RSUD Kecamatan Mandau	1.034.931.890,00	830.095.050,00	204.836.840,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58.728.477.997,93	28.651.588.098,00	30.076.889.899,93
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	2.374.264.900,00	2.007.970.500,00	366.294.400,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	450.732.300,00	0,00	450.732.300,00
Dinas Pemadam Kebakaran	817.927.826,00	0,00	817.927.826,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	124.980.000,00	31.500.000,00	93.480.000,00
Dinas Sosial	359.924.623,00	0,00	359.924.623,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	219.641.100,00	24.000.000,00	195.641.100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	132.975.200,00	58.260.000,00	74.715.200,00
Dinas Ketahanan Pangan	346.510.070,00	93.730.000,00	252.780.070,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.989.606.358,00	672.504.548,00	1.317.101.810,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	405.220.950,00	222.162.947,00	183.058.003,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	586429955,00	199.154.200,00	367.275.755,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	343.912.730,00	238.340.500,00	105.572.230,00
Dinas Perhubungan	4.221.898.050,00	2.017.108.596,57	2.204.789.453,43
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	914.840.299,50	259.725.500,00	655.114.799,50
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	451.034.836,00	200.000.000,00	251.034.836,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	503.540.865,00	136.226.000,00	367.314.865,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	732.013.260,00	1.531.897.850,00	(799.884.590,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	333.678.141,00	16.400.000,00	317.278.141,00
Dinas Perikanan	507.663.701,00	124.590.000,00	383.073.701,00
Dinas Perkebunan	239.671.028,00	0,00	239.671.028,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.320.371.755,00	0,00	1.320.371.755,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	218.795.050,00	176.820.000,00	41.975.050,00
Sekretariat Daerah	7.939.396.495,00	4.559.323.760,00	3.380.072.735,00
Sekretariat DPRD	1.887.569.748,32	536.790.700,00	1.350.779.048,32
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	550.786.081,00	249.730.000,00	301.056.081,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.237.418.862,00	805.458.000,00	1.431.960.862,00
Badan Pendapatan Daerah	1.109.564.760,15	523.928.000,00	585.636.760,15
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	391.402.300,00	79.390.400,00	312.011.900,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	432.001.100,00	85.000.000,00	347.001.100,00
Inspektorat	363.387.906,00	150.465.363,00	212.922.543,00
Kantor Camat Bengkalis	133.325.600,00	79.000.000,00	54.325.600,00
Kantor Camat Bantan	11.250.000,00	61.500.000,00	(50.250.000,00)
Kantor Camat Bukit Batu	210.426.113,00	20.000.000,00	190.426.113,00
Kantor Camat Siak Kecil	83.971.750,00	47.800.000,00	36.171.750,00
Kantor Camat Bandar Laksmana	225.402.185,00	11.650.000,00	213.752.185,00
Kantor Camat Rupa	345.599.650,00	66.336.600,00	279.263.050,00
Kantor Camat Rupa Utara	202.482.850,00	51.400.000,00	151.082.850,00
Kantor Camat Mandau	652.650.000,00	297.552.734,90	355.097.265,10
Kantor Camat Pinggir	69.740.000,00	12.550.000,00	57.190.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Batın Solapan	81.599.201,00	54.465.200,00	27.134.001,00
Kantor Camat Talang Muandau	74.257.848,00	29.640.000,00	44.617.848,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	181.062.043,00	43.500.000,00	137.562.043,00
PPKD	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	102.140.000,00	(102.140.000,00)
Jumlah	100.416.766.337,90	47.889.394.732,47	52.527.371.605,43

e). Beban Perjalanan Dinas

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaiikan/(Penurunan)
	153.646.382.311,50	129.716.994.022,00	23.927.388.289,50

Rincian Beban Perjalanan Dinas tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.231 Rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	83.262.777.078,00	51.777.579.444,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.634.848.662,50	77.941.414.578,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.748.756.571,00	0,00
Jumlah	153.646.382.311,50	129.716.994.022,00

Beban Pejalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp153.646.382.311,50 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.232 Rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas Per OPD

OPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaiikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	6.914.615.585,00	2.956.346.239,00	3.958.269.346,00
Dinas Kesehatan	13.850.861.404,00	9.192.406.114,00	4.658.455.290,00
RSUD Bengkalis	544.897.194,00	706.309.394,00	(161.412.200,00)
RSUD Kecamatan Mandau	613.398.980,00	708.628.191,00	(95.229.211,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.467.196.026,00	3.216.905.139,00	250.290.887,00
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	1.431.524.305,00	1.466.393.313,00	(34.869.008,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.139.013.660,00	1.768.321.226,00	370.692.434,00
Dinas Pemadam kebakaran	977.012.103,00	772.708.911,00	204.303.192,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.735.016.913,00	1.355.649.444,00	1.379.367.469,00
Dinas Sosial	2.290.577.015,00	1.106.816.589,00	1.183.760.426,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.118.067.319,00	1.093.176.798,00	24.890.521,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.733.910.285,00	1.020.985.916,00	712.924.369,00
Dinas Kelahanan Pangan	1.712.559.585,00	1.439.279.178,00	273.280.407,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Lingkungan Hidup	3.025.875.045,00	1.846.554.230,00	1.179.320.815,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.048.437.962,00	1.220.492.483,00	827.945.479,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	4.592.789.690,00	2.765.395.735,00	1.827.393.955,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.482.225.548,00	444.430.950,00	1.037.794.598,00
Dinas Perhubungan	1.953.265.198,00	1.473.101.400,00	480.163.798,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	1.477.017.844,50	1.207.521.018,00	269.496.826,50
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3.691.088.483,00	1.937.761.197,00	1.753.327.286,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1.019.609.808,00	1.243.769.491,00	(224.159.683,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.498.915.791,00	1.293.277.765,00	1.205.638.026,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	895.864.857,00	449.974.743,00	445.890.114,00
Dinas Perikanan	2.237.017.521,00	1.149.250.628,00	1.087.766.893,00
Dinas Perkebunan	2.051.732.195,00	0,00	2.051.732.195,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	2.846.796.623,00	0,00	2.846.796.623,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.781.020.639,00	1.891.860.320,00	1.889.160.319,00
Sekretariat Daerah	18.390.775.603,00	16.255.770.922,00	2.135.004.681,00
Sekretariat DPRD	24.842.914.353,00	40.090.393.902,00	(15.247.479.549,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.346.981.503,00	4.694.482.432,00	652.499.071,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Ases Daerah	9.449.234.188,00	8.427.363.932,00	1.021.870.256,00
Badan Pendapatan Daerah	7.431.895.260,00	3.837.395.151,00	3.594.500.109,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.000.710.135,00	1.450.687.613,00	550.022.522,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	1.607.532.365,00	626.950.857,00	980.581.508,00
Inspektorat	2.676.487.594,00	1.922.179.500,00	754.308.094,00
Kantor Camat Bengkulu	499.350.041,00	314.183.600,00	185.166.441,00
Kantor Camat Bantan	394.996.000,00	262.696.000,00	132.300.000,00
Kantor Camat Bukit Batu	417.939.695,00	424.755.919,00	(6.816.224,00)
Kantor Camat Siak Kecil	458.620.244,00	501.139.000,00	(42.518.756,00)
Kantor Camat Bandar Laksmana	632.936.800,00	500.364.560,00	132.572.240,00
Kantor Camat Rupat	1.132.173.461,00	672.677.311,00	459.496.150,00
Kantor Camat Rupat Utara	673.358.000,00	557.196.000,00	116.162.000,00
Kantor Camat Mandau	1.577.343.280,00	953.691.712,00	623.651.568,00
Kantor Camat Pinggir	587.096.000,00	519.977.600,00	67.118.400,00
Kantor Camat Batin Solapan	760.249.800,00	610.823.272,00	149.426.528,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Talang Muandau	896.825.207,00	598.807.513,00	298.017.694,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	738.655.204,00	558.178.973,00	180.476.231,00
PPKD	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	2.211.961.841,00	(2.211.961.841,00)
Jumlah	153.646.382.311,50	129.718.994.022,00	23.927.388.289,50

f). Beban Subsidi

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	10.642.584.920,00	9.618.696.893,00	1.023.888.027,00

Beban Subsidi merupakan Beban yang dikeluarkan dan dikelola melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Bengkalis dengan realisasi periode 31 Desember Tahun anggaran 2021 sebesar Rp10.642.584.920,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.233 Rincian Realisasi Beban Subsidi

Beban Subsidi	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Subsidi kepada Perusahaan/ Lembaga (PDAM)	10.642.584.920,00	9.618.696.893,00	1.023.888.027,00
Jumlah	10.642.584.920,00	9.618.696.893,00	1.023.888.027,00

g) Beban Hibah

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	65.868.005.997,87	174.181.813.558,46	(108.313.807.558,59)

Rincian Beban Hibah per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Tabel 5.234 Rincian Realisasi Beban Hibah

Beban Hibah	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Beban Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada OPD	64.281.024.966,87	102.988.053.796,46
Beban Hibah dana BOS	0,00	0,00
Beban Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	0,00	7.148.800.000,00
Beban Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	1.103.500.000,00
Beban Hibah kepada kelompok/anggota Masyarakat	0,00	4.636.221.378,00
Beban Hibah kepada Pemerintah	0,00	43.016.390.862,00
Partai Politik	1.586.981.031,00	1.586.980.969,00
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	0,00	13.701.866.551,00
Jumlah	65.868.005.997,87	174.181.813.558,46

Realisasi Beban hibah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp65.868.005.997,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.235 Rincian Realisasi Beban Hibah Per OPD

OPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	9.425.194.951,87	1.113.804.738,84	8.311.390.213,03
Dinas Kesehatan	428.873.196,00	2.046.357.901,00	-1.617.484.705,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.256.027.352,00	25.089.376.236,50	14.166.651.115,50
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	0,00	31.354.000.000,00	(31.354.000.000,00)
Dinas Sosial	598.238.272,00	4.910.138.842,00	-4.311.900.570,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	6.647.749.777,00	0,00	6.647.749.777,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	1.300.835.260,00	-1.300.835.260,00
Dinas Perikanan	1.099.164.360,00	821.040.350,00	278.124.010,00
Sekretariat Daerah	6.549.664.850,00	7.109.585.361,17	-559.920.511,17
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	276.112.208,00	0,00	276.112.208,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	29.342.915.106,95	(29.342.915.106,95)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.586.981.031,00	0,00	1.586.981.031,00
PPKD	0,00	71.093.759.760,00	-71.093.759.760,00
Jumlah	65.866.005.997,87	174.181.843.556,46	(108.313.807.558,59)

h). Beban Bantuan Sosial

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	kenaikan/(Penurunan)
	37.194.371.163,00	0,00	37.194.371.163,00

Rincian Beban Bantuan Sosial menurut jenisnya sebagai berikut:

Tabel 5.236 Realisasi Beban bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Beban Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat pada OPD	37.194.371.163,00	0,00
Jumlah	37.194.371.163,00	0,00

Realisasi Beban bantuan sosial per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.194.371.163,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.237 Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial Per OPD

OPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	640.000,00	0,00	640.000,00
Kecamatan Mandau	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Dinas Sosial	37.189.231.163,00	0,00	37.189.231.163,00
PPKD	0,00	0,00	0,00
Jumlah	37.194.371.163,00	0,00	37.194.371.163,00

i). Beban Penyusutan

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	kenaikan/(Penurunan)
--	----------------	----------------	----------------------

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

838.152.774.546,60

842.136.619.622,64

(3.983.845.076,04)

Beban Penyusutan menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.238 Rincian Realisasi Beban Penyusutan

Beban Penyusutan	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	120.043.650.638,20	139.253.464.949,80
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	94.245.796.640,00	90.575.944.090,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	623.584.472.076,73	612.111.327.109,51
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	278.855.191,67	195.883.473,33
Jumlah	838.152.774.546,60	842.136.619.622,64

Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum Tahun Anggaran 2021 dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp838.152.774.546,60 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.239 Rincian Realisasi Beban Penyusutan Per OPD

OPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	52.455.418.238,11	54.014.539.959,78	(1.559.121.721,67)
Dinas Kesehatan	15.541.041.576,00	12.513.475.723,00	3.027.565.853,00
RSUD Bengkalis	26.632.187.525,95	23.480.827.924,00	3.151.359.601,95
RSUD Kecamatan Mandau	19.270.728.008,00	22.551.372.391,00	(3.280.644.383,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	445.885.308.308,44	441.286.812.004,00	4.598.496.304,44
Dinas Pemukiman, Perumahan dan pertanahan	136.750.007.498,96	133.306.175.180,52	3.443.832.318,44
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	953.422.524,00	1.189.500.339,00	(236.077.815,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	989.173.224,00	1.131.520.560,00	(142.347.336,00)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	575.734.489,00	827.789.547,00	(252.055.058,00)
Dinas Sosial	2.911.056.693,00	1.524.308.037,00	1.386.748.656,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.300.884.037,00	1.531.611.940,00	(230.727.903,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	400.247.775,00	412.962.025,00	(12.714.250,00)
Dinas Ketahanan Pangan	286.275.891,00	470.588.583,00	(184.312.692,00)
Dinas Lingkungan Hidup	4.895.173.961,15	5.459.640.519,00	(564.466.557,85)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.543.660.064,00	1.895.906.973,00	647.753.091,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1.753.846.881,00	1.750.502.453,00	3.344.428,00
Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	706.294.074,00	652.863.433,00	53.430.641,00
Dinas Perhubungan	28.934.353.306,00	40.008.998.180,77	(11.074.644.874,77)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	1.817.071.598,00	1.736.819.794,00	80.251.804,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	636.426.764,00	669.353.047,00	(32.926.283,00)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu	533.032.264,00	588.676.321,00	(55.644.057,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.353.985.711,00	7.176.033.640,00	177.952.071,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.017.575.692,49	1.356.494.092,00	(338.918.399,51)
Dinas Perikanan	1.209.056.287,14	1.809.212.911,00	(600.156.623,86)
Dinas Perkebunan	118.907.523,00	0,00	118.907.523,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	5.641.375.835,00	0,00	5.641.375.835,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.485.686.441,00	5.067.562.989,00	418.123.452,00
Sekretariat Daerah	14.565.416.836,19	13.930.325.394,00	635.091.442,19
Sekretariat DPRD	5.477.986.988,74	6.164.103.695,24	(686.116.706,50)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.461.598.511,00	1.366.816.601,00	94.781.910,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20.693.912.120,00	21.347.436.659,33	(653.524.539,33)
Badan Pendapatan Daerah	1.522.501.989,00	1.742.854.825,00	(220.352.836,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	582.231.323,00	679.659.781,00	(97.428.458,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	385.067.376,00	820.417.270,00	(435.349.894,00)
Inspektorat	220.183.008,00	303.043.859,00	(82.860.851,00)
Kantor Camat Bengkalis	3.246.285.698,00	3.679.640.745,00	(433.355.047,00)
Kantor Camat Bantan	1.779.468.378,00	2.034.022.352,00	(254.553.974,00)
Kantor Camat Bukit Batu	2.405.189.883,00	2.415.924.976,00	(10.735.093,00)
Kantor Camat Siak Kecil	1.385.289.908,00	1.564.333.326,00	(179.043.418,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	502.708.631,00	547.177.969,00	(44.469.338,00)
Kantor Camat Rupal	4.382.208.286,00	4.131.415.844,00	250.792.442,00
Kantor Camat Rupal Utara	1.982.111.718,43	2.181.571.900,00	(199.460.181,57)
Kantor Camat Mandau	6.798.670.982,00	6.492.169.060,00	306.501.922,00
Kantor Camat Pinggir	2.912.234.075,00	3.222.942.503,00	(310.708.428,00)
Kantor Camat Batin Solapan	462.102.746,00	406.777.914,00	55.324.832,00
Kantor Camat Talang Muandau	669.711.073,00	757.321.411,00	(87.610.338,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	119.962.826,00	172.504.312,00	(52.541.486,00)
PPKD	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	5.762.610.660,00	(5.762.610.660,00)
Jumlah	838.152.774.548,00	842.136.619.822,64	(3.983.845.274,64)

j). Beban Amortisasi

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 (BAB V)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkan/(Penurunan)
1.924.210.417,75	3.817.484.659,92	(1.893.274.242,17)

Sedangkan Beban Amortisasi menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.240 Rincian Realisasi Beban Amortisasi

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Beban Amortisasi Goodwill	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Lisensi dan franchise-LO	0,00	14.839.000,00	(14.839.000,00)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.924.210.417,75	3.802.645.659,92	(1.878.435.242,17)
Jumlah	1.924.210.417,75	3.817.484.659,92	(1.893.274.242,17)

Beban Amortisasi adalah Beban Amortisasi yang berasal dari Belanja Aset Tidak Berwujud Perolehan sebelum Tahun Anggaran 2021. Beban Amortisasi periode 31 Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.924.210.417,75 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.241 Rincian Realisasi Beban Amortisasi Per OPD

OPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	784.504.082,00	2.675.771.719,00	(1.891.267.637,00)
Dinas Kesehatan	111.523.900,00	38.463.132,33	73.060.767,67
RSUD Bengkulu	0,00	0,00	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	2.167.687,50	8.969.333,33	(6.801.645,83)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.154.104,17	67.224.500,00	24.939.604,17
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	36.137.500,00	36.137.500,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.430.000,00	16.580.000,00	(4.150.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	10.272.770,83	9.756.000,00	516.770,83
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	6.336.516,67	(6.336.516,67)
Dinas Lingkungan Hidup	18.694.500,00	18.694.500,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	49.917.500,00	49.917.500,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.875.000,00	9.875.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	90.389.700,00	58.919.300,00	31.470.400,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	18.007.500,00	20.784.850,00	-2.777.350,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	62.381.820,83	82.758.450,00	(20.376.629,17)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.433.371,00	8.433.371,00	-
Dinas Perikanan	9.950.000,00	9.950.000,00	-
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	18.713.800,00	36.153.300,00	(17.439.500,00)
Sekretariat DPRD	32.923.066,67	42.755.402,00	(9.832.335,33)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	95.287.496,00	95.287.496,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23.375.000,00	35.293.750,00	(11.918.750,00)
Badan Pendapatan Daerah	335.708.750,00	364.703.600,00	(28.994.850,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	11.693.893,75	12.756.975,00	(1.063.081,25)
Inspektorat	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bengkalis	0,00	17.500.000,00	(17.500.000,00)
Kantor Camat Bantan	3.437.500,00	3.750.000,00	(312.500,00)
Kantor Camat Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Siak Kecil	3.750.000,00	625.000,00	3.125.000,00
Kantor Camat Bandar Laksmana	6.187.500,00	2.062.500,00	4.125.000,00
Kantor Camat Rupal	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Rupal Utara	6.875.000,00	7.500.000,00	(625.000,00)
Kantor Camat Mandau	61.983.975,00	68.213.297,92	(6.229.322,92)
Kantor Camat Pinggir	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Betin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Talang Muandau	7.425.000,00	1.237.500,00	6.187.500,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
PPKD	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	11.074.166,67	(11.074.166,67)
Jumlah	1.524.210.417,75	3.817.484.659,92	(1.893.274.242,17)

k). Beban Penyisihan Piutang

Realisasi 2021

Realisasi 2020

kenaikan/(Penurunan)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

9.204.270.253,09

6.328.008.927,10

2.876.261.325,99

Beban Penyisihan Piutang dapat di rincikan sebagai berikut :

Tabel 5.242 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	6.956.500.915,09	5.785.676.436,75
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	169.978.688,00	263.994.595,35
Beban Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang Sah	2.077.790.650,00	278.337.895,00
Jumlah	9.204.270.253,09	6.328.008.927,10

Beban Penyisihan Piutang adalah Beban Penyisihan Piutang yang berasal dari Piutang sebelum Tahun Anggaran 2021 dan pada Tahun Anggaran 2021 yang disisihkan sesuai dengan kualitas umur piutang yang ditentukan pada Peraturan Bupati. Beban Penyisihan Piutang periode 31 Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp9.204.270.253,09 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.243 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang Per OPD

OPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
RSUD Bengkulu	2.077.790.650,00	278.337.895,00	1.799.452.755,00
RSUD Kecamatan Mandau	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	6.955.994.801,20	5.785.676.436,75	1.170.318.364,45
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	150.608.500,00	188.256.000,00	(37.647.500,00)
Dinas Perhubungan	19.370.188,00	75.738.595,35	(56.368.407,35)
Jumlah	9.203.764.139,20	6.328.008.927,10	2.875.755.212,10

D). Beban Lain-lain

	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
	28.439.550.977,00	137.479.372.167,00	(109.039.821.190,00)

Beban Lain-lain menurut Jenisnya dapat di rincikan sebagai berikut :

Tabel 5.244 Rincian Realisasi Beban Lain-lain

Beban Lain-lain	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Uang yang Dibenikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27.799.947.265,00	7.437.028.565,00
Beban Tidak Terduga	9.655.040,00	152.938.659.147,00
Beban yang Berasal dari Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00
Pengurangan Nilai Investasi	629.948.672,00	690.233.184,00
Aset Covid	0,00	(23.586.548.729,00)
Jumlah	28.439.550.977,00	137.479.372.167,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penjelasan untuk Uang yang Diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	4.587.419.000,00	Hadiah perlombaan sebesar Rp. 327.000.000 dan penghargaan suatu prestasi sebesar Rp. 257.000.000. Beasiswa sebesar Rp. 2.813.449.000
Dinas Kesehatan	236.964.800,00	Jasa pemusnahan obat yang sudah expired sebesar Rp. 197.964.800 dan Hadiah perlombaan sebesar Rp. 39.000.000
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	1.109.975.000,00	Uang untuk perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp. 1.080.000.000 dan Uang Transportasi dan uang saku kegiatan sebesar Rp. 29.975.000
Badan penanggulangan Bencana Daerah	1.158.220.000,00	Uang saku Jasa penanganan bencana non alam epidemi/wabah penyakit covid 19 sebesar Rp. 252.220.000 dan bantuan sosial (santunan) penanganan covid 19 sebesar Rp. 906.000.000
Dinas Sosial	410.695.000,00	Penanganan dampak sosial kemasyarakatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	118.921.465,00	Uang saku peserta kegiatan dan hadiah perlombaan
Dinas Ketahanan Pangan	787.650.000,00	Belanja transfer keuangan daerah dan Desa (TKDD) di Kecamatan Bantan dan Kec. Siak kecil sebesar Rp. 665.000.000. dan Rp. 110.000.000. Bantuan uang saku peserta kegiatan Rp. 3.650.000 dan hadiah perlombaan sebesar Rp. 9.000.000
Dinas Lingkungan Hidup	83.250.000,00	Hadiah Perlombaan sebesar Rp. 29.250.000 dan Uang saku Jasa sebesar Rp. 54.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	914.325.000,00	Uang Jasa yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 891.375.000 dan Uang saku peserta kegiatan sebesar Rp. 22.950.000
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.390.907.000,00	Uang saku peserta kegiatan
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	829.350.000,00	Hadiah perlombaan sebesar Rp. 270.000.000. Jasa yang diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp. 76.800.000. dan Penghargaan suatu prestasi sebesar Rp. 482.550.000
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	764.104.000,00	Uang saku peserta kegiatan menjahit sebesar Rp. 187.800.000, Uang Jasa untuk intruksi kegiatan menjahit sebesar Rp. 426.400.000 dan Uang saku untuk EO pada kegiatan sebesar Rp. 149.904.000
Sekretariat Daerah	4.510.915.000,00	Hadiah perlombaan Rp. 712.540.000. Penghargaan prestasi Rp. 54.500.000. Beasiswa Rp. 2.819.550.000. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga Rp. 306.250.000. Uang yang diberikan kepada Masyarakat Rp. 618.075.000

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	629.948.672,00	Kerugian penyertaan modal pada PT. BLJ
Badan Penelitian dan Pengembangan	160.130.000,00	Hadiah perlombaan sebesar Rp. 111.350.000. Uang untuk penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp. 45.000.000 dan Uang yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 3.780.000.
Kantor Camat Bengkalis	448.030.000,00	Jasa yang diberikan kepada pihak lain sebesar Rp. 301.730.000. Hadiah perlombaan sebesar Rp. 17.100.000 dan Jasa yang diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp. 129.200.000
Kantor Camat Bantan	470.850.000,00	Uang hadiah perlombaan sebesar Rp.139.400.000. Uang yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 120.000.000 dan uang yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 211.450.000
Kantor Camat Bukit Batu	538.400.000,00	Hadiah perlombaan sebesar Rp. 130.950.000. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebesar Rp.26.500.000 . Uang yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 188.500.000 dan Uang yang diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp. 192.450.000
Kantor Camat Siak Kecil	488.675.000,00	Uang hadiah perlombaan sebesar Rp.60.050.000. Uang yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 132.200.000 dan uang yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 296.425.000
Kantor Camat Bandar Laksmana	503.000.000,00	Hadiah perlombaab sebesar Rp. 151.450.000. Ppenghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp. 3.900.000. Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 347.650.000
Kantor Camat Rupert	1.223.800.000,00	Hadiah perlombaan sebesar Rp. 193.650.0. Uang penghargaan prestasi kader PKK sebesar Rp.2.000.000 . Uang jasa sebesar Rp. 1.028.150.000
Kantor Camat Rupert Utara	714.500.000,00	Uang hadiah perlombaan sebesar Rp.324.300.000. Uang penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp. 53.000.000. Uang yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 170.000.000 dan uang yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 167.200.000
Kantor Camat Mandau	4.366.366.000,00	Hadiah perlombaan sebesar Rp.471.866.000 . Uang penghargaan prestasi sebesar Rp.34.000.000 Uang jasa diberikan kpd masyarakat sebesar Rp. 411.800.000
Kantor Camat Pinggir	812.720.000,00	Uang hadiah perlombaan sebesar Rp.31.100.000. Uang penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp. 15.000.000. Uang yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 380.950.000 dan uang yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 385.670.000
Kantor Camat Batin Solapan	398.650.000,00	Hadiah perlombaan sebesar Rp. 40.300.000. Uang saku kegiatan sebesar Rp. 281.050.000. Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 77.300.000
Kantor Camat Talang Muandau	365.225.000,00	Hadiah perlombaan sebesar Rp. 23.500.000. Jasa yang diberikan kepada pihak lain sebesar Rp. 162.550.000. Jasa yang diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp. 179.175.000

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Beban Lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.591.475.937,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.245 Rincian Realisasi Beban Lain-lain Per OPD

OPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	4.587.419.000,00	1.605.340.000,00	2.982.079.000,00
Dinas Kesehatan	236.964.800,00	0,00	236.964.800,00
RSUD Bengkalis	0,00	0,00	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.800.000,00	0,00	55.800.000,00
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	1.109.975.000,00	3.426.348.565,00	(2.316.373.565,00)
Badan penanggulangan Bencana Daerah	1.158.220.000,00	0,00	1158220000,00
Dinas Pemadam Kebakaran	13.150.000,00	0,00	13150000,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	410.695.000,00	21.000.000,00	389.695.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	82.000.000,00	0,00	82000000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	118.921.465,00	0,00	118.921.465,00
Dinas Ketahanan Pangan	787.650.000,00	20.400.000,00	767.250.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	83.250.000,00	14.750.000,00	68.500.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	914.325.000,00	177.750.000,00	736.575.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.390.907.000,00	930.000.000,00	460.907.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	96.825.000,00	24.000.000,00	72.825.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	829.350.000,00	0,00	829.350.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34.230.000,00	0,00	34.230.000,00
Dinas Perikanan	13.600.000,00	0,00	13600000,00
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	74.550.000,00	0,00	74.550.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	764.104.000,00	19.500.000,00	744.604.000,00
Sekretariat Daerah	4.510.915.000,00	560.000.000,00	3.950.915.000,00
Sekretariat DPRD	6.000.000,00	0,00	6000000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	20.200.000,00	(20.200.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	639.603.712,00	0,00	639603712,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	160.130.000,00	0,00	160130000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bengkalis	448.030.000,00	10.000.000,00	438.030.000,00
Kantor Camat Bantan	470.850.000,00	124.700.000,00	346.150.000,00
Kantor Camat Bukit Batu	538.400.000,00	45.000.000,00	493.400.000,00
Kantor Camat Siak Kecil	488.675.000,00	12.000.000,00	476.675.000,00
Kantor Camat Bandar Laksmana	503.000.000,00	8.590.000,00	494.410.000,00
Kantor Camat Rupal	1.223.800.000,00	65.000.000,00	1.158.800.000,00
Kantor Camat Rupal Utara	714.500.000,00	193.100.000,00	521.400.000,00
Kantor Camat Mandau	4.366.366.000,00	86.000.000,00	4.280.366.000,00
Kantor Camat Pinggir	812.720.000,00	13.750.000,00	798.970.000,00
Kantor Camat Batin Solapan	398.650.000,00	0,00	398.650.000,00
Kantor Camat Talang Muandau	365.225.000,00	29.600.000,00	335.625.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.750.000,00	0,00	15750000,00
PPKD	0,00	130.042.343.602,00	(130.042.343.602,00)
Dinas Pertanian	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
Jumlah	28.439.550.977,00	137.479.372.167,00	(109.039.821.190,00)

5.4.2.B. Beban Transfer

Realisasi 2020	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
279.790.490.062,00	222.877.854.625,00	56.912.635.437,00

Beban Transfer merupakan Beban yang dikeluarkan dan dikelola melalui PPKD Kabupaten Bengkalis untuk realisasi tahun anggaran 2021. Realisasi Beban Transfer 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp279.790.490.062,00 dengan rincian sebagai berikut :

a). Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
9.306.096.195,00	4.915.347.049,00	4.390.749.146,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Beban yang dikeluarkan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

Tabel 5.246 Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Transfer	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	9.306.096.195,00	4.915.347.049,00	4.390.749.146,00
Jumlah	9.306.096.195,00	4.915.347.049,00	4.390.749.146,00

b). Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
1.959.882.773,00	763.602.328,00	1.196.280.445,00

Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah ini merupakan Beban yang dikeluarkan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

Tabel 5.247 Rincian Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Beban Transfer	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.959.882.773,00	763.602.328,00	1.196.280.445,00
Jumlah	1.959.882.773,00	763.602.328,00	1.196.280.445,00

c). Beban Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
268.524.511.094,00	217.198.905.248,00	51.325.605.846,00

Beban Bantuan Keuangan merupakan Beban yang dikeluarkan dan dikelola melalui PPKD Kabupaten Bengkulu dengan realisasi periode 31 Desember Tahun anggaran 2021 sebesar Rp268.524.511.094,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.248 Rincian Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa - ADD Se-Kabupaten Bengkulu	241.669.300.229,00	203.271.413.648,00	38.397.886.581,00
Beban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa - Dana Desa dari APBN Se-Kabupaten Bengkulu	0,00	327.491.600,00	(327.491.600,00)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa - UED/K-SP Se-Kabupaten Bengkulu	0,00	0,00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa - INBUP-PPIP Se-Kabupaten Bengkulu	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - P3ID Se-Kabupaten Bengkulu	26.855.210.865,00	13.600.000.000,00	13.255.210.865,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Bantuan PilkaDes Se-Kabupaten Bengkulu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	268.524.511.084,00	217.198.905.248,00	51.325.605.846,00

5.4.3 Surplus Non Operasional**a) Surplus dari Kegiatan Non Operasional**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkani/(Penurunan)
0,00	723.380.000,00	(723.380.000,00)

Tabel 5.249 Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional per OPD

OPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkani/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	0,00	15.804.000,00	(15.804.000,00)
Sekretariat DPRD	0,00	104.860.000,00	(104.860.000,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	38.396.000,00	(38.396.000,00)
Pembangunan Daerah	0,00	23.392.000,00	(23.392.000,00)
Dinas Perikanan	0,00	56.830.000,00	(56.830.000,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	22.758.000,00	(22.758.000,00)
Kecamatan Bukit Batu	0,00	34.378.000,00	(34.378.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	396.966.000,00	(396.966.000,00)
Politik	0,00	29.996.000,00	(29.996.000,00)
Jumlah	0,00	723.380.000,00	(723.380.000,00)

5.4.4. Defisit Non Operasional**a) Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkani (Penurunan)
0,00	36.100.000,00	(36.100.000,00)

5.4.5. Surplus/Defisit - LO

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenalkani/(Penurunan)
(434.592.113.603,75)	(858.198.852.024,32)	423.606.738.420,57

Jumlah Defisit sebesar Rp(434.592.113.603,75) tersebut merupakan Surplus/Defisit-LO Kabupaten Bengkulu untuk periode 31 Desember tahun anggaran 2021 dimana jumlah pendapatan-LO secara



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

keseluruhan lebih kecil dari jumlah Beban. Total Pendapatan-LO selama periode 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp2.948.007.230.812,48 sementara total Beban selama periode 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp 3.382.599.344.416,23 serta Surplus/Defisit Penjualan sebelum Pos luar biasa periode 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5. 5. Penjelasan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama TA 2021 dan TA 2020 terdiri atas:

Tabel 5. 250 Rincian Arus Kas

Arus Kas	Tahun 2021	Tahun 2020
Aktivitas Operasi	1.708.440.331.169,78	428.527.261.163,02
Aktivitas Investasi	(679.492.555.913,42)	(499.606.282.982,84)
Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Jumlah	1.028.947.775.256,36	(71.079.021.819,82)

Realisasi Arus Kas Bersih selama TA 2021 terjadi surplus sebesar Rp.1.028.951.275.256,36 sedangkan realisasi TA 2020 terjadi defisit sebesar Rp.71.079.021.819,82 Realisasi kas bersih dapat dirinci sebagai berikut:

5. 5. 1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2021	Tahun 2020
	1.708.440.331.169,78	428.527.261.163,02

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis selama satu periode akuntansi.

Tabel 5. 251 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Masuk Kas	4.321.908.588.453,72	2.916.669.849.734,02
Arus Kas Keluar	2.613.468.257.283,94	2.488.142.588.571,00
Jumlah	1.708.440.331.169,78	428.527.261.163,02

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama TA 2021 sebesar Rp.1.708.443.831.169,78 sedangkan realisasi TA 2020 sebesar Rp428.527.261.163,02. Adapun rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

A. Arus Masuk Kas

Realisasi Arus Masuk Kas sejumlah Rp4.321.902.433.413,72 merupakan Arus Masuk Kas atas Aktivitas Operasi yang berasal dari :

a. Penerimaan Pajak Daerah

Saldo Penerimaan Pajak Daerah sejumlah Rp82.355.513.611,00 merupakan Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah selama TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 252 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah	Tahun 2021	Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pajak Hotel	2.771.752.685,00	1.509.075.439,25
Pajak Restoran	11.220.797.099,00	8.781.178.472,00
Pajak Hiburan	490.353.540,00	672.591.600,00
Pajak Reklame	768.097.825,00	449.235.275,00
Pajak Penerangan Jalan	37.354.844.432,00	33.167.031.830,00
Pajak Parkir	312.335.167,00	286.723.466,00
Pajak Air Tanah	607.489.510,00	557.236.551,00
Pajak Sarang Burung Walet	497.533.239,00	336.843.119,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.178.288.650,00	3.936.415.145,00
Pajak Bagi Hasil dari PBB P2	19.844.933.613,00	9.680.396.732,00
Pajak BPHTB	4.309.087.851,00	4.288.090.960,00
Jumlah	82.355.513.811,00	63.664.818.589,25

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah sejumlah Rp10.328.501.238,00 merupakan Saldo Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah selama TA 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 253 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah	Tahun 2021	Tahun 2020
Retribusi Pelayanan Kesehatan	557.204.700,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.137.056.000,00	1.161.435.000,00
Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	627.250.000,00	487.575.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.448.109.500,00	1.316.189.500,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	38.627.500,00	41.891.000,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	168.056.000,00	133.005.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	210.853.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	551.193.000,00	483.887.250,00
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	349.035.000,00	293.260.000,00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	469.062.000,00	211.840.000,00
Retribusi Terminal	7.899.000,00	8.536.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa	148.340.000,00	121.195.000,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	11.915.000,00	16.895.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	3.619.944.263,00	3.603.566.399,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.150.000,00	7.250.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	177.840.000,00	288.600.000,00
Retribusi Penyebrangan Air	0,00	0,00
Retribusi izin mendirikan Bangunan	1.008.819.275,00	569.518.236,34
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Izin Trayek/ Kartu Pengawasan (KP)	0,00	570.000,00
Jumlah	10.329.541.236,00	9.956.066.385,34

- c. **Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**
 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan deviden dari PT. Bank Riau Kepri selama TA 2021 dan 2020 sebesar Rp33.292.209.969,00 dan Rp20.920.504.935,00 yang berasal dari :

Tabel 5. 254 Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2021	Tahun 2020
PT. Bank Riau	33.292.209.969,00	20.920.504.935,00
Jumlah	33.292.209.969,00	20.920.504.935,00

- d. **Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah**

Penerimaan Lain – lain PAD yang Sah adalah penerimaan diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Bengkalis selama TA 2021 dan 2020 sebesar Rp.158.252.769.155,72 dan Rp157.661.100.005,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 255 Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2021	Tahun 2020
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Hasil Penjualan BMD Tidak Dipisahkan	11.660.000,00	303.269.700,00
Jasa Giro Kas Daerah	9.534.038.489,00	3.256.110.350,00
Jasa Giro Pemegang Kas	580.952.906,00	830.541.708,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.636.362,00	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.659.531.694,00	19.481.596.510,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	4.400.000,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	228.740.417,00	91.501.945,00
Hasil Eksekusi Jaminan	62.621.367,00	7.147.958.273,22
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	337.689.399,00	23.675.778,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	9.054.842.068,72	1.177.969.623,26
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Modal	0,00	6.991.293.456,46
Pendapatan BLUD	110.382.472.561,00	104.360.891.054,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.267.755.300,00	13.888.868.100,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	121.529.202,00	107.423.508,00
Jumlah	158.252.769.155,72	157.661.100.005,94

- e. **Penerimaan Dana Bagi Hasil**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Bengkalis terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA) T.A 2021 dan 2020 sejumlah Rp3.066.476.067.593,00 dan Rp1.728.780.988.415,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 256 Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil

Penerimaan Dana Bagi Hasil	Tahun 2021	Tahun 2020
Dana Bagi Hasil Pajak	2.658.352.990.601,00	1.050.702.831.784,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)	408.123.076.992,00	678.078.156.631,00
Jumlah	3.066.476.067.593,00	1.728.780.988.415,00

Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Bengkalis untuk periode selama TA 2021 dan 2020 sebesar Rp2.658.352.990.601,00 dan 1.050.702.831.784,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 257 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Tahun 2021	Tahun 2020
Bagi Hasil dari PBB	2.602.448.020.701,00	982.451.114.510,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	54.927.302.100,00	59.289.166.551,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan 29	977.667.800,00	1.643.380.893,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	0,00	3.399.342.940,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	0,00	3.860.526.654,00
Bagi Hasil Pajak dan Bangunan (Sektor Lainnya)	0,00	59.300.236,00
Jumlah	2.658.352.990.601,00	1.050.702.831.784,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkalis untuk periode selama TA 2021 dan 2020 sebesar Rp408.123.076.992,00 dan Rp678.078.156.631,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 258 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Bagi Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Tahun 2021	Tahun 2020
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas	378.598.933.710,00	666.565.099.432,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba	2.071.794.136,00	1.418.038.691,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.674.500.150,00	788.276.289,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	25.777.841.891,00	9.306.618.019,00
Cukai Hasil Tembakau	7.105,00	124.200,00
Jumlah	408.123.076.992,00	678.078.156.631,00

f. **Penerimaan Dana Alokasi Umum**

Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkalis selama TA 2021 dan 2020 sebesar Rp336.787.052.000,00 dan Rp338.731.609.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 259 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum	Tahun 2021	Tahun 2020
Dana Alokasi Umum	336.787.052.000,00	338.731.609.000,00
Jumlah	336.787.052.000,00	338.731.609.000,00

h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik Kabupaten Bengkalis selama TA 2021 dan 2020 sebesar Rp93.311.533.266,00 dan Rp73.318.351.993,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 260 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	Tahun 2021	Tahun 2020
DAK Bidang Pendidikan	32.354.346.067,00	33.188.479.029,00
DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	24.724.290.403,00	19.484.492.836,00
DAK Bidang Pertanian Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.972.898.568,00	0,00
DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	1.082.312.360,00	1.004.638.350,00
DAK Bidang Jalan Reguler	14.535.552.962,00	0,00
DAK Fisik Bidang Jalan Penugasan	4.556.432.300,00	0,00
DAK Bidang Air Minum Penugasan	5.279.878.806,00	0,00
DAK Bidang Sanitasi Penugasan	2.632.652.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	299.903.960,00	0,00
DAK Bidang Transportasi Laut Reguler	3.222.095.169,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	1.104.368.651,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	397.882.000,00	0,00
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.148.920.000,00	0,00
DAK Bidang Kesehatan	0,00	2.216.867.750,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	649.241.000,00
DAK Afiriasi Bidang Penguatan Puskesmas DTPK	0,00	5.915.039.982,00
DAK Cadangan Afiriasi Bidang Sanitasi	0,00	570.501.000,00
DAK Cadangan Penugasan Bidang Irigasi	0,00	1.112.337.434,00
DAK Cadangan Afiriasi Bidang Air Minum	0,00	5.714.326.047,00
DAK Cadangan Afiriasi Bidang Perumahan Pemukiman	0,00	3.462.428.565,00
Jumlah	93.311.533.266,00	73.318.351.993,00

i. Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Kabupaten Bengkalis selama TA 2021 dan 2020 sebesar Rp146.640.483.916,00 dan Rp134.822.508.902,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 261 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Tahun 2021	Tahun 2020
DAK Non Fisik-BOS Afiriasi	240.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DAK Non Fisik-BOS Kinerja	240.000.000,00	0,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	112.812.546.000,00	101.677.829.000,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru	993.000.000,00	894.000.000,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggara-raan PAUD	7.089.600.000,00	7.435.800.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.126.300.000,00	1.349.200.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.252.050.145,00	7.023.749.851,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.769.822.625,00	2.233.525.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.991.251.146,00	2.230.729.976,00
DAK Non Fisik Dana Fasilitas Penanaman Modal	326.122.000,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	187.488.000,00	0,00
DAK Non Fisik- Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	222.000.000,00	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	11.659.944.275,00
DAK Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	317.730.800,00
Jumlah	146.840.483.916,00	134.822.508.902,00

j. **Penerimaan Dana Insentif Daerah**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Insentif Daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode selama TA 2021 sejumlah Rp31.134.698.000,00 sedangkan pada TA 2020 sebesar Rp35.625.236.000,00 dengan rincian:

Tabel 5. 262 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Insentif Daerah

Penerimaan Dana Insentif Daerah	Tahun 2021	Tahun 2020
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00
Jumlah		

k. **Penerimaan Dana Desa**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Desa Kabupaten Bengkalis untuk periode selama TA 2021 sejumlah Rp133.964.917.167,00 sedangkan pada TA 2020 sebesar Rp131.032.700.000,00 dengan rincian:

Tabel 5. 263 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Desa

Penerimaan Dana Desa	Tahun 2021	Tahun 2020
Dana Desa	165.099.615.167,00	166.657.936.000,00
Jumlah	165.099.615.167,00	166.657.936.000,00

l. **Penerimaan Bantuan Keuangan**

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Riau selama TA 2021 dan 2020 adalah Rp17.763.147.160,00 dan Rp26.623.226.400,00 dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 264 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Bantuan Keuangan

Penerimaan Dana Bantuan Keuangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	17.763.201.600,00	26.623.226.400,00
Jumlah	17.763.201.600,00	26.623.226.400,00

m. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah adalah Hibah Dana BOS dianggarkan dan direalisasikan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah, sehingga arus kas masuk pada pos Pendapatan Hibah selama TA 2021 dan 2020 sebesar Rp82.544.910.000 dan Rp91.438.330.000,00.

Tabel 5. 265 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Hibah	82.544.910.000,00	91.438.330.000,00
Jumlah	82.544.910.000,00	91.438.330.000,00

n. Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Penerimaan dari Pendapatan Lainnya terdiri atas Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pendapatan Lainnya selama TA 2021 dan 2020 sejumlah Rp129.050.630.338,00 dan Rp105.094.409.108,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 266 Rincian Arus dari Pendapatan Lainnya

Penerimaan Pendapatan Lainnya	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	129.050.630.338,00	104.662.859.108,49
Pendapatan Lainnya	0,00	431.550.000,00
Jumlah	129.050.630.338,00	105.094.409.108,49

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan transfer Pemerintah Provinsi Realisasi penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama TA 2021 dan 2020 sejumlah Rp129.050.630.338,00 dan Rp104.662.859.108,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 267 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Tahun 2021	Tahun 2020
Pajak Kendaraan Bermotor	38.126.230.282,51	27.011.248.346,49
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.117.233.130,49	14.501.043.214,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.675.574.344,00	35.356.482.824,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.070.056.597,00	879.211.610,00
Pajak Rokok	26.061.535.984,00	26.914.873.114,00
Jumlah	129.050.630.338,00	104.662.859.108,49

B. Arus Keluar Kas

Realisasi arus Keluar Kas sejumlah Rp2.613.458.602.243,94 merupakan saldo Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

Tabel 5. 268 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Arus Keluar Kas	Tahun 2021	Tahun 2020
Pembayaran Pegawai	1.018.335.441.328,20	967.266.480.083,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.097.486.691.596,15	933.384.530.032,00
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	10.642.584.920,00	9.618.696.893,00
Pembayaran Belanja Hibah	35.834.828.114,59	71.023.667.791,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	37.194.371.163,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	9.655.040,00	152.938.659.147,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	11.265.978.968,00	5.678.949.377,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	402.698.706.154,00	348.231.605.248,00
Jumlah	2.613.468.257.283,94	2.488.142.586.571,00

5. 5. 2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2021	Tahun 2020
	(679.492.555.913,42)	(499.606.282.982,84)

Arus kas bersih dari aktivitas Investasi aset Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama TA 2021 dan 2020 sebesar defisit Rp679.492.555.913,42 dan defisit Rp499.606.282.982,84 terdiri dari :

Tabel 5. 269 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas Masuk	0,00	723.380.000,00
Arus Kas Keluar	679.492.555.913,42	500.329.662.982,84
Jumlah	(679.492.555.913,42)	(499.606.282.982,84)

A. Arus Kas Masuk

Realisasi Arus Kas Masuk sejumlah Rp0,00 merupakan Arus Kas Masuk atas Aktivitas Investasi dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5. 270 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

SKPD	Tahun 2021	Tahun 2020
PPKD	0,00	723.380.000,00
Jumlah	0,00	723.380.000,00

B. Arus Keluar Kas

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi selama TA 2021 dan TA 2020 sebesar Rp679.492.555.913,42 dan Rp500.329.662.982,84. Arus Keluar Kas merupakan nilai kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam memperoleh aset tetap. Nilai arus keluar kas adalah sebesar Rp679.492.555.913,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 271 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas	Tahun 2021	Tahun 2020
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	412.940.853,70	815.248.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Perolehan Peralatan dan Mesin	121.410.901.246,66	97.002.850.638,45
Perolehan Gedung dan Bangunan	131.209.405.612,36	131.718.395.987,69
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	415.733.389.785,70	260.976.621.697,70
Perolehan Aset Tetap Lainnya	10.725.918.415,00	9.816.546.659,00
Perolehan Aset lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah	679.492.555.913,42	500.329.662.982,84

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, dan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 272 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pendanaan pemerintah, namun mempengaruhi nilai kas. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Selama TA 2021 aktivitas transitoris yang terjadi berupa penerimaan dan pengeluaran dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 273 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas Masuk	136.003.660.775,45	130.055.634.127,00
Arus Kas Keluar	136.003.660.775,45	130.055.634.127,00
Jumlah	0,00	0,00

A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	136.003.660.775,45	130.055.634.127,00

Tabel 5. 274 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Arus Masuk Kas	Tahun 2021	Tahun 2020
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	136.003.660.775,45	130.055.634.127,00
Pengembalian UP TA 2020 (Pengembalian di Tahun Berjalan)	0,00	0,00
Pengembalian UP TA 2021 (Pengembalian di Tahun Berjalan)	0,00	0,00
Jumlah	136.003.660.775,45	130.055.634.127,00

a) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2021	Tahun 2020
	136.003.660.775,45	130.055.634.127,00

Penerimaan Perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp136.003.660.775,45 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 275 Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK	Tahun 2021	Tahun 2020
PPh	59.293.695.523,00	44.738.419.803,00
PPN	0,00	52.338.725.351,00
IWP	15.247.834.820,15	32.578.891.973,00
Taperum	61.462.130.432,30	399.597.000,00
Jumlah	136.003.660.775,45	130.055.634.127,00

B. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2021	Tahun 2020
	136.003.660.775,45	130.055.634.127,00

Tabel 5. 276 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas	Tahun 2021	Tahun 2020
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	136.003.660.775,45	130.055.634.127,00
SP2D - SPJ	0,00	0,00
Jumlah	136.003.660.775,45	130.055.634.127,00

a) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2021	Tahun 2020
	136.003.660.775,45	130.055.634.127,00

Pengeluaran Perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp136.003.660.775,45 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 277 Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK	Tahun 2021	Tahun 2020
PPh	59.293.695.523,00	44.738.419.803,00
PPN	0,00	52.338.725.351,00
IWP	15.247.834.820,15	32.578.891.973,00
Taperum	61.462.130.432,30	399.597.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jumlah	138.003.660.775,45	130.055.634.127,00
--------	--------------------	--------------------

5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	Tahun 2021	Tahun 2020
	1.028.947.775.256,36	(71.079.021.819,82)

Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas selama TA 2021 adalah Rp1.028.951.275.256,36 merupakan penjumlahan dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2021 sebesar Rp1.708.443.831.169,78 dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2021 sebesar minus Rp679.492.555.913,42 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2021 sebesar Rp0,00 serta Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2021 sebesar Rp0,00.

5.5.6. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	Tahun 2021	Tahun 2020
	1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55

Saldo akhir Kas sebesar Rp1.179.962.849.062,91 merupakan jumlah keseluruhan kas selama TA 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp151.011.573.806,55. Saldo Kas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 278 Rincian Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	Tahun 2021	Tahun 2020
Kas di BUD	1.168.554.249.066,37	144.655.673.806,01
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.581.400,00	1.876.550.420,00
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	6.308,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	1.758.070,00	0,00
Kas di Bendahara JKN	0,00	1.624.173.188,00
Kas di Bendahara BLUD	11.349.091.889,54	2.715.869.028,54
Kas di Bendahara BOS	52.662.329,00	139.307.364,00
Jumlah	1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55

a) Saldo Akhir Kas di BUD

Saldo Akhir kas di BUD selama TA 2021 sebesar Rp1.168.554.249.066,37 dan Tahun 2020 sebesar Rp144.655.673.806,01.

Kas di BUD terdiri dari :

Tabel 5. 279 Rincian Saldo Akhir Kas di BUD

Saldo Akhir Kas di BUD	Tahun 2021	Tahun 2020
Bank Riau Kepri	1.168.554.249.066,37	144.655.673.806,01
Bank BRI	1.758.070,00	0,00
Bank Mandiri	0,00	0,00
Deposito	0,00	0,00
Jumlah	1.168.556.007.136,37	144.655.673.806,01

b) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.581.400,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran di SKPD yang terdiri dari Sisa UP (Uang Persediaan), selama TA 2021 belum disetorkan pada Rekening BUD. Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 280 Rincian Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	2021	2020	Keterangan
Dinas Pendidikan	0,00	1.876.550.420,00	Sisa UP
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	400,00	0,00	Sisa UP
Kantor Camat Talang Muandau	1.581.000,00	0,00	Sisa UP
Jumlah	1.581.400,00	1.876.550.420,00	

d) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.758.070,00 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan di SKPD selama TA 2021 belum disetorkan pada Rekening BUD. Kas di Bendahara Penerimaan dapat di rinci sebagai berikut :

Tabel 5. 281 Rincian Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2021	Tahun 2020
Badan Pendapatan Daerah	1.758.070,00	0,00
Jumlah	1.758.070,00	0,00

e) Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN

Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN selama TA 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp1.624.173.188,00 merupakan Kas di Bendahara JKN di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 31 Desember 2021. Kas di Bendahara JKN dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 282 Rincian Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN

Rincian JKN	Tahun 2021	Tahun 2020
Saldo Awal	1.624.173.188,00	1.271.465.892,00
Pendapatan	14.287.755.300,00	13.888.868.100,00
Belanja	13.805.164.712,00	13.536.160.804,00
Belanja Pegawai	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.536.160.804,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Penyetoran SILPA JKN	2.106.763.776,00	0,00
Kas di Bendahara	0,00	1.624.173.188,00

f) Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD

Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp11.349.091.889,54 merupakan Kas di Bendahara BLUD di RSUD selama TA 2021. Kas di Bendahara BLUD dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 283 Rincian Mutasi Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD

Rincian Mutasi		Tahun 2021	Tahun 2020
Saldo Awal		11.349.091.889,54	11.349.091.889,54
Mutasi		0,00	0,00
Kas di Bendahara		11.349.091.889,54	11.349.091.889,54



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Kas di Bendahara BLUD Per 01 Januari 2021	2.715.869.028,54	8.140.177.538,54
Lain-Lain Pendapatan yang Sah		
Pendapatan BLUD	110.382.472.561,00	104.360.691.054,00
Belanja		
Belanja Pegawai BLUD	4.013.845.000,00	7.146.645.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	94.312.367.457,00	90.948.926.794,00
Belanja Modal BLUD	3.423.037.243,00	11.689.627.770,00
Kas BLUD	11.349.091.869,54	2.715.869.028,54

Tabel 5. 284 Rincian Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD

SKPD	Tahun 2021	Tahun 2020
	Kas di Bendahara BLUD	Kas di Bendahara BLUD
RSUD Mandau	10.395.570.750,44	2.529.831.299,44
RSUD Bengkalis	953.521.139,10	186.037.729,10
Jumlah	11.349.091.869,54	2.715.869.028,54

g) Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS

Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS selama TA 2021 dan 2020 sebesar Rp52.662.329,00 dan Rp139.307.364,00,00 merupakan Kas di Bendahara BOS pada SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang pada tanggal 31 Desember 2021. Kas di Bendahara BOS dapat di rinci sebagai berikut :

Tabel 5. 285 Rincian Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS

Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Tahun 2021	Tahun 2020
BOS Reguler/ 393 Sekolah	51.083.262,00	135.112.897,00
BOS Kinerja/ 4 sekolah	237.660,00	237.660,00
BOS Afirmasi/ 6 sekolah	720.686,00	916.086,00
Jasa Giro BOS	620.721,00	3.040.721,00
Jumlah	52.662.329,00	139.307.364,00

Tabel 5. 286 Rincian Mutasi Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Saldo Awal Kas di Bendahara BOS	139.307.364,00	4.860.382.090,00
Koreksi Kas di Bendahara Bos	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah		
Pendapatan Dana BOS dari Pusat	83.024.910.000,00	90.754.330.000,00
Jasa Giro BOS	0,00	214.618,00
Belanja		
Belanja Pegawai Dana BOS	0,00	21.860.083.620,00
Belanja Barang Dana BOS	64.463.165.184,00	39.965.187.757,00
Belanja Modal Dana BOS	18.645.969.851,00	33.572.169.752,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penyetoran Jasa Giro BOS	2.420.000,00	78.178.215,00
Kas di Bendahara BOS	52.662.329,00	139.307.384,00

Jumlah Kas di Bendahara BOS ini merupakan bagian dari SiLPA dan bagian dari pengakuan pendapatan secara akrual.

5. 5. 7. Perbandingan antara Saldo Akhir Kas dengan SiLPA

Saldo akhir kas sebesar Rp1.179.959.349.062,91 terdiri dari :

1) Kas di BUD	1.168.554.249.066,37
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	1.581.400,00
3) Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	6.308,00
4) Kas di Bendahara Penerimaan	1.758.070,00
5) Kas di Bendahara JKN	0,00
6) Kas di Bendahara BLUD	11.349.091.889,54
7) Kas di Bendahara BOS	52.662.329,00
Jumlah	1.179.959.349.062,91

Saldo akhir kas sebesar Rp1.179.959.349.062,91 sama jika dibandingkan dengan saldo SiLPA dikarenakan Kas di Bendahara BOS menjadi bagian SiLPA selama Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.6. PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas Atas Aktivitas Operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

2021	2020
9.215.647.863.998,17	9.886.020.878.913,95

Saldo awal Ekuitas tahun 2021 adalah sebesar Rp9.215.647.863.998,17. jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar sebesar Rp9.886.020.878.913,95 mengalami penurunan sebesar Rp670.373.014.915,78 atau 6,78% yang merupakan saldo akhir Ekuitas tahun 2020

5.6.2. Surplus(Defisit) - LO

2021	2020
(434.592.113.603,75)	(858.198.852.024,32)

Defisit- LO tahun 2021 sebesar Rp434.592.113.603,75 Sedangkan surplus tahun 2020 sebesar Rp858.198.852.024,32 maka mengalami penurunan sebesar Rp423.606.738.420,57 atau 49,36% merupakan Defisit atas kegiatan operasional (Basis Akrua), sehingga akan mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

2021	2020
418.194.002.639,50	187.825.837.108,54

Dampak Kumulatif Atas Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar mengurangi Ekuitas Awal tahun 2021 sebesar Rp418.194.002.639,50 Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koreksi Nilai Piutang Tahun 2021 sebesar Rp999.562.616.171,00 Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.287 Rincian koreksi Nilai Piutang

OPD	Koreksi Nilai Piutang	Keterangan
RSUD Bengkulu	(242.027.000,00)	Koreksi lebih catat Piutang BPJS (Klaim yang telah di verifikasi dan di bayarkan BPJS lebih kecil dari piutang Yang dicatat)
		Koreksi kurang catat Piutang Jamkesda
RSUD Kecamatan Mandau	186.505.765,00	Siak (Klaim yang telah di verifikasi dan di bayarkan Jamkesda Siak lebih besar dari piutang Yang dicatat)
	6.767.949,00	Koreksi kurang catat Piutang Jampersal Kab. Siak (Klaim yang telah di verifikasi dan di bayarkan Jampersal Siak lebih besar dari piutang Yang dicatat)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	988.693.754.855,00	Koreksi Nilai Piutang DBH Pusat dikarenakan adanya perubahan Piutang DBH Pusat dari Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 dengan PMK 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 dan PMK 129 TA.2021
	11.015.373.461,00	Koreksi Nilai Piutang DBH Provinsi dikarenakan SK TW 4 bulan desember terbit pada tahun 2021
	100.000.000,00	Koreksi Kurang catat Piutang lain lain (Bantuan Keuangan P3ID Desa Titi Akar Th.2020)
	1.175.318,00	Koreksi kurang catat pajak hotel kurang bayar tahun 2018
	1.154.300,00	Koreksi kurang catat pajak hiburan tahun 2016 dan tahun 2017
	11.353.125,00	Pajak Reklame
	73.215.363,00	Air Tanah 2021
	(77.934.285,00)	Koreksi PPJ Non PLN tahun 2018
	(204.743.106,00)	Koreksi PPJ Non PLN tahun 2019
	(557.375,00)	Koreksi Pajak Reklame tahun 2019
(1.053.250,00)	Koreksi Pajak Reklame tahun 2017	
(303.585,00)	Koreksi Pajak Air Tanah tahun 2019	
(45.288,00)	Koreksi Pajak Air Tanah tahun 2018	
(20.076,00)	Koreksi Pajak Air Tanah tahun 2017	
Total	988.562.616.171,00	

b. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar Rp10.465.257,14 Dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.288 Rincian Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

OPD	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang 2021	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang 2020
RSUD Bengkulu	24.202.700,00	12.950,00
RSUD Kecamatan Mandau	(84.957.206,64)	305.514.200,00
Badan Pendapatan Daerah	50.269.249,50	(18.427.238,10)
Total	(10.465.257,14)	287.096.911,90

Tabel 5.289 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang RSUD Bengkulu

Jenis Piutang	Nilai Penyisihan Piutang 2021	Keterangan
Penyisihan Piutang BPJS	24.202.700,00	Koreksi dikarenakan adanya koreksi lebih catat Nilai Piutang BPJS
Total	24.202.700,00	

Tabel 5.290 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang RSUD Kecamatan Mandau

Jenis Piutang	Nilai Penyisihan Piutang 2021	Keterangan
Penyisihan Piutang Jamkesda Siak	(84.957.206,64)	Koreksi dikarenakan adanya koreksi kurang catat Nilai Piutang Jamkesda Siak



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Total:	(84.957.206,64)
---------------	------------------------

Tabel 5.291 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Badan Pendapatan Daerah

Jenis Piutang	Nilai Penyisihan Piutang 2021	Keterangan
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(577.150,00)	
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(648.950,00)	
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(7.338.444,80)	Koreksi dikarenakan adanya koreksi Nilai Piutang Pajak
Penyisihan Piutang PPJ non PLN	59.441.453,10	
Penyisihan Piutang Hotel	(587.659,00)	
Total	50.289.249,90	

c. Koreksi Nilai Persediaan selama periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.017.740.231,89 Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.292 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

OPD	Koreksi Nilai Aset Tetap 2021	Koreksi Nilai Aset Tetap 2020
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	270,00	0,00
RSUD kecamatan mandau	(1.017.740.501,89)	0,00
Total	(1.017.740.231,89)	0,00

d. Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan pembetulan secara akuntansi agar akun/ pos yang tersaji dalam Laporan Keuangan Entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, Koreksi Nilai Aset pada OPD Tahun 2021 sebesar Rp1.037.563.269,51 Dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.293 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap

OPD	Koreksi Nilai Aset Tetap 2021	Koreksi Nilai Aset Tetap 2020
Dinas Pendidikan	(1.272.566.777,81)	71.440.628.956,00
Dinas Kesehatan	(194.136.875,16)	20.855.929,00
RSUD Bengkulu	(3.322.540,28)	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	(2.927.600,00)	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.127.800,00)	14.576.538.106,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	(6.583.322.992,50)	34.490.878.975,20
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	(29.986.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	(647.640,00)	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	(20.743.115,00)	0,00
Dinas Sosial	(921.000,00)	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(5.404.380,00)	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(230.000,00)	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	(1.390.000,00)	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(450.000,00)	0,00
Dinas Perhubungan	4.266.181.850,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(707.696,00)	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(895.000,00)	(19.910.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	529.598.600,00	1.398.376.560,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.300.000,00)	0,00
Dinas Perikanan	(655.375,00)	(52.400.000,00)
Dinas Perkebunan	-	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	604.378.000,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(1.375.000,00)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sekretariat Daerah	167.137.000,18	7.809.723.440,00
Sekretariat DPRD	140.490.256,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(450.000,00)	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.391.101.750,00	2.544.860.115,00
Badan Pendapatan Daerah	(350.000,00)	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(5.458.041,00)	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	(3.499.250,00)	0,00
Inspektorat	(450.000,00)	0,00
Kantor Camat Bengkulu	(464.535,00)	0,00
Kantor Camat Bantan	(852.125,00)	0,00
Kantor Camat Bukit Batu	(6.129.400,00)	0,00
Kantor Camat Siak Kecil	(301.400,00)	0,00
Kantor Camat Bandar Laksamana	0,00	62.369.400,00
Kantor Camat Rupat	(7.700.000,00)	0,00
Kantor Camat Rupat Utara	(58.536,00)	0,00
Kantor Camat Mandau	(11.019.896,94)	0,00
Kantor Camat Pinggir	(343.750,00)	0,00
Kantor Camat Bathin Solapan	0,00	0,00
Kantor Camat Talang Muandau	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(6.250.000,00)	0,00
PPKD	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	(40.437.200,00)
Total	(1.037.563.289,51)	132.201.518.281,20

Tabel 5.294 Dinas Pendidikan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(1.272.566.777,81)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(1.272.566.777,81)	

Tabel 5.295 Dinas Kesehatan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(194.136.875,16)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(194.136.875,16)	

Tabel 5.296 RSUD Bengkulu

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(3.322.540,28)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(3.322.540,28)	

Tabel 5.297 RSUD Kecamatan Mandau

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(2.927.600,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(2.927.600,00)	

Tabel 5.298 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(1.127.800,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(1.127.800,00)	

Tabel 5.299 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Tanah	(6.583.322.992,50)	Koreksi akibat lebih pencatatan atas nilai tanah pada laporan keuangan tahun 2020
Total	(6.583.322.992,50)	

Tabel 5.300 Dinas Pemadam Kebakaran

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(647.640,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(647.640,00)	

Tabel 5.301 Satuan Polisi Pamong Praja

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(20.743.115,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(20.743.115,00)	

Tabel 5.302 Dinas Sosial

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(921.000,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(921.000,00)	

Tabel 5.303 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(5.404.380,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(5.404.380,00)	

Tabel 5.304 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(230.000,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(230.000,00)	

Tabel 5.305 Dinas Lingkungan Hidup

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(1.390.000,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(1.390.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.306 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Ases Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(450.000,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(450.000,00)	

Tabel 5.307 Dinas Perhubungan

Ases Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(14.165.434,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Jalan Irigasi Jaringan	4.280.347.284,00	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya hasil putusan pengadilan nomor 41/ptd.G/2017/Pn.Bis dan nomor 227/PDT/2018/PT.PBR
Total	4.266.181.850,00	

Tabel 5.308 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Ases Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(707.696,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(707.696,00)	

Tabel 5.309 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ases Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(895.000,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(895.000,00)	

Tabel 5.310 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Ases Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan mesin	533.178.600,00	Koreksi dari LHP BPK 2020
Peralatan dan Mesin	(3.580.000,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	529.598.600,00	

Tabel 5.311 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Ases Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(2.300.000,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(2.300.000,00)	

Tabel 5.312 Dinas Perikanan

Ases Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(655.375,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(655.375,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.313 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Tanah	613.010.500,00	Koreksi akibat kurang pencatatan atas nilai tanah pada laporan keuangan tahun 2020
Peralatan dan Mesin	(8.632.500,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	604.378.000,00	

Tabel 5.314 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(1.375.000,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(1.375.000,00)	

Tabel 5.315 Sekretariat Daerah

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Tanah	195.426.000,00	Koreksi akibat kurang pencatatan atas nilai tanah pada laporan keuangan tahun 2020
Peralatan dan Mesin	(3.871.000,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
KDP	(24.417.999,82)	Koreksi akibat lebih pencatatan atas nilai Kontruksi dalam pengerjaan pada laporan keuangan tahun 2020
Total	167.137.000,18	

Tabel 5.316 Sekretariat DPRD

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(25.499.744,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Peralatan dan Mesin	165.990.000,00	Koreksi akibat kurang pencatatan atas nilai Peralatan dan Mesin pada laporan keuangan tahun 2020
Total	140.490.256,00	

Tabel 5.317 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(450.000,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(450.000,00)	

Tabel 5.318 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Tanah	1.396.540.500,00	Koreksi akibat kurang pencatatan atas nilai tanah pada laporan keuangan tahun 2020
Peralatan dan Mesin	(5.438.750,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Total	1.391.101.750,00
-------	------------------

Tabel 5.319 Badan Pendapatan Daerah

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(350.000,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(350.000,00)	

Tabel 5.320 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(5.458.041,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(5.458.041,00)	

Tabel 5.321 Badan Penelitian dan Pengembangan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(3.499.250,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(3.499.250,00)	

Tabel 5.322 Inspektorat

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(450.000,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(450.000,00)	

Tabel 5.323 Kantor Camat Bengkulu

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(464.535,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(464.535,00)	

Tabel 5.324 Kantor Camat Bantan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(852.125,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(852.125,00)	

Tabel 5.325 Kantor Camat Bukit Batu

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(6.129.400,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(6.129.400,00)	

Tabel 5.326 Kantor Camat Siak Kecil

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
------------	--------	------------



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peralatan dan Mesin	(301.400,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(301.400,00)	

Tabel 5.327 Kantor Camat Rupat

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(7.700.000,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(7.700.000,00)	

Tabel 5.328 Kantor Camat Rupat Utara

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(58.536,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(58.536,00)	

Tabel 5.329 Kantor Camat Mandau

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(11.019.896,94)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(11.019.896,94)	

Tabel 5.330 Kantor Camat Pinggir

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(343.750,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(343.750,00)	

Tabel 5.331 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(6.250.000,00)	Merupakan Koreksi aset tetap yang diakibatkan adanya penghapusan aset dibawah nilai kapitalisasi aset tetap
Total	(6.250.000,00)	

e. Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp373.140.038.393,96 merupakan penyesuaian terkait dengan adanya Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2021, dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 5.332 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan

Jenis Piutang	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2021	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2020
Peralatan dan Mesin	2.542.351.763,19	202.680.958
Gedung dan Bangunan	(13.314.464.036,73)	17.374.935.156
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(418.543.560.133,21)	(176.550.603.869)
Aset Tetap Lainnya	56.175.634.012,79	360.843.587
Total	(373.140.038.393,96)	(158.612.144.168,79)

Tabel 5.333 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Per OPD



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

OPD	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2021	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2020
Dinas Pendidikan	50.924.665.333,70	(1.495.357.283,80)
Dinas Kesehatan	(278.174.648,84)	(366.752.687,00)
RSUD Bengkulu	(87.094.274,72)	7.951.693,00
RSUD Kecamatan Mandau	5.427.350,00	(189.180.310,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(357.790.948.949,60)	(118.050.226.535,78)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	16.810.264.499,49	(20.103.150,99)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(550.848.989,56)	(3.936.468,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	(360.875.031,00)	5.830.484,00
Satuan Polisi Pamong Praja	(188.201.591,83)	69.710.856,00
Dinas Sosial	(9.115.590.850,00)	65.431.787,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(810.695.100,54)	501.510.831,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	167.759.800,00	(2.002.180,00)
Dinas Ketahanan Pangan	279.130.555,56	(1.541.345,00)
Dinas Lingkungan Hidup	(1.347.477.836,27)	830.446.313,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(1.395.895.882,00)	68.695.544,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(831.318.126,00)	1.210.253.507,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(322.486.652,57)	159.822.987,00
Dinas Perhubungan	(48.832.760.865,00)	(43.977.478.802,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(3.530.541,44)	27.849.848,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	(6.556.325,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(70.121.088,00)	(9.665.602,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(2.367.725.228,44)	(2.370.754.866,89)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.372.976.317,82	(358.974.663,00)
Dinas Perikanan	(3.237.625.043,57)	154.395.844,00
Dinas Perkebunan	(717.581.500,00)	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	(2.271.576.792,79)	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(3.832.463.903,00)	154.147.483,00
Sekretariat Daerah	(140.360.971,73)	383.451.024,00
Sekretariat DPRD	5.132.683.346,94	(539.097.066,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	970.778.150,00	61.403.120,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(2.473.613.833,70)	5.259.309.632,00
Badan Pendapatan Daerah	157.133.696,00	6.995.675,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	542.663.133,00	(147.398.287,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	(1.874.577.417,70)	38.049.209,00
Inspektorat	158.450.000,00	0,00
Kantor Camat Bengkulu	(2.625.600.184,03)	511.602.894,00
Kantor Camat Bantan	(570.182.140,00)	(49.919.489,00)
Kantor Camat Bukit Batu	(889.327.785,00)	(256.863.668,00)
Kantor Camat Siak Kecil	(2.585.740.450,62)	(141.555.806,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	0,00	(55.391.693,00)
Kantor Camat Rupal	(845.425.131,36)	(154.742.177,00)
Kantor Camat Rupal Utara	(860.045.142,73)	(14.489.167,00)
Kantor Camat Mandau	(4.817.531.847,39)	89.554.786,67
Kantor Camat Pinggir	(978.035.021,48)	(16.878.446,00)
Kantor Camat Bathin Solapan	149.600,00	(658.527,00)
Kantor Camat Talang Muandau	0,00	(54.584.672,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(588.687.355,56)	4.077.835,00
PPKD	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	61.483.696,00
Total	(373.140.036.393,96)	(158.612.194.168,79)

f. Koreksi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp0,00 dan Koreksi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2020 sebesar Rp15.000.000,00.

g. Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp6.512.500,00 merupakan Koreksi atas kurang pencatatan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 5.334 Rincian Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

OPD	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2021	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2020
Dinas Pendidikan	0,00	18.392.115,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	(11.231.062,00)
Dinas Perikanan	0,00	(70.000,00)
Kantor Camat Bentan	0,00	(7.812.500,00)
Kantor Camat Siak Kecil	(1.562.500,00)	0,00
Kantor Camat Bandar Laksamana	(3.093.750,00)	0,00
Kantor Camat Talang Muandau	(1.856.250,00)	0,00
Total	(6.512.500,00)	(721.447,00)

h. Koreksi Nilai Aset Lain- lain sebesar tahun 2021 sebesar Rp11.469.914.467,00 dapat dilihat pada rincian OPD sebagai berikut:

Tabel 5.335 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

OPD	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain 2021	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain 2020
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(10.514.794.379,00)	0,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	(955.120.068,00)	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	(6.997.500,00)
Total	(11.469.914.467,00)	(6.997.500,00)

i. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain selama periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 dan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain tahun 2020 sebesar Rp6.324.470.748.23.

j. Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka selama periode sampai dengan 31 Desember 2021 Sebesar Rp186.638.836.607,00 merupakan koreksi atas saldo awal pendapatan diterima dimuka yang disebabkan adanya perubahan Piutang DBH Pusat dari Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 dengan PMK 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021.

j. Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2021 sebesar Rp8.049.030.305,00 Dapat dilihat pada rincian OPD sebagai berikut:

Tabel 5.336 Rincian Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga

OPD	2021	Keterangan
-----	------	------------



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kesehatan	1.871.435.275,00	Koreksi nilai hutang dikarenakan hutang tersebut belum sampai tahap SPM sehingga tidak diakui sebagai hutang.
RSUD Bengkalis	203.975.444,00	Koreksi nilai Uang Pihak Ketiga sebesar Rp.203.945.444,00 merupakan koreksi lebih catat akibat Kesalahan perhitungan Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2020
	30.871.500,00	Koreksi Hutang Pihak ketiga dikarenakan adanya pemotongan denda keterlambatan
	(2.280.579.093,00)	Koreksi tersebut dikarenakan adanya pengakuan hutang berdasarkan Keputusan pengadilan nomor 41/pdt.G/2017/Pn.Bls dan nomor 227/PDT/2018/PT.PBR yang menyatakan Tergugat harus membayar sisa dana pekerjaan pembangunan Dermaga
Dinas Perhubungan	(1.999.768.191,00)	Penyeberangan Air putih Koreksi tersebut dikarenakan adanya pengakuan hutang berdasarkan Keputusan pengadilan nomor 41/pdt.G/2017/Pn.Bls dan nomor 227/PDT/2018/PT.PBR yang menyatakan Tergugat harus membayar sisa dana pekerjaan pembangunan Dermaga
	(1.609.500.000,00)	Penyeberangan Sungai Selari Koreksi tersebut dikarenakan adanya pengakuan hutang berdasarkan Keputusan pengadilan nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Bls yang menyatakan Tergugat harus membayar Biaya
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(4.265.465.240,00)	Docking KMP, Tasik Gemilang Koreksi kurang catat Hutang Pihak Ketiga BPJS
Total	(8.049.030.305,00)	

l. Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2021 sebesar Rp1.487.500,00 merupakan Koreksi atas kurang pencatatan Utang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sehingga mengurangi nilai ekuitas.

m. Koreksi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selama periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 dan Koreksi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2020 sebesar Rp2,00.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp9.199.249.753.033,92

2021	2020
9.199.249.753.033,92	9.215.947.863.996,17



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI LAINNYA

6.1 INFORMASI REKENING GIRO YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Rekening Kas Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, rekening bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang dikelola oleh SKPD.

6.2 INFORMASI DEPOSITO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bengkulu menempatkan Deposito pada Bank Riau Kantor Cabang Bengkulu Rp900.000.000.000,00 yang terdiri dari 18 Bilyet dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Daftar Deposito Pemkab Bengkulu Tahun 2021

No.	Tanggal Deposito	Nominal (Rp)	No. Rekening
1.	19 Juli 2021	100.000.000.000,00	108-3000068
		100.000.000.000,00	108-3000069
		100.000.000.000,00	108-3000070
		100.000.000.000,00	108-3000071
		50.000.000.000,00	108-3000072
		50.000.000.000,00	108-3000074
		50.000.000.000,00	108-3000081
		25.000.000.000,00	108-3000075
		25.000.000.000,00	108-3000076
		25.000.000.000,00	108-3000077
		25.000.000.000,00	108-3000078
		25.000.000.000,00	108-3000079
		25.000.000.000,00	108-3000080
2.	09 Agustus 2021	50.000.000.000,00	108-3000082
		50.000.000.000,00	108-3000083
		50.000.000.000,00	108-3000084
		25.000.000.000,00	108-3000085
		25.000.000.000,00	108-3000086
	JUMLAH	900.000.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

6.3 INFORMASI STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)

Secara garis besar, Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu (entitas akuntansi) selama periode pelaporan yakni Tahun 2021 terdiri dari:

- Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mencakup 3 Asisten;
- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat;
- Badan yang mencakup 7 badan;
- Dinas yang mencakup 23 dinas;
- Kantor yang mencakup 1 kantor;
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mencakup 2 RSUD yakni RSUD Bengkulu dan RSUD Kecamatan Mandau;
- Kecamatan yang terdiri dari 11 Kecamatan;

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No. 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Didalam Peraturan Daerah tersebut ditetapkan adanya perubahan terhadap susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2

Daftar OPD pada Pemkab Bengkulu Tahun 2021

No	OPD
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD Kabupaten Bengkulu
4	RSUD Kecamatan Mandau
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Pemadam Kebakaran
9	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
10	Dinas Sosial
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Dinas Ketahanan Pangan
14	Dinas Lingkungan Hidup
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Dinas Perhubungan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	OPD
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Dinas Perikanan
25	Dinas Perkebunan
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
28	Sekretariat Daerah
29	Sekretariat DPRD
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
32	Badan Pendapatan Daerah
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
34	Badan Penelitian dan Pengembangan
35	Inspektorat
36	Kantor Camat Bengkalis
37	Kantor Camat Bantan
38	Kantor Camat Bukit Batu
39	Kantor Camat Siak Kecil
40	Kantor Camat Bandar Laksamana
41	Kantor Camat Rupal
42	Kantor Camat Rupal Utara
43	Kantor Camat Mandau
44	Kantor Camat Pinggir
45	Kantor Camat Bathin Solapan
46	Kantor Camat Talang Muandau
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6.4 Informasi Lainnya

Informasi lainnya pada Pemkab Bengkalis selama periode Tahun 2021 antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis telah mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lain dalam hal Pelayanan Kesehatan yaitu Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Untuk pembayaran klaim Jamkesda dan Jampersal RSUD Mandau dan RSUD Bengkalis termasuk pembebanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. dengan penjelasan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 1) Jaminan Persalinan
Terdapat tagihan pembayaran klaim kepada Rumah Sakit Arifin Achmad, RSUD Siak, RSUD Dumai sebesar Rp60.333.434,00. dan terdapat pembebanan kepada RSUD Mandau dan RSUD Bengkalis sebesar Rp151.689.643,00.
 - 2) Jaminan Kesehatan Daerah
Terdapat Tagihan pembayaran klaim Kepada Rumah Sakit Arifin Achmad, RSUD Dumai serta BPJS sebesar Rp1.838.922.579,00. dan terdapat pembebanan kepada RSUD Mandau dan RSUD Bengkalis sebesar Rp3.085.455.514,00.
 - 3) Sejak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di tetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan Dana Non Kapitasi dari Bulan November 2021 dilimpahkan langsung ke rekening Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masing-masing Puskesmas dan diakui sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Seluruh penerimaan Dana Non Kapitasi per 31 Desember 2021 sudah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan total nilai sebesar Rp158.906.900,00.
 - 4) Terdapat tagihan pembebanan yang tidak memiliki SPM yaitu berupa:
 - Belanja Iuran Premi BPJS-PBPU Kelas 3 Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.872.905.275,00
 - Bantuan transportasi petugas vaksinator ke pos-pos imunisasi Desa/ Kelurahan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas sebesar Rp.858.750.000,00
 - Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar sebesar Rp.80.000.000,00 dan
 - Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebesar Rp.59.780.000.000,00
- b. Adanya penambahan jumlah hari kerja pada OPD :
- 1) Dinas PUPR untuk 8 paket pekerjaan dengan total nilai Rp5.288.847.906,28. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2022 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
 - 2) Dinas Kesehatan untuk 5 paket pekerjaan dengan total nilai Rp7.078.034.209,45. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2022 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
 - 3) Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan untuk 9 paket pekerjaan dengan total nilai Rp4.469.870.696,38. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2022 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.

- c. Adanya Utang Jasa pelayanan untuk Dokter dan Karyawan RSUD Bengkalis sebesar Rp.8.348.907.705,00 yang tidak diakumulasikan kedalam neraca dikarenakan angka dari Utang tersebut masih dalam proses perhitungan.

6.5 Pandemi Covid-19

Dengan adanya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia di awal tahun 2020 hingga saat ini menimbulkan potensi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis antara lain:

- a. Tingkat ketertagihan piutang Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan kendala perekonomian yang mengalami hambatan akibat adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bengkalis.
- b. Dalam rangka penanganan Covid-19 tahun 2021, Pemerintah Bengkalis telah melakukan *refocussing* anggaran melalui beberapa kali pergeseran yang dituangkan dalam perubahan penjabaran APBD. sebagaimana disajikan pada tabel 6.3.

Tabel 6.3
ANGGARAN DAN REALISASI PENANGANAN COVID-19
BERDASARKAN REFOCUSING 8% DARI DAU DAN DBH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

No.	Uraian Alokasi Anggaran Refocusing	Anggaran	Realisasi	%
I.	Bidang Kesehatan	356.848.635.238,00	314.454.099.987,65	88,12%
I.1	Penanganan Covid-19	50.333.787.901,00	41.462.276.570,00	82,37%
I.2	Dukungan Vaksinasi	8.362.532.700,00	7.122.968.700,00	85,18%
I.3	Dukungan pada kelurahan dan kecamatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	8.231.193.000,00	6.781.800.500,00	82,39%
I.4	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19	23.210.594.499,00	20.914.938.366,00	90,11%
I.5	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas	266.710.527.138,00	238.172.115.851,65	89,30%
II.	Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi	45.006.987.925,00	40.000.590.562,50	88,88%
III.	Bantuan Sosial Safety Net/Jaring Pengaman Sosial	40.116.573.700,00	35.511.876.204,00	88,52%
Total Penyesuaian/Refocusing APBD TA 2021 (Earmarked 8% DBH/DAU)		441.972.196.863,00	389.966.566.754,15	88,23%



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 6.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENANGANAN COVID-19
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PER OPD

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Kesehatan	158.875.858.373,00	136.718.860.374,01	86,05
2	RSUD Bengkulu	96.450.028.177,00	86.846.628.340,23	90,04
3	RSUD Kec. Mandau	87.615.642.288,00	80.081.799.804,41	91,40
4	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	0,00	0,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.698.410.400,00	1.384.068.800,00	81,49
6	Dinas Perhubungan	1.263.000.000,00	1.194.780.000,00	94,60
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.431.353.000,00	1.313.322.000,00	54,02
8	Inspektorat	283.150.000,00	132.840.169,00	46,92
9	Kecamatan Bengkulu	426.530.000,00	425.930.000,00	99,86
10	Kecamatan Bantan	354.518.000,00	333.318.000,00	94,02
11	Kecamatan Bukit Batu	332.424.000,00	249.246.000,00	74,98
12	Kecamatan Siak Kecil	380.700.000,00	334.985.000,00	87,99
13	Kecamatan Bandar Laksamana	233.142.000,00	233.142.000,00	100,00
14	Kecamatan Rupal	759.521.000,00	721.400.000,00	94,98
15	Kecamatan Rupal Utara	346.478.000,00	308.240.000,00	88,96
16	Kecamatan Mandau	3.735.441.000,00	2.887.327.000,00	77,30
17	Kecamatan Pinggir	884.535.000,00	619.590.500,00	70,05
18	Kecamatan Bathin Solapan	384.322.000,00	364.922.000,00	94,95
19	Kecamatan Talang Muandau	393.582.000,00	303.700.000,00	77,16
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	14.145.821.500,00	12.559.637.684,79	88,79
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	638.284.900,00	612.548.000,00	95,97
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.265.286.700,00	3.516.762.700,00	82,45
23	Dinas Ketahanan Pangan	951.049.600,00	899.426.200,00	94,57
24	Dinas Perkebunan	4.765.254.600,00	4.356.657.707,71	91,43
25	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	7.017.565.325,00	6.497.522.228,00	92,59
26	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8.489.891.000,00	7.332.283.530,00	86,36
27	Dinas Perikanan	4.733.834.300,00	4.225.752.512,00	89,27
28	Dinas Sosial	40.116.573.700,00	35.511.876.204,00	88,52
	JUMLAH	441.972.196.863,00	389.966.566.754,15	88,23



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakandalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, bahwa Gubernur/Walikota/Bupati bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Kemudian, khusus untuk pengelolaan keuangan daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan selanjutnya secara teknis Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah berupaya untuk mewujudkan amanah sebagaimana aturan perundang-undangan tersebut.

Untuk laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengonsolidasikan laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam satu set laporan keuangan, yang terdiri dari 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis berusaha memberikan informasi yang andal, transparan dan akuntabel.

Untuk memenuhi amanah peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 (*unaudited*) yang disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan Laporan Keuangan melalui proses konversi, mengingat adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan persediaan dan pengelolaan pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus menyinergikan regulasi peraturan perundang-undangan, dan yang paling penting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset. Prioritas pertama yang harus segera dibenahi Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas fungsi pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Disamping pembenahan sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya yang ditingkatkan adalah kualitas dan kuantitas sistem pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan penyempurnaan aturan-aturan yang disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih memadai dan berkualitas.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa berbagai hal perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Khusus untuk pengelolaan barang milik daerah (aset), Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 telah melakukan inventarisasi terhadap aset tetap pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengelolaan piutang di SKPD perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan validasi terhadap data-data piutang pada SKPD yang memiliki data piutang. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian utama dengan melakukan pendataan, validasi data dan meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Koordinasi secara berkesinambungan harus terus ditingkatkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun ditingkat SKPD, terutama koordinasi antara pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset demi mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Bengkalis, Mei 2022

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos, MMP



**PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS**

**LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN KAS DI KASDA
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Ref.	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
Saldo Awal		144.649.973.804,01		144.649.973.804,01
Penerimaan		3.900.260.608.207,72		4.124.710.602.015,73
Setoran UYHD 2020		1.878.970.420,00		4.126.789.552.433,73
Setoran UYHD 2020		24.660.474.804,00		4.151.450.027.237,73
Belanja (SP2D)			2.985.004.743.949,36	1.166.445.283.290,37
Setoran Sisa JKN		2.106.763.776,00		1.168.552.049.066,37
Penyembalian Kasalihan Seter BPHTB Tahun 2020			3.500.000,00	1.168.548.549.066,37
Kasalahan Pemotongan Pajak PPh		3.300.000,00	3.300.000,00	1.168.548.549.066,37
Dobet posting SP2D-15/04/2021 ROP KB Amanah Bunda Slak Kecil		5.700.000,00		1.168.554.249.066,37
Kelebihan dana Bantuan Khusus Prov. Riau		54.840,00	54.840,00	1.168.554.249.066,37
Salah Seter Dana BLT Desa Bulan Mei 2021- Nurihidayu Darah Tersida		1.800.000,00	1.800.000,00	1.168.554.249.066,37
Salah Seter retribusi Pemokalan Kurangan		1.000.000,00	1.000.000,00	1.168.554.249.066,37
Salah Seter Dana POS-Ti 2021 SD It Al Huda Dws		21.613.000,00	21.613.000,00	1.168.554.249.066,37
Salah Seter BPHTB Tahun 2020		3.500.000,00		1.168.557.749.066,37
		4.153.893.659.055,73	2.985.035.909.999,36	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 31 DESEMBER 2021

NO. (1)	NAMA SKPD (2)	SALDO AWAL (3)	MUTASI 2021		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2021 (6)
			PENAMBAHAN (4)	PENGURANGAN (5)	
1	Badan Pendapatan Daerah		1.758.070,00		1.758.070,00
	JUMLAH	0,00	1.758.070,00		1.758.070,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN MUTASI PIUTANG RETRIBUSI
TAHUN ANGGARAN 2021

Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Mutasi kurang/ Tambah
Piutang Retribusi HO Golongan	2.575.801.820,50	2.575.801.820,50	0,00
Jumlah	2.575.801.820,50	2.575.801.820,50	0,00

RSUD Bengkulu

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Mutasi Tambah/Kurang
Jasa umum Pasien 2011	12.706.150,00	12.706.150,00	0,00
Jumlah	12.706.150,00	12.706.150,00	0,00

RSUD Kecamatan Mandau

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Mutasi Tambah/Kurang
BPJS Kesehatan	280.259.100,00	280.259.100,00	0,00
BPJS Ketanagakerjaan	2.803.828,00	2.803.828,00	0,00
Jumlah	283.062.928,00	283.062.928,00	0,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Mutasi kurang/ Tambah
Retribusi HO Golongan	426.426.125,00	426.426.125,00	0,00
Jumlah	426.426.125,00	426.426.125,00	0,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Mutasi kurang/ Tambah
Piutang retribusi pasar grosir/pertokoan.	1.006.925.500,00	905.925.500,00	101.000.000,00
Piutang retribusi jasa usaha pelayanan pasar	7.500.000,00	7.500.000,00	-
Jumlah	1.014.425.500,00	905.925.500,00	101.000.000,00

Dinas Lingkungan Hidup

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Mutasi kurang/ Tambah
Piutang Retribusi Limbah Cair	3.517.300,00	3.517.300,00	-
Jumlah	3.517.300,00	3.517.300,00	0,00

Dinas Perhubungan

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Mutasi kurang/ Tambah
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	490.000.000,00	490.000.000,00	-
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	779.711.646,00	764.551.746,00	15.159.900,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	116.100.000,00	116.100.000,00	-
Jumlah	1.385.811.646,00	1.370.651.746,00	15.159.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
REKAPITULASI PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Pendidikan	7.850.879.699,81	7.853.533.099,81	(2.653.400,00)
Dinas Kesehatan	22.831.485.143,89	17.532.856.457,18	5.298.628.686,71
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	7.451.972.262,00	10.152.386.492,00	(2.700.414.230,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	12.653.060.436,02	12.820.977.128,40	(167.916.692,38)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.295.773.986,73	145.408.815.946,55	(130.113.041.959,82)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	12.249.735.163,00	2.783.460.163,00	9.466.275.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.338.100,00	202.868.700,00	(201.530.600,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	2.950.000,00	2.127.000,00	823.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.897.700,00	3.611.800,00	285.900,00
Dinas Sosial	4.151.900,00	1.330.000,00	2.821.900,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	643.855.128,00	635.981.888,00	7.873.240,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	358.000,00	1.504.000,00	(1.146.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan	496.181.000,00	387.386.500,00	108.794.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.058.000,00	1.271.700,00	(213.700,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.954.029.450,00	633.393.950,00	1.320.635.500,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.953.300,00	3.895.000,00	8.058.300,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	313.410.016,75	671.614.369,00	(358.204.352,25)
Dinas Perhubungan	573.535.960,00	232.456.860,00	341.079.100,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.830.000,00	5.113.900,00	(1.283.900,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	702.100,00	1.249.600,00	(547.500,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.875.400,00	2.373.100,00	502.300,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.245.700,00	1.094.500,00	1.151.200,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.818.400,00	770.000,00	1.048.400,00
Dinas Perikanan	15.116.500,00	122.371.045,00	(107.254.545,00)
Dinas Perkebunan	117.726.860,00		117.726.860,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	121.293.928,00		121.293.928,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.530.800,00	9.240.800,00	(7.710.000,00)
Sekretariat Daerah	13.184.940,23	9.045.859,23	4.139.081,00
Sekretariat DPRD	7.537.400,00	9.249.600,00	(1.712.200,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.140.200,00	1.142.600,00	(2.400,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	831.600.734,61	850.269.664,61	(18.668.930,00)
Badan Pendapatan Daerah	2.939.800,00	5.255.400,00	(2.315.600,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	708.800,00	652.000,00	56.800,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	15.707.100,00	7.011.100,00	8.696.000,00
Inspektorat	2.587.600,00	3.333.329,00	(745.729,00)
Kecamatan Bengkulu	78.000,00	85.200,00	(7.200,00)
Kecamatan Bantan	2.562.000,00	2.826.630,00	(264.630,00)
Kecamatan Bukit Batu	683.800,00	651.400,00	32.400,00
Kecamatan Siak Kecil	7.842.730,00	6.909.500,00	933.230,00
Kecamatan Bandar Laksamana	777.300,00	838.200,00	(60.900,00)
Kecamatan Rupal	591.500,00	643.400,00	(51.900,00)
Kecamatan Rupal Utara	4.352.000,00	4.966.300,00	(614.300,00)
Kecamatan Mandau	12.347.100,00	2.334.400,00	10.012.700,00
Kecamatan Pinggir	2.605.000,00	2.180.500,00	424.500,00
Kecamatan Bathin Solapan	4.710.100,00	1.761.500,00	2.948.600,00
Kecamatan Talang Muandau	23.854.500,00	2.825.000,00	21.029.500,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.509.750,00	9.405.600,00	(3.895.850,00)
Dinas Pertanian	-	12.252.708,00	(12.252.708,00)
Jumlah	83.548.085.289,04	200.405.323.889,78	(116.857.238.600,74)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PER 31 DESEMBER 2021

No	Nama Perusahaan	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir
1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bengkalis	1,00		(1,00)	0,00
2	PT. Riau Airlines	8.000.000.000,00			8.000.000.000,00
3	PT. Bank Riau	131.606.200.000,00			131.606.200.000,00
4	PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis	378.937.948.762,00	629.948.672,00		378.308.000.090,00
5	PT SJMT Bengkalis	1,00		(1,00)	0,00
Jumlah			629.948.672,00		139.914.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2021

TANAH

No	SKPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Dinas Pendidikan	178.593.350.223,97	178.393.881.625,27	199.468.598,70
2	Dinas Kesehatan	23.435.640.160,09	23.435.640.160,09	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	181.705.111.389,54	181.705.111.389,54	0,00
6	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	69.964.029.983,30	76.547.352.975,80	-6.583.322.992,50
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	740.852.417,00	740.852.417,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran	459.475,00	459.475,00	0,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
10	Dinas Sosial	10.285.725.010,00	10.285.725.010,00	0,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	374.801.559,00	374.801.559,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.346.125.000,00	1.346.125.000,00	0,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	648.225.000,00	648.225.000,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	6.767.065.066,66	6.767.065.066,66	0,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.400.125.669,34	19.400.125.669,34	0,00
16	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.001.484.000,00	1.001.484.000,00	0,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	373.525.000,00	373.525.000,00	0,00
18	Dinas Perhubungan	26.329.412.889,38	26.329.412.889,38	0,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	122.500.000,00	122.500.000,00	0,00
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	232.513.760,00	232.513.760,00	0,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	337.500.000,00	337.500.000,00	0,00
22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	79.863.321.013,47	76.203.349.644,40	3.659.971.369,07
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.011.095.000,00	3.011.095.000,00	0,00
24	Dinas Perikanan	462.557.200,00	462.557.200,00	0,00
25	Dinas Perkebunan			0,00
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	2.758.916.100,00		2.758.916.100,00
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	22.294.474.155,00	22.294.474.155,00	0,00
28	Sekretariat Daerah	63.996.434.940,00	63.801.008.940,00	195.426.000,00
29	Sekretariat DPRD	7.804.400.000,00	7.804.400.000,00	0,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.217.600.000,00	2.217.600.000,00	0,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	348.536.880.274,76	350.800.311.143,83	-2.263.430.869,07
32	Badan Pendapatan Daerah	1.370.500.000,00	1.370.500.000,00	0,00
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.009.050.000,00	4.009.050.000,00	0,00
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	3.049.955.000,00	3.049.955.000,00	0,00
35	Inspektorat	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
36	Kecamatan Bengkulu	1.281.372.369,00	1.281.372.369,00	0,00
37	Kecamatan Bantan	1.456.520.000,00	1.456.520.000,00	0,00
38	Kecamatan Bukit Batu	3.046.584.000,00	3.046.584.000,00	0,00
39	Kecamatan Siak Kecil	3.339.364.000,00	3.339.364.000,00	0,00
40	Kecamatan Bandar Laksamana	1.227.647.722,00	1.227.647.722,00	0,00
41	Kecamatan Rupal	2.646.383.220,00	2.646.383.220,00	0,00
42	Kecamatan Rupal Utara	193.396.950,00	193.396.950,00	0,00
43	Kecamatan Mandau	13.982.798.800,00	13.982.798.800,00	0,00
44	Kecamatan Pinggir	3.216.718.000,00	3.216.718.000,00	0,00
45	Kecamatan Bathin Solapan	7.609.976.000,00	7.609.976.000,00	0,00
46	Kecamatan Talang Muandau	331.960.000,00	331.960.000,00	0,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	293.760.000,00	293.760.000,00	0,00
48	Dinas Pertanian		2.145.905.600,00	-2.145.905.600,00
Jumlah		1.113.920.111.347,51	1.118.098.988.741,31	(2.032.971.793,80)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2021

PERALATAN DAN MESIN

No	SKPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Dinas Pendidikan	345.883.284.809,85	324.717.955.455,56	21.165.329.354,29
2	Dinas Kesehatan	124.843.309.705,34	111.226.101.423,50	13.617.208.281,84
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	243.549.537.212,85	218.712.163.036,57	24.837.374.176,28
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	178.430.872.494,14	169.393.292.051,67	9.037.580.442,47
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53.643.302.710,85	49.267.653.262,10	4.375.649.448,75
6	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	11.886.379.333,86	12.277.219.333,86	-390.840.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.713.955.775,92	7.932.894.728,36	781.061.047,56
8	Dinas Pemadam Kebakaran	25.130.681.935,22	23.518.617.775,22	1.612.064.160,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	7.569.145.113,40	7.258.643.521,57	310.501.591,83
10	Dinas Sosial	9.478.625.575,07	8.401.437.075,07	1.077.188.500,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.343.660.817,11	11.270.240.897,11	73.419.920,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.299.295.400,23	4.219.933.700,23	79.361.700,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	6.050.998.783,89	6.131.303.339,45	-80.304.555,56
14	Dinas Lingkungan Hidup	48.360.182.189,60	47.092.867.385,60	1.267.314.804,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.822.585.083,68	13.708.757.883,68	3.113.827.200,00
16	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.980.467.590,83	11.967.389.190,83	13.078.400,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.550.493.513,74	4.600.218.090,27	950.275.423,47
18	Dinas Perhubungan	78.523.243.407,71	76.946.793.041,71	1.576.450.366,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	11.581.492.798,04	10.239.731.200,60	1.341.761.597,44
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.098.927.735,12	6.657.560.735,12	441.367.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.096.014.712,09	7.867.772.012,09	228.242.700,00
22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	13.923.762.073,66	12.978.501.973,66	945.260.100,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.319.783.857,64	11.633.067.957,64	686.715.900,00
24	Dinas Perikanan	10.355.934.788,42	9.633.882.663,42	722.052.125,00
25	Dinas Perkebunan	1.975.895.900,00		1.975.895.900,00
26	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	30.958.515.355,73		30.958.515.355,73
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.714.167.762,71	12.686.793.862,71	1.027.373.900,00
28	Sekretariat Daerah	273.712.119.436,01	266.167.609.587,28	7.544.509.848,73
29	Sekretariat DPRD	47.842.323.256,33	48.065.427.743,60	-223.104.487,27
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.742.314.880,24	10.869.129.680,24	873.185.200,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	95.699.335.489,91	84.351.626.434,21	11.347.709.055,70
32	Badan Pendapatan Daerah	18.341.705.091,71	16.640.621.221,71	1.701.083.870,00
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	12.148.983.443,85	12.421.556.084,85	-272.572.641,00
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	11.082.286.841,01	10.755.196.091,01	327.090.750,00
35	Inspektorat	6.773.624.118,25	6.315.869.118,25	457.755.000,00
36	Kecamatan Bengkulu	4.701.661.545,47	4.857.170.872,47	-155.509.327,00
37	Kecamatan Bantan	3.863.152.634,73	3.698.988.759,73	164.163.875,00
38	Kecamatan Bukit Batu	4.267.868.734,00	3.864.723.134,00	403.145.600,00
39	Kecamatan Siak Kecil	4.432.327.636,66	4.275.789.036,66	156.538.600,00
40	Kecamatan Bandar Laksamana	3.090.432.967,00	2.313.285.805,00	777.147.162,00
41	Kecamatan Rupal	5.656.457.327,54	4.780.976.577,54	875.480.750,00
42	Kecamatan Rupal Utara	5.468.643.230,17	5.170.949.766,17	297.693.464,00
43	Kecamatan Mandau	13.875.344.740,54	11.035.773.137,48	2.839.571.603,06
44	Kecamatan Pinggir	5.452.956.851,70	5.365.202.601,70	87.754.250,00
45	Kecamatan Bathin Solapan	2.601.699.190,00	1.894.419.290,00	707.279.900,00
46	Kecamatan Talang Muandau	3.661.274.010,00	3.280.855.610,00	380.418.400,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.392.188.298,36	3.762.965.942,80	629.222.355,56
48	Dinas Pertanian		30.707.709.855,73	-30.707.709.855,73
	Jumlah	1.840.891.216.160,18	1.720.936.637.948,03	119.954.578.212,15



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2021

Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Dinas Pendidikan	1.069.780.292.223,28	1.006.396.556.154,68	63.383.736.068,60
2	Dinas Kesehatan	180.838.405.343,35	166.447.064.169,23	14.391.341.174,12
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	133.968.063.058,85	123.426.063.254,00	10.541.999.804,85
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	121.801.134.328,29	117.369.471.038,04	4.431.663.290,25
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.843.305.026,97	80.620.453.591,00	6.222.851.435,97
6	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	56.994.824.218,58	56.233.127.802,58	761.696.416,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.272.567.532,75	5.624.314.597,75	648.252.935,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran	3.648.930.445,00	3.241.679.600,00	407.250.845,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	4.415.044.309,83	4.415.044.309,83	0,00
10	Dinas Sosial	34.040.570.824,65	32.570.022.479,65	1.470.548.345,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.178.759.463,17	30.018.131.784,81	1.160.627.678,36
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.412.535.258,11	7.412.535.258,11	0,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	5.762.986.203,97	5.364.480.203,97	398.506.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	48.122.505.140,45	48.122.505.140,45	0,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.851.975.842,59	15.491.003.582,59	2.360.972.260,00
16	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31.985.615.273,80	31.985.615.273,80	0,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.246.982.246,97	5.641.121.371,87	605.860.875,10
18	Dinas Perhubungan	175.500.986.394,60	169.694.922.631,17	5.806.063.763,43
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.057.772.578,37	2.057.772.578,37	0,00
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.978.672.034,00	10.978.672.034,00	0,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.178.844.418,00	7.069.072.418,00	109.772.000,00
22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	167.843.672.324,53	163.912.545.864,53	3.931.126.460,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23.744.937.402,06	22.706.137.541,84	1.038.799.860,22
24	Dinas Perikanan	19.395.299.682,05	19.300.620.682,05	94.679.000,00
25	Dinas Perkebunan	-	0,00	0,00
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	46.130.566.522,13	0,00	46.130.566.522,13
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	147.828.709.275,96	139.659.275.911,17	8.169.433.364,79
28	Sekretariat Daerah	167.823.504.881,51	159.775.184.846,51	8.048.320.035,00
29	Sekretariat DPRD	53.948.454.360,09	51.567.854.501,61	2.380.599.858,48
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.201.894.309,62	11.936.200.309,62	2.265.694.000,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	374.867.042.497,49	377.651.413.497,49	-2.784.371.000,00
32	Badan Pendapatan Daerah	11.713.196.959,41	11.406.477.350,00	306.719.609,41
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	15.665.094.365,18	15.536.782.365,18	128.312.000,00
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.211.283.101,91	12.389.576.101,91	821.707.000,00
35	Inspektorat	3.900.145.700,00	3.900.145.700,00	0,00
36	Kecamatan Bengkalis	17.126.191.528,59	16.631.202.128,59	494.989.400,00
37	Kecamatan Bantan	15.394.939.602,73	15.079.627.370,73	315.312.232,00
38	Kecamatan Bukit Batu	25.288.549.980,00	25.098.230.980,00	190.319.000,00
39	Kecamatan Siak Kecil	12.047.440.360,92	11.834.526.260,92	212.914.100,00
40	Kecamatan Bandar Laksamana	370.386.110,64	0,00	370.386.110,64
41	Kecamatan Rupert	33.643.553.128,19	32.974.805.828,19	668.747.300,00
42	Kecamatan Rupert Utara	16.991.937.152,57	16.905.987.152,57	85.950.000,00
43	Kecamatan Mandau	34.591.335.314,97	33.568.069.120,26	1.023.266.194,71
44	Kecamatan Pinggir	16.588.233.396,53	15.718.182.396,53	870.051.000,00
45	Kecamatan Bathin Solapan	-	0,00	0,00
46	Kecamatan Talang Muandau	-	0,00	0,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.836.537.220,00	2.836.537.220,00	0,00
48	Dinas Pertanian	-	44.432.419.738,13	-44.432.419.738,13
	Jumlah	3.278.033.677.342,66	3.135.001.432.143,73	143.032.245.200,93

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2021



JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN

No	SKPD	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenalkan/ Penurunan
1	Dinas Pendidikan	3.937.046.086,00	3.937.046.086,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	503.972.708,00	503.972.708,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	629.693.000,00	629.693.000,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.686.318.606.526,20	6.391.113.191.542,12	295.205.414.984,08
6	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	2.006.085.646.823,95	1.967.898.910.532,62	38.186.736.291,33
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	727.155.900,00	727.155.900,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran	74.359.300,00	0,00	74.359.300,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	4.916.451.609,10	4.916.451.609,10	0,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.644.247.074,29	5.464.432.181,33	179.814.892,96
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	4.727.692.918,51	4.167.948.918,51	559.744.000,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.872.485.750,00	1.872.485.750,00	0,00
16	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Perhubungan	284.998.702.838,02	279.283.224.135,46	5.715.478.702,56
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	5.724.964.989,44	4.728.126.789,44	996.838.200,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	216.249.225,49	216.249.225,49	0,00
24	Dinas Perikanan	13.081.931.813,94	12.353.701.813,94	728.230.000,00
25	Dinas Perkebunan	3.451.871.685,71	0,00	3.451.871.685,71
26	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	47.348.224.831,56	0,00	47.348.224.831,56
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.244.138.598,86	8.244.138.598,86	0,00
28	Sekretariat Daerah	1.918.696.287,58	1.918.696.287,58	-0,00
29	Sekretariat DPRD	2.095.187.717,78	2.095.187.717,78	0,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	60.152.675.965,18	60.152.675.965,18	0,00
32	Badan Pendapatan Daerah	59.716.600,00	59.716.600,00	0,00
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	160.973.338,46	160.973.338,46	0,00
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.023.356.277,00	824.066.277,00	199.290.000,00
35	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Bengkalis	31.225.697.250,16	30.811.551.250,16	414.146.000,00
37	Kecamatan Bantan	12.330.971.364,01	12.330.971.364,01	0,00
38	Kecamatan Bukit Batu	15.095.769.463,00	15.066.137.463,00	29.632.000,00
39	Kecamatan Siak Kecil	10.526.541.664,69	10.526.541.664,69	0,00
40	Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Rupat	31.141.989.583,38	30.639.196.583,38	502.793.000,00
42	Kecamatan Rupat Utara	9.913.120.050,82	9.913.120.050,82	0,00
43	Kecamatan Mandau	51.198.260.354,66	50.345.958.643,40	852.301.711,26
44	Kecamatan Pinggir	21.891.635.529,96	21.692.615.529,96	199.020.000,00
45	Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
46	Kecamatan Talang Muandau	0,00	0,00	0,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
48	Dinas Pertanian	0,00	42.771.172.738,56	-42.771.172.738,56
	(jumlah)	9.327.286.533.125,75	8.975.413.810.264,85	351.872.722.860,90



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2021

No	Uraian	Nama Perusahaan / Penerima	Saldo / Jumlah	Kategori Bermanfaat	Perkiraan (TA 2021)	Perkiraan (TA 2022)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Dinas Pendidikan							
1	Tambahan Ruang Kelas (TRK) SDN 61 Kecamatan Mandau	CV. Fitra	40.055.300,00				40.055.300,00
2	Unit Sekolah Baru (USB) TPA Al-Amaliyah RT 02 RW 10 Desa Patahi Duru	CV. Sumber Tenaga	38.875.200,00				38.875.200,00
3	Penyelesaian Pembangunan Ruang Pustaka SDN 23 Tanjung Gadai Kecamatan Tobing Tinggi	Kop. Mula Pratama	12.242.000,00				12.242.000,00
4	Penyelesaian Pembangunan RDG SDN 33 Dedap Type 45	CV. Tarik Seroi	99.300.000,00				99.300.000,00
5	Pembangunan RDG Type 45 SDN 16 Bandar Jaya 2 Unit Kec. Siak Kecil	CV. Ade Saimah	12.688.000,00				12.688.000,00
6	Tambahan Ruang Kelas (TRK) SDN 25 Kecamatan Pinggir	CV. Sri Wulan	1.841.675,00				1.841.675,00
7	Pengadaan Bahan Ajar Keselamatan dan Ketahanan Lintas	CV. Pajar Harapan	200.000,00				200.000,00
8	Pembangunan Tambahan Ruang Kelas (TRK) MDA Baburahaman Jl. Polita 3 RT 01 RW 07 Kelurahan	CV. Febri Jaya	9.366.995,00				9.366.995,00
Dinas Perhubungan							
1	Penyelesaian pembangunan seloger Jl. Cik Dagang Desa Mekong Kec. Tebing Tinggi Barat	CV. Tunji Karya	240.100.000,00				240.100.000,00
2	Pembangunan stager desa Cantai Kec. Merbau	CV. Dendr Kurnia	47.948.600,00				47.948.600,00
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang							
1	Peningkatan sarana air bersih Kec. Bengkulu	PT. Nindra Kawa	571.200.000,00				571.200.000,00
2	Sisa pembayaran konsultan pengawas pembangunan	PT. Gusa Nusantara	27.000.000,00				27.000.000,00
3	Perencanaan pembangunan pagar gedung pemerintah	CV. Mitra Rina Leslari	100.000,00				100.000,00
Dinas Pasar Ketersediaan dan Perlindungan							
1	Pembangunan pagar TPU Almutimin Desa Tonggayan Kec. Bukit batu	CV. Putra Utami	4.237.160,00				4.237.160,00
2	Pembangunan pagar beton TPU RT06 desa Buruk Bakul Kec. Bukit batu	CV. Terminal Sumudra Teknik	6.686.030,00				6.686.030,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Belanja jasa konsultan pengawasan Kec. Siak Kecil	CV. Ama Techno Consultant	9.877.000,00				9.877.000,00
2	Pembangunan Jembatan Sifat Morong	PT. Sumaja Cipta Beton Konstruktama	1.613.974.000,00				1.613.974.000,00
3	Pembangunan Jembatan Papabak	PT. Teisa Mandiri	81.283.000,00				81.283.000,00
4	Pembangunan Jembatan Menin 1 (Bentang 20 M)	PT. Indra Sejati	135.077.000,00				135.077.000,00
5	Belanja jasa konsultan pengawasan	CV. Bina Usaha Consultant	1.884.000,00				1.884.000,00
6	Belanj Lantai Jembatan RT 02 RW 04 Gang Riaki Jalan Nusantara, Jembatan Beton 1 Unit Kecamatan	CV. Mega Prima	4.465.300,20				4.465.300,20
7	Peningkatan Jalan Menuju RPC Desa Sepotong	PT. Daya Berkarya	34.205.055,00				34.205.055,00
8	Peningkatan Jalan Teluk Lantah Menuju Masim	PT. Bina Riau Sejahtera	190.141.550,00				190.141.550,00
9	Peningkatan Jalan Pelajar Jalan Arah Air dan Jalan Perumba	PT. Anugrah Pinang	377.300,00				377.300,00
10	Konsultan pengawasan	CV. Omaha Adi Gupta Konsultan	32.954.000,00				32.954.000,00
11	Pengawasan	CV. Bina Usaha Consultant	3.920.000,00				3.920.000,00
12	Justifikasi Perencanaan Kec. Rupa Utara	PT. Ace Studio	9.000.000,00				9.000.000,00
13	Pengawasan Kec. Rupa Utara	PT. Ace Studio	28.000.000,00				28.000.000,00
14	Pengawasan Kec. Tebing Tinggi	CV. Mediam Consultant	2.475.000,00				2.475.000,00
15	Pengawasan lain Pekerjaan pemk Turap beton jalan perumki desa alai Kec. Tebing Tinggi Barat	PT. Figure Pratama Konsultan	1.976.700,00				1.976.700,00
16	Konsultan Pengawasan	PT. Geometrik Teknik	2.119.755,00				2.119.755,00
17	Pintu klep besar melai Kec. Rangsang Barat	CV. Haska Dwi Putra	69.237.000,00				69.237.000,00
18	Pembangunan pintu klep besar bernilai 1 unit Kec. Bantan	CV. Terubuk Jaya	4.934.500,00				4.934.500,00
19	Pelab tanggul peci segitimg/sulurno jerum desa pegomang 4000 M x 5 M	CV. Technido	27.536.600,00				27.536.600,00
20	Pengawasan Kec. Bengkulu	CV. Prioritas Konsultan	4.600.000,00				4.600.000,00
21	Unji. Pemb. Turap cik mac aya konstruksi sand bag 673 M Kec. Bengkulu	PT. Putra Maly Teknologi	178.594,00				178.594,00
22	dan proteksi abrasi system concrete matras hydrostatic filter (polyacry) dan reklamasi nepanjang	PT. Lahan Hijau Inhil Utama	1.451.857,00				1.451.857,00
23	Pembangunan Turap penahan gelombang konstruksi sand bag desa bantan air kec. Bantan	PT. Karya Utama Sekti	204.998.954,16				204.998.954,16
24	Pengawasan Kec. Merbau	CV. Mega Oscanindo	2.637.850,00				2.637.850,00
25	Pembangunan Turap Beton Jalan Utama Desa Dedap	PT. Babor Indah	6.633.933,00				6.633.933,00
26	Pembangunan Turap Penahan Gelombang Konstruksi Batu Susun 500 m Kec. Merbau	PT. Rantau Perjuangan	238.745,20				238.745,20
27	Peningkatan Jalan H. Abdul Salam RT 01 RW 01 Dusun Berlagi Desa selubaru, Jalan Tanah 1600 M x	CV. Putra Bantaa Perkasa	585.503,54				585.503,54
28	Peningkatan Jalan Poreh Kampung Jawa RW 06 Kal Sungai Pakaling	PT. Bumi Melayu Indah Sejahtera	159.599.000,00				159.599.000,00
29	Peningkatan Jalan H. Nurdin Desa Tenggara	CV. Zybrindo	17.606.066,00				17.606.066,00
30	Peningkatan Jalan Perkebunan II Desa Teluk Lantar	PT. Qinta Qurana	62.849.350,00				62.849.350,00
31	Peningkatan jalan selke RT 02 RW 01 Desa Semumi	CV. Surya Adi Nirma	30.030.000,00				30.030.000,00
32	Peningkatan Jalan kasturi Gang Anggar RT 05 Dusun Sukolodi Desa Balai Makam	CV. Juanda Indo Teknik	4.095.265,00				4.095.265,00
33	Pembangunan Pintu Klep Sungai Desa Bantan Tengah 2 unit Kec. Bantan	CV. Atanda Pertama Jr	8.584.953,00				8.584.953,00

No	Tugas	Nama Perusahaan/Kelembagaan	Rakor 1 Januari 2021	Rakor 2 Januari 2021	Penyusunan TA 2021	Penyusunan TA 2022	Saldo
34	Peningkatan Jalan Penghubung Dusun Petaling Jaya Dukuh Sei Galonggong Desa Tarik Seri Timur	CV. Cahaya Abadi	348.591.950,00				348.591.950,00
35	Pembangunan Jembatan Kuning Desa Tanjung Medang Kec Rapat Utara	PT. RANAH KITALO	1.500.000.000,00				1.500.000.000,00
36	Pengawasan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat	CV. KOKOH INDAH CONSULTAN	28.750.000,00				28.750.000,00
37	Peningkatan Pembangunan Masjid Al-Munawwarah RT.02 RW.01 Kec. Pinggir	CV. WAKANA MITRA INTERMEDIA	19.178.500,00				19.178.500,00
38	Pembangunan Masjid Al-Maghfiroh RT.03 RW.01 Jalan Budi Luhur Desa Teluk Pambang Kec. Bantan	CV. WULAN REKI KONTRAKTOR	26.169.450,00				26.169.450,00
39	Pengawasan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Kec. Siak lokal Wilayah I	CV. MEGA OKWALINDO	38.900.000,00				38.900.000,00
40	Pengawasan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat	CV. CITRA ESTETIKA SELAMU	26.500.000,00				26.500.000,00
41	Pembangunan Lapangan Volley Pantai Di Kec. Bengkalis	PT. SRI SIAG GEMILANG	64.854.400,00				64.854.400,00
42	Jalan Malmuduro Desa Taik Tebing Seri	CV. KUALA AYUNG INDAH	198.935.000,00				198.935.000,00
43	Pembangunan Turap Beton Anak sungai di RT.04/05 Desa Air Kulam	CV. ARIO PRATAMA	26.285.350,00				26.285.350,00
44	Pembangunan Turap Beton Jl. Sungai Kayu Api Kliri Kanan Jalan Koto Paki Boningih	CV. CAHAYA SHAYIRA ABADI	89.645.000,00				89.645.000,00
45	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Matah RW.09 Kelurahan Pematang Pudu	CV. MITRA MANDIRI	79.556.200,00				79.556.200,00
46	Pembangunan Renovasi Jembatan RW.04 RT.01 Kel. Duri Barat	CV. CITRA MAKMUR JAYA	12.707.800,00				12.707.800,00
47	Peningkatan Jalan Family Manugu SMA 3 (Capokan) RT.05 RW.04 Dusun III Suka Mulia Desa Bukit Kerikil	CV. PIJKA PRATAMA JAYA	198.370.000,00				198.370.000,00
48	Pengawasan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (M)	PT. YODYA KARYA	50.000.000,00		50.000.000,00		-
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam untuk Pembayaran Invoice 01 dan Invoice 02 (Terakhir), atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bathin Solapan (1 Paket)	CV. IWIN CONSULTANT				29.892.500,00	29.892.500,00
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya untuk Pembayaran Anggaran 1 (Terakhir), atas Pekerjaan Perencanaan Optimalisasi Drainase Kec. Mandau (1 Paket)	CV. IWIN CONSULTANT				99.759.000,00	99.759.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya untuk Pembayaran Invoice 01 dan Invoice 02 (Terakhir), atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan Bathin Solapan (1 Paket)	CV. IWIN CONSULTANT				79.739.000,00	79.739.000,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam untuk Pembayaran Invoice 01, Invoice 02, Invoice 03 dan Invoice 04 (Terakhir), atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Mandau (1 Paket)	CV. IWIN ENGINEERING				49.852.000,00	49.852.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya untuk Pembayaran Monthly Certificate 01 dan Monthly Certificate 02 (Terakhir), atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase RT. 02 RW. 06 (1 Unit)	CV. PERMAKA FOUNDATION				199.544.444,73	199.544.444,73
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam untuk Pembayaran Monthly Certificate 01, Monthly Certificate 02, Monthly Certificate 03 dan Monthly Certificate 04 (Terakhir), atas Pekerjaan Pembangunan Turap Beton Dengan Muntala Aturul Huda Pt 01 Rr 01 Desa Pergam Kec. Rapat (1 Unit)	CV. SELEMBANG KARANG				456.287.269,99	456.287.269,99
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam untuk Pembayaran Invoice 01, Invoice 02, Invoice 03 dan Invoice 04 (Terakhir), atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Pinggir (1 Paket)	CV. IWIN ENGINEERING				49.852.000,00	49.852.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur lainnya , Untuk Pembayaran Invoice 1 Periode 18 September 2021 s/d 02 Desember 2021 (Terakhir) Atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Masjid Nur Iman RW. 06 Kelurahan Balai Raja Kec. Pinggir (1 Paket).	CV. IWIN ENGINEERING				29.865.000,00	29.865.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur, Untuk Pembayaran Invoice 1 (Terakhir) Atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau A (1 Paket).	CV. IWIN ENGINEERING				29.906.000,00	29.906.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur, Untuk Pembayaran Invoice 01 dan 02 (Terakhir) Atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau (1 Paket).	CV. IWIN ENGINEERING				99.863.500,00	99.863.500,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur, Untuk Pembayaran Invoice 01 dan 02 (Terakhir) Atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bathin Solapan (1 Paket).	CV. IWIN ENGINEERING				99.863.500,00	99.863.500,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur, Untuk Pembayaran Invoice 01 dan 02 (Terakhir) Atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Takeng Mandau (1 Paket)	CV. IWIN CONSULTANT				74.855.000,00	74.855.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur lainnya , Untuk Pembayaran Invoice 1 (Terakhir) Atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan mandau A (1 Paket).	CV. IWIN CONSULTANT				29.865.000,00	29.865.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur, Untuk Pembayaran Invoice 01 dan 02 (Terakhir) Atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Pinggir (1 Paket).	CV. IWIN CONSULTANT				74.855.000,00	74.855.000,00

No.	Uraian	Nama Perusahaan/Rekanan	Saldo 1 Januari 2021	Koreksi Budget	Pergerakan TA 2021	Penambahan TA 2021	Saldo
	Belanja Hibah Barang Kopada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukorelu Berafil Sosial Kemasyarakatan, Untuk Pembayaran Anggaran 1 (Pertama) Area Pekerjaan Pembangunan Masjid Baiturrahman Dusun Sukajadi Desa Tanjung Belit Kec. Siak Kecil (1 Paket)	CV. RUPAT JAYA PERKASA				98.601.300,01	98.601.300,01
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian						
1	Pekerjaan Pemasangan Paving Block Pasar Modern Duri Kec.Mandau th 2016	CV. RIAU GLOBAL MANDIRI	49.950.000,00				49.950.000,00
	Badan Pendapatan Daerah						
1	Belanja Jasa konsultasi Pengawasan Pada Kegiatan Pembangunan gedung kantor	Gianto, SE, PT. Rangga Consultant Engineering	10.408.000,00				10.408.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN						
1	belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan penyeberangan	CV. ARE CONSULTANT	12.529.000,00			12.529.000,00	
2	masterplan dan DED pelabuhan penyeberangan Ketam Putih Kecamatan Bengkalis	PT ABATA RENCANA KARYANUSA	432.201.000,00	(30.871.500,00)		401.329.500,00	
3	Lanjutan Pembangunan Dermaga	PT BANGUN MULYA TAN ABADI		2.280.579.093,00			2.280.579.093,00
		PT SYARIP MAJU KARYA		1.999.768.191,00			1.999.768.191,00
	Dinas Kesehatan						
1	Utang jasa perawatan	RSUD ARIFIN AHMAD	318.259.456,00			318.259.456,00	
2	Utang jasa perawatan	RSUD DUMAI	154.093.137,00			154.093.137,00	
3	Utang jasa perawatan	RSUD SIAK	70.584.583,00			70.584.583,00	
	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSUD ARIFIN AHMAD				930.479.226,00	930.479.226,00
	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSUD KOTA DUMAI				35.538.078,00	35.538.078,00
	Pembayaran klaim persalinan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	RSUD SIAK				19.343.000,00	19.343.000,00
	Pembayaran klaim persalinan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	RSUD ARIFIN AHMAD				20.532.858,00	20.532.858,00
	Pembayaran klaim persalinan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	RSUD DUMAI				20.457.576,00	20.457.576,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor. Bahan Cetak Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	CV. GEMMA LESTARI				26.444.000,00	26.444.000,00
	Pengadaan Filing Cabinet kantor 4 Laci Pustu Tanjung Kapal Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	CV. LADINI				61.614.485,00	61.614.485,00
	Pengadaan Kursi Besi Tunggu 4 Kursi Pustu Tanjung Kapal Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	CV. LADINI				43.662.960,00	43.662.960,00
	Pengadaan Kursi Kerja Pustu Tanjung Kapal Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	CV. LADINI				41.724.760,00	41.724.760,00
	Pengadaan Meja Kerja Pustu Tanjung Kapal Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	CV. LADINI				46.500.000,00	46.500.000,00
	RSUD BENGKALIS (BLUD)						
101	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. ANTAR MITRA SEMBADA	Rp 153.115.188	Rp -	Rp	153.115.188,00	
102		PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	Rp 207.362.925	Rp -	Rp	177.183.341,00	30.178.984,00
103		PT. ANUGERAH ARGON MEDICA	Rp 1.173.746.144	Rp (1.000.000,00)	Rp	1.172.746.144,00	
104		PT. BINA SAN PRIMA	Rp 420.546.161	Rp 1.000.000,00	Rp	421.546.161,00	
105		PT. APOTIK MEDIKAL FARMA	Rp 47.809.364	Rp -	Rp	47.809.364,00	
106		PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	Rp 884.517.974	Rp 548.711,00	Rp	786.056.387,00	105.010.348,00
107		PT. INDOFARMA GLOBAL MEDICA	Rp 147.986.161	Rp (235.950,00)	Rp	147.750.211,00	
108		PT. KIMIA FARMA	Rp 297.524.594	Rp (86.454.657,00)	Rp	211.069.937,00	
109		PT. MENSABINA SUKSES	Rp 81.706.178	Rp -	Rp	81.706.178,00	
110		PT. MERAPI UTAMA PHARMA	Rp 791.281.215	Rp 30.000.000,00	Rp	821.281.215,00	
111		PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	Rp 293.634.969	Rp 200.030,00	Rp	293.834.999,00	
112		PT. PARTI PADANG GLOBAL	Rp 427.388.937	Rp 60.981.846,00	Rp	497.370.783,00	
113		PT. PENTAVALENT	Rp 176.782.294	Rp -	Rp	176.782.294,00	
114		PT. RAJAWALI NUSINDO	Rp 96.490.005	Rp (704.999,00)	Rp	95.785.006,00	
115		PT. RIAU ANDALAN FARMA	Rp 34.932.172	Rp -	Rp	34.932.172,00	
116		PT. SAPTA SARI TAMA	Rp 24.837.378	Rp -	Rp	24.837.378,00	
117		PT. TEMPO	Rp 36.298.100	Rp -	Rp	36.298.100,00	
118		PT. TRI SAPTA JAYA	Rp 58.604.818	Rp -	Rp	58.604.818,00	
119		PT. UNITED DICO CITAS	Rp 37.473.000	Rp -	Rp	37.473.000,00	
120		PT. ALEXA MEDIKA	146.242.669,00	(855.003,00)		134.855.486,00	10.532.200,00
121		PT. AFINA SINAR CEMERLANG	15.000.480,00			10.117.800,00	4.882.680,00
122		PT. CITRA VITRA BUANA	17.229.047,00			17.229.047,00	
123		PT. ANUGERAH ARGON MEDICA	305.528.769,00	(132.973.007,00)		159.804.891,00	12.760.871,00
124		PT. BINTANG SURYANI JAYA	254.763.098,00			204.786.035,00	49.977.060,00
125		PT. BINTANG SYAFWAN	15.011.779,00			15.011.779,00	
126	PT. CITRA MEDIKAL INDONESIA	9.592.000,00			9.592.000,00		
127	PT. DANVI MEDILAB PERKASA	151.502.640,00			151.502.640,00		

No	Uraian	Nama Perusahaan/Instansi	Saldo 1 Januari 2020	Revisi/Retras	Perkiraan 31 Desember 2020	Perkiraan 31 Desember 2021	Saldo
124	Biaya Bahan habis Pakai kesehatan	PT.BINTANG SURYANI JAYA	254.763.095,00	-	-	204.786.035,00	49.977.060,00
125		PT.BINTANG SWAPWAN	15.011.779,00	-	-	15.011.779,00	-
126		PT.CITRA MEDICAL INDONESIA	9.592.000,00	-	-	9.592.000,00	-
127		PT.DANVI MEDILAB PERSASA	151.502.640,00	-	-	151.502.640,00	-
128		PT.DIVA ALKESINDO UTAMA	9.075.000,00	-	-	9.075.000,00	-
129		PT.DOOS NI ROHA	265.424.500,00	-	-	265.424.500,00	-
130		PT.ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	226.479.076,00	68.389.415,00	-	179.083.077,00	115.785.414,00
131		PT.ERIS MEDIKA UTAMA	333.847.250,00	-	-	333.847.250,00	-
132		PT.EURIKA SUKSES ABADI	29.117.000,00	-	-	29.117.000,00	-
133		PT.IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA	61.380.000,00	-	-	61.380.000,00	-
134		PT.INTERGASTRA NUSANTARA	134.722.500,00	-	-	134.722.500,00	-
135		PT.INTISUMBER HASIL SEMPURNA	32.287.450,00	(32.287.450,00)	-	-	-
136		PT.KIMIA FARMA	54.016.512,00	-	-	54.016.512,00	-
137		PT.MENSABINA SUKSES	11.283.250,00	-	-	11.283.250,00	-
138		PT.MERAPI UTAMA PHARMA	63.988.275,00	(10,00)	-	63.988.265,00	-
139		PT.MILENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	188.830.713,00	-	-	188.830.713,00	-
140		MITRA UTAMA SEJAHTERA	73.545.000,00	-	-	73.545.000,00	-
141		PT.PARIT PADANG GLOBAL	752.834.733,00	-	-	752.834.733,00	-
142		PT.SUMATERA SIBERIDA KOMPANYA	17.820.000,00	-	-	17.820.000,00	-
143		PT.RAJAWALI NUSINDO	162.982.897,00	(103.511.900,00)	-	59.470.997,00	-
144	PT.SURGICA ALKESINDO	78.210.310,00	-	-	78.210.310,00	-	
145	PT.TIRTA MEDICAL INDONESIA	104.326.900,00	(14.982.970,00)	-	89.343.930,00	-	
146	PT.APOTIK MEDIKAL FARMA	7.161.400,00	-	-	7.161.400,00	-	
147	PT.INDOMEDIKA MULIA JAYA	68.269.225,00	-	-	68.269.225,00	-	
148	Laboratorium Patologi Klinik	PT.ANDESIA AHANDA THARA	165.917.500,00	(1.159.500,00)	-	50.102.900,00	114.654.100,00
149		PT.ANUGRAH RIZKY BERSAMA INDONESIA	178.772.880,00	-	-	178.772.880,00	-
150		PT.ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	133.220.737,00	-	-	122.400.738,00	10.819.999,00
151		PT.HEMATECH NUSANTARA	401.268.450,00	-	-	252.921.350,00	148.347.100,00
152		PT.TIRTA MEDICAL INDONESIA	77.858.256,00	-	-	77.858.256,00	-
153		PT.SABA INDONESIA	35.586.542,00	-	-	35.586.542,00	-
154	Laboratorium Patologi Anatomi	PT. MEDI PATH BIOSAINS INDONESIA	10.258.500,00	-	-	10.258.500,00	-
155	Makan Dan Minum Pasien	CV. ADI SAPUTRA	378.985.917,00	-	-	378.985.917,00	-
156	NUTRISI TAMBAHAN	APOTEK MEDICAL FARMA	38.867.494,00	-	-	38.867.494,00	-
157	Jasa Rujukan Pasien		-	-	-	-	-
158	Jasa supir dan penawat pendamping		3.036.000,00	-	-	3.036.000,00	-
159	Bahan bakar minyak ambulance tahun 2020	SPBU	13.620.000,00	-	-	13.620.000,00	-
160	Service mobil ambulance	GALA AUTO SERVICE	43.085.600,00	-	-	43.085.600,00	-
161	Jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium		-	-	-	-	-
162	Pemeriksaan hasil PK pasien	PT. MITRA PRAMITA MEDIKA	56.620.850,00	-	-	56.620.850,00	-
163	Biaya jasa paket/ Pengiriman	CV. MEGHBYE DAWANIA, PT LANNI ROHA, CV	1.240.000,00	-	-	1.240.000,00	-
164	Pemeriksaan hasil PA pasien	PT. MITRA PRAMITA MEDIKA	10.925.000,00	-	-	10.925.000,00	-
165	ALAT TULUS KAMTOR	Toko Senia	40.802.000,00	-	-	40.802.000,00	-
166		Toko Borobudur	78.338.900,00	-	-	78.338.900,00	-
167		Toko Senia	5.340.800,00	-	-	5.340.800,00	-
168		Toko Borobudur	328.767.800,00	-	-	328.767.800,00	-
169	Pengadaan	Toko Senia	2.065.285,00	-	-	2.065.285,00	-
170		Toko Borobudur	27.185.100,00	-	-	27.185.100,00	-
171	Belanja Makan Minum Non Pasien petugas bahu Radini	CV.ADI SAPUTRA	4.790.000,00	-	-	4.790.000,00	-
172	Belanja peralatan kebersihan		-	-	-	-	-
173	peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Toko Senia	1.035.000,00	-	-	1.035.000,00	-
174	peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Toko Borobudur	141.301.000,00	-	-	141.301.000,00	-
175	Belanja Chemical laundry	PT.NUSANTARA JAYA MEDICAL LINDO	102.697.000,00	-	-	102.697.000,00	-
176	Pengungkuan Limbah B3 tahun 2020		225.896.000,00	-	-	225.896.000,00	-
177	Pemeriksaan Sampel Air	LABKESDA PEKANBARU	9.900.000,00	-	-	9.900.000,00	-
178	Belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Toko Borobudur	595.000,00	-	-	595.000,00	-
179	Belanja tali ulang tabung gas	UD. HARMONI	3.040.000,00	-	-	3.040.000,00	-
180	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		-	-	-	-	-

No	Uraian	Nama Perusahaan/Instansi	Saldo 1 Januari 2021	Keuntungan/Rugi	Perkiraan CA 2021	Perkiraan TA 2021	Saldo
174	Rehab Plafond Lantai II RSUD	CV. DAPA BROTHER	268.491.000,00		268.491.000,00		-
175	Rehab dan Interior Ruang Rawat Inap Kelas I (R. 405)	CV. DEA TARIA KARYA TEKNIK	118.700.000,00		118.700.000,00		-
180	Rehab dan Interior Ruang Rawat Inap Kelas I (R. 410)	CV. EGA MANDIRI	113.750.000,00		113.750.000,00		-
181	Rehab dan Interior Ruang Rawat Inap Kelas I (R. 411)	CV. DUTA MAS	113.750.000,00		113.750.000,00		-
182	Rehab dan Interior Ruang Rawat Inap Kelas I (R. 315)	CV. MELIANA JAYA	127.257.000,00		127.257.000,00		-
183	Rehab dan Interior Ruang Rawat Inap Kelas I (R. 316)	CV. MELIANA JAYA	126.355.000,00		126.355.000,00		-
184	Rehab dan Interior Ruang Rawat Inap Kelas II (R. 314)	CV. MELIANA JAYA	125.303.000,00		125.303.000,00		-
185	Rehab dan Interior Ruang Rawat Inap Kelas II (R. 206)	CV. AYUN BERSAUDARA	125.400.000,00		125.400.000,00		-
186	Rehab dan Interior Ruang Rawat Inap Kelas III (R. 304)	CV. WULAN PERSADA	186.000.000,00		186.000.000,00		-
187	Rehab Ruang Pengawasan Intern LT.4	CV. ARKANA MULTIKARYA	28.317.000,00		28.317.000,00		-
188	Rehab Ruang Sub Bagian Pemrograman	CV. ARKANA MULTIKARYA	50.821.000,00		50.821.000,00		-
189	Rehab Ruang Poliklinik Tumbuh Kembang Anak	CV. DESTINDO ENGINEERING	309.786.000,00		309.786.000,00		-
190	Rehab Ruang Labor RSUD	CV. KARYA SUKSES TANGGUH	229.293.000,00		229.293.000,00		-
191	Pencetakan Labor Mikro	CV. JUANDA INDO TEKNIK	248.070.000,00		248.070.000,00		-
	Belanja Pemeliharaan dan Penggantian Bekas, Sediaan Perawatan dan Mesin						-
192	Pembayaran utang alat kesehatan rumah sakit tahun 2020	PT.TAWADA HEALTHCARE, PT	248.000.000,00		248.000.000,00		-
193	Pembayaran utang pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pada Toko Senia tahun 2020	Toko Senia	1.380.000,00		1.380.000,00		-
	Belanja Pegawai						-
194	Honorarium Dokter spesialis dan dokter sub spesialis dg kerja sama dengan RSUD Bengkulu tahun 2020	RS Duri, RS. ANFIN AHMAD, RS. JIWA, RS	44.000.000,00		44.000.000,00		-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan						-
195	Pembuatan fasilitas kamar mandi labor micro	CV. JUANDA INDO TEKNIK	92.908.000,00		92.908.000,00		-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						-
196	Televisi led PANASONIC 32 Inc	TOKO SENIA	13.156.000,00		13.156.000,00		-
197	Dispenser Mayak pada toko Senia tahun 2020		287.500,00		287.500,00		-
198	AC 2 PK DAIKIN		10.166.000,00		10.166.000,00		-
199	AC 1 PK DAIKIN		6.989.700,00		6.989.700,00		-
200	AC 2 PK DAIKIN		10.783.550,00		10.783.550,00		-
201	AC 2 PK DAIKIN	Toko Barabuder	22.139.800,00		22.139.800,00		-
202	Mosi	TOKO SENIA	345.000,00		345.000,00		-
203	Laptop LENOVO E3		10.177.500,00		10.177.500,00		-
204	printer EPSON 3110		7.820.000,00		7.820.000,00		-
	Obat	PT.ANTAR MITRA SEMBADA			93.745.528,00		93.745.528,00
		PT.ANUGERAH PHARMINDO LESTARI			79.048.371,00		79.048.371,00
		PT.ANUGRAH ARGON MEDICA			662.520.176,00		662.520.176,00
		PT.BINA SAN PRIMA			57.675.857,00		57.675.857,00
		PT.APOTEK MEDICAL FARMA	Rp	115.991.800,00	206.945.115,00		412.996.915,00
		PT.ENSEVAL PUTRA MEGATRADING			1.874.480.049,50		1.874.480.049,50
		PT.GLOBAL MITRA PEKANBARU			104.613.832,00		104.613.832,00
		PT.INDOFARMA GLOBAL MEDICA			310.166.056,00		310.166.056,00
		PT.KIMIA FARMA	Rp	37.499.437,00	204.439.168,00		341.929.545,00
		PT.MENSABINA SUKSES			45.504.470,00		45.504.470,00
		PT.MERAPI UTAMA PHARMA			1.170.053.054,84		1.170.053.054,84
		PT.PARIT PADANG GLOBAL			1.222.524.440,00		1.222.524.440,00
		PT.RAJAWALI NUSINDO			451.766.797,00		451.766.797,00
		PT.SAA SARI TAMA			31.208.403,00		31.208.403,00
		PT.TEMPO			12.044.000,00		12.044.000,00
		PT.TRI SAA JAYA			87.245.730,00		87.245.730,00
		PT.UNITED DRCD OTAS			70.312.550,00		70.312.550,00
		PT.DOSHI ROHA	Rp	1.472.948,00	73.929.195,00		75.402.143,00
					802.377.402,00		802.377.402,00
	BMHP	PT.ALEXA MEDIKA			1.900.000,00		1.900.000,00
		PT.ANDINI SARANA			6.115.000,00		6.115.000,00
		PT.CITRA VITRA BUANA			207.933.369,00		207.933.369,00
		PT.ANUGRAH ARGON MEDICA			23.999.974,00		23.999.974,00
		PT.ANUGERAH PHARMINDO LESTARI			163.250.928,00		163.250.928,00
		PT.BINTANG SURYANI JAYA			167.190.527,00		167.190.527,00

No	Uraian	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	Saldo 1 Januari 2021	Debet	Kredit	Saldo 31 Desember 2021	Saldo
		PT.CITRA MEDICAL INDONESIA				8.910.000,00	8.910.000,00
		PT.DANVI MEDILAB PERKASA		Rp	107.550.940,00	293.120.975,00	340.680.925,00
		PT.DIVA ALKESINDO UTAMA		Rp	[76.232.750,00]	76.232.750,00	-
		PT.DOS NI ROHA				1.243.826.205,00	1.243.826.205,00
		PT.ENSEVAL PUTRA MEGATRAIDING				839.903.553,08	839.903.553,08
		PT.ERIS MEDKA UTAMA		Rp	76.232.750,00	166.782.750,00	243.215.500,00
		PT.EURKA SUKSES ABADI				68.132.000,00	68.132.000,00
		PT.INTERGASTRA NUSANTARA				156.124.600,00	156.124.600,00
		PT.INTISUMBER NASIL SEMPURNA				309.672.387,00	309.672.387,00
		PT.KIMIA FARMA				47.603.820,00	47.603.820,00
		PT.MERAPI UTAMA PHARMA				297.913.834,00	297.913.834,00
		PT.MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL				40.237.893,00	40.237.893,00
		PT.MITRA UTAMA SEJAHTERA				222.065.000,00	222.065.000,00
		PT.PARIT PADANG GLOBAL				991.028.827,00	991.028.827,00
		PT.SUMATERA SIBERIDA KOMPANIYA				7.920.000,00	7.920.000,00
		PT.RAJAWALI NUSINDO				499.824.874,00	499.824.874,00
		PT.SURGIKA ALKESINDO				102.867.152,00	102.867.152,00
		PT.TIRTA MEDICAL INDONESIA				83.102.163,00	83.102.163,00
		PT.APOTIK MEDICAL FARMA				32.936.575,00	32.936.575,00
		PT.INDOMEDIKA MULIA JAYA				128.271.050,00	128.271.050,00
		PT.DJAMA MULYA BERSAUDARA				58.016.000,00	58.016.000,00
		PT.PANCA MITRA AMANAH				149.498.000,00	149.498.000,00
		PT.MEDTEK				5.000.000,00	5.000.000,00
		PT.COBRA DENTAL INDONESIA				6.548.900,00	6.548.900,00
		PT.GALDEH HUSADA FARMA				179.560.000,00	179.560.000,00
		PT.TAWADA HEALTHCARE				37.510.000,00	37.510.000,00
	Sanitasi	PT.MERAPI UTAMA PHARMA				86.209.200,00	86.209.200,00
	Belanja PK	PT.ANDESIA ANANDA THARA		Rp	246.594.050,00	561.415.590,00	808.008.630,00
		PT.ANUGRAH RIZKY BERSAMA INDONESIA				473.419.090,00	473.419.090,00
		PT.ENSEVAL PUTRA MEGATRAIDING				200.608.925,00	200.608.925,00
		PT.HEMATECH NUSANTARA				752.582.600,00	752.582.600,00
		PT.TIRTA MEDICAL INDONESIA		Rp	56.028.335,00	213.463.518,50	269.491.853,50
	Belanja Pengisian Tabung Gas						
	Pengisian Tabung Gas Oxygen	PT. AYEKA GAS INDUSTRI TBK				1.044.767.900,00	1.044.767.900,00
	Gas Elpiji Bulan Oktober-Desember	UD. HARMONY				7.360.000,00	7.360.000,00
	Makan Dan Minum Pasien						
	Makan dan Minum Pasien Bulan Desember	CV. ADI SAPUTRA				212.395.000,00	212.395.000,00
	Makan dan Minum Pasien Bulan November					185.236.630,00	185.236.630,00
	Nutris Tambahan						
	Susu Pasien Bulan Oktober-Desember	APOTIK MEDICAL FARMA				39.401.156,00	39.401.156,00
	Jasa Rujukan Pasien						
	Jasa Supir Ambulance pendamping pasien Bulan Desember					3.590.000,00	3.590.000,00
	Jasa perawat Pendamping pasien Bulan Desember					1.000.000,00	1.000.000,00
	Jasa Supir Ambulance pendamping pasien Bulan Desember					2.652.000,00	2.652.000,00
	Minyak Bakar Ambulance			Rp	1.250.000,00		1.250.000,00
	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium						
	Pemeriksaan Hasil PA Pasien Bulan Oktober	Laboratorium Amanah				13.925.000,00	13.925.000,00
	Pemeriksaan Hasil PA Pasien Bulan November	Laboratorium Amanah				17.875.000,00	17.875.000,00
	Pemeriksaan Hasil PA Pasien Bulan Desember	Laboratorium Amanah		Rp	18.400.000,00		18.400.000,00
	Pemeriksaan Hasil PK Pasien Bulan Oktober	Laboratorium Pramita				22.335.300,00	22.335.300,00
	Pemeriksaan Hasil PK Pasien Bulan November	Laboratorium Pramita				20.400.250,00	20.400.250,00

No.	Uraian	Nama Perusahaan/Suplier	Saldo 1 Januari 2021	Saldo Pulang	Pembayaran PA 2021	Pembayaran PA 2021	Saldo
	Pemeriksaan Hasil PK Pasien Bulan Desember	Laboratorium Pramita				21.037.350,00	21.037.350,00
	Jasa Paket Pengiriman Bulan Desember	CV ARUNG SUMATERA				1.040.000,00	1.040.000,00
	Belanja Cetak	Borobudur				456.380.000,00	456.380.000,00
		Apple Print				22.400.000,00	22.400.000,00
	Pengandaan	CV. HOKKAIDO				15.158.750,00	15.158.750,00
	Alat Tulis Kantor	CV. HOKKAIDO				371.505.250,00	371.505.250,00
		Borobudur				124.053.500,00	124.053.500,00
	Belanja Makan Minum Non Pasien petugas bahaya Radasi	Harmoni				10.270.000,00	10.270.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan	CV. HOKKAIDO				287.381.200,00	287.381.200,00
		Borobudur				96.078.000,00	96.078.000,00
	Chemical Laundry	PT.NUSANTARA JAYA MEDIKALINDO				135.712.500,00	135.712.500,00
	Belanja Pembuangan Limbah B3	PT.BERKAH CENDHIA LESTARI				456.280.000,00	456.280.000,00
	Belanja Bahan Persediaan Alat Listrik/Elektronik	CV. HOKKAIDO				29.238.000,00	29.238.000,00
		Borobudur				2.863.000,00	2.863.000,00
	Biaya Administrasi Bank					390.000,00	390.000,00
	Pulsa Handphone Now-Des	StarCell		Rp 308.000,00			308.000,00
	Belanja Bahan Habis pakai Rumah Tangga	CV. HOKKAIDO				63.819.000,00	63.819.000,00
	Belanja Pegawai						
	Honorarium Dokter spesialis dan dokter sub spesialis yg kerja sama dengan RSUD Bengkulu tahun 2021					77.000.000,00	77.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						
	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor (Rehab Ruang Gizi)	CV. KARYA SUKSES TANGGUH				499.459.000,00	499.459.000,00
	Pemeliharaan Ruang PCR	RAJKA TIRTA UTAMA				120.999.000,00	120.999.000,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	CV. SHERINDO				19.565.000,00	19.565.000,00
		CV. HOKKAIDO				10.637.505,00	10.637.505,00
	Belanja Pemeliharaan dan Penggantian suku cadang Peralatan dan Mesin						
	Belanja Pemeliharaan Service AC	SEJAHTERA ABADI				26.875.000,00	26.875.000,00
	Service AC	CV. SHERINDO				18.360.000,00	18.360.000,00
	Belanja Spropt AC	CV. SHERINDO				30.700.000,00	30.700.000,00
	Pengantian suku cadang Peralatan dan Mesin	CV. Vecto Kreasi Mandiri				69.750.000,00	69.750.000,00
	BELANJA Freezer AC	CV. HOKKAIDO				9.481.000,00	9.481.000,00
	Pemeliharaan Peralatan Komputer	CV. HOKKAIDO				16.174.750,00	16.174.750,00
	Pemeliharaan Alkes	Andasib Ananda Tara				34.005.400,00	34.005.400,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	Diagnostik Ultra Sound Equipment Myble XG-Echocardiografi (ESADTE)	PT. ESA HANNA UTAMA				1.350.034.000,00	1.350.034.000,00
	ULTRA SOUND MEDICAL DIAGNOSTIC MYLAB NINEEXP PROBES FOR ESADTE USG (ESADTE)						
	FOCUS+SCAN EXAM ONE DIGITAL IMAGING PLATE SCANNER	PT. MENSA BINA SUKSES				230.533.233,00	230.533.233,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	PT. VICTORY GLOBAL SINERGI				329.493.780,00	329.493.780,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Replindo				152.053.000,00	152.053.000,00
		Hokkaido				317.398.700,00	317.398.700,00
		RAJKA TIRTA UTAMA		Rp (140.000,00)		160.639.000,00	160.639.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
	Pembuatan Fasilitas Toilet Umum Poliklinik RSUD	CV. PAKU BANGSIK JAYA				274.639.000,00	274.639.000,00
	RSUD MANDAU						

No	Tugas	Revisi	Saldo 1 Januari 2021	Moeda Rincian	Pembayaran 2021	Pembayaran 2022	Saldo
APBD							
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (BAHAN PAKAI HABIS RUMAH SAKIT)	PT. MERAPI UTAMA PHARMA				28.528.750,00	28.528.750,00
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (BAHAN PAKAI HABIS RUMAH SAKIT)	PT. ALEXA MEDIKA				15.023.809,00	15.023.809,00
	Belanja Bahan-Bahan Kimia (Belanja Laboratorium Microbiologi Covid-19)	PT. MAHAKARYA PERKASA				186.104.850,00	186.104.850,00
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (BAHAN PAKAI HABIS RUMAH SAKIT)	PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL				96.975.480,00	96.975.480,00
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (BAHAN PAKAI HABIS RUMAH SAKIT)	PT. ANUGERAH ARGON MEDICA				72.750.000,00	72.750.000,00
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (BAHAN PAKAI HABIS RUMAH SAKIT)	PT. INTISUMBER HASIL SEMPIRNA				78.982.000,00	78.982.000,00
	Belanja Bahan - Isi Tabung Gas (Isi Ulang Oksigen Cair) RSUD Mandau	PT. ANEKA GAS				109.307.583,00	109.307.583,00
DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN							
1	Pengadaan Pembangunan/peningkatan PSU Perumahan Kec. Rupal A	CV Megat 19 Connaltant	64.900.000,00				64.900.000,00
2	Peningkatan jalan Bario desa, pungkalan Nyirih Kec. Rupal	CV Zhaaf Putra Rupal	195.744.000,00				195.744.000,00
	Peningkatan Partit Jl. Nibantara I Gg. Rambutan Kel. Air Jamban RT 6 RW 3 Kel. Mandau	CV. CITRA MARMUR JAYA			199.800.000,00		199.800.000,00
	Peningkatan Partit Gg. Minthala Kel. Air Jamban (D) RT 2 RW 18 Kel. Mandau	CV. NORDIA JAYA			149.850.000,00		149.850.000,00
	Peningkatan Jl. Sepakat Menjaja JIHOH	CV. MELARA JAYA			199.830.600,00		199.830.600,00
	Partit Desa Janda Sejahtera Gg. Arjuna RT.04 RW.006 Kel. Air Jamban	CV. KARYA NISANTARA MERSAMA			149.662.000,00		149.662.000,00
	Peningkatan Partit Jalon Jl. Impus RT. 04 RW. 11 Talang Manda Kecamatan Mandau	CV. RINDY RIATAMA			199.781.000,00		199.781.000,00
	Dusunase Jl. Pindawa RT. 010 / RW. 005 Desa Bahin Betuah	CV. BENCALIS PUTRA MANDAU			199.750.000,00		199.750.000,00
	Partit Jalon Jalan Juhulawa RT.03 RW.07 Dusun Air Putih Desa Huluh Aca	CV. JIMMY PERRASA			199.379.000,00		199.379.000,00
	PEMBANGUNAN PARTIT HETON JL. DAMAI GG. SAMAYU RT 03 RW. 02 GAJAH SAKIT KECAMATAN MANDAU	CV. KARYA JAYA CONSTRUCTION			199.780.000,00		199.780.000,00
	Strukturasi Gg. Sengau J. RT 04/RW. 13 Kel. Rambutan Publi, Kel. Mandau	CV. PAKU BANGUN JAYA			199.805.000,00		199.805.000,00
	Peningkatan Jl. K.H. ARIFIN RT. 003 RW. 002 Dusun 1 Simpang Kec. Pinggir	CV. SAMGRILA UTAMA			149.330.000,00		149.330.000,00
	Peningkatan Jalan Persegi SMP 7 RW. 06 Kel. Talang Manda Kec. Mandau	CV. PAKU BANGUN JAYA			99.900.000,00		99.900.000,00
	Pengadaan Pembangunan Sumbu dan Persegi Panjang RT 04 Kel. Pinggir	PT. WASTU ASRIHATI RIAU			29.902.000,00		29.902.000,00
	Peningkatan Jl. Sepakat Desa Buhai Mase Kec. Bathin Solapan	CV. SANTIKA JAYA			199.683.000,00		199.683.000,00
	Peningkatan/ Sejahtera Gg. Cempaka Dusun Sejarjo Desa Hutan Baru	CV. BANGUN LEMBING			199.883.000,00		199.883.000,00
	Peningkatan Jl. Delima RT. 05 RW. 10 Kel. Rambutan Publi	CV. MARMUR KAYA UTAMA			199.861.000,00		199.861.000,00
	Pengawasan Perencanaan Sumbu Samudra Dusun De Eca. Mandau	CV. IRWIN CONSULTANT			24.850.980,00		24.850.980,00
	Huluas Gg. Damau PS. 15 Kel. Rambutan Publi	CV. TERNIK GUNTER ABADI			199.780.000,00		199.780.000,00
	Sejahtera Gg. Cahaya . RT.04/RW.03 Kel. Air Jamban . Kel. Mandau	CV. TERNIK GUNTER ABADI			96.882.000,00		96.882.000,00
	Peningkatan Gg. Minthala At. Tiabun RT 2 RW 6 Kel. Gajah Saka Kel. Mandau	CV. TERNIK GUNTER ABADI			169.765.000,00		169.765.000,00
	Pengawasan Pembangunan / Peningkatan PSU Perumahan Kel. Bathin Subasa	CV. ETIPI PADULA CONSULTANT			99.825.000,00		99.825.000,00
	Pengawasan Pembangunan Sumbu 4km Persegi Panjang Kel. Rupal Utara	CV. REALISE CONSULTANT			24.860.000,00		24.860.000,00
	Peningkatan Jl. Sejahtera Desa Tamak Soral Kec. Talang Mandau	CV. ZHAFFI ARIFGIAN			149.095.000,00		149.095.000,00
	Partit Jalon jalan batu aspal	CV. RINDY PUTRA			199.763.000,00		199.763.000,00
	Peningkatan Jalan Damau Dusun Pengulu Desa Perunggu	CV. KARYA PUTRA MANDAU			199.214.000,00		199.214.000,00
PPKD							
1	Utang Hibah Kepada Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		70.091.969,00	(70.091.969,00)			-
Belanj Kesatuan Bangsa dan Politik							
	Utang Hibah Kepada Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)			70.091.969,00	70.091.969,00		-
Dinas Pendidikan							
BIDANG SD							
1	Pembangunan Ruang Majelis Guru SDN 20 Rupal	CV. NURFAR JAYA				199.681.815,19	199.681.815,19
2	Pembangunan Ruang Majelis Guru/Kepala Sekolah SDN 6 Bantan	CV. KASELA TEKNIK				199.793.767,56	199.793.767,56
3	Pembangunan Kantor Majelis Guru SDN 2 Rupal desa Batu Panjang Kec. Rupal	CV. MAUSA ENGINEERING				199.709.023,02	199.709.023,02
4	Pembangunan Ruang Majelis Guru SDN 20 Rupal	CV. CAHAYA PELITAS				199.507.637,65	199.507.637,65
5	Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU Kecamatan Mandau	CV. IRWIN ENGINEERING				24.937.000,00	24.937.000,00
6	Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU Kecamatan Rupal	CV. BUHARA PERSADA				29.900.750,00	29.900.750,00
7	Pembangunan Ruang Perputakaan SDK 25 Bangkalis	CV. RIAU MAMMUR JAYA				199.958.041,59	199.958.041,59
8	Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan Perputakaan Sekolah Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan	CV. ABADI CONSULTANT				29.925.500,00	29.925.500,00
9	Pembangunan Pagar SDN 50 Mandau	CV. RIAU MANDALA PUTRA				199.000.356,72	199.000.356,72
10	Pembangunan Pagar SDN 6 Pinggir	CV. PERMATA FOUNDATION				199.369.732,32	199.369.732,32
11	Pembangunan pagar SDN 1 Bathin Solapan	CV. APIKA MAULANA				199.400.779,60	199.400.779,60
12	Pembangunan Pagar SDN 30 Bathin Solapan	CV. JIMMY PERRASA				199.029.019,47	199.029.019,47
13	Pembangunan Pagar SDN 24 MANDAU	CV. SANTIKA JAYA				162.238.630,12	162.238.630,12
14	Pembangunan Pagar SDN 46 MANDAU	CV. JIMMY PERRASA				199.085.861,24	199.085.861,24
15	Pembangunan Pagar SDN 1 Talang Muandau	CV. APIKA MAULANA				199.793.883,30	199.793.883,30
16	Pembangunan Pagar SDN 3 Kec. Rupal Utara	CV. ASP SUWIS GROUP				199.487.850,38	199.487.850,38
17	Pembangunan Pagar SDN 20 Bathin Solapan	CV. MITRA BEJAHTERA UTAMA				198.763.552,78	198.763.552,78
18	Pembangunan Pagar SDN 6 Talang Muandau	CV. RIAU GLOBAL MANDIRI				197.817.392,68	197.817.392,68
19	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 34 Bathin Solapan	CV. SANTIKA JAYA				114.407.414,18	114.407.414,18
20	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 16 Talang Muandau	CV. RIAU GLOBAL MANDIRI				196.665.035,47	196.665.035,47
21	Pembangunan Pagar SDN 40 Mandau Jl. Pindawa RT. 015/RW. 007 Dusun Pindawa Desa Bathin Betuah	CV. AGUNG SAPTI KONSTRUKSI				199.437.884,48	199.437.884,48
22	Peningkatan Fasilitas Prasarana SD Negeri 7 Mandau	CV. CHOROMOSOM				199.668.576,49	199.668.576,49
23	Pembangunan MCK SDN 9 Mandau	CV. JAYA MELINDO				122.832.938,14	122.832.938,14

No	Uraian	Instansi/Perusahaan	Nilai / Jumlah	Korupsi	Penyimpangan TA 2021	Penyimpangan TA 2021	Saldo
24	Pembangunan MCK SDN 24 Pinggir	CV. PULAU KANDU	-	-	-	-	-
25	Pembangunan MCK SDN 36 J.L. Dimai 2 ke Cahaj Bukit Kec. Muandau	CV. RIAU GLOBAL MANDIRI	-	-	-	199.682.175,84	199.682.175,84
26	Pembangunan MCK SDN 11 Rupert Utara	CV. GEMILANG WIRAKARSA	-	-	-	198.913.346,92	198.913.346,92
27	Pembangunan Lapangan Upacara SDN 24 Bathin Solapan	CV. GRZA	-	-	-	124.622.854,76	124.622.854,76
28	Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah Kecamatan Talang Muandau	CV. IWIN ENGINEERING	-	-	-	139.703.348,07	139.703.348,07
29	Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rupert dan Rupert Utara	CV. BUHARA PERSADA	-	-	-	29.881.500,00	29.881.500,00
30	Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Bukit Batu dan Bandar Lutumano	CV. BOEDAK BETUAH	-	-	-	29.876.000,00	29.876.000,00
31	Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kec. Sink Kecil	CV. BOEDAK BETUAH	-	-	-	34.870.000,00	34.870.000,00
32	Biaya Konsultan Pengawasan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kec. Bathin Solapan	CV. IWIN CONSULTANT	-	-	-	44.896.500,00	44.896.500,00
33	Biaya Konsultan Pengawasan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kec. Muandau	CV. IWIN CONSULTANT	-	-	-	44.896.500,00	44.896.500,00
34	Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kec. Pinggir	CV. IWIN ENGINEERING	-	-	-	44.896.500,00	44.896.500,00
35	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 22 Pinggir	CV. PERMAWA FOUNDATION	-	-	-	198.000.675,95	198.000.675,95
36	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 19 Rupert	CV. PRIMATAMA	-	-	-	199.270.946,89	199.270.946,89
37	Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengajar Sekolah Kec. Bukit Baru, Sink Kecil dan Bandar Laksamana	CV. REALISE CONSULTANT	-	-	-	44.814.000,00	44.814.000,00
38	Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengajar Sekolah Kec. Pinggir	CV. ABADI CONSULTANT	-	-	-	19.943.000,00	19.943.000,00
39	Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Pengajar Sekolah Kec. Rupert dan Rupert Utara	PT. SANDI ARIFA CONSULTANT	-	-	-	19.899.000,00	19.899.000,00
40	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 16 Rupert	CV. NURIZAH JAYA	-	-	-	197.079.692,43	197.079.692,43
41	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 14 Rupert Lokal Jauh	CV. RUPAT JAYA PERKASA	-	-	-	199.641.987,61	199.641.987,61
42	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 36 Kec. Muandau	CV. KASELA TEKNIK	-	-	-	199.790.510,81	199.790.510,81
43	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 5 Muandau	CV. CHROMSOM	-	-	-	199.671.074,35	199.671.074,35
44	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 9 Bathin Solapan	CV. BANGUN LINE INDO	-	-	-	199.759.660,50	199.759.660,50
45	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 18 Rupert	CV. ATTALYYA GEMILANG	-	-	-	181.151.937,49	181.151.937,49
46	Rehab Ruang Kelas Sekolah SD Negeri 2 Bengkulu	CV. RIAU FOUNDATION	-	-	-	199.601.046,15	199.601.046,15
47	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 7 Rupert	CV. TEGUH MANDIRI PERKASA	-	-	-	199.587.800,66	199.587.800,66
48	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 6 Bathin Solapan	CV. MITRA SEJANTEPA UTAMA	-	-	-	199.829.207,48	199.829.207,48
49	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 23 Bengkulu	CV. BINTANG MUDA	-	-	-	199.752.993,51	199.752.993,51
50	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 31 Bantan	CV. WULAN PERSADA	-	-	-	199.712.427,53	199.712.427,53
51	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 30 Muandau	CV. RAFA MANDIRI	-	-	-	199.698.355,16	199.698.355,16
52	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 6 Pinggir	CV. TUAN MUDE	-	-	-	199.546.928,79	199.546.928,79
53	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 19 Pinggir	CV. PULAU KANDU	-	-	-	199.256.061,85	199.256.061,85
54	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 45 Kec. Muandau	CV. RIZKIA JAYA	-	-	-	199.852.418,26	199.852.418,26
55	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 31 Rupert	CV. ASP SUWIS GROUP	-	-	-	199.597.387,58	199.597.387,58
56	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 15 Talang Muandau	CV. PUTRI KENBAR	-	-	-	199.717.995,50	199.717.995,50
57	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SDN 5 Talang Muandau	CV. JIMMY PERKASA	-	-	-	198.830.826,09	198.830.826,09
58	Biaya Konsultan Pengawas Rehabilitasi Sedang / Berat / Ruang Kelas Kec. Pinggir dan Talang Muandau	CV. IWIN ENGINEERING	-	-	-	49.890.500,00	49.890.500,00
59	Biaya Konsultan Pengawas Rehabilitasi Sedang / Berat / Ruang Kelas Kec. Bukit Batu dan Sink Kecil	CV. REALISE CONSULTANT	-	-	-	44.814.000,00	44.814.000,00
60	Biaya Konsultan Pengawas Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Kec. Rupert	CV. BUHARA PERSADA	-	-	-	44.880.000,00	44.880.000,00
61	Biaya Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Kec. Muandau dan Bathin Solapan	CV. IWIN CONSULTANT	-	-	-	44.896.500,00	44.896.500,00
62	Biaya Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah Kecamatan Rupert	PT. SANDI ARIFA CONSULTANT	-	-	-	24.915.000,00	24.915.000,00
63	Biaya Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah Kec. Sink Kecil	CV. REALISE CONSULTANT	-	-	-	19.800.000,00	19.800.000,00
64	Rehab Rumah Dinas Guru / Kepala Sekolah SDN 1 Rupert Utara	CV. CAHAYA PELITA	-	-	-	199.623.310,26	199.623.310,26
65	Biaya Konsultan Pengawas Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengajar Sekolah Kec. Rupert Utara	CV. BUHARA PERSADA	-	-	-	29.881.500,00	29.881.500,00
	BIKANG SMP						
66	Biaya Jasa Konsultan Pengawas Kecamatan Muandau dan Pinggir (DID)	CV. MADHIRA UTAMA	-	-	-	29.892.500,00	29.892.500,00
67	Pembangunan Perpustakaan SMPN 11 Muandau (Dana Insentif Daerah)	CV. TUAN MUDE	-	-	-	199.175.521,78	199.175.521,78
68	Pembangunan Aula SMPN 2 Bantan	CV. MELAYU JAYA	-	-	-	500.205.107,35	500.205.107,35
69	Biaya Jasa Konsultan Pengawas Kec. Muandau dan Pinggir	CV. ZAHIRA KONSULTAN	-	-	-	19.895.700,00	19.895.700,00
70	BELANJA JASA KONSULTAN PENGAWAS KEC. PINOGIR (Dana Insentif Daerah-DID)	CV. MADHIRA UTAMA	-	-	-	19.896.800,00	19.896.800,00
71	Biaya Jasa Konsultan Pengawas Kec. Bathin Solapan, Bukit Batu, dan Bantan (Dana Insentif Daerah) DID	CV. SALARI KARYA KONSULTAN	-	-	-	19.896.800,00	19.896.800,00
72	Biaya Jasa Konsultan Pengawas SMP Negeri 2 Bantan (Dana Insentif Daerah) DID	CV. BINA NITA	-	-	-	19.842.625,00	19.842.625,00
73	Biaya Jasa Konsultan Pengawas Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau	CV. SALARI KARYA KONSULTAN	-	-	-	23.897.800,00	23.897.800,00
74	REHAB RUANG KELAS SMPN 5 TALANG MUANDAU Dana Insentif Daerah (DID)	CV. JAYA MELINDO	-	-	-	149.870.532,00	149.870.532,00
75	REHAB BANGUNAN SEKOLAH SMPN 6 TALANG MUANDAU Dana Insentif Daerah (DID)	CV. SAIRI MANDIRI KARYA	-	-	-	199.759.072,00	199.759.072,00

No.	Uraian	Nama Pemilik/Revisi	Batas Januari 2021	Revisi Revisi	Penyempurnaan TA 2021	Penyempurnaan TA 2021	Saldo
26	Biaya Jasa Konsultansi Pengawas Rse Bengkalis, Bantani, Bukit Batu (Dana Insentif Daerah) DID	CV. LABORA KARYA	-	-	-	9.903.300,00	9.903.300,00
27	Rehab Bangunan SMPN 6 Bontan (Dana Insentif Daerah) DID	CV. ZHAFIR ANGGAPAN	-	-	-	199.531.023,00	199.531.023,00
28	Biaya Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sebelah (DID-Dana Insentif Daerah)	CV. NADHIRA UTAMA	-	-	-	87.708.500,00	87.708.500,00
29	Pembangunan Pagar SMPN 2 Ruspit Utara (Dana Insentif Daerah) DID	CV. SEMPERA RIAU	-	-	-	149.700.000,00	149.700.000,00
30	Semenisasi SMP Negeri 7 Mandau (Dana Insentif Daerah)	CV. ALWIN KARYA PRATAMA	-	-	-	199.780.000,00	199.780.000,00
31	Pembangunan MCK SMPN 5 Talang Muandau (Dana Insentif Daerah) DID	CV. CHROMOSOM	-	-	-	79.759.591,00	79.759.591,00
32	Belanja Modal Pembangunan MCK SMPN 6 Talang Muandau Dana Insentif Daerah (DID)	CV. RAFA MANDIRI GROUP	-	-	-	149.759.547,00	149.759.547,00
33	Semenisasi SMPN 1 Bukit Batu (Dana Insentif Daerah)	CV. ESTIMASI GENESIS	-	-	-	199.780.012,60	199.780.012,60
34	Pembangunan pagar Sekolah SMPN 11 Mandau (Dana Insentif Daerah)	CV. AFRIKA MAULANA	-	-	-	199.699.143,48	199.699.143,48
35	Pembangunan Pagar SMPN 11 Mandau (Dana Insentif Daerah)	CV. PULAU KANDO	-	-	-	149.500.507,20	149.500.507,20
36	Pembangunan Taman, Lapangan Ucepan SMPN 4 Bukit Batu (Dana Insentif Daerah)	CV. TIRTA GENESIS RIAU	-	-	-	197.940.804,61	197.940.804,61
37	Belanja Modal Pembangunan Pagar SMPN 3 Talang Muandau Dana Insentif Daerah (DID)	CV. RIAU MANDALA PUTRA	-	-	-	149.663.753,00	149.663.753,00
38	Pembangunan Pagar SMPN 4 Talang Muandau (Dana Insentif Daerah) DID	CV. SAIRI MANDIRI KARYA	-	-	-	149.710.623,00	149.710.623,00
39	Belanja Modal Rehab RDG SMPN 7 Pinggir Dana Insentif Daerah (DID)	CV. RAFA MANDIRI GROUP	-	-	-	74.850.298,00	74.850.298,00
40	Pembangunan Bak Penampung Air Hujan SMPN 6 Mandau (Dana Insentif Daerah)	CV. EKA MANDIRI	-	-	-	44.279.792,26	44.279.792,26
41	Belanja Modal Pembangunan Bak Air Hujan SMPN 4 Pinggir Dana Insentif Daerah (DID)	CV. EKA MANDIRI	-	-	-	44.280.967,00	44.280.967,00
42	Pembangunan Pagar dan Turap SMPN 4 Bathin Selapan (Dana Insentif Daerah)	CV. RAFA MANDIRI GROUP	-	-	-	44.997.704,20	44.997.704,20
	BIDANG PAUD		-	-	-	-	-
43	Belanja Perawatan Kegiatan Belajar Mengajar	CV. HOK KAIIDO	-	-	-	179.080.000,00	179.080.000,00
	Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
	Utang tanah Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah	BRJS		4.265.465.240,00			4.265.465.240,00
	Jumlah		20.303.256.713	8.283.631.099,00	14.413.975.973,00	44.127.228.654,84	60.699.149.905,84